jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Salatiga untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2024;
b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
c. pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : PENDAHULUAN
    b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
    c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
    d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
    f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
    g. BAB VII : PENUTUP
(2) Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
    c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan ketua DPRD.
(3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

jdih.salatiga.go.id

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-4
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 ..... I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-10
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-40
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-87
2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 dan Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022 ..... II-102
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) II-125
2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) II-177
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-289
2.3.1 Isu Strategis II-289
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-290
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah III-6
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga III-7
3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-11
3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-17
3.3.1. Kebijakan Belanja Operasi III-22
3.3.2. Kebijakan Belanja Modal III-23

3.3.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga.....III-25
3.3.4. Kebijakan Belanja Transfer.....III-25
3.4. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-29
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan.....IV-13
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....IV-13
4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....IV-16
4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024.....IV-17
4.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 untuk mendukung Kebijakan Nasional IV-37
4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-43
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....V-1
5.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....V-11
5.3 Urusan Pilihan V-23
5.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....V-27
5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....V-29
5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan V-31
5.7 Unsur Pemerintahan Umum V-32
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH...VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 *Diagram Proses Penyusunan RKPD 2024* I-4
Gambar 1. 2 *Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga* I-7

Gambar 2. 1. *Peta Kota Salatiga* II-2
Gambar 2. 2. *Bagian Wilayah Perencanan Kota Salatiga* II-4
Gambar 2. 3. *Peta Rawan Bencana Kota Salatiga* II-6

Gambar 3. 1. *Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) persen* III-7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. *Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-7
Grafik 2. 2. *Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional*..... II-11
Grafik 2. 3. *Inflasi Kota Salatiga tahun 2016-2019* II-17
Grafik 2. 4. *Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022*.. II-18
Grafik 2. 5. *Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022* II-19
Grafik 2. 6. *Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah*..... II-20
Grafik 2. 7. *Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022*..... II-20
Grafik 2. 8. *Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga*..... II-21
Grafik 2. 9. *Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022*..... II-22
Grafik 2. 10. *Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional* II-22
Grafik 2. 11. *Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah*..... II-23
Grafik 2. 12. *Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2022* II-24
Grafik 2. 13. *Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2017- 2022* II-24
Grafik 2. 14. *Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022*..... II-25
Grafik 2. 15. *Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022* II-27
Grafik 2. 16. *Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022*..... 28
Grafik 2. 17. *Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022*. II-29
Grafik 2. 18. *Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2022*.... II-29
Grafik 2. 19. *Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022*..... II-30
Grafik 2. 20. *Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022*..... II-31
Grafik 2. 21. *Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022*..... II-32
Grafik 2. 22. *Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*..... II-32

Grafik 2. 23. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah) II-33
Grafik 2. 24. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah) II-34
Grafik 2. 25. Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 ..... II-34
Grafik 2. 26. Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-35
Grafik 2. 27. Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2021 ..... II-36
Grafik 2. 28. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-36
Grafik 2. 29. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (%) II-37
Grafik 2. 30. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (%) II-38
Grafik 2. 31. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) KotaSalatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (%) II-38
Grafik 2. 32. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-39
Grafik 2. 33. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-42
Grafik 2. 34. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-44
Grafik 2. 35. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-46
Grafik 2. 36. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-47
Grafik 2. 37. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-48
Grafik 2. 38. Succes Rate Tuberkolusis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-49
Grafik 2. 39. Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia di atas 18 Tahun di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-50
Grafik 2. 40. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-53
Grafik 2. 41. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-53
Grafik 2. 42. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-54
Grafik 2. 43. Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-56
Grafik 2. 44. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-57
Grafik 2. 45. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-58

Grafik 2. 46. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-60
Grafik 2. 47. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-62
Grafik 2. 48. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-64
Grafik 2. 49. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-65
Grafik 2. 50. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 .... II-65
Grafik 2. 51. Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-66
Grafik 2. 52. Tren Emisi GRK Sektor Limbah II-68
Grafik 2. 53. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU II-68
Grafik 2. 54. Tren Emisi GRK Sektor IPPU II-68
Grafik 2. 55. Tren Emisi GRK Sektor Limbah II-69
Grafik 2. 56. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-70
Grafik 2. 57. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-72
Grafik 2. 58. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-77
Grafik 2. 59. Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-82
Grafik 2. 60. Persentase Perangkat Daerah yang menerapakan e-arsip di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 ..... II-82
Grafik 2. 61. Perbandingan Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 ..... II-90
Grafik 2. 62. Perbandingan Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Salatiga Dengan Wilayah Kedungsepur Tahun 2022 ..... II-91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. *Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-7
Tabel 2. 2. *Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-8
Tabel 2. 3. *Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022* II-8
Tabel 2. 4. *Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022* II-9
Tabel 2. 5. *Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)* II-12
Tabel 2. 6. *Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)* II-13
Tabel 2. 7. *Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)* II-14
Tabel 2. 8. *Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)* II-15
Tabel 2. 9. *Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (persen)* II-15
Tabel 2. 10. *Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-16
Tabel 2. 11. *Jumlah Penduduk Kemiskinan Ekstrim Desil 1* II-26
Tabel 2. 12. *Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-27
Tabel 2. 13. *Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2017-2022* II-40
Tabel 2. 14. *Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-41
Tabel 2. 15. *Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-41
Tabel 2. 16. *Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-42
Tabel 2. 17. *Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-43
Tabel 2. 18. *Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-43
Tabel 2. 19. *SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan* II-44
Tabel 2. 20. *Data Stunting Kota Salatiga 2018-2022* II-49
Tabel 2. 21. *SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan* II-50
Tabel 2. 22. *SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum* II-54
Tabel 2. 23. *SPM Pelayanan Dasar Air Minum* II-55
Tabel 2. 24. *SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik* II-55
Tabel 2. 25. *SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat* II-59

Tabel 2. 26. *Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-60
Tabel 2. 27. *SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* II-61
Tabel 2. 28. *SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial* II-63
Tabel 2. 29. *Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup* II-67
Tabel 2. 30. *Persentase Sampah yang Terangkut* II-69
Tabel 2. 31. *Data Pengelolaan Sampah Kota Salatiga* II-70
Tabel 2. 32. *Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil* II-71
Tabel 2. 33. *Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-71
Tabel 2. 34. *Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2017-2022.* II-74
Tabel 2. 35. *Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-75
Tabel 2. 36. *Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-76
Tabel 2. 37. *Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-78
Tabel 2. 38. *Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-79
Tabel 2. 39. *Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-79
Tabel 2. 40. *Indikator Kinerja Daerah Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-80
Tabel 2. 41. *Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-80
Tabel 2. 42. *Indikator Kinerja Utama Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-81
Tabel 2. 43. *Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-81
Tabel 2. 44. *Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2017-2022* II-82
Tabel 2. 45. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2017- 2022* II-83
Tabel 2. 46. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2017-2022* II-84
Tabel 2. 47. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2017-2022* II-85
Tabel 2. 48. *Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga* II-88
Tabel 2. 49. *Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Salatiga* II-88
Tabel 2. 50. *Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017 s.d. 2022* II-92
Tabel 2. 51. *Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga* II-92
Tabel 2. 52. *Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga* II-92

Tabel 2. 53. Jumlah Orang/ Barang melalui Terminal Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-93
Tabel 2. 54. Rasio Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-94
Tabel 2. 55. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-94
Tabel 2. 56. Persentase Luas Wilayah Industri Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha).....II-94
Tabel 2. 57. Persentase Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha).....II-94
Tabel 2. 58. Persentase Luas Wilayah Kekeringan Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha).....II-95
Tabel 2. 59. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha).....II-95
Tabel 2. 60. Jumlah dan Jenis Bank menurut Kepemilikannya Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-95
Tabel 2. 61. Jumlah dan Jenis Asuransi menurut Kepemilikannya Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-95
Tabel 2. 62. Jumlah, Jenis, Kelas Restoran Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-96
Tabel 2. 63. Jumlah dan Jenis Restoran Tahun 2022 Kota Salatiga...II-96
Tabel 2. 64. Jumlah Penginapan/ Hotel Tahun 2017 s.d. 2022 .....II-97
Tabel 2. 65. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-97
Tabel 2. 66. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga.....II-97
Tabel 2. 67. Persentase Penggunaan Tenaga Listrik Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga II-97
Tabel 2. 68. Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga II-98
Tabel 2. 69. Angka Kriminalitas Tahun 2017 s.d. 2022.....II-98
Tabel 2. 70. Jumlah Demonstrasi Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022 .....II-99
Tabel 2. 71. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022.....II-100
Tabel 2. 72. Rasio Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022 .....II-101
Tabel 2. 73. Rasio Kualitas Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022.....II-102
Tabel 2. 74. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2022.....II-104
Tabel 2. 75. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan II-123
Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan .II-177
Tabel 2. 77. Capaian Program Daerah Urusan Pendidikan II-179
Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan ..II-181
Tabel 2. 79. Capaian Program Daerah Urusan Kesehatan.....II-183
Tabel 2. 80. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....II-189

Tabel 2. 81. *Capaian Akses Layanan Air Minum* II-190
Tabel 2. 82. *Capaian Sanitasi* II-190
Tabel 2. 83. *Capaian Program Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* II-191
Tabel 2. 84. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman* II-195
Tabel 2. 85. *Capaian Program Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman* II-196
Tabel 2. 86. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* .. II-197
Tabel 2. 87. *Capaian Program Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat* II-199
Tabel 2. 88. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial* II-201
Tabel 2. 89. *Capaian Program Daerah Urusan Sosial* II-201
Tabel 2. 90. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketenaga Kerjaan* II-204
Tabel 2. 91. *Capaian Program Daerah Urusan Tenaga Kerja* II-205
Tabel 2. 92. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* II-206
Tabel 2. 93. *Capaian Program Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* II-208
Tabel 2. 94. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan* II-210
Tabel 2. 95. *Capaian Program Daerah Urusan Pangan* II-210
Tabel 2. 96. *Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Pertanahan* II-215
Tabel 2. 97. *Capaian Program Daerah Urusan Pertanahan* II-215
Tabel 2. 98. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup* II-216
Tabel 2. 99. *Capaian Program Daerah Urusan Lingkungan Hidup* ... II-217
Tabel 2. 100. *Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan* II-221
Tabel 2. 101. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* II-221
Tabel 2. 102. *Capaian Program Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* II-223
Tabel 2. 103. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* II-224
Tabel 2. 104. *Capaian Program Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* II-224
Tabel 2. 105. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* II-225
Tabel 2. 106. *Capaian Program Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* II-226
Tabel 2. 107. *Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Urusan Perhubungan* II-228
Tabel 2. 108. *Capaian Program Daerah Urusan Perhubungan* II-229
Tabel 2. 109. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika* II-230

Tabel 2. 110. Capaian Program Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika II-231
Tabel 2. 111. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-233
Tabel 2. 112. Capaian Program Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-236
Tabel 2. 113. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal II-237
Tabel 2. 114. Capaian Program Daerah Urusan Penanaman Modal ... II-238
Tabel 2. 115. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..... II-240
Tabel 2. 116. Capaian Program Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga II-241
Tabel 2. 117. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik..... II-243
Tabel 2. 118. Capaian Program Daerah Urusan Statistik..... II-243
Tabel 2. 119. Capaian Indikator Kinerja Daerah untuk Urusan Persandian II-244
Tabel 2. 120. Capaian Program Daerah Urusan Persandian II-244
Tabel 2. 121. Capaian Indikator Kinerja Daerah untuk Urusan Kebudayaan..... II-245
Tabel 2. 122. Capaian Program Daerah Urusan Kebudayaan..... II-245
Tabel 2. 123. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan II-246
Tabel 2. 124. Capaian Program Daerah Urusan Perpustakaan II-247
Tabel 2. 125. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kearsipan... II-247
Tabel 2. 126. Capaian Program Daerah Urusan Kearsipan..... II-248
Tabel 2. 127. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan..... II-249
Tabel 2. 128. Capaian Program Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan..... II-250
Tabel 2. 129. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata .. II-251
Tabel 2. 130. Capaian Program Daerah Urusan Pariwisata II-251
Tabel 2. 131. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian.... II-252
Tabel 2. 132. Capaian Program Daerah Urusan Pertanian..... II-253
Tabel 2. 133. Capaian Indikator Kinerja Daerah untuk Urusan Perdagangan II-255
Tabel 2. 134. Capaian Program Daerah Urusan Perdagangan II-255
Tabel 2. 135. Capaian Indikator Kinerja Daerah untuk Urusan Perindustrian..... II-257
Tabel 2. 136. Capaian Program Daerah Urusan Perindustrian..... II-258
Tabel 2. 137. Capaian Indikator Kinerja Daerah untuk Urusan Transmigrasi II-259
Tabel 2. 138. Capaian Program Daerah Urusan Transmigrasi II-259
Tabel 2. 139. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan..... II-260
Tabel 2. 140. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan II-261
Tabel 2. 141. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keuangan..... II-264

Tabel 2. 142. Capaian Program Daerah untuk Fungsi Penunjang Keuangan II-265
Tabel 2. 143. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kepegawaian II-265
Tabel 2. 144. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kepegawaian II-267
Tabel 2. 145. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan II-267
Tabel 2. 146. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan II-269
Tabel 2. 147. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD II-269
Tabel 2. 148. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD II-270
Tabel 2. 149. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah II-270
Tabel 2. 150. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah II-271
Tabel 2. 151. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti II-277
Tabel 2. 152. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti II-278
Tabel 2. 153. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo II-279
Tabel 2. 154. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo II-281
Tabel 2. 155. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang ... II-282
Tabel 2. 156. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Tingkir II-285
Tabel 2. 157. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo II-286
Tabel 2. 158. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo II-288

Tabel 3. 1. Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2024 ..... III-5
Tabel 3. 2. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022 ..... III-10
Tabel 3. 3. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2021 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2022 ..... III-15
Tabel 3. 4. Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2023, 2024 dan Perkiraan Maju 2025 ..... III-16
Tabel 3. 5. Realisasi Belanja Anggaran Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022 ..... III-19
Tabel 3. 6 Alokasi Dana Kelurahan Kota Salatiga Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Dana Kelurahan Tahun 2024 ..... III-27
Tabel 3. 7. Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2024 ..... III-29
Tabel 3. 8. Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 ..... III-31

Tabel 3. 9. *Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025* III-33

Tabel 4. 1. *Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025 dengan Tujuan RPD 2023 – 2026* IV-2
Tabel 4. 2. *Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024*.....IV-4
Tabel 4. 3. *Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2024*...IV-20
Tabel 4. 4. *Sinkronisasi Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024* IV-28

Tabel 5. 1. *Prioritas, Kerangka Pendanaan dan Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun 2024*.....V-34
Tabel 5. 2. *Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024*.....V-42
Tabel 5. 3. *Pagu Indikatif Dana Kelurahan Tahun 2024* V-44

Tabel 6. 1. *Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2024* VI-1
Tabel 6. 2. *Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024*.....VI-3
Tabel 6. 3. *Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024*.....VI-20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding dengan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholders pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat disini mengandung makna semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan yang dapat berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan melalui perencanaan responsif gender. Mengingat sumber daya yang terbatas, upaya-upaya inovasi daerah dalam pembangunan diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up

dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD.
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
   a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
   c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
   d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
   f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
   h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
   i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
   j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
   k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

   Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam sebagai pedoman untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2024.
3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024

   Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Salatiga Tahun 2024

   Musrenbang RKP sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota

Salatiga merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Salatiga Tahun 2024.
   Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 ini sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Salatiga. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.
6. Penetapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024.
   Penetapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 dengan Peraturan Wali Kota.

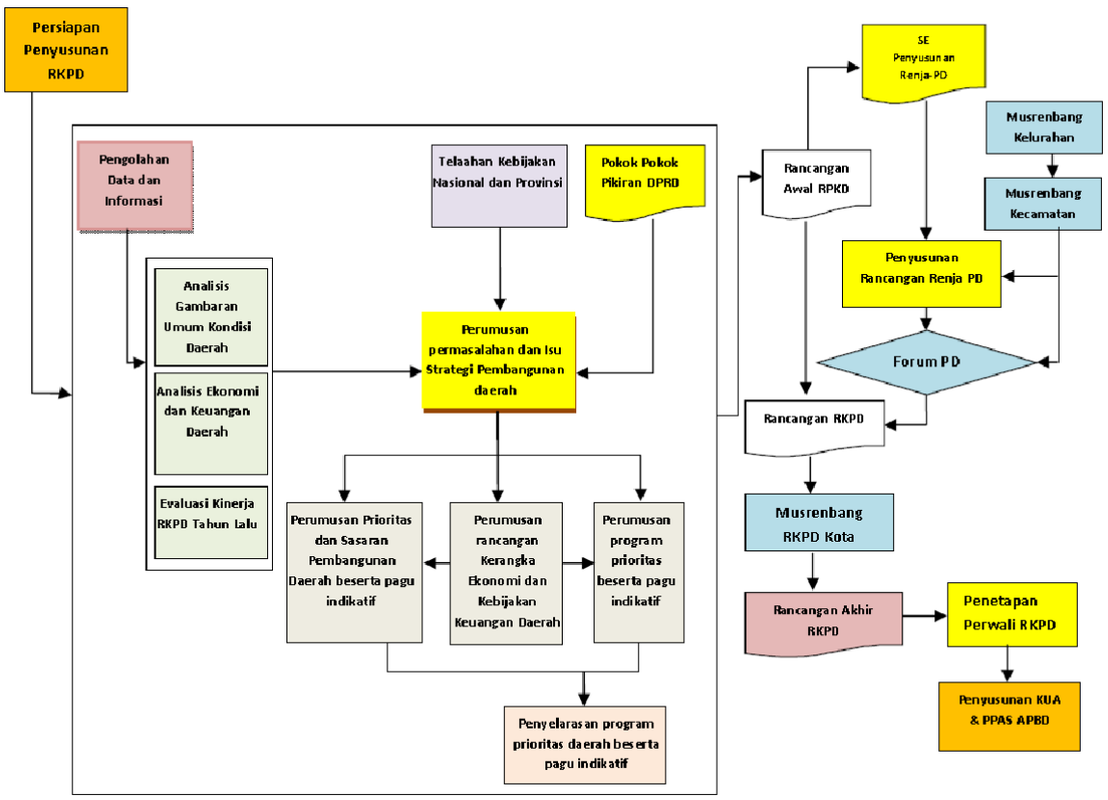
RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 ini disusun dengan asumsi respon dan pemulihan pandemi Covid-19 telah membaik, selain itu RKPD Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi pasca Coronavirus Disease 2019 (Covid 2019). Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2024. RKPD Tahun 2024 juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2024, RPJMN 2020-2024, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD

menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2024.

Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut



Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2024

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

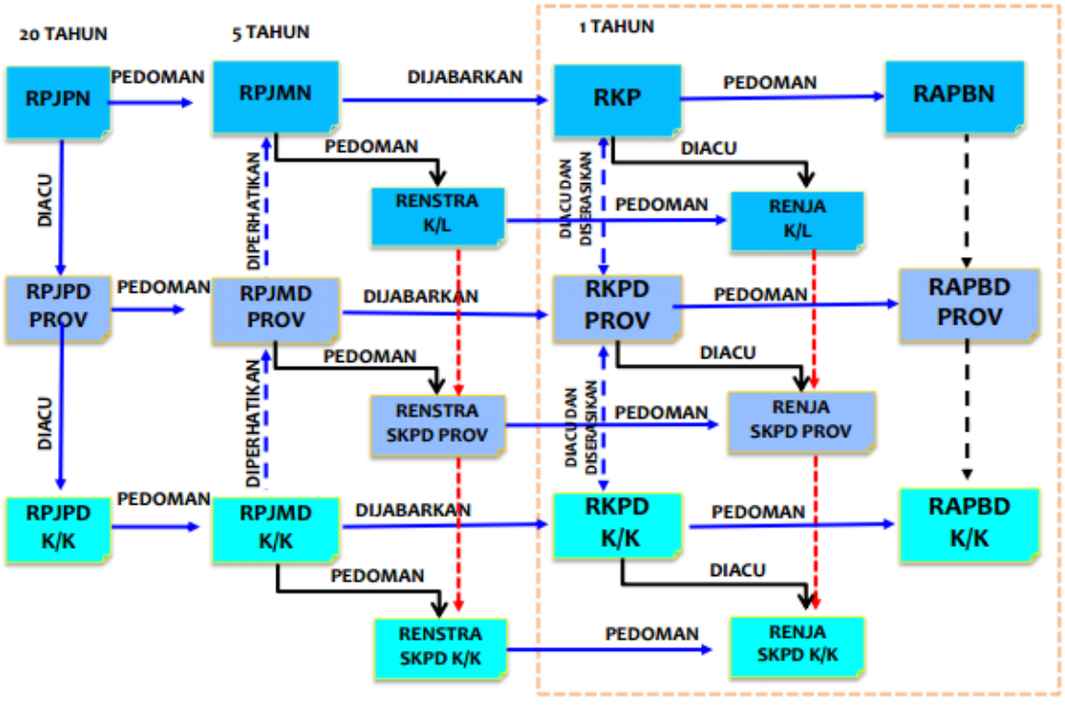
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
29. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam proses perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan maka salah satu yang memiliki fungsi dan peran cukup krusial adalah dokumen RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.



Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

2) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024 bertujuan untuk :

1) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2) Mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024

RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2022; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2024.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Daerah Bergelombang ± 65%, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
b. Daerah Miring ± 25%, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
c. Daerah Datar ± 10%, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Latosol Coklat

   Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

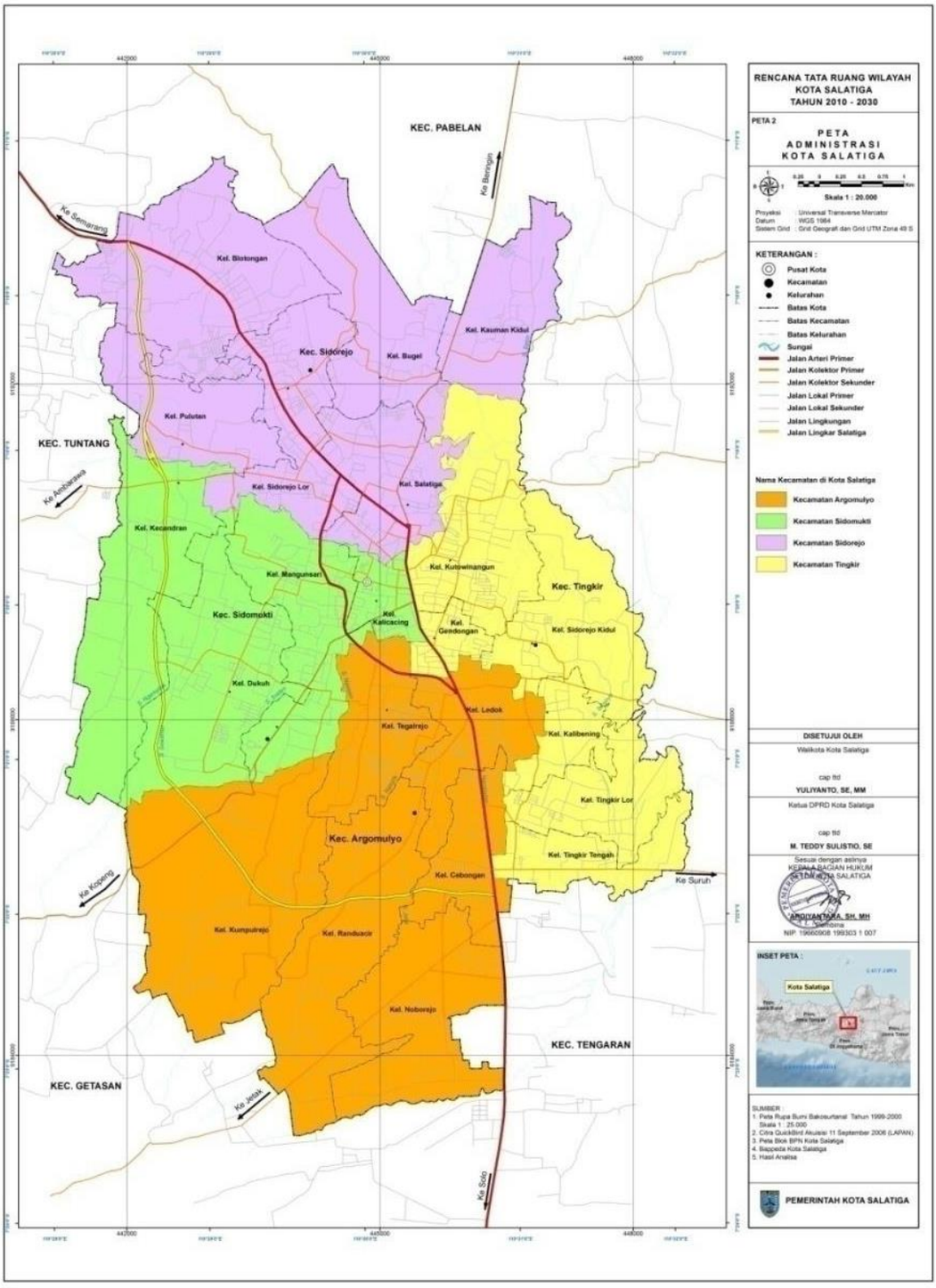
b. Tanah Latosol Coklat Tua

   Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini terdapat di bagian ujung kota, sekitar Gunung Rong. Tanah ini cocok

ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Peta wilayah Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1. Peta Kota Salatiga



Sumber : Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011-2030

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
   - Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
   - Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
   - Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
   - Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton,Desa Nyamat

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
   - Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
   - Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
   - Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
   - Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

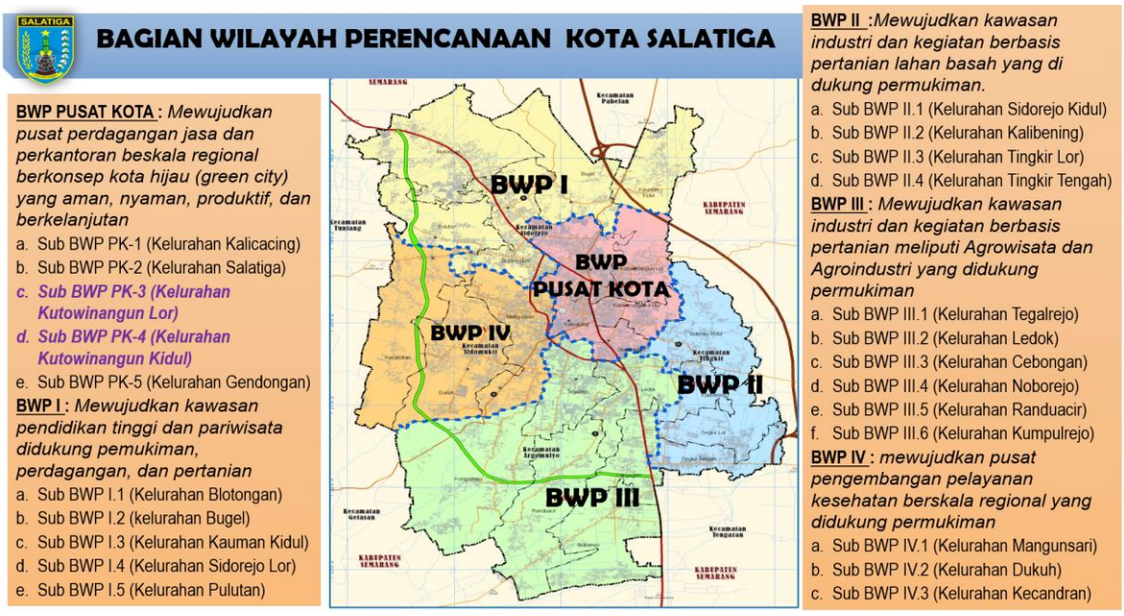
Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit.

Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain di dukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki

letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interegional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Penetapan alokasi pembangunan di Kota Salatiga yang termasuk dalam pengembangan kawasan strategis Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 yaitu Penataan Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Peningkatan Terminal Tipe A Tingkir dan Pembangunan Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Noborejo.

Gambar 2. 2. Bagian Wilayah Perencanan Kota Salatiga



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2010

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian struktur ruang wilayah di Kota Salatiga, masing – masing memiliki fungsi sebagai berikut.

a. **Pusat Pelayanan Kota** adalah sebagai pusat perdagangan jasa dan perkantoran, meliputi :

1) Kelurahan Salatiga;
2) Kelurahan Kalicacing;
3) Kelurahan Gendongan;
4) Kelurahan Kutowinangun Lor;
5) Kelurahan Kutowinangun Kidul;

b. Subpusat Pelayanan Kota Sidorejo adalah sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata. Terletak di Kelurahan Sidorejo Lor.

c. Subpusat Pelayanan Kota Sidomukti adalah sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan dan pemukiman. Terletak di Kelurahan Mangunsari.

d. Subpusat Pelayanan Kota Argomulyo adalah sebagai pengembangan kegiatan yang berbasis pertanian (Agrowisata dan Agroindustri) dan industri. Terletak di Kelurahan Randuacir.

e. Subpusat Pelayanan Kota Tingkir adalah sebagai pengembangan kegiatan yang berbasis industri dan pertanian lahan basah. Terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul.

f. Pusat Lingkungan, sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi, meliputi:

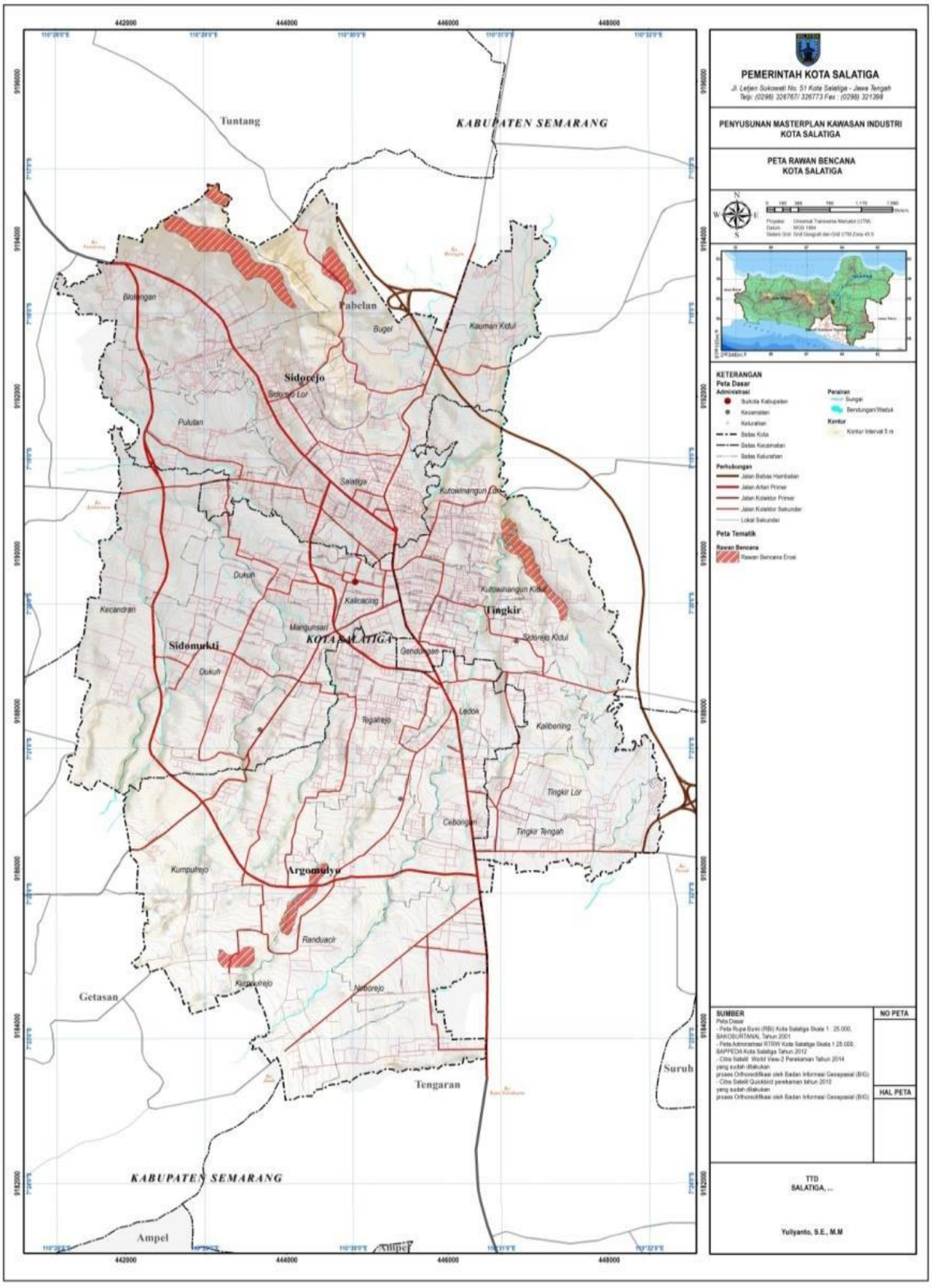
1. Kelurahan Blotongan;
2. Kelurahan Bugel;
3. Kelurahan Kauman Kidul;
4. Kelurahan Pulutan;
5. Kelurahan Kalibening;
6. Kelurahan Tingkir Lor;
7. Kelurahan Tingkir Tengah;
8. Kelurahan Noborejo;
9. Kelurahan Ledok;
10. Kelurahan Tegalrejo;
11. Kelurahan Kumpulrejo;
12. Kelurahan Cebongan;
13. Kelurahan Kecandran;
14. Kelurahan Dukuh.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Rawan bencana yang terjadi diantaranya angin puting beliung di Kelurahan Blotongan pada tahun 2016. Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Dukuh rawan bencana longsor karena tipologi tanah tebing. Kelurahan Randuacir dan Tegalrejo rawan bencana longsor karena lokasi yang berada di sepadan sungai yang diatasnya berdiri rumah/perumahan. Rawan

bencana lainnya yaitu pohon tumbang yang sering terjadi di beberapa wilayah disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi pepohonan yang sudah tua. Peta rawan bencana Kota Salatiga sebagai berikut:

Gambar 2. 3. Peta Rawan Bencana Kota Salatiga



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2010

2.1.1.4 Aspek Demografi

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 200.220 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 196.440 jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 3.780 jiwa atau 1,92%.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 99.403 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.817 jiwa artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 98,59%, meningkat sebesar 0,29% dibandingkan tahun 2021 sebesar 98,30%.

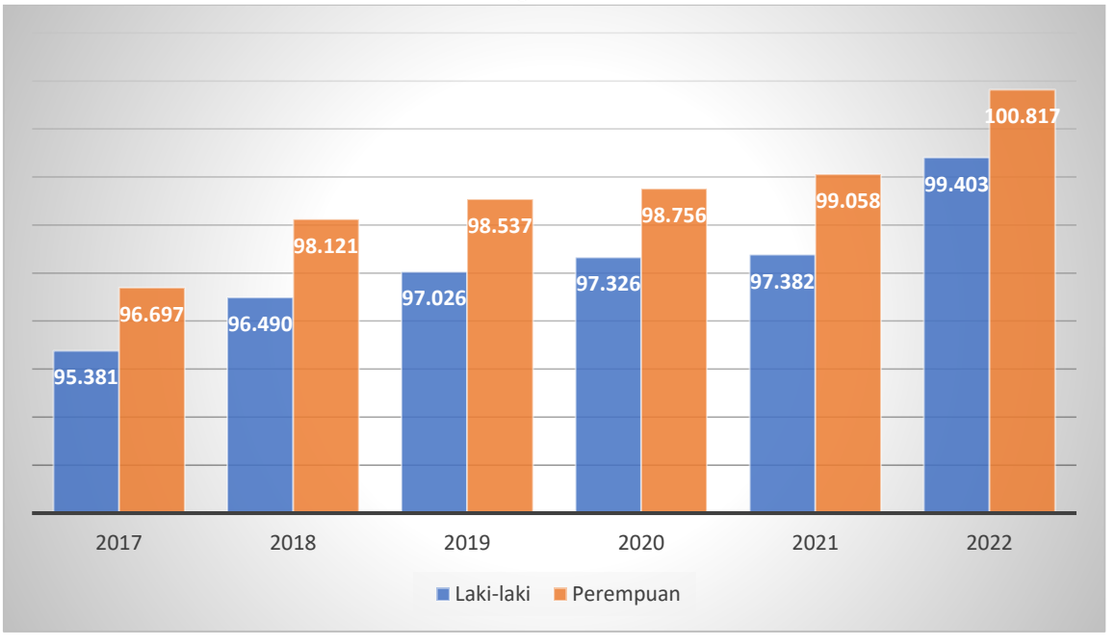
Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2017	95.381	96.697	192.078	98,64
2	2018	96.490	98.121	194.611	98,34
3	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
4	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
5	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
6	2022	99.403	100.817	200.220	98,59

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2023

Grafik 2. 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2023

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 55.215 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 45.764 jiwa.

Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

	Argomulyo	**Tingkir**	**Sidomukti**	**Sidorejo**	**Kota Salatiga**
2017	48.794	46.117	43.617	53.550	192.078
2018	49.772	46.605	44.023	54.211	194.611
2019	49.679	46.562	44.710	54.612	195.563
2020	50.261	46.937	44.162	54.722	196.082
2021	50.264	46.838	45.054	54.284	196.440
2022	51.542	47.699	45.764	55.215	200.220

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2023

Pada tahun 2022, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia 40-44 tahun sebanyak 16.995 jiwa atau sebesar 8,49% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 4.414 jiwa atau sebesar 2,20% dari jumlah penduduk.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022

No	**Usia (tahun)**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah (jiwa)**	**%**
		Laki-laki (jiwa)	**Perempuan (jiwa)**		
1.	0-4	6.636	6.134	12.770	6,38
2.	5 – 9	7.400	6.824	14.224	7,10
3.	10 – 14	8.159	7.813	15.972	7,98
4.	15 – 19	7.904	7.435	15.339	7,66
5.	20 – 24	7.527	7.186	14.713	7,35

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
6.	25 – 29	7.543	7.402	14.945	7,46
7.	30 – 34	7.299	7.405	14.704	7,34
8.	35 – 39	7.639	7.836	15.475	7,73
9.	40 – 44	8.482	8.513	16.995	8,49
10.	45 – 49	7.024	7.069	14.093	7,04
11.	50 – 54	6.403	6.996	13.399	6,69
12.	55 – 59	5.329	5.975	11.304	5,65
13.	60 – 64	4.484	5.104	9.588	4,79
14.	65 – 69	3.452	3.649	7.101	3,55
15.	70 – 74	2.065	2.349	4.414	2,20
16.	>75	2.057	3.127	5.184	2,59
Jumlah 2022		**99.403**	**100.817**	**200.220**	**100**
2021		**97.382**	**99.058**	**196.440**	
2020		**96.989**	**98.629**	**196.082**	
2019		**97.026**	**98.537**	**195.563**	
2018		**96.490**	**98.121**	**194.611**	
2017		**95.381**	**96.697**	**192.078**	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2022 tertinggi adalah penduduk berpendidikan SLTA sebanyak 52.864 jiwa dan terendah adalah penduduk berpendidikan Sarjana Strata III sebanyak 174 jiwa.

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	43.196 Jiwa
2.	Tidak/belum tamat SD/sederajat	19.892 Jiwa
3.	Tamat SD/sederajat	28.255 Jiwa
4.	SLTP	28.270 Jiwa
5.	SLTA	52.864 Jiwa
6.	Diploma I/II	1.853 Jiwa

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
7.	Diploma III	6.060 Jiwa
8.	Strata I	17.945 Jiwa
9.	Strata II	1.711 Jiwa
10.	Strata III	174 Jiwa
Jumlah		**200.220 Jiwa**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan rasio penduduk miskin.

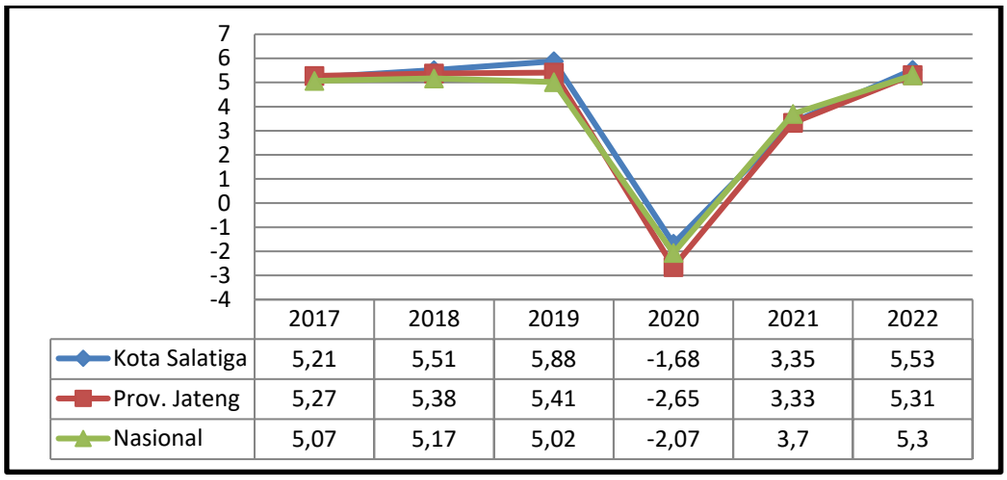
a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama enam tahun (2017-2022) menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Sejak akhir tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2022 mengalami pertumbuhan dengan nilai 5,53% berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 5,31% dengan selisih 0.22% dan di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional 5,3%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

Pertumbuhan ekonomi Salatiga tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 5,53 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 51,00 persen sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor

Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 9,97 persen. Sektor Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Salatiga yaitu sebesar 32,73 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,59 persen. Sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,54 persen dan 12,81 dengan pertumbuhan sebesar 1,04 dan 4,05 persen

Grafik 2. 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	5,21	5,51	5,88	-1,68	3,35	5,53
Prov. Jateng	5,27	5,38	5,41	-2,65	3,33	5,31
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,3

Sumber : website BPS, 2023

b. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2022, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.10.365,31 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.543,31 (dalam miliar) atau 5,53% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.9.822,00 (dalam

miliar) akibat pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19.

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.092,87 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2,94 (dalam miliar).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 5. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02	445,45
B	**Pertambangan dan Penggalian**	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27	2,94
C	**Industri Pengolahan**	2.530,04	2.649,47	2.824,52	2.831,44	2.955,35	3.092,87
D	**Pengadaan Listrik dan Gas**	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08	24,56
E	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87	8,15
F	**Konstruksi**	1.214,06	1.288,65	1.340,84	1.288,95	1.299,23	1.312,76
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	1.224,67	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39	1.436,36
H	**Transportasi dan Pergudangan**	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35	391,62
I	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77	872,57
J	**Informasi dan Komunikasi**	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88	558,13
K	**Jasa Keuangan dan Asuransi**	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29	339,17
L	**Real Estate**	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27	544,72
M, N	**Jasa Perusahaan**	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39	126,15
O	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44	487,32
P	**Jasa Pendidikan**	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81	443,50
Q	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41	167,56
R, S, T, U	**Jasa lainnya**	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49	111,47
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**8.624,24**	**9.127,86**	**9.666,45**	**9.503,71**	**9.822,00**	**10.365,31**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun,

sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2022, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 15.407,64 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp1.398,73 (dalam miliar) atau 9,98% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp14.008.91 (dalam miliar). Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5.042,82 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 4,95 (dalam miliar).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	525,55	567,53	599,35	602,19	631,75	683,29
B	**Pertambangan dan Penggalian**	5,18	5,22	5,36	5,44	5,34	4,95
C	**Industri Pengolahan**	3.569,64	3.835,46	4.162,39	4.272,67	4.586,93	5.042,85
D	**Pengadaan Listrik dan Gas**	21,81	23,31	24,23	24,71	25,76	27,66
E	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**	7,75	8,20	8,67	90,60	9,31	9,85
F	**Konstruksi**	1.615,22	1.790,90	1.918,19	1.850,35	1.929,82	2.086,17
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	1.507,69	1.629,05	1.756,07	1.704,86	1.823,95	1.973,25
H	**Transportasi dan Pergudangan**	336,84	363,07	400,61	304,90	324,56	517,84
I	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	850,60	920,16	1.001,71	944,91	1.002,97	1.196,13
J	**Informasi dan Komunikasi**	344,81	385,31	428,89	510,45	542,72	555,04
K	**Jasa Keuangan dan Asuransi**	412,15	440,72	462,86	471,77	498,68	543,54
L	**Real Estate**	536,69	579,42	609,36	612,78	631,73	675,21
M,N	**Jasa Perusahaan**	136,24	154,42	175,63	167,00	174,33	192,12
O	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	613,16	652,23	689,70	690,22	705,65	741,13

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	606,29	662,72	718,06	733,79	741,66	757,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,50	197,62	214,67	239,51	242,33	252,67
R	Jasa lainnya	112,22	123,83	135,22	127,24	129,09	148,68
S	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**11.382,35**	**12.339,18**	**13.310,96**	**13.271,84**	**14.008,91**	**15.407,64**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.365,52	7.933,00	8.554,92	8.539,32	8.824,97	9.692,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	109,91	121,17	137,40	136,71	143,12	161,69
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.113,30	1.179,63	1.258,40	1.251,53	1.307,85	1.321,27
Pembentukan Modal tetap Bruto	5.469,65	6.194,59	6.770,53	6.284,91	6.384,00	6.761,85
Perubahan Inventori	86,91	121,34	104,19	126,24	111,89	146,33
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(2.762,94)	(3.210,56)	(3.514,48)	(3.066,87)	(2.762,91)	(2.676,44)
Produk Domestik Regional Bruto	**11.382,35**	**12.339,18**	**13.310,96**	**13.271,84**	**14.008,91**	**15.407,64**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

Selain dinilai dengan Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan

dari tahun 2017-2019, dan terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan di beberapa komponen. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi kenaikan di beberapa komponen dengan nilai akhir PDRB 15.407,64 milyar rupiah.

Tabel 2. 8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.536,01	5.817,58	6.109,79	6.040,15	6.152,12	6.493,80
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	73,32	79,03	87,64	85,89	87,15	91,43
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	714,81	744,94	788,79	776,65	795,55	796,20
Pembentukan Modal tetap Bruto	3.927,43	4.241,06	4.458,90	4.150,35	4.182,73	4.263,74
Perubahan Inventori	62,96	64,76	65,32	122,13	90,51	118,27
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(1.690,30)	(1.819,51)	(1.843,46)	(1.671,46)	(1.486,07)	(1.398,12)
Produk Domestik Regional Bruto	**8.624,24**	**9.127,86**	**9.666,45**	**9.503,71**	**9.822,00**	**10.365,31**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2022 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan angka 5,55% yang mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan invidu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Tabel 2. 9. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4,82	5,09	5,02	(1,14)	1,85	5,55

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	7,54	7,79	10,89	(1,99)	1,47	4,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,18	4,21	5,89	(1,54)	2,43	0,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,44	7,99	5,14	(6,92)	0,74	1,94
5. Perubahan Inventori	6,14	2,85	0,87	86,97	(25,89)	
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(5,92)	(7,64)	(1,35)	9,36	11,09	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5,58**	**5,84**	**5,90**	**(1,68)**	**3,33**	**5,53**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dan terjadi pertumbuhan negative dengan nilai -1,03% pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Miliar RP)						
-ADHB	11.382,35	12.339,18	13.310,96	13.271,84	14.008,91	15.407,64
-ADHK 2010	8.624,24	9.127,86	9.666,45	9.503,71	9.822,00	10.365,31
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	5,21	5,84	5,90	-1,68	3,35	5,53
PDRB perkapita (Juta Rp)						
-ADHB	60,24	64,41	68,88	69,14	72,39	78,99
-ADHK 2010	45,64	47,64	50,02	49,51	50,75	53,14
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	3,80	4,38	4,99	(1,03)	2,71	4,70
Jumlah Penduduk (Orang)	188.928	191.571	193.231	191.950	193.525	195.065
Pertumbuhan (%)	1,42	1,40	0,87	(0,66)	0,82	0,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

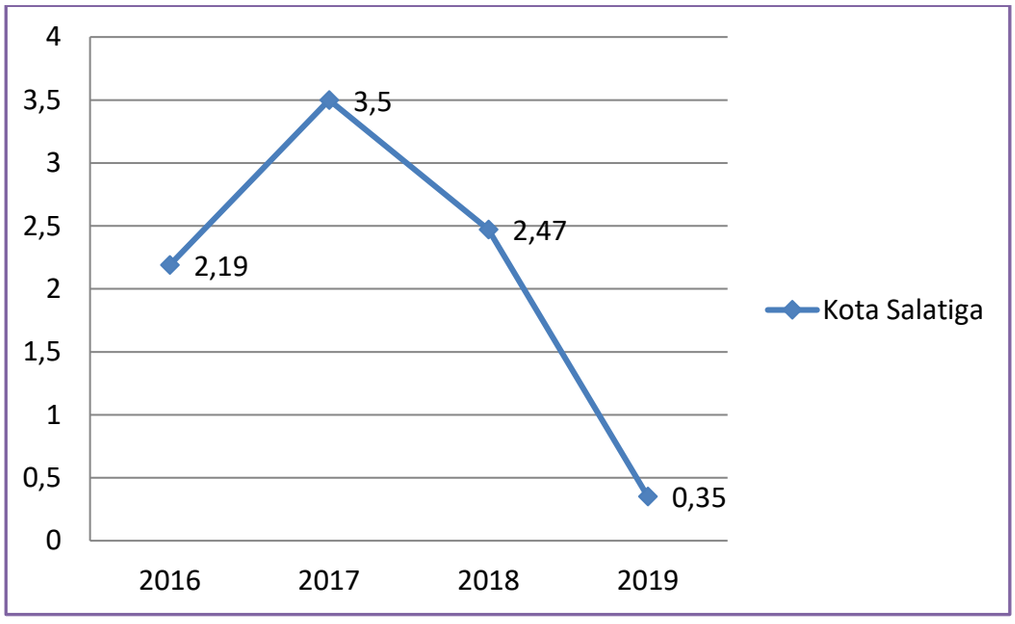
c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.

Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Tahun 2022 BPS Salatiga tidak melakukan pengukuran inflasi di Kota Salatiga. Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2019 sebesar 0,35% mengalami penurunan -2,12% tahun 2018 sebesar 2,47%. Sedangkan data inflasi Provinsi Jawa Tengah yang di rilis pada bulan Desember 2022 adalah 0,47%. Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2016-2019 terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 2. 3. Inflasi Kota Salatiga tahun 2016-2019



Sumber : website BPS

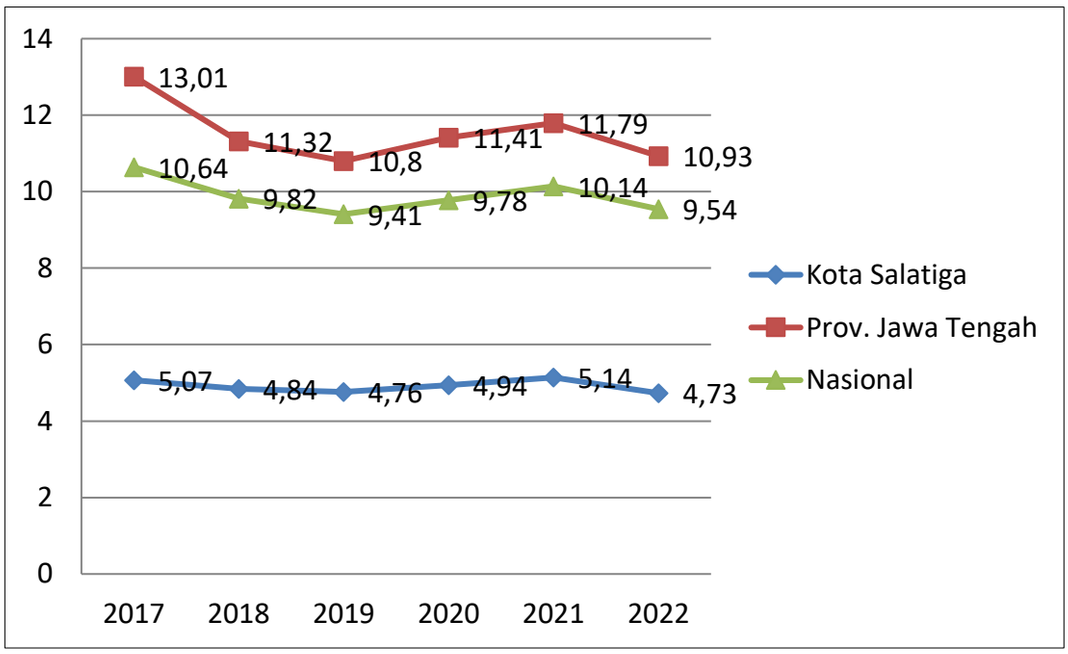
d. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 4,73% menurun 0,41% dibanding dengan tahun 2021 sebesar 5,14%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kota Salatiga relatif lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 4,94% dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak cukup signifikan pada semua

sektor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Salatiga berhasil menekan angka kemiskinan yaitu dari tahun 2017 sebesar 5,07% turun 0,23% pada tahun 2018 menjadi 4,84% lalu turun kembali pada tahun 2019 sebesar 0,08% menjadi 4,76%.

Meskipun seperti itu, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,93% dan capaian rata-rata nasional sebesar 9,54%. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik 2.3 berikut ini.

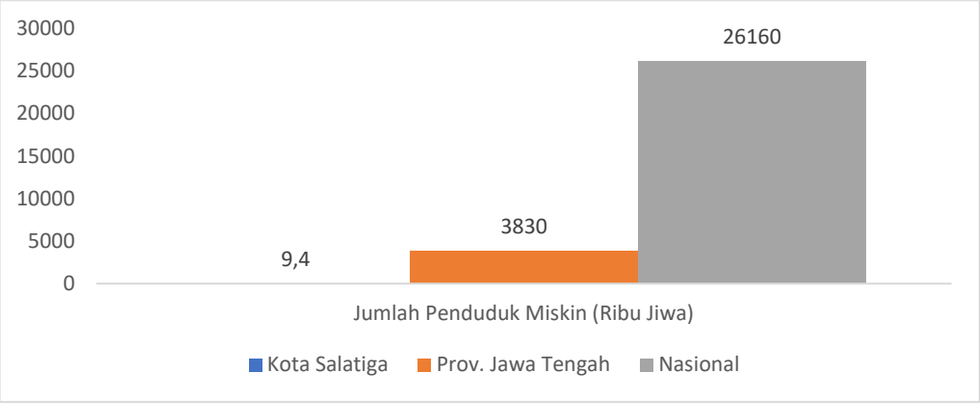
Grafik 2. 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dilihat dari sisi jumlahnya penduduk miskin Kota Salatiga pada Tahun 2022 menurun menjadi 9.450 jiwa daripada Tahun 2021 sebesar 10.140 jiwa yang masih diberada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.830.000 jiwa dan Nasional sebesar 26.160.000 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 5. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Berdasarkan data posisi relative persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah seperti pada tabel, capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 4 terbawah sebesar 4,73%. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,41%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,25%.

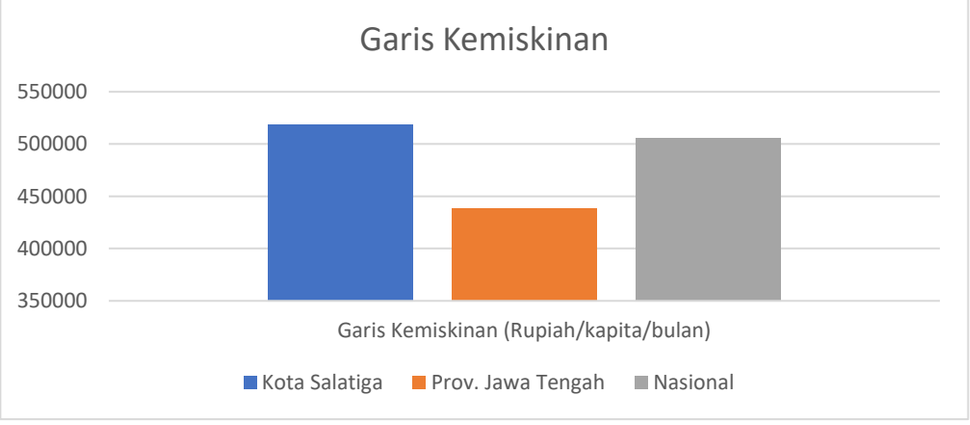
Grafik 2. 6. Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Tahun 2022 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp.518.815,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.438.833,- dan relatif sama dengan garis kemiskinan nasional yaitu Rp.505.469,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 7. Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

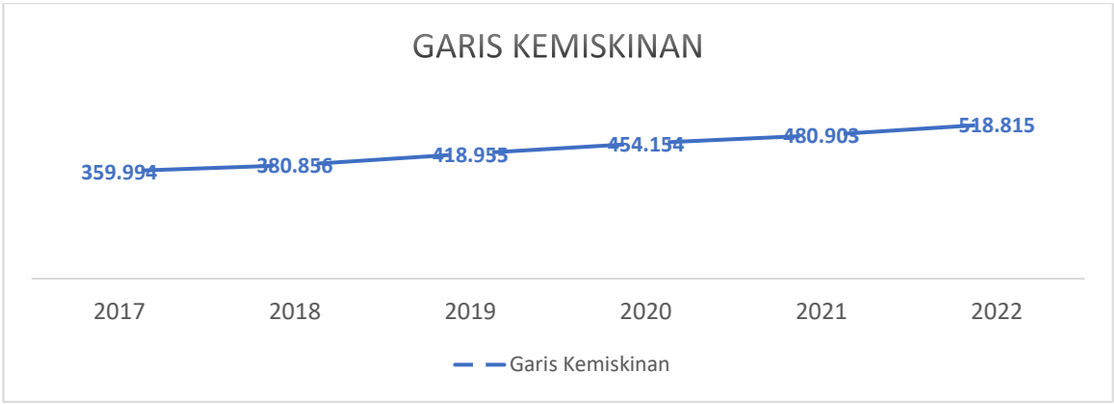


Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2023

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah.

Garis Kemiskinan Tahun 2022 tercatat naik Rp. 518.815,- jika dibandingkan pada Tahun 2021 Rp. 480.903,- mengalami kenaikan Rp. 26.749,- dibanding Tahun 2020 Rp. 454.154,-. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

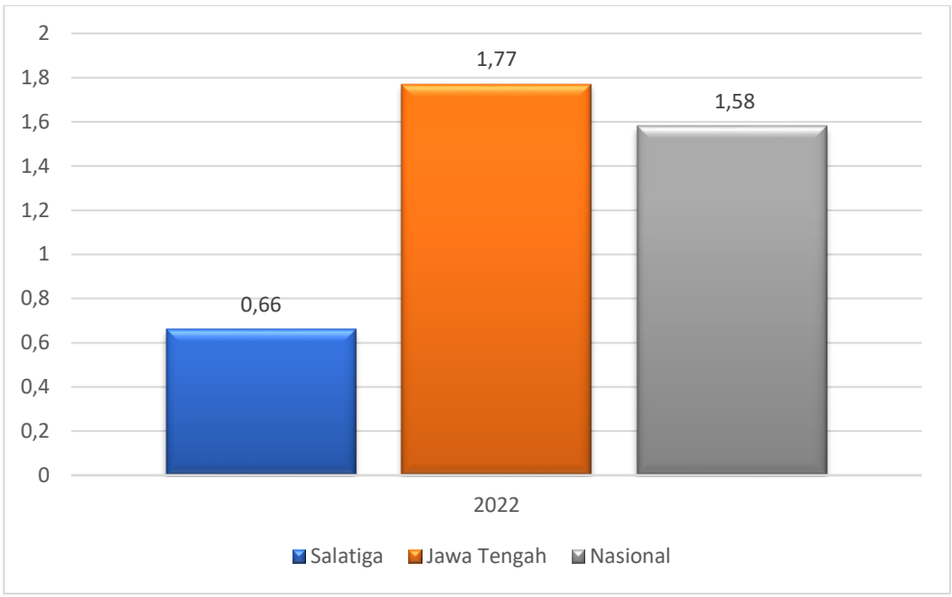
Grafik 2. 8. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin kecil nilai Poverty Gap önden, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2022 adalah sebesar 0,60. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

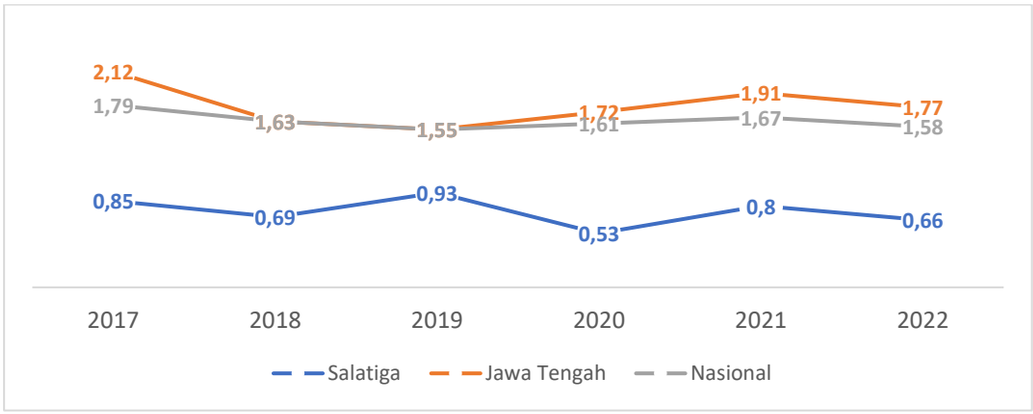
Grafik 2. 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Pencapaian P1 Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017-2022 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,66. Untuk mengetahui perkembangan P1 Kota Salatiga tahun 2017-2022 serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2017 – 2022

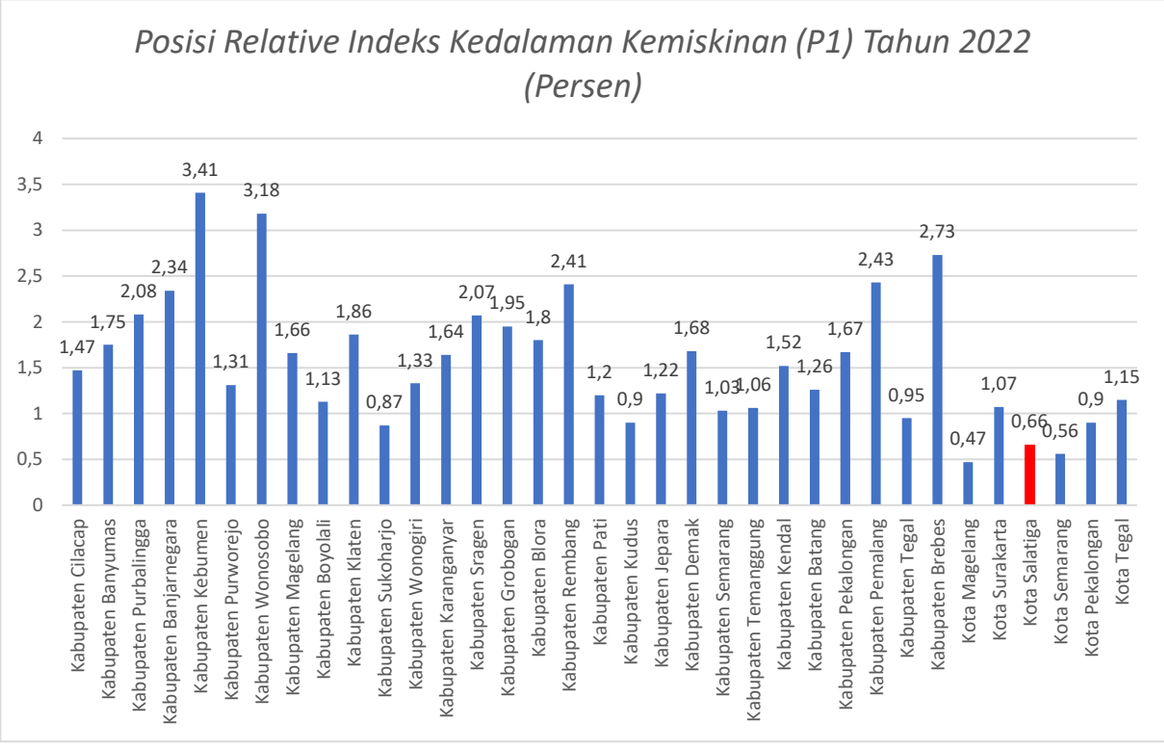


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga

jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 4 terbawah sebesar 0,66%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 3,41%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) paling sedikit adalah Kota Magelang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,47%.

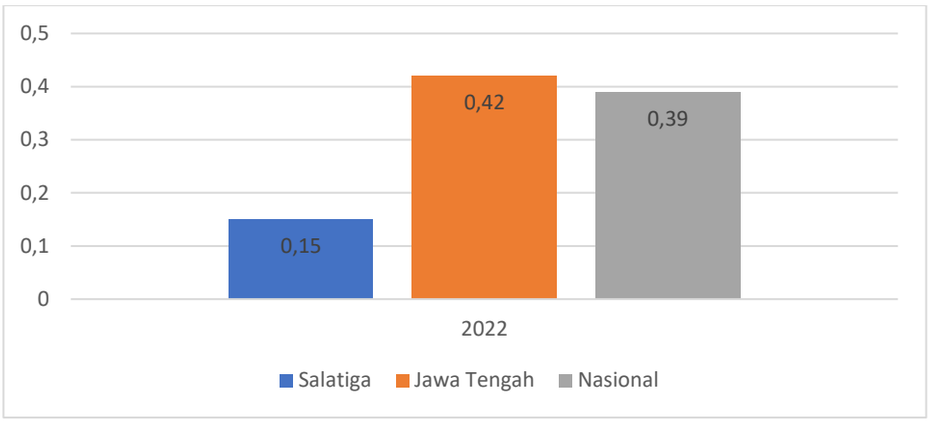
Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0.15, Provinsi Jawa Tengah 0.42 dan nasional sebesar 0.39. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Kota Salatiga pada tahun 2022 masih lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

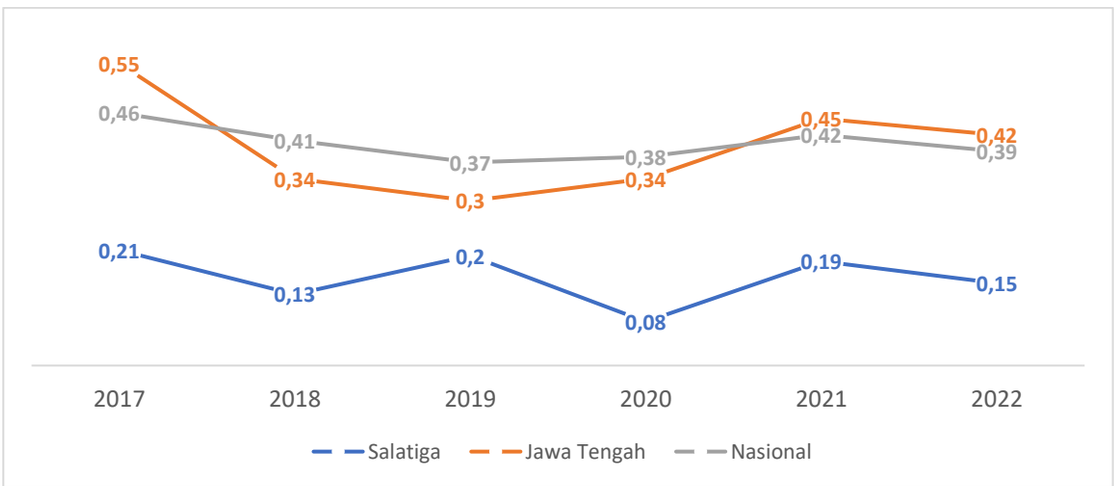
Grafik 2. 12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dalam kurun waktu tahun 2017-2022, capaian indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 mengalami kenaikan namun di tahun 2021 kembali mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari P2 Kota Salatiga pada tahun 2018 yaitu 0.13 naik menjadi 0.20 pada tahun 2019, turun menjadi 0.08 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0.19. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017 — 2022 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Grafik 2. 13. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2017- 2022

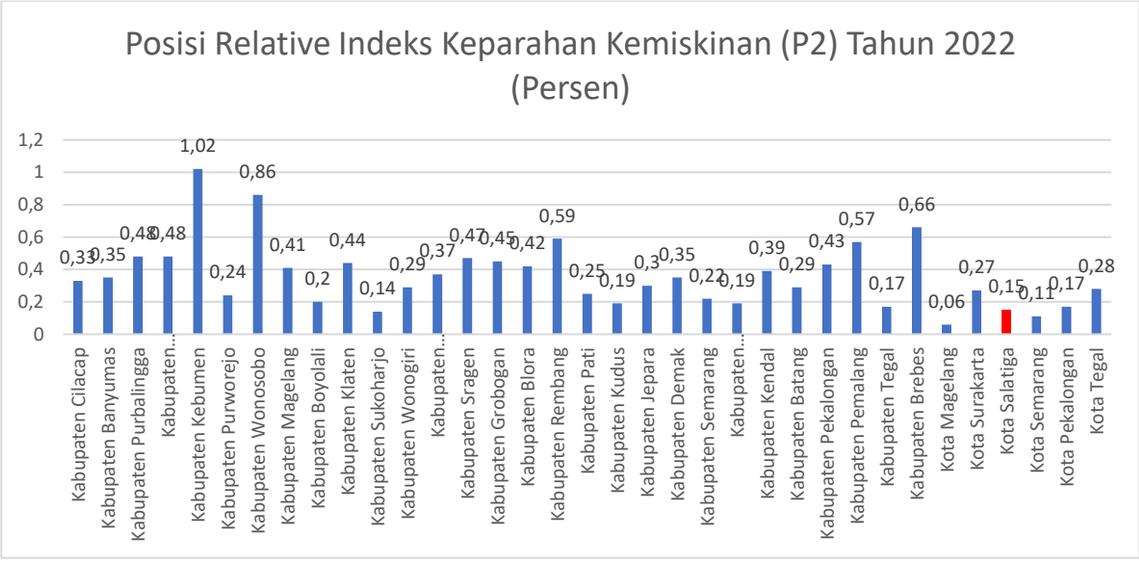


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Salatiga

jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 4 terbawah sebesar 0,15%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 1,02%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) paling sedikit adalah Kota Magelang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,06%.

Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022, Kota Salatiga merupakan Kota dengan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023 – 2024 bersama 18 (delapan belas) kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Salatiga melalui Bappeda telah menerima data P3KE dari Kemenko PMK tanggal 24 November 2022 serta bimbingan teknis pemanfaatan data P3KE yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2022.

P3KE Kota Salatiga berdasarkan Data dari Kemenko PMK terdapat jumlah penduduk desil 1–7 di Kota Salatiga berjumlah 92.036 jiwa, dan sejumlah 12.449 jiwa diantaranya merupakan penduduk dengan kriteria kemiskinan ekstrem desil 1 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Kemiskinan Ekstrim Desil 1 Kota Salatiga

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Argomulyo	3.410
2.	Sidomukti	2.320
3.	Sidorejo	2.092
4.	Tingkir	4.627
	Total	**12.449**

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Identifikasi pada proses padu padan oleh Dinas Sosial :

a. Data P3KE dari Kemenko PMK yang padupadan dengan NIK sejumlah 10.754 jiwa, sehingga terdapat sebanyak 1.695 jiwa yang tidak padupadan NIK, dengan berbagai sebab antara lain NIK ganda, bukan warga Salatiga, dsb.
b. Data P3KE dari Kemenko PMK yang padupadan dengan data DTKS sebanyak 8.800 jiwa, sedangkan yang tidak padupadan dengan data DTKS sebanyak 3.649 jiwa.
c. Tambahan Informasi: Dinas Sosial Kota Salatiga menginformasikan, bahwa berdasarkan data DT Provinsi Jawa Tengah (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah), yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 176 jiwa.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

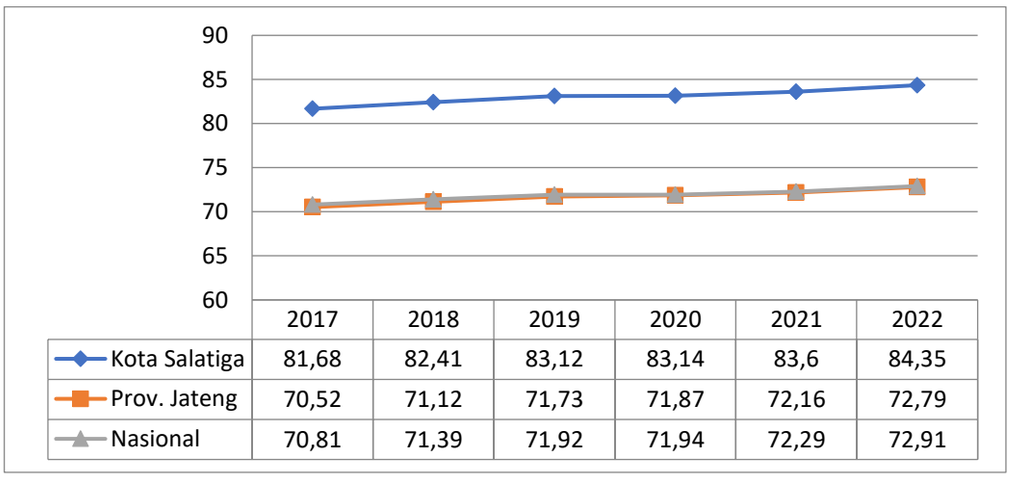
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial tahun 2021 masing–masing indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (msayarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Pada Tahun 2022 IPM Kota Salatiga mencapai 84,35 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 83,60 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,75. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya, Perlambatan capaian IPM sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama enam tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 15. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	81,68	82,41	83,12	83,14	83,6	84,35
Prov. Jateng	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Tabel 2. 12. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2017-2022

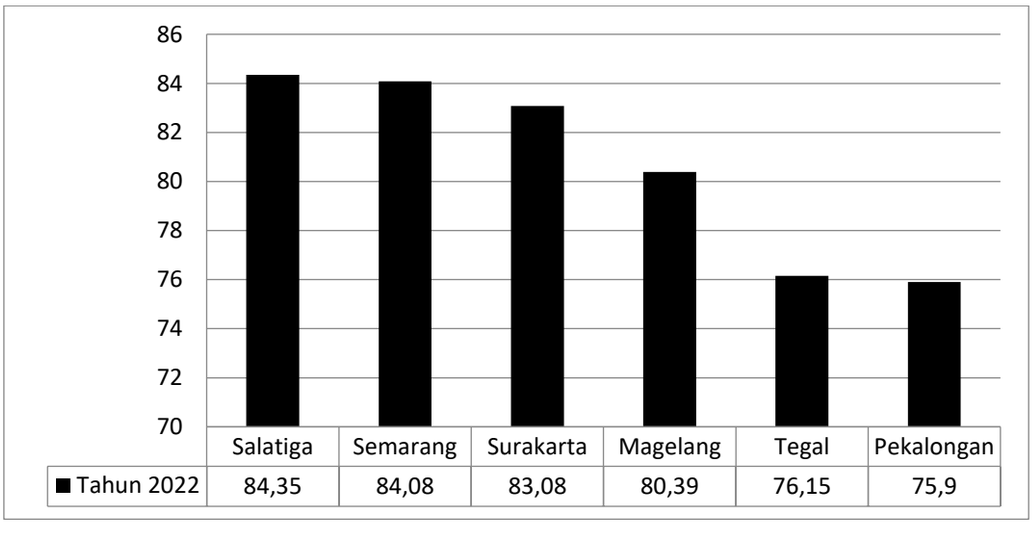
No.	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usia Harapan Hidup saat lahir	76,98	77,11	77,22	77,4	77,55	77,72
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,99	15	15,34	15,41	15,42	15,43

No.	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Rata-rata Lama Sekolah	10,15	10,4	10,41	10,42	10,66	10,95
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	14.921	15.464	15.944	15.700	15.843	16.351
IPM Kota Salatiga		**81,14**	**81,68**	**82,41**	**83,12**	**83,60**	**84,35**
Jawa Tengah		**69,98**	**70,52**	**71,12**	**71,73**	**72,16**	**72,79**
Nasional		**70,18**	**70,81**	**71,39**	**71,92**	**72,29**	**72,91**

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Capaian IPM Kota Salatiga di Jawa Tengah berada pada posisi **tertinggi.** Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Grafik berikut:

Grafik 2. 16. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



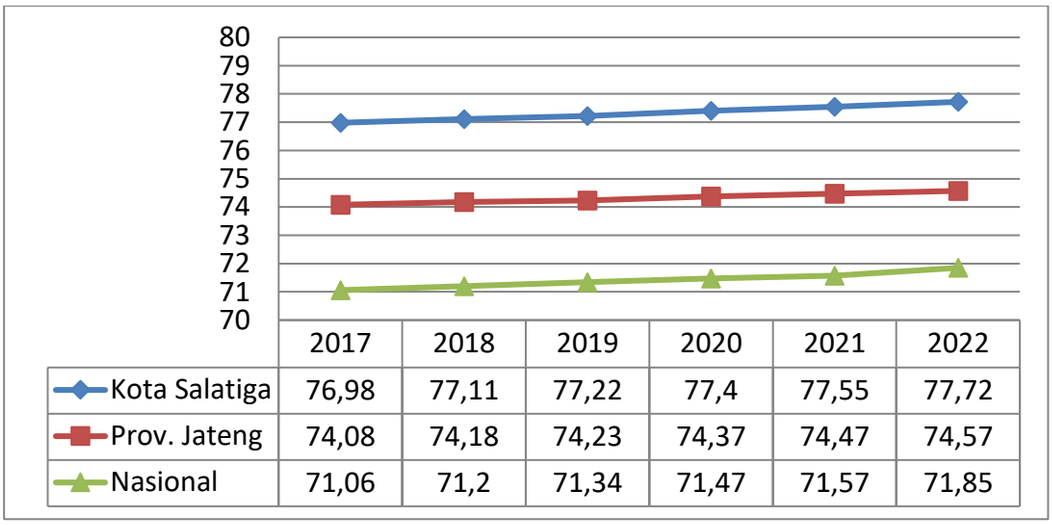
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

1) Usia Harapan Hidup saat Lahir

Usia harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia harapan hidup saat lahir menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan "*lamanya hidup*" sekaligus "*hidup sehat*" suatu masyarakat.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2022 Kota Salatiga sebesar 77,72 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,57 dan capaian Nasional sebesar 71,85. Hal ini berarti dari tahun 2017 sampai tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup antara usia 76-77 tahun. Tren perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga selama kurun waktu 2017 hingga 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 17. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

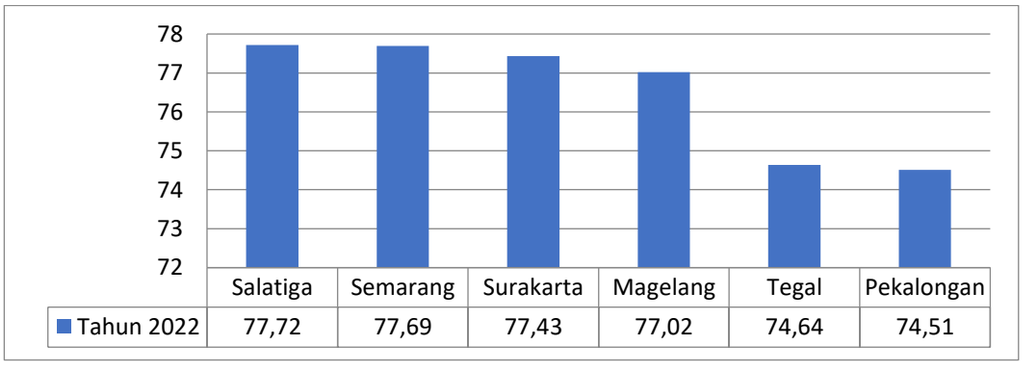


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	76,98	77,11	77,22	77,4	77,55	77,72
Prov. Jateng	74,08	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57
Nasional	71,06	71,2	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga dengan kota-kota di Jawa Tengah berada pada peringkat kedua setelah Kota Semarang sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2. 18. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2022



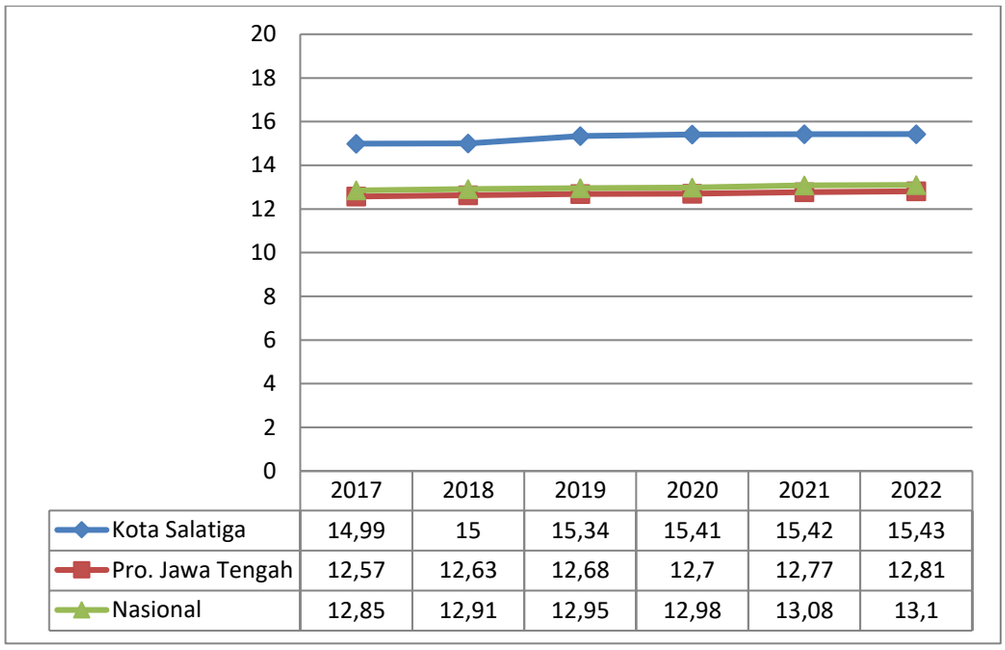
	Salatiga	Semarang	Surakarta	Magelang	Tegal	Pekalongan
Tahun 2022	77,72	77,69	77,43	77,02	74,64	74,51

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 19. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022



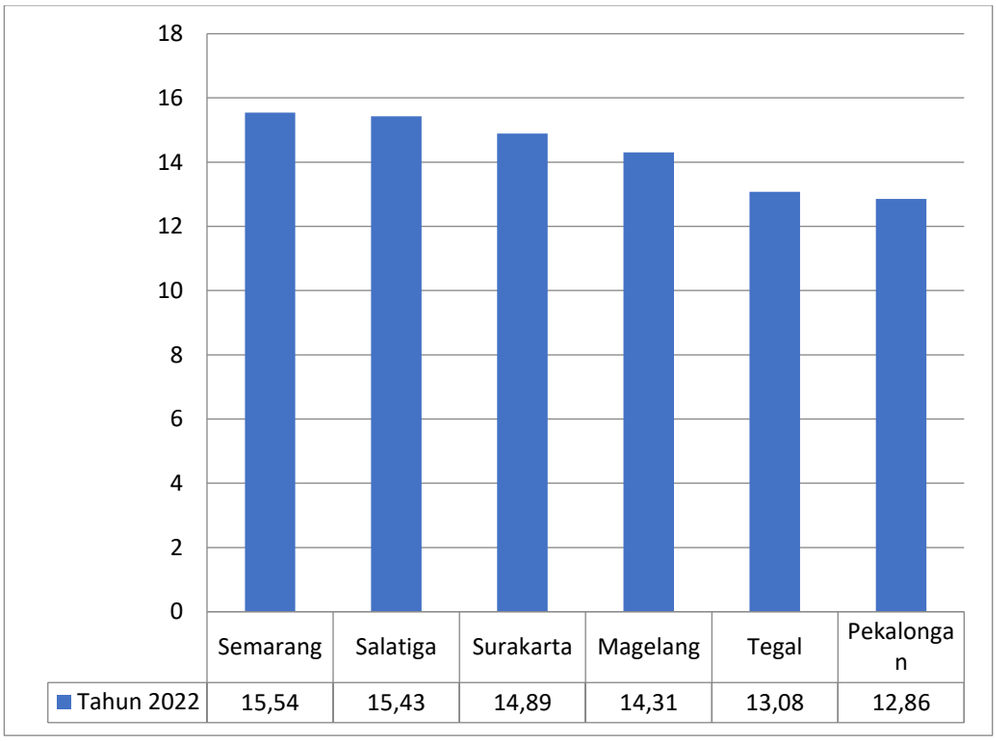
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	14,99	15	15,34	15,41	15,42	15,43
Pro. Jawa Tengah	12,57	12,63	12,68	12,7	12,77	12,81
Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,1

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Salatiga pada tahun 2022 yaitu 15,43 tahun mengalami kenaikan 0,01 tahun dari tahun 2021 sebesar 15,42 tahun. Angka capaian Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,81 tahun dan Nasional sebesar 13,10 tahun.

Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi 15,43 setelah Kota Semarang sebesar 15,54 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 20. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



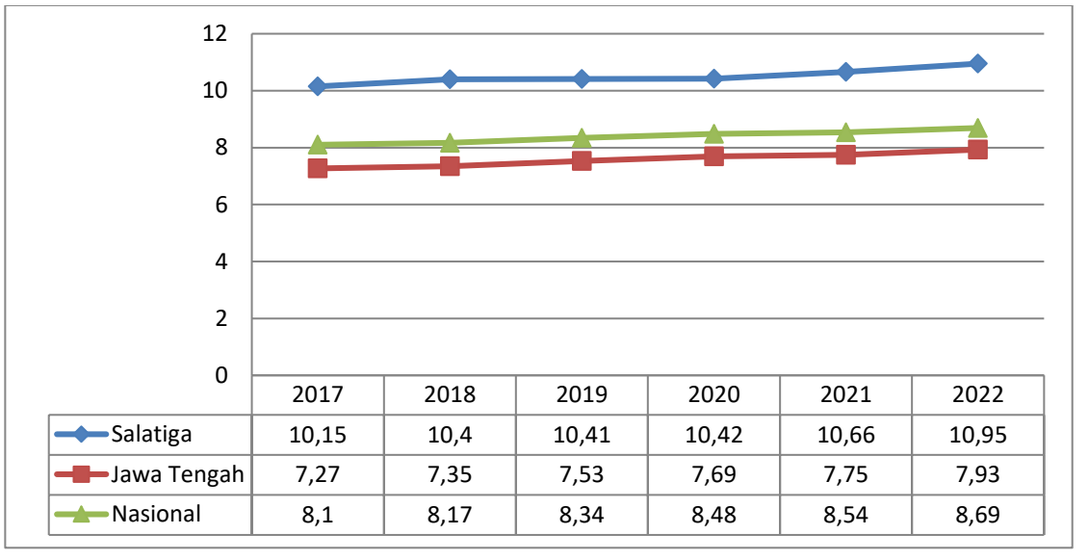
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 10.95 tahun, mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 10,66 tahun. Peningkatan RLS juga terjadi di Provinsi jawa tengah dan secara nasional, namun angka capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah Sebesar 7.95 tahun dan Nasional sebesar 8.69 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 21. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022

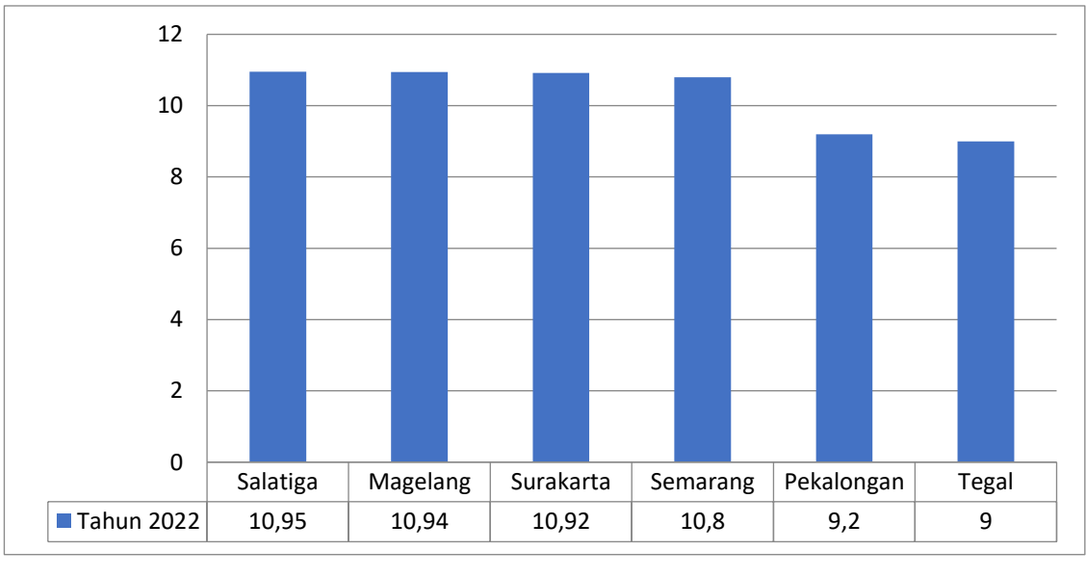


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Salatiga	10,15	10,4	10,41	10,42	10,66	10,95
Jawa Tengah	7,27	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93
Nasional	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2022 berada pada peringkat pertama diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan terakhir Kota Tegal, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 22. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



	Salatiga	Magelang	Surakarta	Semarang	Pekalongan	Tegal
Tahun 2022	10,95	10,94	10,92	10,8	9,2	9

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

4) Pengeluaran Rill Per Kapita

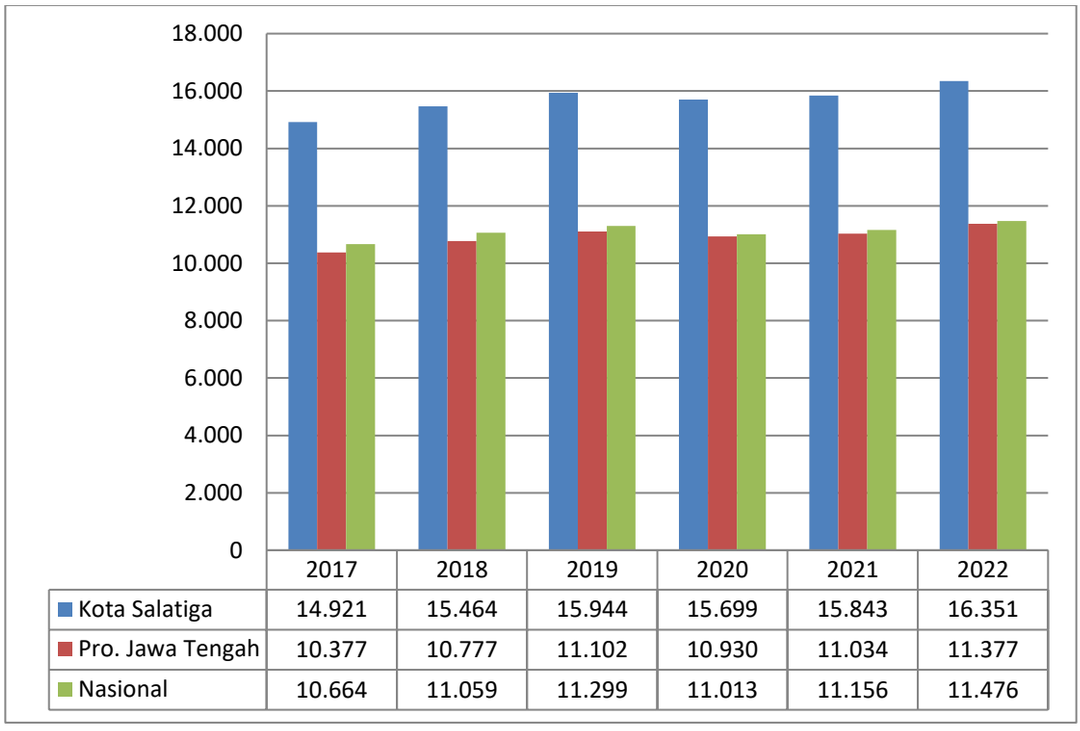
Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan

masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar Rp.16.351.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.508.000,- dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.15.843.000,-.

Capaian pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2022 berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.377.000,- dan Nasional sebesar Rp.11.476.000,-, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 23. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah)

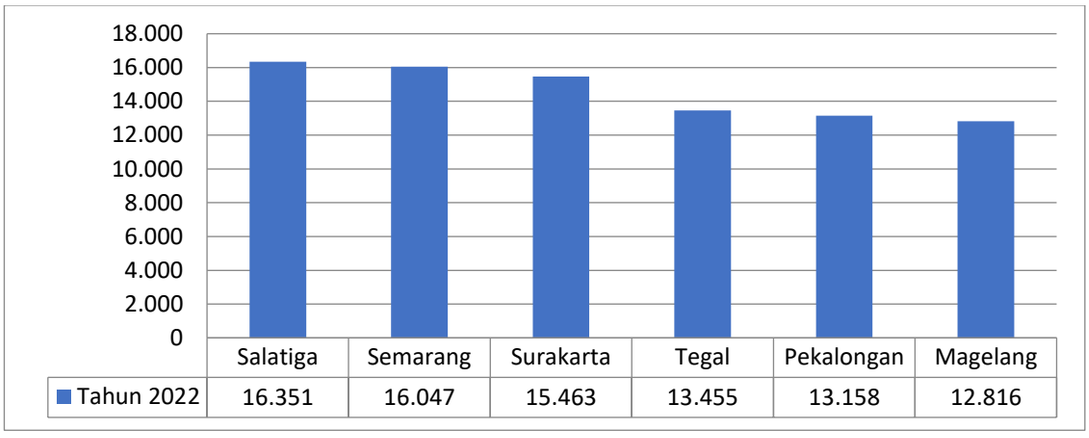


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	14.921	15.464	15.944	15.699	15.843	16.351
Pro. Jawa Tengah	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034	11.377
Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.476

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 24. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah)



	Salatiga	Semarang	Surakarta	Tegal	Pekalongan	Magelang
Tahun 2022	16.351	16.047	15.463	13.455	13.158	12.816

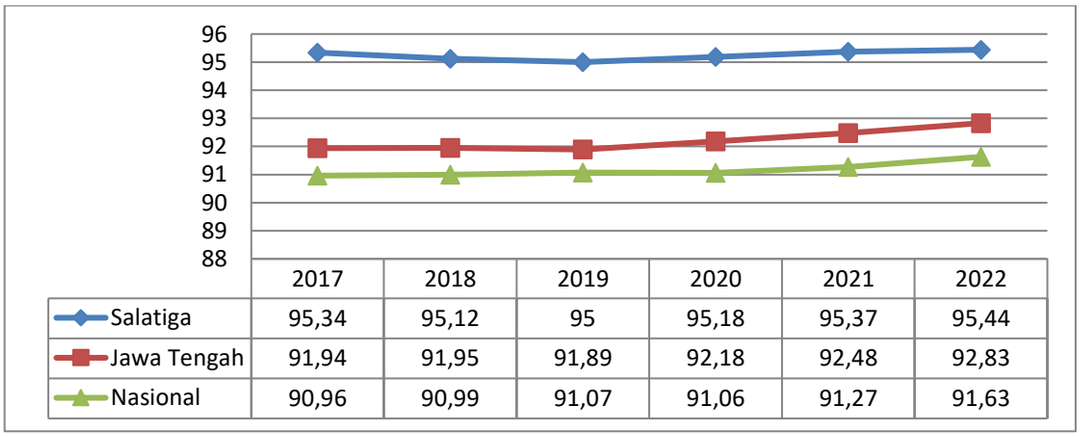
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2022

b. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

Capaian IPG Kota Salatiga tahun 2022 dengan indeks 95,44 terhitung naik dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan indeks 95,37. Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 92,83 dan Nasional sebesar 91,63 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 25. Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

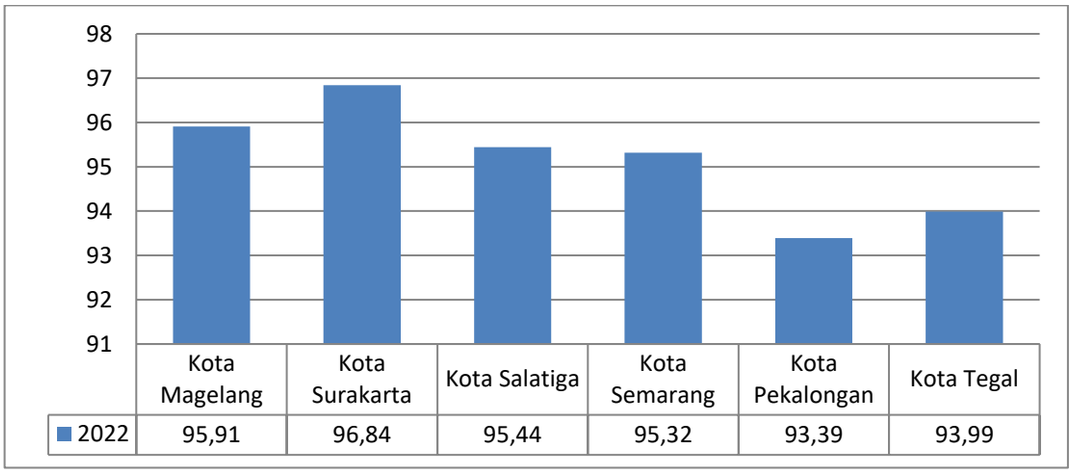


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Salatiga	95,34	95,12	95	95,18	95,37	95,44
Jawa Tengah	91,94	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan kota – kota lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 3 sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. 26. Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

c. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan.

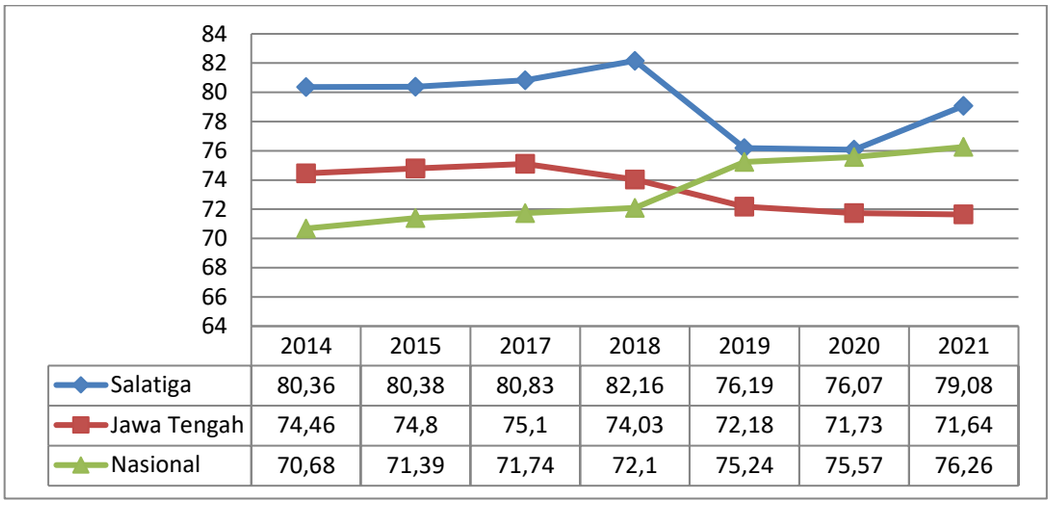
IDG Kota Salatiga Tahun 2021 dengan indeks 79,08 mengalami kenaikan 3,01 dari tahun 2020 dengan indeks 76,07. Capaian IDG Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 71,64 dan Nasional dengan indeks 76,26. Perbandingan capaian IDG tersebut dapat terlihat pada grafik berikut.

Walaupun skor IDG Kota Salatiga pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih ada penurunan pada indikator pembentuknya, yaitu pada peran perempuan dalam dunia profesional yang turun 0,19 dan pendapatan perempuan yang turun 0,34. Sedangkan indikator keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan sebesar 4.

Penurunan pada variabel peran perempuan dalam dunia profesional dan sumbangan pendapatan perempuan, karena Dampak pandemi terhadap dunia usaha di Salatiga mempengaruhi

penghasilan perempuan yang bergantung dari usaha keluarga, dan dengan adanya pembatasan sosial terdapat perempuan yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Grafik 2. 27. Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2021

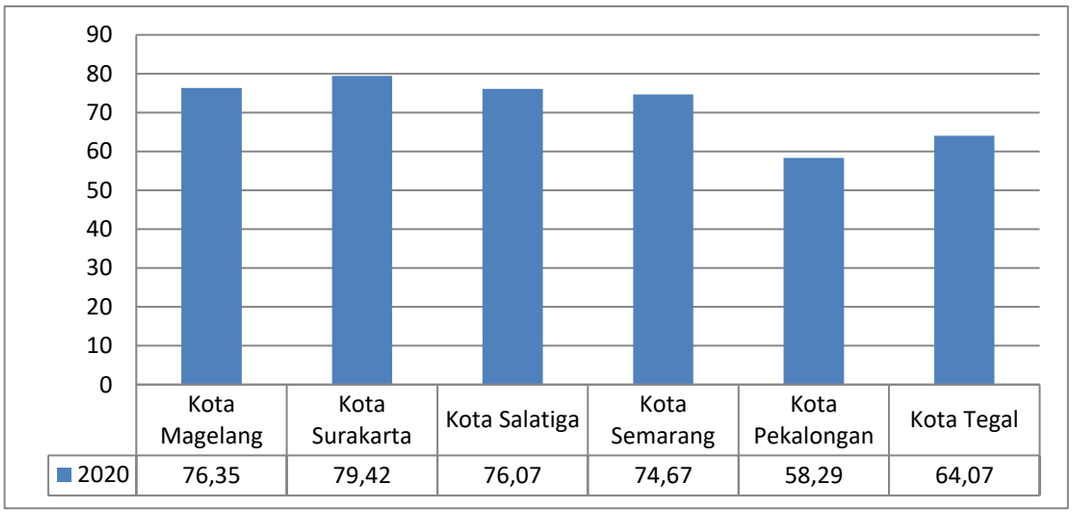


	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Salatiga	80,36	80,38	80,83	82,16	76,19	76,07	79,08
Jawa Tengah	74,46	74,8	75,1	74,03	72,18	71,73	71,64
Nasional	70,68	71,39	71,74	72,1	75,24	75,57	76,26

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021

Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 berada pada peringkat ketiga tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 28. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
2020	76,35	79,42	76,07	74,67	58,29	64,07

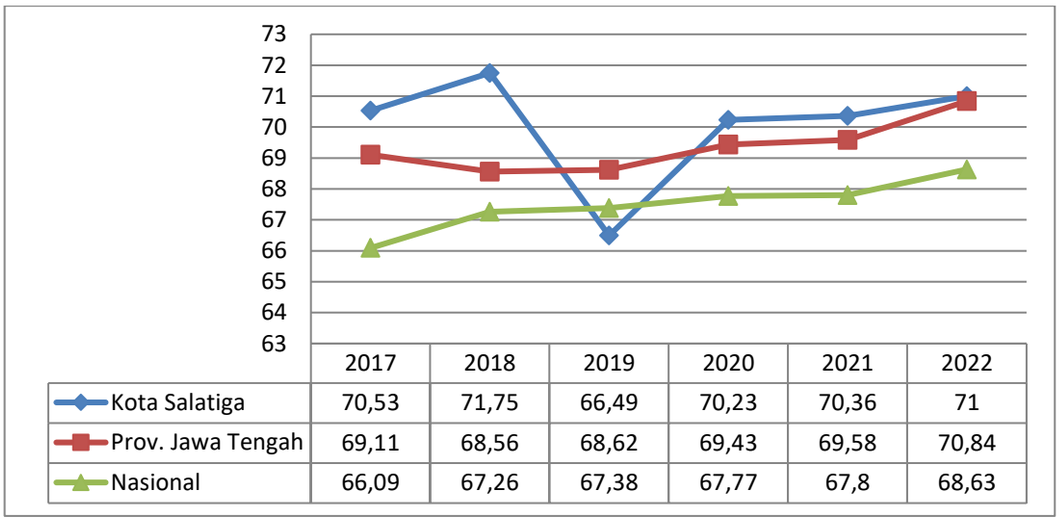
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2021

d. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari.

Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 71% mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 70,36%. Capaian Kota Salatiga pada tahun 2022 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,84% dan Nasional sebesar 68,63%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2022 tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 29. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (%)

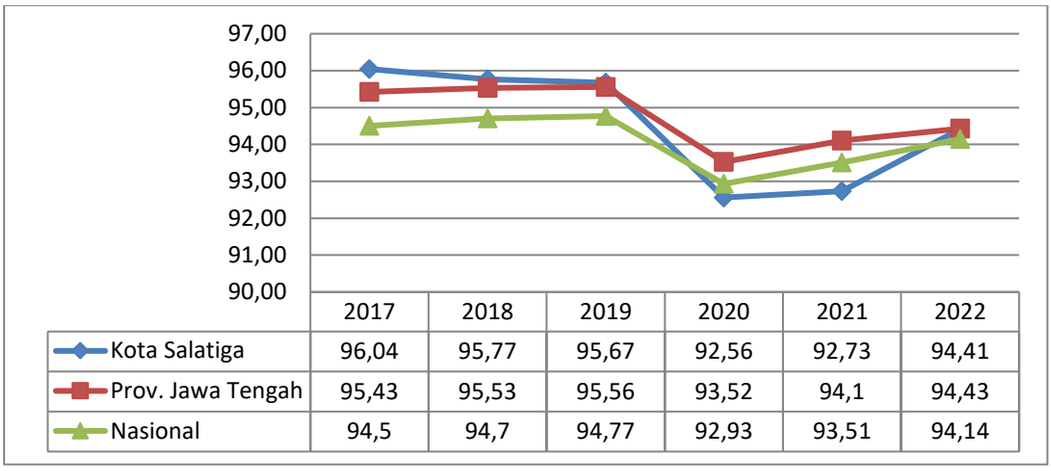


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36	71
Prov. Jawa Tengah	69,11	68,56	68,62	69,43	69,58	70,84
Nasional	66,09	67,26	67,38	67,77	67,8	68,63

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukan tren yang cenderung membaik. Tren menaik terjadi pada Tahun 2022 karena adanya indikasi *supply* tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:

Grafik 2. 30. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (%)



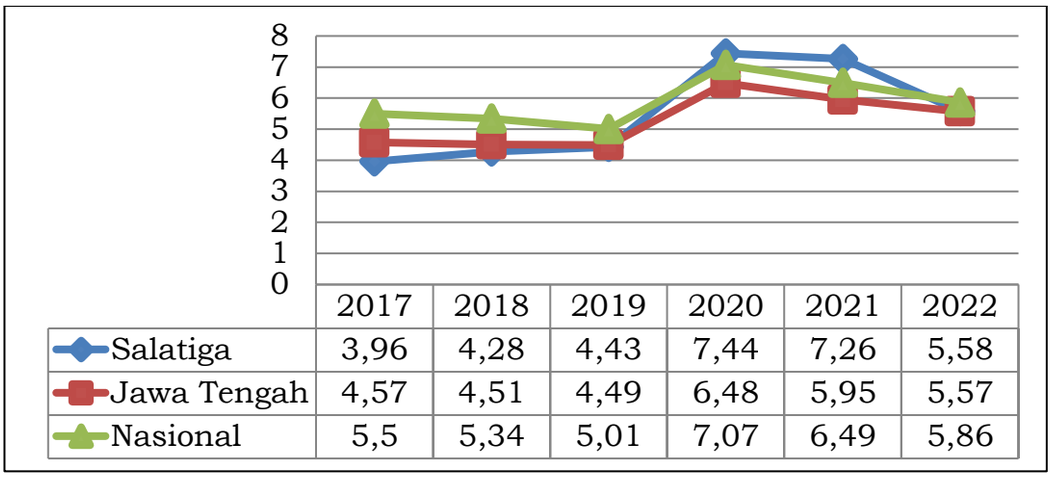
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Salatiga	96,04	95,77	95,67	92,56	92,73	94,41
Prov. Jawa Tengah	95,43	95,53	95,56	93,52	94,1	94,43
Nasional	94,5	94,7	94,77	92,93	93,51	94,14

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 5,58% mengalami penurunan sebasar 1,68% dari tahun 2021 sebesar 7,26%. Berarti, di antara 100 orang angkatan kerja, di temukan sekitar lima sampai enam orang penanggur. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 31. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) KotaSalatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022 (%)



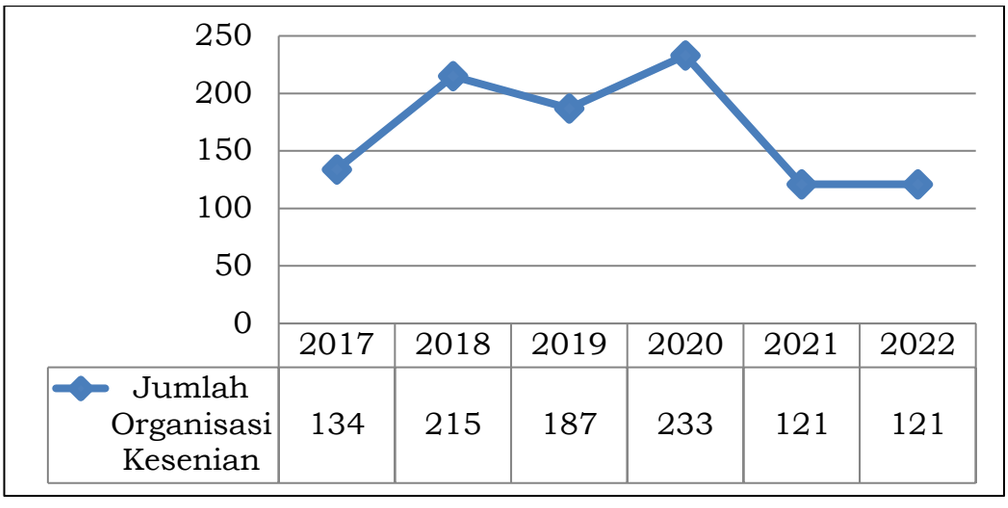
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Salatiga	3,96	4,28	4,43	7,44	7,26	5,58
Jawa Tengah	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95	5,57
Nasional	5,5	5,34	5,01	7,07	6,49	5,86

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kota Salatiga yang disebut sebagai Indonesia mini terdiri dari beragam etnis sehingga menumbuhkan keragaman seni dan budaya yang ada. Jumlah Organisasi Kesenian di Kota Salatiga cenderung fluktuatif pada 5 tahun terakhir namun stagnan pada tahun 2021 dan 2022 dengan jumalh 121 organisasi kesenian. Berikut gambaran perkembangan organisasi kesenian di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2017-2022.

Grafik 2. 32. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Pada tahun 2022 walaupun tidak ada POPDA tetapi Kota Salatiga tetap mengirimkan atletnya pada berbagai event perlombaan tingkat nasional seperti Piala Bergilir Presiden RI ke 3 Wushu Taulo, Tugu Muda Championship 3, Kejurnas Tennis Meja, Kejurnas Atletik U18 U20 dan senior, Kejurnas Anggar, Fornas VI, serta Lomba tingkat Internasional yaitu Junior Wushu Champion. Dengan total perolehan medali 28 emas, 43 perak dan 27 perunggu. Meningkat jika dibandingkan dengan prestasi Kota Salatiga di bidang olahraga tahun 2021 pada kejuaraan di tingkat provinsi dengan perolehan 10 medali emas, 11 medali perak, 19 medali perunggu. Sedangkan perolehan medali tahun 2019 yaitu 10 medali emas, 9 medali perak dan 5 medali perunggu.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

Integrasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs, pengarusutamaan gender serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya.

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Strategi yang dilakukan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang sangat baik ditunjukan dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 10,95 tahun dan harapan lama sekolah 15,43 tahun, serta Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59) sebesar 99,62%. Perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dalam kurun tahun 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 13. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2017-2022

Capaian Pembangunan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,15	10,4	10,41	10,42	10,66	10,95
Harapan Lama Sekolah	tahun	14,99	15	15,34	15,41	15,42	15,43
Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59)	%	99,07	99,1	99,11	99,12	99,59	96,62

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukan dengan ruang kelas dalam kondisi baik. Tahun 2022 persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang PAUD sebesar 80,17%, untuk jenjang SD 88,40% dan jenjang SMP 98,62%. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga kurun waktu 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 14. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Prosentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAUD	%	90,24	87,78	84,21	82,22	87,33	80,17
SD	%	78,36	86,00	79,64	89,5	87,28	88,40
SMP	%	92,69	84,77	92,71	88,91	97,70	98,62

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru di sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio murid-guru di Kota Salatiga tahun 2022 yaitu 14,79. Perkembangan rasio murid-guru di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 15. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Tahun	SEKOLAH	MURID	GURU	RATA-RATA PER SEKOLAH		RASIO MURID GURU
				MURID	GURU	
2017	94	17583	1182	187,05	12,57	14,88
2018	94	17479	1053	185,95	11,2	16,6
2019	95	16926	1051	178,17	11,06	16,1
2020	89	16473	1023	185,09	11,49	16,1
2021	81	15900	1074	196,3	13,26	14,08
2022	80	15621	10056	195,26	13,2	14,79

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Prosentase Guru Layak Mengajar pada tahun 2022 di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebanyak 86,91%, jenjang SD 97,39% dan jenjang SMP 97,63%.

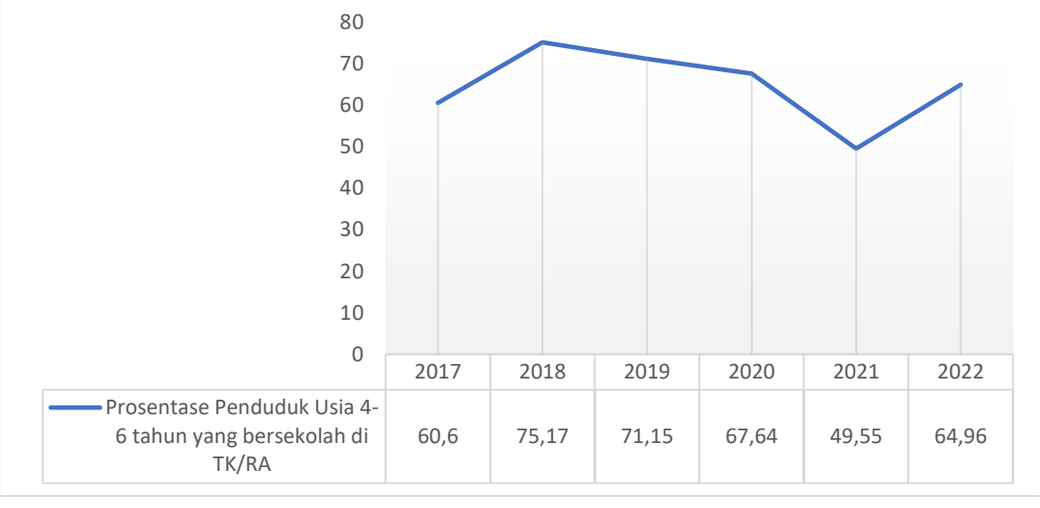
Tabel 2. 16. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Prosentase Guru Layak Mengajar	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAUD	%	74,12	74,12	74,5	80,43	84,95	86,91
SD	%	91	94,00	92	94,52	97,30	97,39
SMP	%	93	93,73	93,5	94,47	96,43	97,63

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2017-2022, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA.

Grafik 2. 33. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan seberapa tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Tahun 2022 APK di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD

sebesar 40,10%, jenjang SD sebesar 114,07%, dan jenjang SMP 130,59%. Perkembangan APK di Kota salatiga dalam kurun waktu 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAUD	%	42,53	44,69	48,36	42,64	38,33	40,10
SD	%	114,21	140,65	107,81	110,37	113,46	114,07
SMP	%	139,45	136,22	138,41	127,66	130,81	130,59

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjangnya. Persentase APS menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Perkembangan APS di Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut.

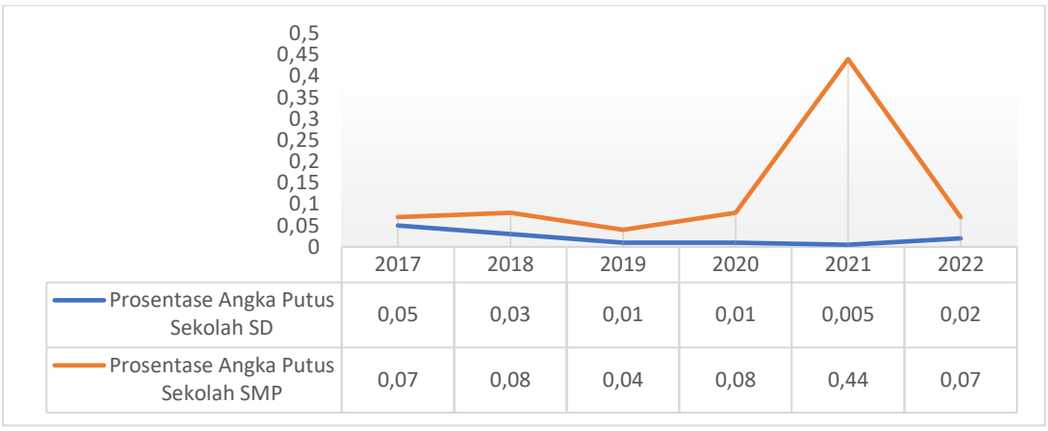
Tabel 2. 18. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Usia 5-6 tahun	%	75,47	75,03	93,85	95,5	84,81	89,61
Usia 7-12 tahun	%	127,99	134,59	108,01	116,45	99,22	99,23
Usia 13-15 tahun	%	148,53	151,80	143,93	131,07	96,72	90,56

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2022

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 menunjukkan tren yang baik yaitu cenderung menurun.

Grafik 2. 34. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prosentase Angka Putus Sekolah SD	0,05	0,03	0,01	0,01	0,005	0,02
Prosentase Angka Putus Sekolah SMP	0,07	0,08	0,04	0,08	0,44	0,07

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Tabel 2. 19. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022
1	Pendidikan Kesetaraan	151,83	61,95	69,74
2	Pendidikan Anak Usia Dini	149,23	84,81	88,38
3	Pendidikan pada Sekolah Dasar	128,35	90,90	87,75

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dinilai berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah pada Kesetaraan, PAUD dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan bahwa pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2022 sesuai dengan penerapan Indikator sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yaitu **Tuntas Madya** dengan Pendidikan Anak Usia Dini 88,38 (Tuntas Madya), Pendidikan pada Sekolah Dasar 84,38 (Tuntas Madya) dan Pendidikan Kesetaraan 69,57 (Tuntas Muda).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu

kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistikintegratif perlu dimaksimalkan dalam pengumpulan data untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.

Untuk Capaian Indikator pada PAUD juga belum mencapai target yang ditetapkan karena masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah di PAUD untuk anak usia 5-6 tahun, karena rendahnya kesadaran dan minat orang tua untuk menyekolahkan anak pada jenjang PAUD. Akan tetapi masih ada kesulitan dalam pendataan anak tidak sekolah, dikarenakan sudah tidak bisa mengkompilasi antara data peserta didik dengan data penduduk usia sekolah semenjak data kependudukan terpusat.

b. Urusan Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain : Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Kinerja daerah urusan kesehatan mendukung pencapaian misi kedua RPJMD tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana”.

Pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari kondisi pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dilihat secara makro, yaitu meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya kematian ibu, kematian bayi, balita dan gizi buruk.

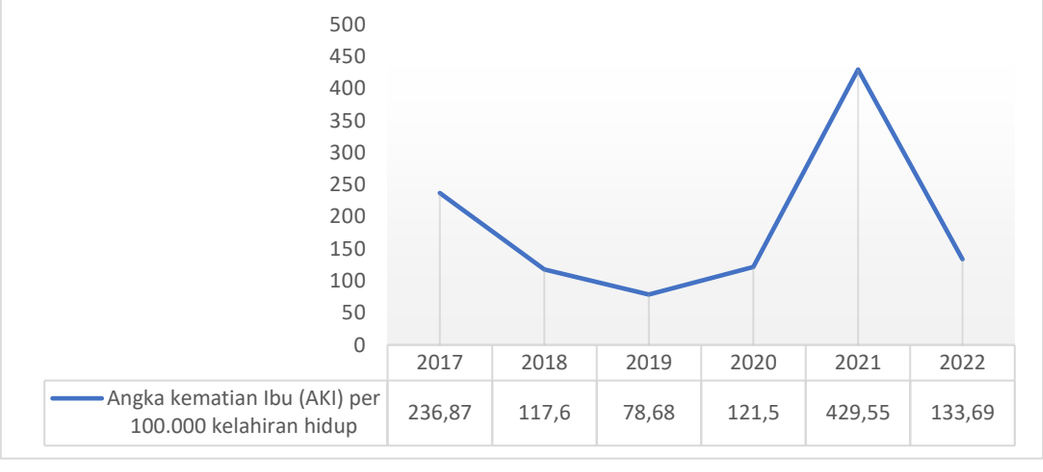
Kasus kematian ibu menjadi salah satu sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami perkembangan secara fluktuatif. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kematian ibu diantaranya dengan program kelompok sayang ibu dan pendampingan ibu hamil resti (resiko tinggi) oleh anggota dasawisma di tingkat RT, serta dengan

upaya deteksi dini resiko tinggi dan pendampingan pada kehamilan, persalinan dan nifas oleh kader.

Target Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Salatiga tahun 2022 ditetapkan 117/100.000KH atau 2 kasus kematian ibu, sedangkan realisasi AKI pada tahun 2022 sebesar 133,69/100.000 KH atau 3 kasus kematian ibu. Dengan demikian capaian kinerja AKI pada tahun 2022 belum memenuhi target ditetapkan. Karena indikator negative berarti kinerja AKI telah mencapai 85,47% dengan predikat tinggi.

Apabila dilihat secara perhitungan angka absolut pada tahun 2022, kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas berdasarkan KTP, maka dimanapun ibu tinggal akan dikembalikan (dilaporkan) sesuai dengan identitas walaupun tidak meninggal di Kota Salatiga. Dari 3 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh penyakit jantung, asma dan TB, 2 diantaranya tidak tinggal di Kota Salatiga. Hal tersebut terjadi di karenakan mobilisasi masyarakat di Kota Salatiga sangat tinggi, dibuktikan dengan hasil pelacakan kematian ibu terlihat bahwa ibu berKTP di Salatiga namun tidak tinggal di Salatiga. Langkah tindak lanjut untuk tahun selanjutnya adalah membuat jejaring rujukan lintas batas dan optimalisasi e-kohort.

Grafik 2. 35. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	236,87	117,6	78,68	121,5	429,55	133,69

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

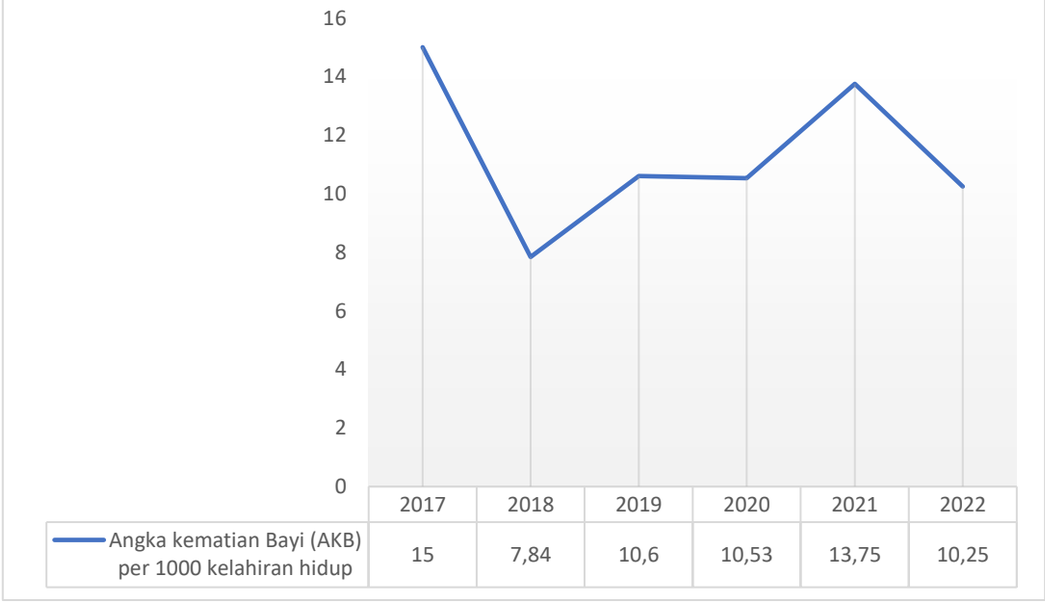
Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan di Kota Salatiga. Kasus kematian bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan

penyakit penyerta/kelainan bawaan pada bayi. Posyandu balita, posyandu lansia dan Posbindu yang menjadi sarana untuk pemantauan kesehatan masyarakat tidak bisa dilaksanakan, sehingga mengakibatkan peningkatan kasus gizi buruk pada balita di masyarakat dan kasus penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada bayi lahir terutama karena masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia. Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi SHK (*screening hipotiroid kongenital*) dan meningkatkan cakupan ANC (*antenal care*) yaitu pemeriksaan ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

AKB di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 10,25/1.000 KH. Angka tersebut berada di bawah target yang telah ditentukan yaitu 10,75/1000 KH. Secara absolute dari target 25 kasus kematian bayi, terdapat 23 kasus kematian bayi di Kota Salatiga pada tahun 2022. Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 104,65%, masuk dalam kategori tercapai. Perkembangan capaian AKB dari tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif, dengan capaian 2022 sebesar 10,25% per 1000 kelahiran bayi.

Grafik 2. 36. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

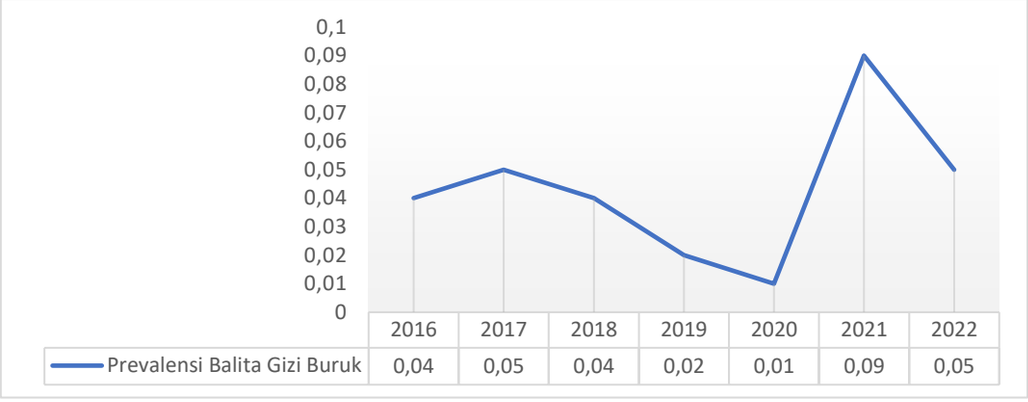


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	15	7,84	10,6	10,53	13,75	10,25

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Pada tahun 2022 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,05%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2017-2022 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 37. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 6,21 persen atau sebanyak 647 Balita Stunting pada tahun 2022 dan tersebar pada semua Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas Sumberdaya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

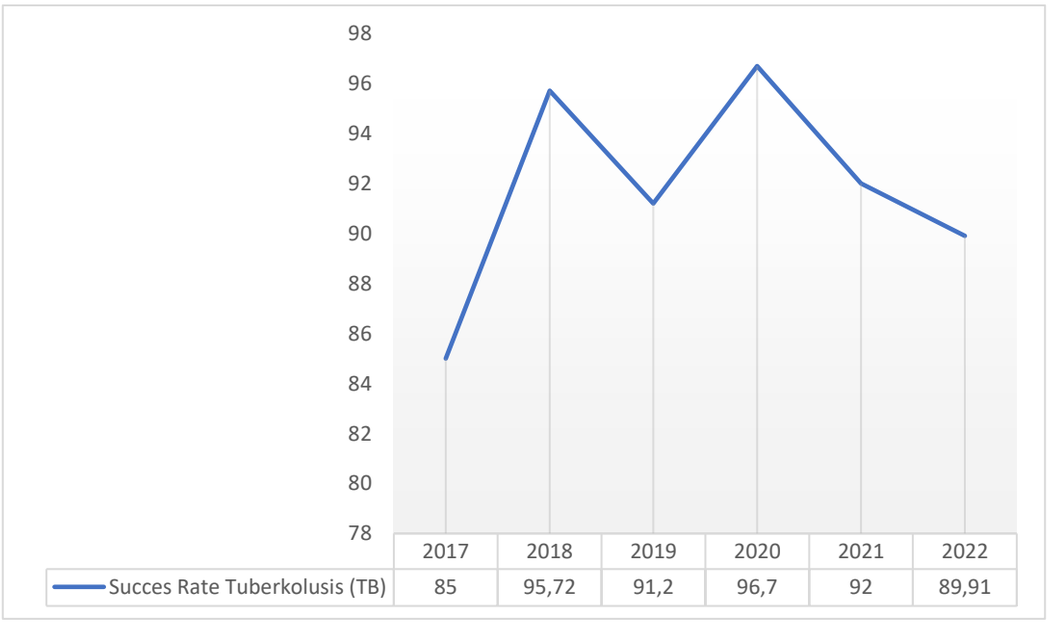
Tabel 2. 20. Data Stunting Kota Salatiga 2018-2022

Tahun	BADUTA		BALITA	
2018	738/4.608	16,02%	1660/10.656	15,58%
2019	323/4.614	7,00%	1228/11.374	10,80%
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunnya penyakit menular terlihat dari Success Rate Tuberkolusis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2022 sebesar 89,91% dengan target 2022 sebesar 85%. Dari 412 Kasus TB di Kota Salatiga, terdapat 370 kasus yang sudah sembuh dan mendapatkan pengobatan lengkap, walaupun nilainya menurun 2,09% dibanding tahun 2021. Faktor penghambat penurunan capaian penanganan TB adalah banyak pasien yang berobat ke RS, sehingga puskesmas wilayah tidak bisa melakukan pemantauan. Perkembangan penanganan Tuberkolusis (TB) cenderung fluktuatif dari tahun 2017-2022.

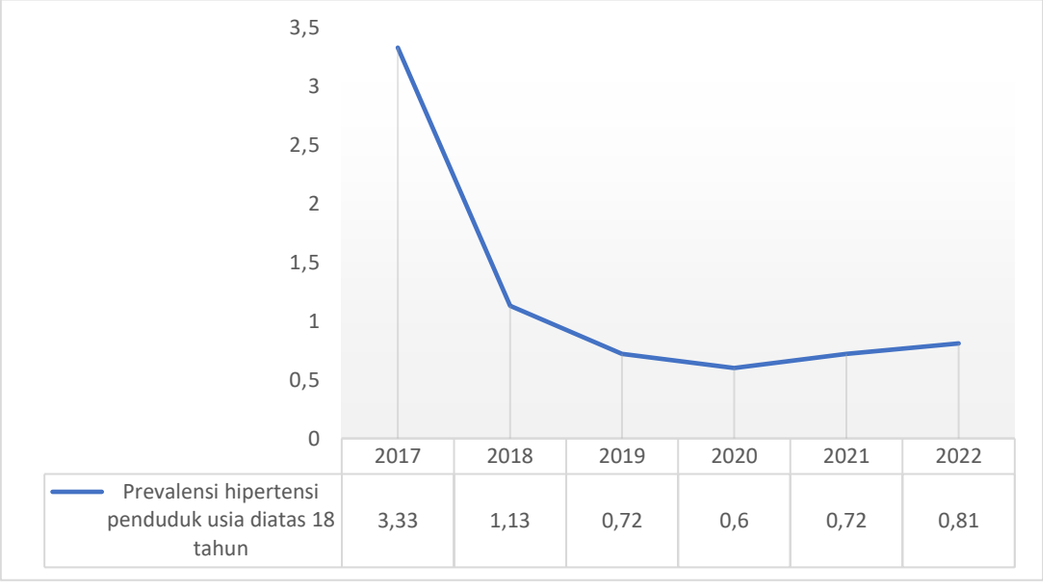
Grafik 2. 38. Succes Rate Tuberkolusis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Menurunnya penyakit tidak menular untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun. Pada tahun 2022 capaian prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun sebesar 0,81% naik dibanding tahun 2021 0,72%. Perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun dari tahun 2017-2022 cenderung menurun.

Grafik 2. 39. Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia di atas 18 Tahun di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi pelayanan dasar Urusan Kesehatan dapat dilihat dari SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan capaian tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 21. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,73	97,53	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,06	98,20	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	75,52	93,79	97,06
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	32,11	25,14	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	20,13	26,62	93,08

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	85,34	70,88	93,34
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27,11	33,71	93,17
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48,73	67,71	93,84
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	59,18	73,52	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13,99	33,43	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*/HIV)	50,60	50,60	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2021. Dan juga adanya Peraturan baru yaitu Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyebabkan capaian antara 2021 dan 2022 berubah signifikan.

Belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2022, disebabkan oleh :

1. Belum semua balita datang ke posyandu tetapi bagi balita yang tidak datang ke posyandu vitamin A tetap diberikan
2. Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Posbindu / Deteksi Dini PTM
3. Masih ada lansia yang tidak bisa datang ke posyandu lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
4. Belum semua penderita hipertensi ditemukan (berdasarkan prevalensi hipertensi Kota Salatiga)
5. Belum semua penderita DM ditemukan (berdasarkan prevalensi DM Kota Salatiga)

Walaupun Indikator SPM Bidang Kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya pemecahan masalah telah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan PKK, tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait
2. Mendekatkan Posbindu hingga ke tingkat RW di semua wilayah

3. Memberikan layanan kesehatan kepada lansia dari rumah ke rumah
4. Meningkatkan edukasi ke masyarakat

Dengan upaya-upaya pemenuhan penerapan SPM tersebut diharapkan progress capaian indikator SPM Kesehatan akan semakin meningkat pada periode berikutnya.

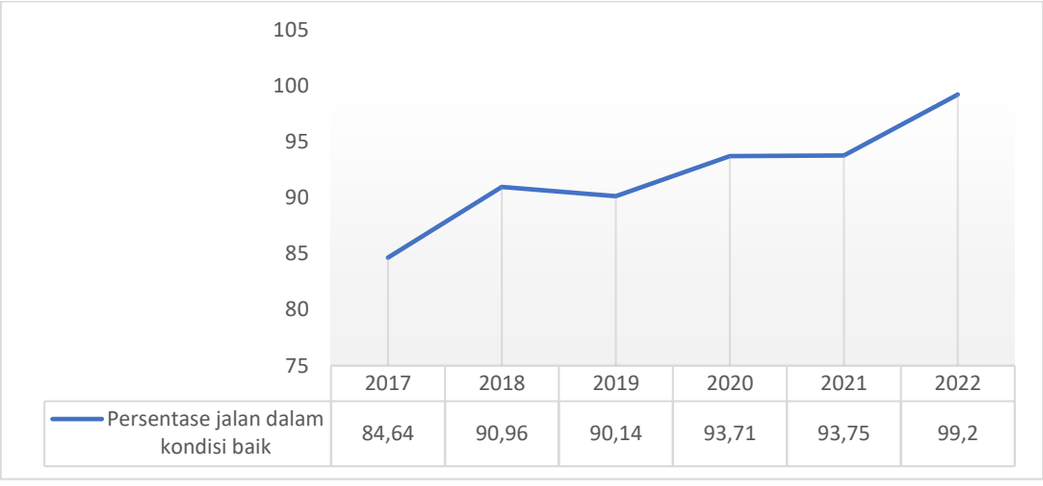
Pencapaian target 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan di Kota Salatiga, pada tahun 2022 telah ada 7 (tujuh) indikator yang telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sedangkan capaian yang terendah adalah cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang hanya mencapai 93,08 % (Tuntas Utama). Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Posbindu / deteksi dini Penyakit Tidak Menular. Oleh karena itu IP SPM Bidang Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2022 berkategori **Tuntas Utama**.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan sasaran strategis meningkatkan kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi serta meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tahun 2022 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 99,20% dari total jalan berdasarkan SK Jalan tahun 2017 sepanjang 337,471 km yang berada dalam kondisi baik/mantap sepanjang 334,771 km. Sehingga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun RPJMD adalah 101,48% yang di dukung oleh pelaksanaan lelang yang tertib dan juga terbukanya komunikasi antara dinas dengan masyarakat

sehingga kerusakan dapat segera di tangani dengan cepat. Perkembangan kondisi jalan dalam kondisi baik mengalami tren meningkat kurun waktu 2017-2022.

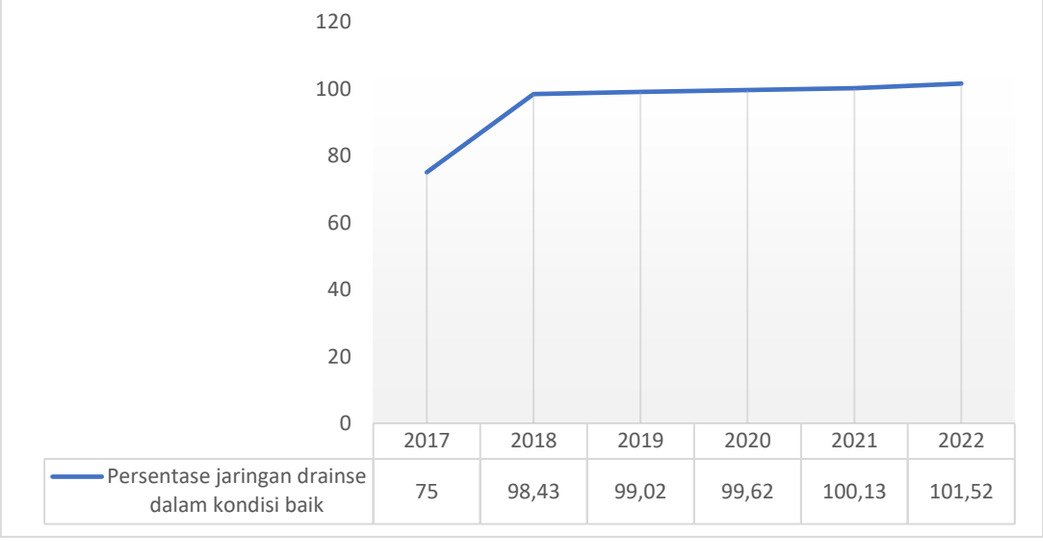
Grafik 2. 40. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Jaringan drainase dalam kondisi baik di Kota Salatiga mengalami perkembangan dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2022 terbangun sepanjang 5.304,84 m sehingga panjang saluran dalam kondisi baik bertambah menjadi 387.526,51 m dengan persentase sebesar 101,52% dari total panjang saluran yang menjadi target pembangunan sepanjang 381.719,59 m.

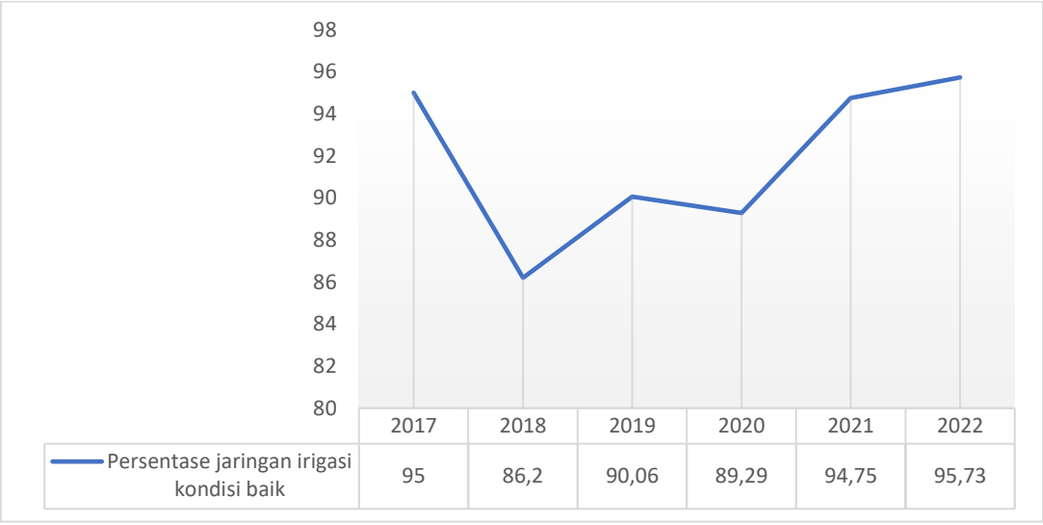
Grafik 2. 41. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Jaringan irigasi dalam kondisi baik Kota Salatiga Tahun 2021 mencapai 94,75% atau sepanjang 22.490,6 m dari total panjang irigasi 23.735 m. Pada tahun 2022 panjang jaringan tidak bertambah, tetapi pembangunan jalan inspeksi irigasi Tegalsari sepanjang 231,7 m sehingga panjang jarinan irigasi kondisi baik menjadi 22.722,3 m. Dari data tersebut maka capaian Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 adalah 95,73%. Jalan inspeksi adalah jalan yang di gunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Grafik 2. 42. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2022

SPM urusan Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten/kota mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi SPM tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 22. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	92	131,82	99,09
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	100	100	82,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Pencapaian Indikator Standar Minimal Bidang Pekerjaan Umum berupa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpurusan pekeipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota dan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPAL.

Permasalahan yang dihadapi bidang pekerjaan Umum pada Pencapaian SPM antara lain:

a. Kondisi eksisting yang ekstrim untuk lokasi daerah tertentu yang padat penduduk;
b. Terdapat kondisi tanah yang sulit dilakukan pengeboran sehingga memerlukan titik pengeboran yang baru;
c. Masyarakat yang belum paham mengenai sanitasi.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari berada pada kategori Tuntas Utama, sedangkan pada jenis pelayanan dasar berkategori Tuntas Madya, sehingga IP SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2022 dikategorikan **Tuntas Utama**.

Tabel 2. 23. SPM Pelayanan Dasar Air Minum

No.	Air Minum	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Air Minum Layak	85,00	86,00	86,30	75,05	95,00
2.	Persentase Air Minum Jaringan Perpipaan	85,00	86,00	86,30	75,05	95,00
3.	Persentase Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	15,00	14,00	13,70	24,95	2,98
4.	Persentase Air Minum Aman	69,32	66,27	69,29	73,85	77,08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Tabel 2. 24. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

No.	Air Minum	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Air Limbah Domestik Layak	90,37	93,97	94,71	93,75	94,37

No.	Air Minum	2018	2019	2020	2021	2022
2.	Persentase Air Limbah Domestik Belum Layak	9,63	6,03	5,29	6,25	5,63
3.	Persentase Air Limbah Domestik Aman	4,72	5,06	7,10	7,75	8,37

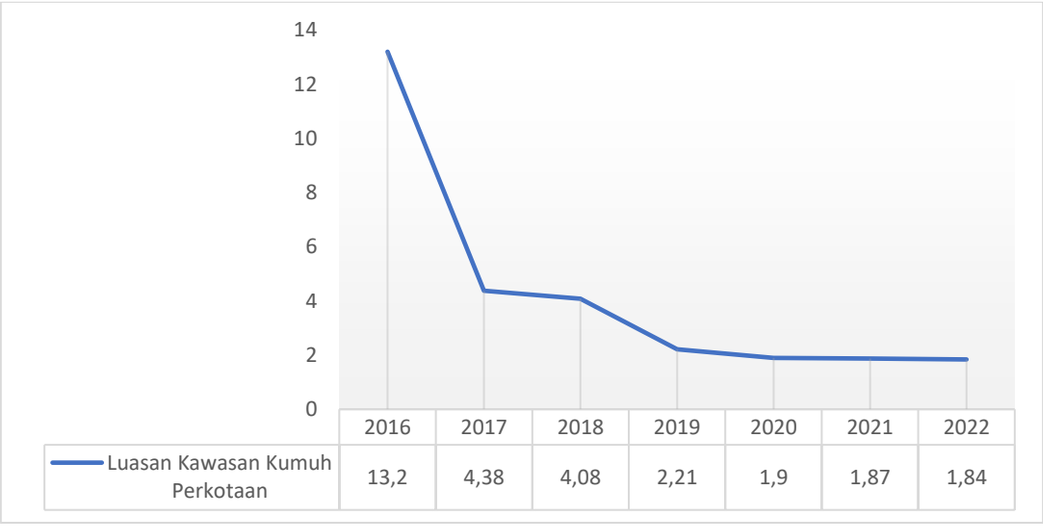
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu isu yang masih berkembang saat ini adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang adalah 253,66 Ha. Pada tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang tertangani bertambah 2,02 Ha mencapai 149,19 Ha. Sehingga luasan kawasan kumuh Salatiga menjadi 104,47 Ha atau 1,9% dari total luas Kota Salatiga yang baru yaitu 5.498 Ha, jika menggunakan luas wilayah Kota Salatiga yang lama 5.678 Ha prosentase Luasan Kumuh menjadi 1,84%.

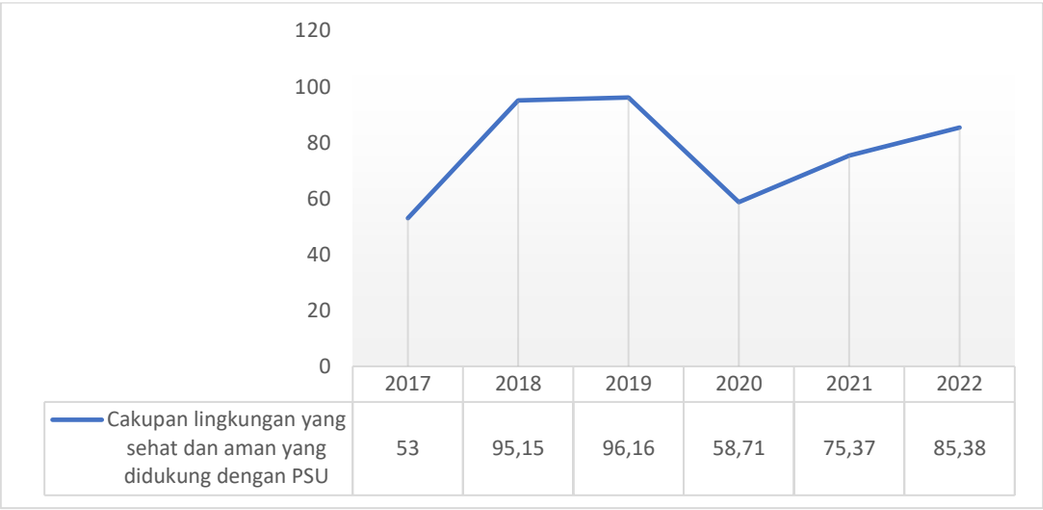
Grafik 2. 43. Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2022 ditargetkan 80,00% mencapai realisasi 85,38%. Persentase ini dicapai dari luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dalam kondisi baik di Kota Salatiga seluas 52.868,26 m² dari total luasan PSU perumahan seluas 61.923,36 m². capaian tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 75,37%, hal ini dikarenakan adanya program kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas PSU serta memelihara PSU dalam keadaan baik sehingga jumlah perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Salatiga, sehingga jumlah total luasan PSU bertambah.

Grafik 2. 44. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2022

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang ditargetkan 93,62% terealisasi 91,95%, dengan capaian kinerja sebesar 98,22%. Realisasi capaian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 93,62% dengan status Akan Tercapai. Data dasar jumlah rumah layak huni pada tahun awal RPJMD 2017 – 2022 adalah sebanyak 37.873 rumah. Sejak ditetapkannya RPJMD 2017 – 2022, yaitu pada tahun 2017, realisasi peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 1.667 unit, dengan rincian penambahan sebagai berikut :

a. Tahun 2017 sebanyak 411 unit;
b. Tahun 2018 sebanyak 58 unit;

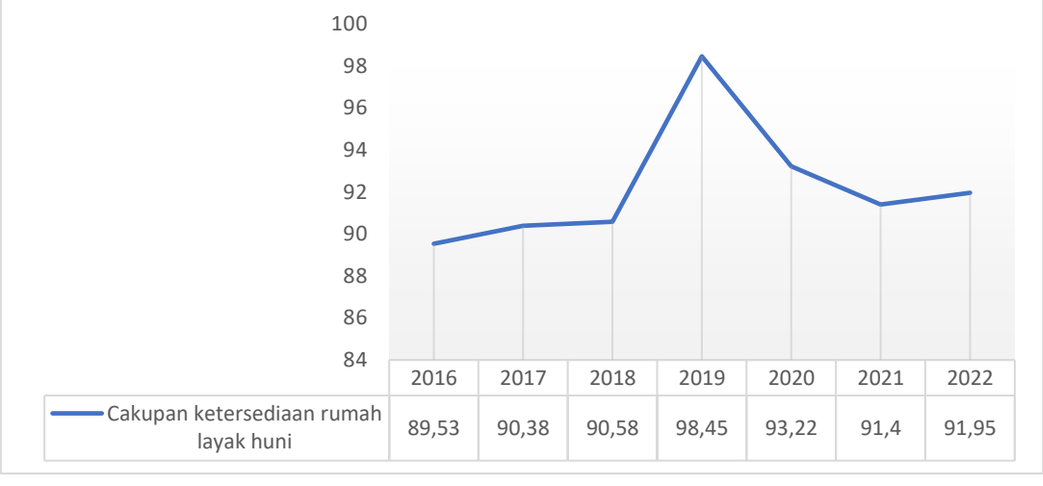
c. Tahun 2019 sebanyak 421 unit;
d. Tahun 2020 sebanyak 340 unit;
e. Tahun 2021 sebanyak 226 unit; dan
f. Tahun 2022 sebanyak 211 unit

Realisasi penambahan tersebut berasal dari pembiayaan APBD sejumlah 870 unit, DAK sejumlah 455 unit, BSPS sejumlah 333 unit, dan dari Baznas sejumlah 9 unit.

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2022 jumlah rumah layak huni di Kota Salatiga menjadi sebanyak 41.302 rumah, yang berasal dari jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2021 sebanyak 40.667 rumah ditambah peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.667 unit, dan dari hasil pendataan pembangunan baru rumah swadaya dan komersil sebanyak 424 unit.

Adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 91,95%, diperoleh dari jumlah rumah layak huni tahun 2022 sebanyak 41.302 rumah dibagi jumlah seluruh rumah di Kota Salatiga sebanyak 44.915 rumah dikalikan 100%. Realisasi capaian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 98,21% dengan status Akan Tercapai.

Grafik 2. 45. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89,53	90,38	90,58	98,45	93,22	91,4	91,95

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2022

Indikator SPM Bidang Perumahan rakyat berupa Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni untuk Kota

Salatiga sampai saat ini masih belum terdata secara lengkap. Hal ini dikarenakan masih belum adanya inventarisasi obyek penerima layanan SPM bidang Perumahan Rakyat, Data Program Pemerintah yang berkaitan dengan relokasi penduduk serta integrasi informasi kebencanaan Kota Salatiga.

Walaupun capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2021 belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi kegiatan, tetapi program-program pendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa pengalokasian anggaran untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau serta Penyediaan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU. Pada tahun 2021, realisasi capaian indikator program kegiatan yang mendukung indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 99,52%.

Tabel 2. 25. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022
1.	Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	0	0	100
2.	Penyediaan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU	0	0	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Pada Tahun 2022 di Kota Salatiga tidak terdapat bencana, sehingga Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2022 yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar dikategorikan **Pencatatan Saja**.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah di Kota Salatiga ditunjang dengan petugas

Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Rasio Linmas dibanding penduduk kota salatiga yaitu 62 orang Linmas per 10.000 penduduk. Perkembangan rasio pertugas Linmas dalam kurun waktu 2017-2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

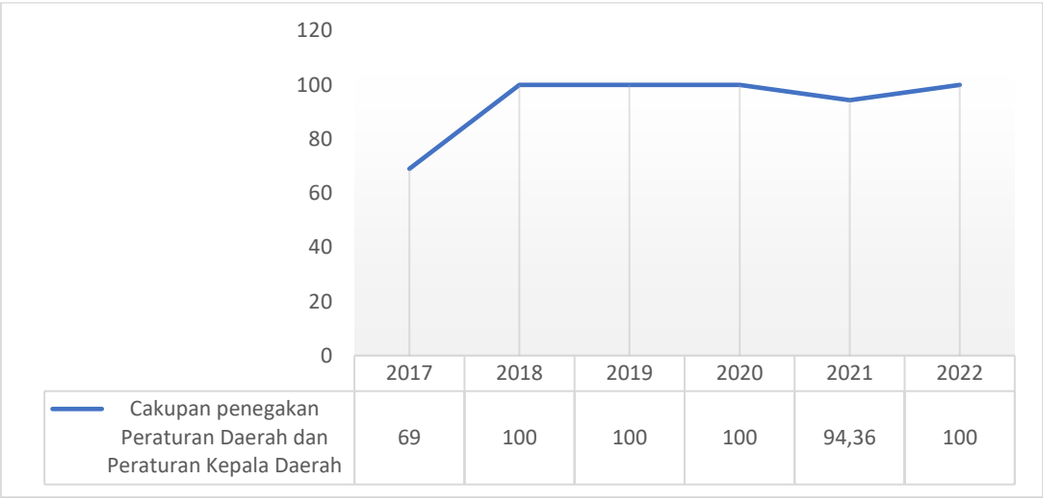
Tabel 2. 26. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jml linmas	1100	1097	1273	1.298	1.264	1258
Jml Penduduk	192.078	194.611	195.563	196.082	196.440	200.220
Rasio 1 : x	175	177	154	151	155	159
rasio per 10.000	57	56	65	66	64	62

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2023

Kondusifitas wilayah tergambar dari penegakan PERDA di Kota Salatiga relatif stabil dalam kurun waktu 2017-2022. Cakupan penegakan perda pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 100% dari 94,36% pada tahun 2021. Dengan penyelesaian sejumlah 31 kasus dari 85 kasus pelanggaran PERDA dan PERKADA sedangkan yang lainnya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi.apip

Grafik 2. 46. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2023

Tabel 2. 27. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan BPBD, 2023

Seluruh Indeks Penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan 2022 telah mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Walaupun demikian, jika dilihat dari permasalahan masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dari Satpol PP dan BPBD dalam pencapaian SPM tahun 2022 diantaranya:

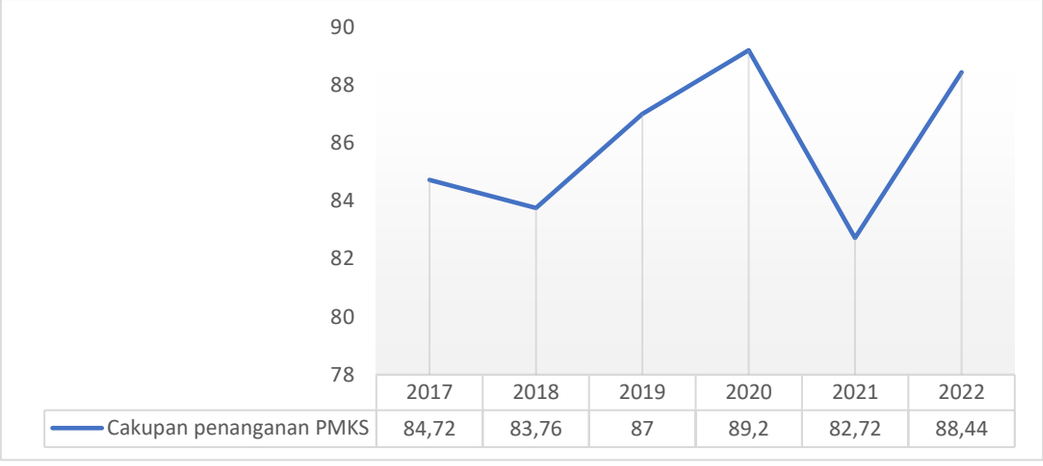
a. Masih adanya SDM Non PNS Pemadam Kebakaran yang belum bersertifikat ;
b. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana bagi Petugas Damkar dalam melaksanakan Pemadaman Kebakaran dan Penyelematan;
c. Kurangnya pemahaman/pengetahuan personil Satpol PP dalam penegakan perda/perkada;
d. Kurangnya jumlah personil saat operasi non yustisial;
e. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga pengamanan pada waktu terjadi kebakaran;
f. Banyaknya Jalan dan Gapura di daerah/ perkampungan yang sempit sehingga menyulitkan Mobil Pemadam masuk di Lokasi Kebakaran;
g. Kurangnya koordinasi antar opd terhadap adanya permasalahan pelanggaran perda perkada di masyarakat.

Selanjutnya perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan barang dan jasa dan juga koordinasi yang baik standar pelayanan minimal bidang Trantibunlinmas, agar kualitas SPM menjadi lebih baik.

f. Urusan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Salatiga dilaksanakan dengan pembinaan dan pemberian bantuan hukum. Pada Tahun 2022 PMKS yang menerima penanganan sebanyak 6.662 dari total PMKS di Kota Salatiga sebanyak 7.533 PMKS, sehingga cakupan penanganan PMKS sebesar 88,44%. Pada tahun 2021 kinerjanya sebesar 82,72% sehingga terjadi kenaikan sebesar 5,72% namun sudah melebihi dari target RPJMD sebesar 21%, adanya perubahan capaian yang signifikan karena jumlah PMKS (seseorang maupun keluarga) yang berubah setiap saat, sehingga perlu diadakan pendataan berkala agar hasilnya benar-benar akurat.

Grafik 2. 47. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

Standar pelayanan minimal urusan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan PP 2 Tahun 2018 terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial ada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi SPM tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 28. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	100	100	98,73
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	100	70	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	100	100	99,72
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Ada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana diamanahkan pada Permendagri 59 tahun 2021 untuk Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 untuk semua jenis pelayanan telah berada pada Kategori Tuntas Paripurna, sehingga IP SPM Bidang Sosial di Kota Salatiga dikategorikan **Tuntas Paripurna**.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan target tersebut adalah masih adanya kesulitan untuk memperoleh data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar di luar panti serta kurangnya anggaran dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan. Dan juga kesulitan mencari tempat rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Periode berikutnya lebih ditekankan pada pemenuhan Indikator SPM yang harus dipenuhi dan perlu dilaksanakan penghitungan barang dan jasa pendukung pelaksanan SPM Bidang Sosial yang lebih sistematis dan terintegrasi.

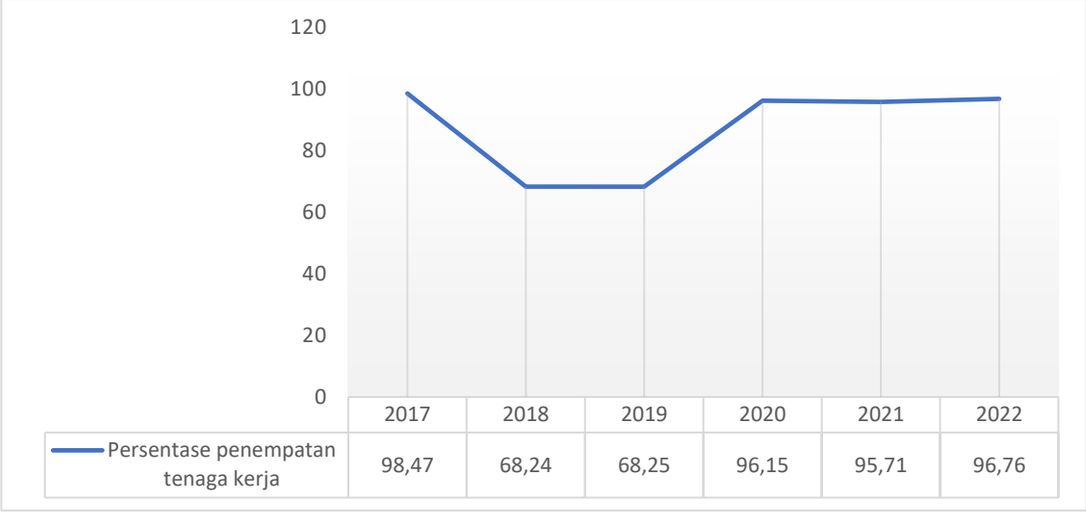
2.1.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Gambaran aspek pelayanan umum pada fokus urusan wajib non pelayanan dasar terlihat pada capaian indikator kinerja masing-masing urusan sebagai berikut:

a. *Tenaga kerja*

Persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2022 mencapai 96,76% yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 mencapai 95,71%. Hal ini di dukung oleh pemulihan ekonomi yang di tandai oleh penyerapan tenaga kerja sudah mulai meningkat setelah pandemi COVID 19 yang terjadi di Kota Salatiga khususnya dan juga mempunyai program Job Fair yang menjadi tempat untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja.

Grafik 2. 48. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penempatan tenaga kerja	98,47	68,24	68,25	96,15	95,71	96,76

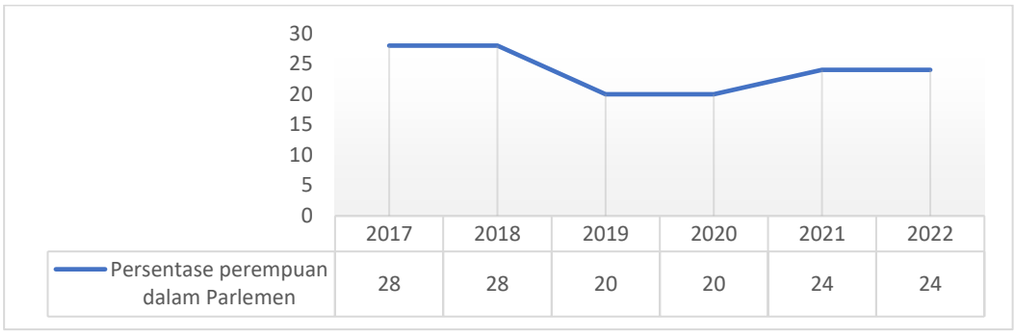
Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2022 jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kota Salatiga sebanyak 19.830 jiwa, sedangkan total jumlah penduduk 200.220 jiwa, sehingga rasio penduduk S1/S2/S3 yaitu 1:10.

b. *Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak*

Pada tahun 2022 persentase perempuan dalam parlemen di Kota Salatiga sebanyak 24% atau sebanyak 6 orang perempuan dari 25 orang jumlah keseluruhan Anggota DPRD Salatiga hasil Pemilu 2019 dengan satu tambahan Pengganti Antar Waktu pada Akhir tahun 2021. Capaian tahun 2022 ini tetap sama seperti capaian tahun 2021.

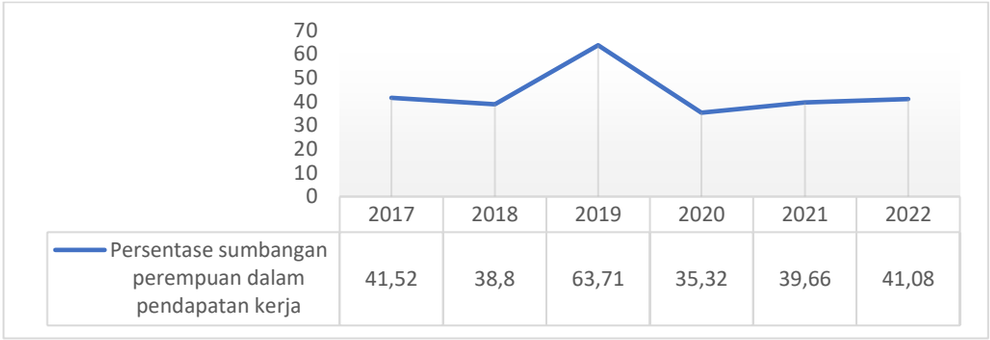
Grafik 2. 49. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Sedangkan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebesar pada tahun 2022 mencapai 41,08% mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 39,66%, hal ini merupakan keadaan yang membaik setelah dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan kerja keseluruhan. Dan juga semakin mudahnya akses bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Grafik 2. 50. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

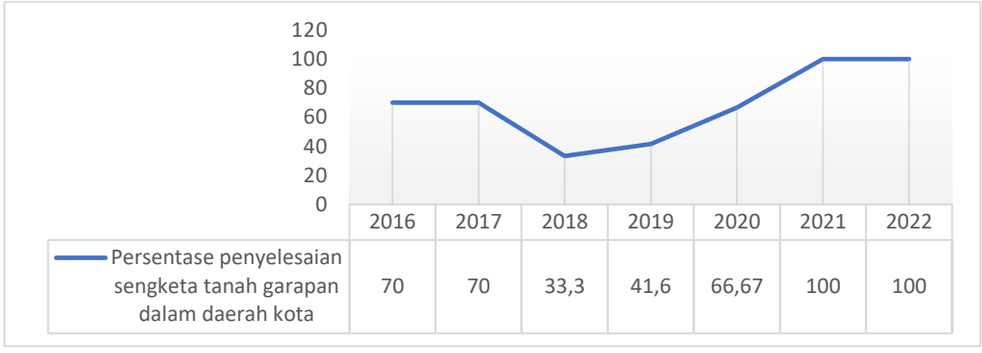
Pada tahun 2022 masih terdapat banyak kasus kekerasan, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 22 kasus sedangkan kasus

kekerasan pada perempuan sebanyak 23 kasus. Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 kasuk kekerasan pada anak sebanyak 17 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 11 kasus. Melihat dari kenaikan kasus kekerasan setiap tahunnya menunjukan bahwa kasus kekerasan menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa korban kekerasan sudah mulai berani untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya, terlebih dengan kemajuan teknologi maka kasus pengaduan kekerasan bisa dilakukan secara online.

c. *Pertanahan*

Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota Salatiga yang ditargetkan 90% terealisasi 100%. Tahun 2022 kegiatan penyelesaian sengketa tanah adalah penyelesaian permasalahan kesalahan berkas dalam dokumen pengadaan tanah jalan tol Solo – Semarang di wilayah Kelurahan Kutowinangun Lor. Hal tersebut berkaitan dengan dua permohonan warga untuk penerbitan Kutipan C tanah sawah di persil 32a kelas tanah III yang secara faktual sebagian terkena proyek pengadaan tanah jalan tol pada tahun 2013, setelah dikaji dengan dokumen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Semarang dari Bagian Pemerintahan Sekda terdapat ketidaksesuaian antara Kutipan C dalam dokumen Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Semarang dengan tanah sewa persil 32a pada kedua permohonan tersebut di atas. Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan target akhir RPJMD sebesar 100% hal tersebut menunjukan bahwa realisasi kinerja mencapai target akhir RPJMD.

Grafik 2. 51. Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

d. *Lingkungan Hidup*

Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kota salatiga pada tahun 2022 yaitu 61,34 meningkat 2,69 poin apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 namun belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 63,66. Hal tersebut terjadi karena:

a. Tidak tercapainya target IKL, IKA dan IKU sebagai dasar perhitungan IKLH, menyebabkan nilai IKLH juga tidak dapat mencapai target;
b. Kurangnya RTH secara kuantitas dan kualitas;
c. Tidak proporsionalnya antara pertumbuhan kegiatan/usaha penghasil polusi udara/emisi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, serta masih adanya penghasil emisi yang belum memenuhi standar pengelolaan dan pengolahan emisi secara baik dan benar;
d. Peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang menghasilkan sampah/limbah cair, dan terdapatnya penghasil sampah/limbah cair yang belum mengelola dan mengolah sampah/limbah cairnya dengan baik dan benar.

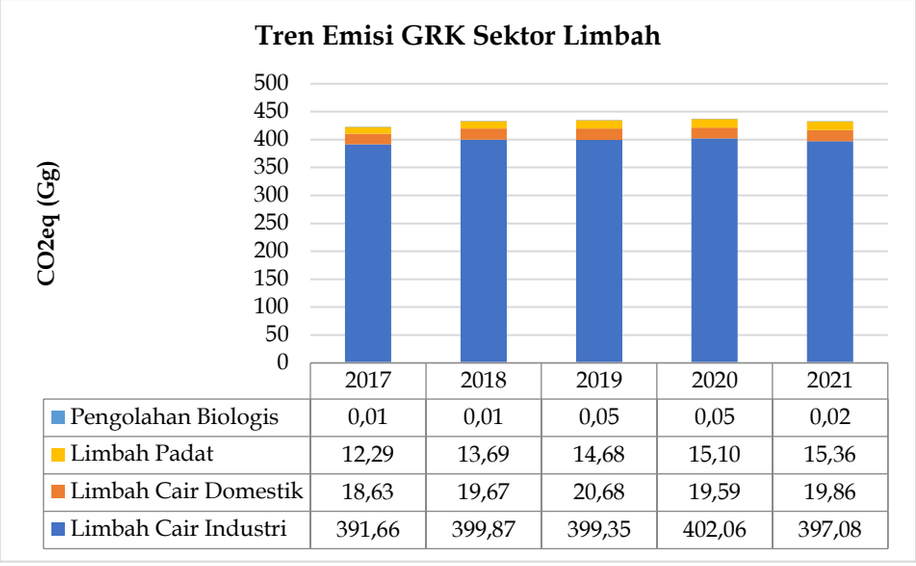
Tabel 2. 29. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup

No	Indikator	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Indeks pencemaran air	Nilai	43,33	43,33	43,54	44,29	42,50	45,00
2)	Indeks pencemaran udara	Nilai	66,75	76,87	76,98	79,41	79,82	84,11
3)	Indeks tutupan lahan	Nilai	59,38	59,46	59,62	59,43	47,21	47,28
4)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	56,78	59,84	60,05	60,88	58,65	61,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Berikut ini merupakan besaran tren emisi Gas Rumah Kaca pada setiap sektor di Kota Salatiga :

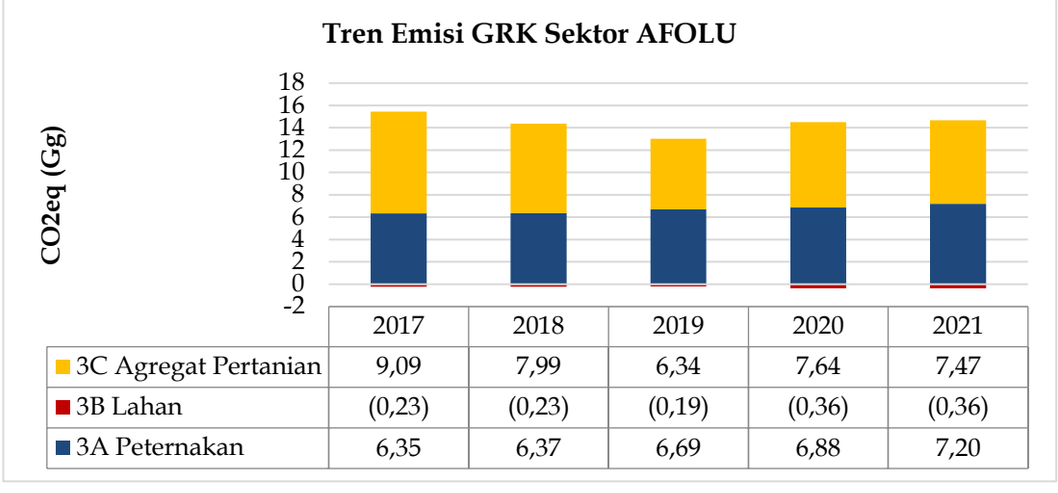
Grafik 2. 52. Tren Emisi GRK Sektor Limbah



	2017	2018	2019	2020	2021
Pengolahan Biologis	0,01	0,01	0,05	0,05	0,02
Limbah Padat	12,29	13,69	14,68	15,10	15,36
Limbah Cair Domestik	18,63	19,67	20,68	19,59	19,86
Limbah Cair Industri	391,66	399,87	399,35	402,06	397,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

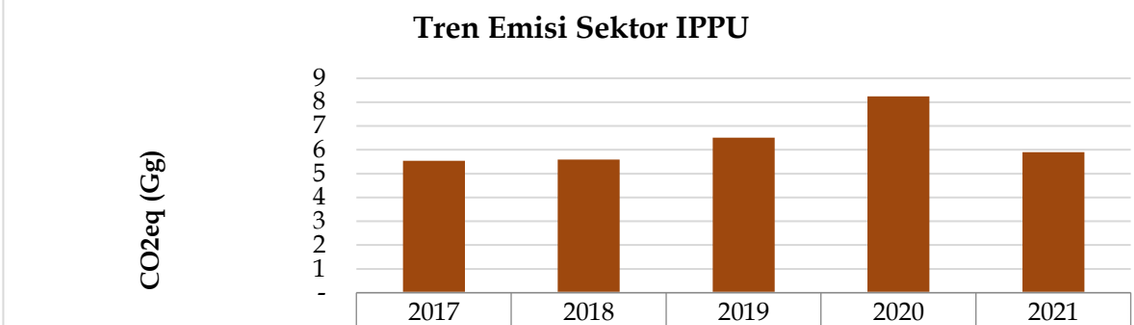
Grafik 2. 53. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU



	2017	2018	2019	2020	2021
3C Agregat Pertanian	9,09	7,99	6,34	7,64	7,47
3B Lahan	(0,23)	(0,23)	(0,19)	(0,36)	(0,36)
3A Peternakan	6,35	6,37	6,69	6,88	7,20

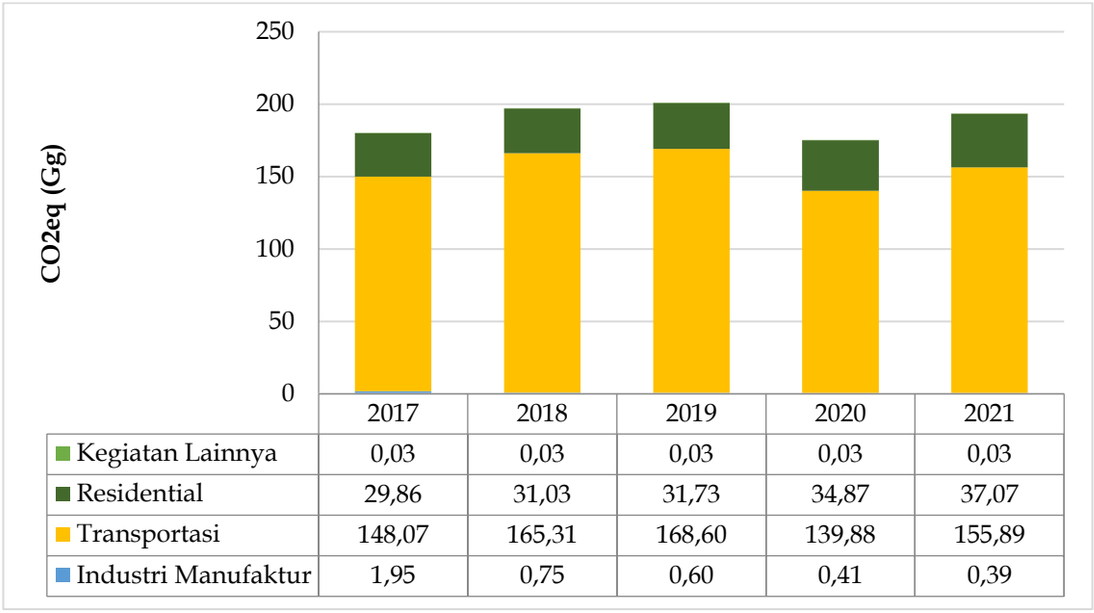
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Grafik 2. 54. Tren Emisi GRK Sektor IPPU



	2017	2018	2019	2020	2021
Penggunaan BPO					
Industri Elektronik					
Produk Non Energi dan Pelarut	5,54	5,59	6,51	8,24	5,90
Industri Logam					
Industri Kimia					
Industri Mineral					

Grafik 2. 55. Tren Emisi GRK Sektor Limbah



	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan Lainnya	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Residential	29,86	31,03	31,73	34,87	37,07
Transportasi	148,07	165,31	168,60	139,88	155,89
Industri Manufaktur	1,95	0,75	0,60	0,41	0,39

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

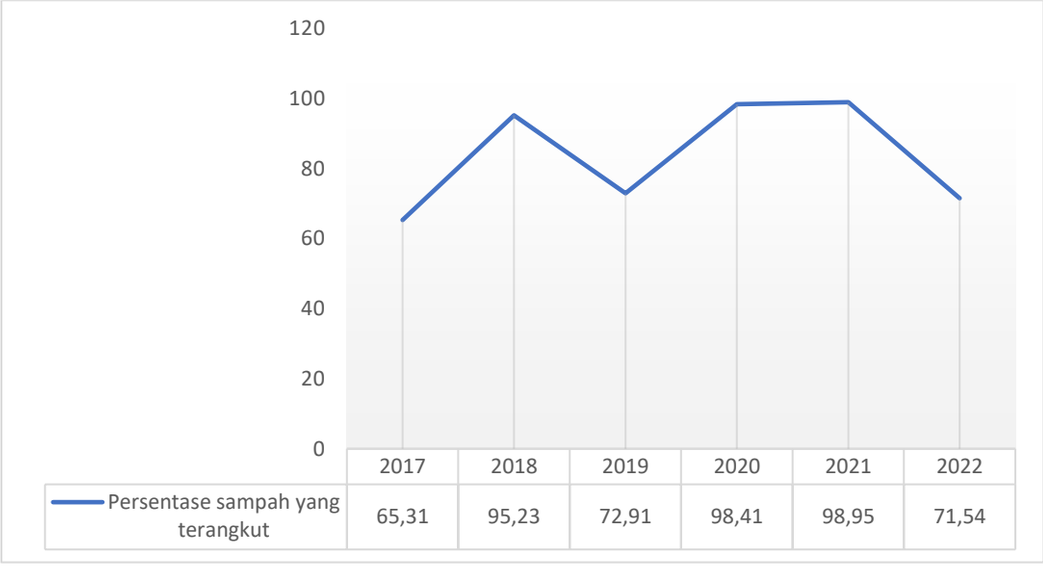
Ketersediaan RTH di Kota Salatiga pada tahun 2022 baru tersedia 16,31% dengan perhitungan luas RTH 896,81 ha dibandingkan dengan luas Kota Salatiga 5.498,55 ha, hal tersebut meningkat dari capaian 2021 dengan 15,00% namun berkurang drastis dari capaian 2020 yaitu 27,70%. Dalam pengelolaan persampahan di Kota Salatiga volume sampah yang terangkut pada tahun 2022 mencapai 321,16 m^3 per hari atau 71,54% dari total volume sampah per hari 448,9 m^3. Prosentase sampah yang terangkut menurun capaianya dikarenakan sampah sudah terpilah dan terolah di TPS3R Bulu Tegalrejo yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas serta menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Tabel 2. 30. Persentase Sampah yang Terangkut

Tahun	VOLUME (M^3/HARI)	TERANGKUT (M^3/HARI)	Persentase sampah yang terangkut (%)
2017	528.21	345	65,31
2018	382.22	364	95,23
2019	342.18	249.51	72,91
2020	349.95	344.42	98,41
2021	387.05	383	98.95
2022	448.9	321.16	71,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Grafik 2. 56. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Tabel 2. 31. Data Pengelolaan Sampah Kota Salatiga

No	Uraian	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
1.	Timbunan Sampah	40.556		41.284		41.620		40.969		41.668	
2.	Pengurangan Sampah	6.653	16,4	7.311	17,71	7.393	17,76	7.274	17,76	7.877	18,9
3.	Penanganan Sampah	14.947	36,85	30.007	72,68	29.441	70,74	29.510	72,03	32.307	77,53
4.	Pengelolaan Sampah	21.599	53,26	37.317	90,39	36.835	88,5	36.784	89,78	40.184	96,44
5.	Sampah tidak terkelola	18.956	46,74	3.966	9,61	4.785	11,5	4.185	10,22	1.484	3,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

e. *Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Persentase cakupan akta kelahiran pada tahun 2022 yaitu 99,07% meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 98,67%. Peraturan terkait adminduk yang lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan DUKCAPIL. Sedangkan penduduk ber KTP elektronik tahun 2022 sebesar 95,53%, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 95,53%, hal ini di karenakan perekaman KTP elektronik pemula di sekolah sudah mulai dilaksanakan dan juga pelayanan tatap muka di buka kembali setalah pandemi COVID 19.

Tabel 2. 32. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Persentase cakupan akta kelahiran	%	93,55	91,92	92,76	98,51	98,67	99,07
2)	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	90,00	93,88	95,35	97,56	95,53	96,26

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

Banyaknya pelayanan permohonan Akta-Akta dapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 2. 33. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga				
Tahun	**Kelahiran**	**Kematian**	**Perkawinan**	**Perceraian**
2017	3.363	1.466	239	35
2018	3.506	1.522	306	37
2019	3.982	1.682	258	49
2020	3.286	1.531	257	63
2021	3.650	2.503	290	46
2022	3.207	1.790	246	40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

f. *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Persentase swadaya masyarakat 2022 meningkat sebesar 1,56 % yang berupa pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan yang bersumber dari dana swadaya masyarakat. Peningkatan tersebut berasal dari perhitungan antara dana swadaya masyarakat sebesar 12.000.000 dibagi seluruh anggaran Progr am Pemberdayaan Masyarakat sebesar 769.789.000.

Adapun capaian kinerja selama periode 2018-2022 adalah sebagai berikut :

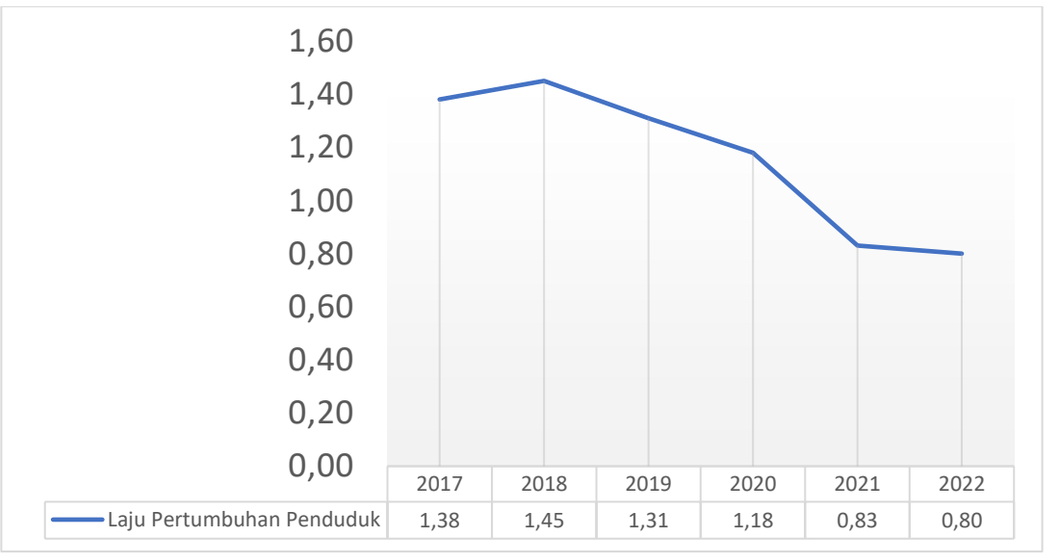
1) Tahun 2018 target 2% realisasi 2% capaian 100%
2) Tahun 2019 target 2% realisasi 2% capaian 100%

3) Tahun 2020 target 2% realisasi 0% capaian 0%, karena kegiatan keswadayan Masyarakat terpengaruh dampak pandemic *Covid-19*
4) Tahun 2021 target 2% realisasi 0% capaian 0%, karena kegiatan keswadayan Masyarakat masih terpengaruh dampak pandemic *Covid-19*
5) Tahun 2022 target 2% realisasi 1,56 % capaian 78%.

g. *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 yaitu 0,80% yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,83%. Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain Kelahiran (natalitas), Kematian (mortalitas), Perpindahan (migrasi). Pemerintah Kota Salatiga hanya bisa menjalankan pada pengaturan jumlah kelahiran melalui program KB dan pelayanan KB. Pada tahun 2021 sebanyak 2.355 pelayanan KB Baru sedangkan tahun 2022 menurun sebesar 75,16% dengan angka capaian absolut sebanyak 585. Sehingga pada tahun 2022 capaian peserta KB Baru hanya mencapai 1770. Meski demikian, laju pertumbuhan penduduk mengalami tren menurun dalam kurun waktu 2017-2022. Gambaran perkembangan laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Grafik 2. 57. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2022

Total Feritility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR Kota Salatiga tahun 2022 yaitu 1,84% artinya bahwa wanita usia subur (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa usia suburnya. Perkembangan TFR Salatiga dalam kurun waktu 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 34. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	TFR (Total Fertility Rate)	%	n-a	2,06	1,75	1,55	1,90	1,84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Rasio akseptor KB yaitu perbandingan jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur. Pada tahun 2022 jumlah akseptor KB sebanyak 20.757 dan jumlah PUS sebanyak 24.729 sehingga rasio akseptor KB 64,65%. Rasio ini menurun dibanding tahun 2021 yaitu 87,61%, hal ini terjadi karena terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu :

1. Penggunaan aplikasi baru NewSIGA masih membutuhkan beberapa waktu untuk adaptasi oleh pelaksana dan pengguna (Faskes KB khususnya Jejaring/PMB);
2. Model pencatatan dan pendataan pelayanan peserta KB yang menggunakan metode *by name by address* menjadikan pelayanan yang dilaksanakan membutuhkan data kesertaan yang lebih lengkap;
3. Metode pencatatan menggunakan NewSIGA memerlukan waktu dan tenaga lebih dikarenakan banyak variabel yang harus diisikan pada aplikasi tersebut, sehingga perlu perhatian dan upaya lebih bagi Jejaring (PMB).

h. *Perhubungan*

Kota Salatiga memiliki 2 terminal yaitu 1 terminal tipe A Tingkir yang menjadi kewenangan pusat, dan 1 terminal angkot dalam kota Tamansari. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Salatiga adalah membandingkan panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Panjang jalan Kota Salatiga yaitu 337,471 km dan jumlah kendaraan pada tahun 2022 sebanyak 93.924. jadi rasio panjang jalan adalah 27,83%.

Tabel 2. 35. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	%	75,00	80,00	82,13	62,00	81,54	60,11

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Penurunan capaian indikator Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dari 81,54% pada tahun 2021 menjadi 60,11% pada tahun 2022 di sebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk tertib pengujian dan kendaraan tidak ODOL (Over Dimension Over Loading) yaitu Dimensi kendaraan dan muatan kendaraan melebihi ketentuan, karena hal tersebut berbahaya karena menganggu kinerja kendaraan. Serta belum efisien karena alat uji yang digunakan sudah berumur 18 tahun sehingga kinerjanya kurang optimal dan perlu direncanakan peremajaan peralatan.

i. *Komunikasi dan Informatika*

Tingkat ketersediaan media informasi publik pada tahun 2022 dengan nilai 97,73. Capaian ini meningkat dari tahun 2021 yaitu 93,86. Sedangkan tingkat pengembangan layanan e-government dan smart city pada tahun 2022 yaitu 87, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 85. Hal ini di dukung oleh sudah mulainya perintisan Single Sign On (SSO) di beberapa aplikasi.

Tabel 2. 36. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Tingkat ketersediaan media informasi publik	Skor	15,91	50,00	80,00	93,18	93,86	97,73
2)	Tingkat pengembangan layanan e-*Government* dan *smart city*	Skor	26,00	60,00	70,00	83,00	85,00	87,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

j. *Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

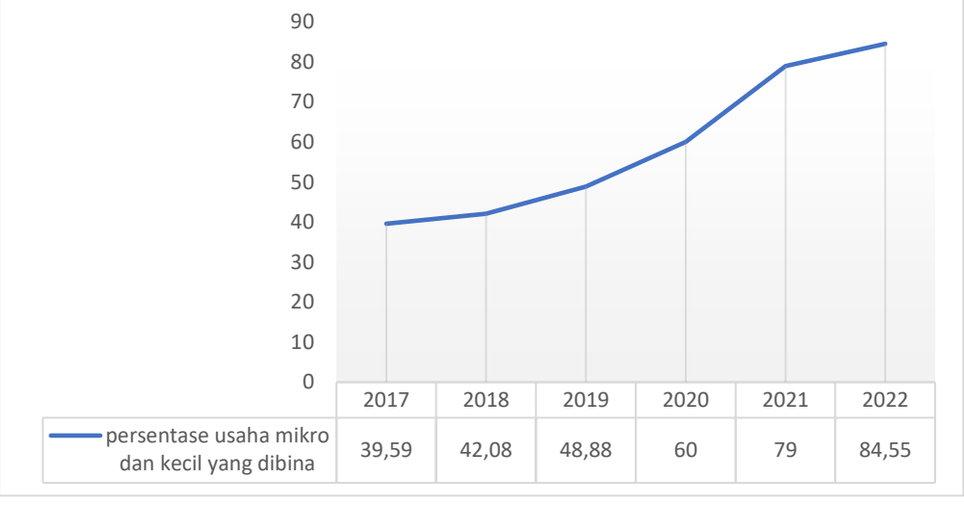
Pengembangan sektor usaha mikro dan kecil mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah melakukan pembinaan baik dengan memberikan bantuan modal ataupun dengan memberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2022 persentase usaha mikro dan kecil yang dibina sebesar 84,55% meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 79%. Hitungan ini berasal dari banyaknya UMKM yang dibina sebanyak 19.416 UKM dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang terdata di Dinas Koperasi UKM sebanyak 22.965 UKM.

Prosentase usaha mikro dan kecil ini meningkat di dukung oleh keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang cepat, responsif dan akuntabel melalui media sosial dan media online serta animo pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang tinggi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM, fasilitasi aplikasi pintar umkm, broadcast dan konsultasi baik melalui tatap muka maupun melalui media online.

Capaian Kinerja ditahun 2022 adalah:

1. Fasilitasi sertifikasi halal bagi 41 produk UMKM
2. Fasilitasi badan hukum kelompok UMKM sebanyak 9 kelompok.
3. Tersusunnya profil UMKM sebanyak 1 dokumen
4. Terlaksananya keikutsertaan pameran sebanyak 2 kali
5. Terlaksananya bantuan sembako sebanyak 800 paket bagi 800 UMKM

Grafik 2. 58. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, Tahun 2023

Jumlah koperasi di Kota Salatiga tahun 2022 sebanyak 211 koperasi dengan jumlah total anggota sebanyak 84.507 orang, serta jumlah total modal aset sebanyak 351.178 milyar rupiah dan jumlah total SHU sebanyak 7,88 milyar rupiah. Persentase koperasi sehat di Kota Salatiga meningkat dari tahun 2021 sebanyak 6,14% menjadi 10,75% di tahun 2022.

Persentase KSP/USP koperasi sehat sebesar 10,75%. Hitungan ini berasal dari hasil penilaian kesehatan koperasi dengan hasil sehat sebanyak 10 koperasi dibandingkan dengan koperasi aktif yang berbadan hukum kota Salatiga sebanyak 93 koperasi. Capaian yang belum maksimal juga di sebakan oleh sulitnya menemui pengurus koperasi karena ada beberapa faktor (kesibukan pekerjaan pengurus). Ke depan Dinas Koperasi UKM akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk memperbaiki kinerja usaha koperasi di Salatiga.

k. *Penanaman Modal*

Nilai investasi penanaman modal asing pada tahun 2022 sebesar 289,110 milyar rupiah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1.221,011 milyar rupiah sehingga terjadi penurunan nilai investasi PMA sebesar 931,90 milyar rupiah. Sedangkan nilai investasi penanaman modal dalam negeri tahun 2022 mencapai 101,195 milyar rupiah, naik jika dibandingkan tahun 2021 mencapai 92,592 milyar rupiah dengan kenaikan nilai investasi sebesar 8,603 milyar rupiah. Dampak pandemi covid-19 menyebabkan penurunan nilai investasi tersebut karena adanya kebijakan lockdown di beberapa negara dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang berakibat pada banyaknya lapangan usaha yang mengalami kerugian dan penutupan. Disamping hal tersebut pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan daya tarik investasi. Perkembangan nilai investasi di Kota Salatiga sebagai berikut:

Tabel 2. 37. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Kenaikan nilai investasi PMA	Milyar Rupiah	245,24	71,00	970,18	333,12	887,89	(931,90)
2)	Kenaikan nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	153,67	163,80	654,45	183,33	92,592	8,603

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

l. *Kepemudaan dan olah raga*

Target akhir RPJMD adalah Kota Salatiga pada posisi 5 besar PORDA Jawa Tengah, sementara PORDA atau PORPROV dilaksanakan terakhir pada tahun 2018 dan baru akan diselenggarakan tahun 2023. Pada tahun 2022 posisi Kota Salatiga masih pada peringkat 6, jadi target dalam RPJMD masih belum tercapai pada tahun ini dengan tingkat kemajuan sebesar 80%.

Tabel 2. 38. Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Peringkat dalam PORDA	%	7	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023

Persentase pemuda berwirausaha pada tahun 2022 yaitu 3,29% mengalami penurunan dari tahun 2021 yang tercapai 3,29%. Penurunan wirausaha muda terjadi karena tidak ada pendataan yang valid terkait data jumlah pemuda berwirausaha, sedangkan jumlah pemuda terus mengalami pertumbuhan. Capaian 2,43% di peroleh dari perhitungan 1.053 pemuda berwirausaha dibagi 43.426 jumlah pemuda yang ada di Kota Salatiga. Penyebab penurunan kinerja pemuda berwirausaha diantaranya:

1. Kegiatan pelatihan kewirausahaan belum optimal dilaksanakan karena hanya sebatas pelatihan teori dan praktek dalam waktu yang singkat;
2. Tidak ada pendampingan yang berkelanjutan bagi peserta pelatihan kewirausahaan pemuda;
3. Tidak adanya monitoring dan evaluasi bagi pemuda yang telah selesai mengikuti pelatihan kewirausahaan sehingga tidak diketahui efektifitas dan dampak pelatihan kewirausahaan;
4. Tidak ada dukungan modal dan sarana untuk pemuda berwirausaha.

Perkembangan pemuda berwirausaha tersebut pada table berikut:

Tabel 2. 39. Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemuda berwirausaha	%	n-a	2,19	2,2	3,72	3,29	2,43

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023

Persentase atlet berprestasi pada tahun 2022 sebanyak 35,38% dengan prestasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 22,86%. Hal tersebut dikarenakan mengggunakan acuan Porda 2018 yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Jumlah atlet yang

berprestasi tahun 2018 sebanyak 115 atlet dan total atlet sebanyak 325 atlet. Perkembangan persentase atlet berprestasi dalam kurun waktu 2017-2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 40. Indikator Kinerja Daerah Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase atlet berprestasi	%	n-a	35,38	35,38	25,39	22,86	35,38

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2023

m. *Statistik dan Persandian*

Dalam menyediakan layanan data dan statistik, pemerintah Kota Salatiga memiliki system data yang terintegrasi dalam website yang memberikan informasi daerah kepada masyarakat. Adapun perkembangan persentase ketersediaan data statistik sektoral dan tingkat pengamanan informasi daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 41. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Persentase ketersediaan data statistik sectoral	%	n-a	100	100	81	84,29	100
1)	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	n-a	100	100	n-a	92,30	70,85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

n. *Kebudayaan*

Realisasi kinerja untuk cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 sebesar 129,55% naik pada tahun 2022 sebesar 190,17% yang artinya realisasi dan capaian kinerja untuk indikator cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan terus mengalami kenaikan. Hal tersebut mencerminkan pengembangan gelar seni budaya yang mengedapankan kearifan lokal dan pelaksanaan pembinaan dan pelestarian cagar budaya dan situs secara berkala melalui kerjasama dengan stakeholder dan instansi. Dan juga banyaknya potensi benda cagar budaya,

peninggalan sejarah, penggiat/pelaku budaya dan akademisi yang tinggi.

Tabel 2. 42. Indikator Kinerja Utama Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan	%	38,95	57,80	73,23	88,97	129,55	190,17

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2022

Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina pada tahun 2021 sebanyak 58,82% mengalami kenaikan menjadi 100% pada tahun 2022. Sedangkan persentase cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 14,18% pada tahun 2021 meningkat menjadi 22,86% pada tahun 2022. Perkembangan dua indikator urusan kebudayaan sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2. 43. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1)	Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina	%	n-a	75,37	64,43	37,34	58,82	100
2)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38.95	12,06	14	11,35	14,18	22,86

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

o. *Perpustakaan dan Kearsipan*

Jumlah perpustakaan di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 200 perpustakaan dengan jumlah pengunjung sebanyak 18.007 orang, menurun dari jumlah pengunjung pada tahun 2021 yaitu 35.870 orang yang disebabkan oleh perubahan waktu operasional pelayanan Perpusatakaan Daerah Kota Salatiga yaitu hari sabtu, minggu dan hari besar nasional menutup pelayanan.

Berikut data perkembangan jumlah pengunjung, anggota dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga dalam kurun waktu 2017-2022:

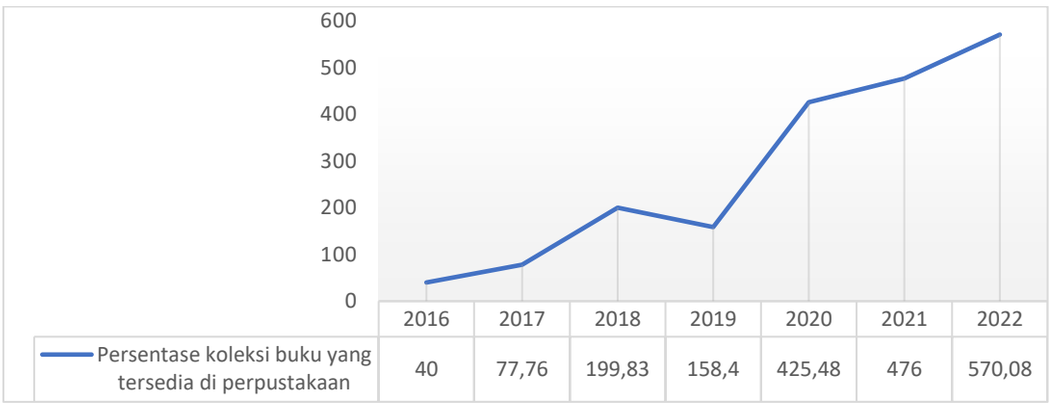
Tabel 2. 44. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Tahun	PENGUNJUNG	ANGGOTA	KOLEKSI BUKU	KOLEKSI NON BUKU / AV
2017	386.829	31.057	45.486	681
2018	381.050	34.178	53.276	681
2019	384.225	37.705	56.029	686
2020	75.098	38.276	60.643	686
2021	35.870	38.764	61.016	686
2022	18.007	39.667	64.692	686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

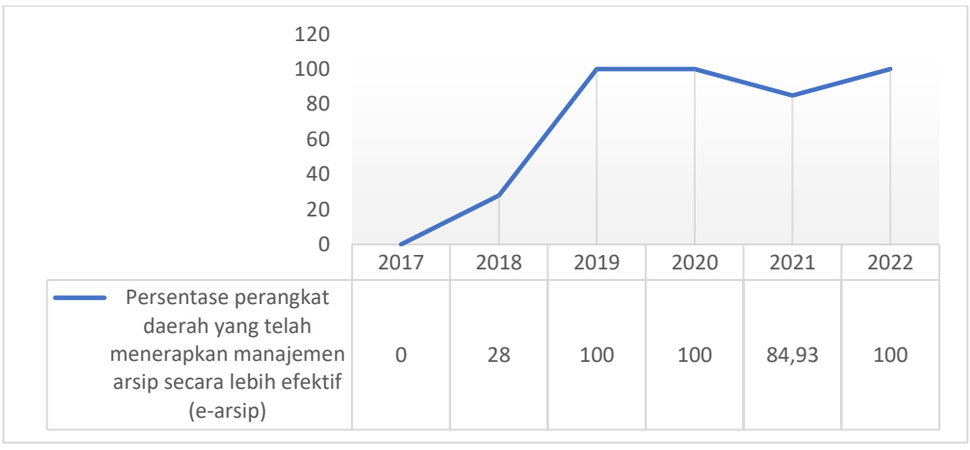
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2022 sebesar 570,08% atau sebanyak 64.692, meningkat dari tahun 2021 sebesar 476% atau sebanyak 61.016.

Grafik 2. 59. Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2022

Grafik 2. 60. Persentase Perangkat Daerah yang menerapakan e-arsip di Kota Salatiga Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan pilihan terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Capaian dari indikator kinerja daerah masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 2. 45. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2017- 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	**Kelautan dan Perikanan**							
1)	Produksi perikanan budidaya	ton	700	752,05	800,22	712,35	715,589	717,381
B.	**Pariwisata**							
1)	Jumlah kunjungan wisata	Orang	120.000	304.054	441.860	89.423	183.210	310.000
C.	**Pertanian**							
1)	Produktivitas tanaman pangan utama							
	- Padi	Ton/Ha	6,4	6,35	5,89	5,70	6,52	6,18
	- Jagung	Ton/Ha	5,1	4,75	4,38	4,40	5,82	7,40
2)	Produksi perikanan budidaya	ton	700	752,05	800,22	712,35	715,589	717,381
3)	Produksi daging sapi potong	kg	1.018.010	1.151.670	1.224.100	950.410	1.395.800	1.701.880
D.	**Perdagangan**							
1)	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,54	6,46	5,33	5,54	-3,76	4.05
E.	**Perindustrian**							
1)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	0,2	0,3	0,1	0	-0,22	0
F	**Transmigrasi**							
1)	Prosentase Peminat Transmigrasi	%	5,00	8	2	0	1	3

Sumber : DISPANGTAN, DISDAG dan DISPERINAKER, Tahun 2023

2.1.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Keuangan dan Kepegawaian.

Tabel 2. 46. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**							
1)	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	40	44,44	44,44	46,67	72,76	51,20
2)	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	40	25,21	52,94	90,62	73,33	80,00
3)	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	97,57	86,79	86,79	85,71	100	100
4)	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD	%	97,51	99,68	99,68	105,66	100	100
B.	**Keuangan**							
1)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses
C.	**Kepegawaian**							
2)	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	90,35	90,45	90,61	45,35	52,04	54,74

Sumber : BAPPEDA, BPKPD dan BKPSDM, Tahun 2023

2.1.3.5. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Pengawasan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Tabel 2. 47. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	**Pengawasan**							
1)	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	2,0	3,0	3	3	3	3
2)	Tingkat Maturitas SPIP	level	2,85	3,038	3,034	3	3	3
B.	**Sekretariat DPRD**							
1)	Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	85,00	100	100	100	88	100
C.	**Sekretariat Daerah**							
1)	Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)	%	68,33	84,01	81,49	83,23	84,61	84,95
D.	**Kecamatan**							
	Kecamatan Sidomukti							
1)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	70	89,6	90,34	71	84,96	90,14
2)	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
3)	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	59	62	65	64	0	0
4)	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	30	58	53,2	62	79,91	78,78

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5)	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	70	80,8	91	84	89,11	89,15
	Kecamatan Sidorejo							
1)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	60	82,11	88,92	93	93,51	91,97
2)	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan	%	60	91,35	92,16	99	100	100
3)	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	60	67,80	84	90	0	0
4)	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	50	23,91	28	35	41,23	53,83
5)	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	86	81,69	82,36	85	85,83	91,25
	Kecamatan Tingkir							
1)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	80	85,76	86,68	89	95,62	91,76
2)	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan	%	78	96,16	96	96	88	100
3)	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	50	17,92	51,43	42,5	36,73	64,12
4)	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	83	72,92	85,71	0	36,73	40,82
5)	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	84	81,06	82,24	85	85,94	86,96
	Kecamatan Argomulyo							
1)	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	75	87,05	82,7	73	60	59
2)	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
3)	Cakupan RW berprestasi di bidang	%	72	35,09	65,78	72	77,59	0

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	kebersihan dan kesehatan lingkungan							
4)	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	60	30	45,57	75	77,97	93,32
5)	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	74	81,92	81,06	79	80,60	81,38

Sumber : IRDA, SETDA, SETWAN dan Kecamatan, Tahun 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan sebagai kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Tolok ukur kemampuan ekonomi daerah dalam memicu daya saing daerah diantaranya yaitu terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Hasil analisis konsumsi rumah tangga per kapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 48. Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total Pengeluaran Rumah Tangga	7.365.515,59	7.933.004,34	8.554.915,93	8.539.315,57	8.824.965,44	9.692.948,19
Jumlah Rumah Tangga	63.186	64.712	65.307	66.737	65.899	66.490
Rasio	116,57	122,59	130,99	127,95	133,92	145,78

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Salatiga, Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (*Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli diluar makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Dan hasil analisis terkait Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan) dapat dilihat pada data dibawah ini :

Tabel 2. 49. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total pengeluaran rumah tangga non pangan	721.420	935.491	940.479	983.097	1.172.907	1.536.037

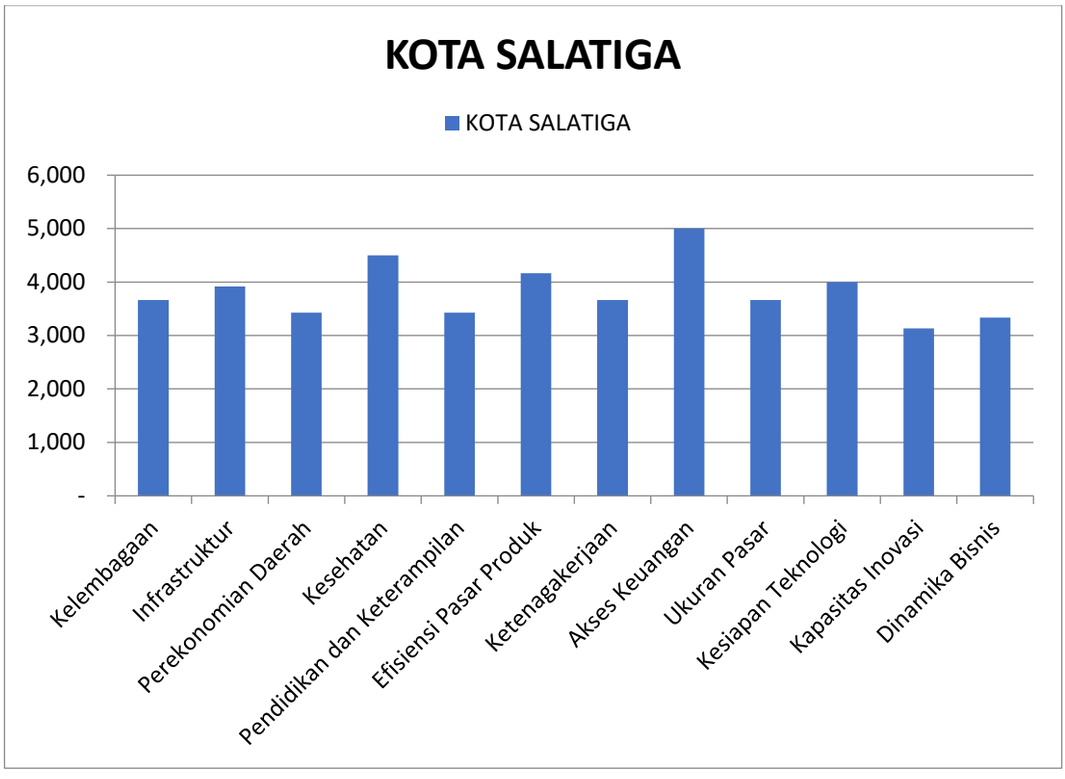
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total pengeluaran	7.365.515,59	7.933.004,34	8.554.915,93	8.539.315,57	8.824.965,44	9.692.948,19
Rasio	0,0979	0,1179	0,1099	0,1151	0,1329	0,1585

Sumber : PDRB 2022, Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

c. Produktivitas total daerah merupakan tingkat efisiensi suatu ekonomi daerah dalam menggunakan anggaran, sumber daya manusia dan teknologi untuk memenuhi target kinerja. Pengukuran produktivitas dan daya saing wajib dilakukan agar dapat diketahui pencapaian produktivitas sebagai muara dari keseluruhan proses pembangunan di setiap daerah. Bahkan, pengukuran itu sekaligus dapat mendeteksi tingkat efisiensi, efektivitas dari kualitas input, proses dan hasil pembangunan yang ada di berbagai wilayah. Tahapan pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah. Pembentuk daya saing daerah dapat dihitung dari empat aspek yaitu Faktor Penguat/ Enabling Environment, Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar dan Faktor Ekosistem Inovasi. Aspek ini didukung oleh 12 pilar, 23 dimensi, 97 Indikator.

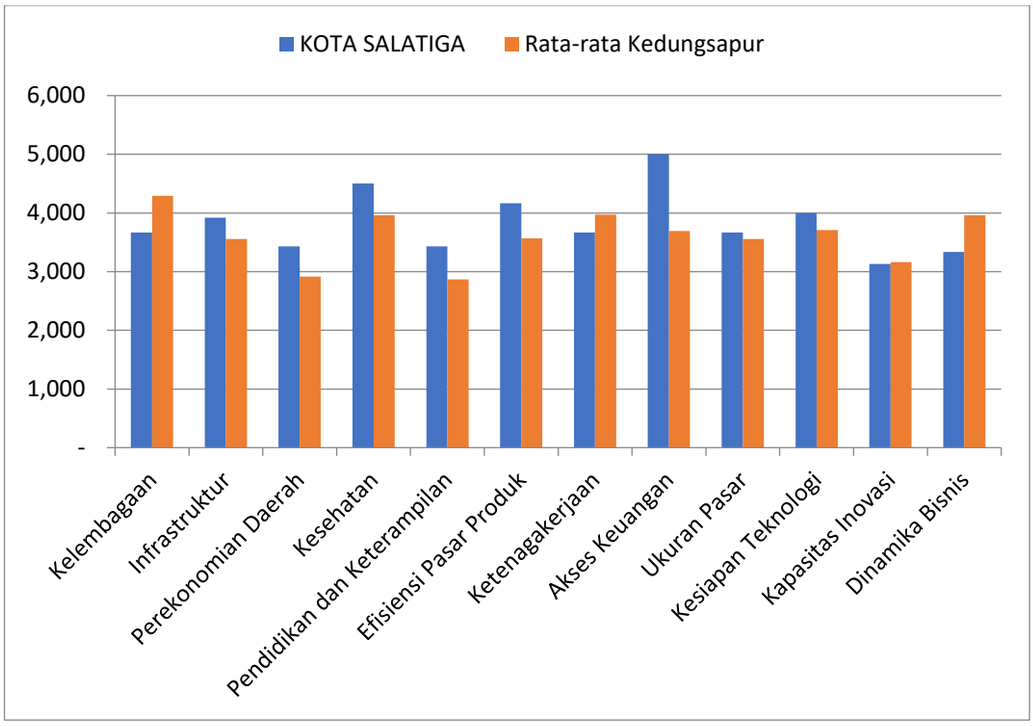
Aspek Ekosistem Inovasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing daerah Kota Salatiga yaitu sebesar 3,489. Aspek ini sangat dipengaruhi oleh pilar Akses Keuangan dengan nilai 5,000 atau mencapai nilai tertinggi dalam Aspek Ekosistem Inovasi, sedangkan pilar aspek lain yang mencapai 4,000 atau lebih adalah pilar Kesehatan dengan nilai 4,500, kemudian pilar Efisiensi Pasar Produk dengan nilai 4,167dan terakhir pilar Kesiapan Teknologi dengan nilai 4,000. Sedangkan untuk pilar yang memiliki nilai paling rendah atau dibawah 3,500 antara lain pilar Perekonomian Daerah dengan nilai 3,429, lalu pilar Pendidikan dan Keterampilan 3,429, dan pilar Dinamika Bisnis dengan nilai 3,333 dan pilar paling rendah dalam Aspek Ekosistem Inovasi adalah Kapasitas Inovasi dengan nilai 3,133.

Grafik 2. 61. Perbandingan Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Salatiga Tahun 2022



Aspek Ekosistem Inovasi Kota Salatiga secara keseluruhan masih lebih tinggi dari Rata-rata Aspek Ekosistem Inovasi Wilayah Kedungsapur, tetapi untuk beberapa pilar Aspek masih terdapat beberapa yang memiliki nilai di bawah rata-rata Kedungsapur diantaranya pilar Kelembagaan dengan nilai 3,667 untuk Kota Salatiga dan 4,292 untuk rata-rata Kedungsapur, pilar Ketenagakerjaan dengan nilai 3,667 untuk Kota Salatiga dan 3,972 untuk rata-rata Kedungsapur dan yang terakhir pilar Kapasitas Inovasi dengan nilai 3,133 untuk Kota Salatiga dan untuk rata-rata Kedungsapur dengan nilai 3,165.

Grafik 2. 62. Perbandingan Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Salatiga Dengan Wilayah Kedungsepur Tahun 2022



d. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (*It*) terhadap indeks harga yang dibayar petani (*Ib*). Secara konseptual, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks harga produsen dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (*farm gate price*), sedangkan indeks harga yang dibayar petani merupakan indeks harga konsumen barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian (*retail price*). Dari angka NTP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan. Dan hasil analisis terkait Nilai Tukar Petani (NTP) dapat dilihat pada data dibawah ini :

Tabel 2. 50. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Indeks Yang Diterima Petani (lt)	TAD	104,00	108,92	108,94	113,96	114,59
2. Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	TAD	104,52	104,61	107,34	110,45	111,67
3. Rasio	TAD	102,44	104,11	101,49	103,18	102,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Kota Salatiga menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat. Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit yang di dukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga menunjang daya saing daerah. Data wilayah/ infrastruktur Kota Salatiga yang menunjang daya saing daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Salatiga 93.924 kendaraan, sedangkan Panjang Jalan adalah 337.457,45 jadi Rasio Panjang jalan adalah 27,83%, dan rincian terkait data kendaraan bermotor dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 51. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Roda dua	0	103.090	106.476	107.236	108.538	109.597
2. Roda empat	0	23.812	25.251	26.123	26.831	27.515

Sumber : Samsat Kota Salatiga, Tahun 2023

b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2. 52. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah orang/ barang	0	17.628.933	4.553.160	1.796.328	1.820.952	1.692.416
2. Jumlah angkutan umum	0	829	469	687	619	978
3. Rasio	0	21.265,29	9.708,23	2.614,74	2.941,76	1.730,48

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

c. Jumlah orang/ barang melalui terminal per tahun

Tabel 2. 53. Jumlah Orang/ Barang melalui Terminal Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah orang/ barang	0	17.628.933	4.553.160	1.796.328	1.820.952	1.692.416
2. Jumlah Terminal	2	2	2	2	2	2
3. Rasio	0	8.814.466,5	2.276.580	898.164	910.476	846.208

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Jumlah orang yang melalui terminal, merupakan akumulasi dari jumlah orang yang melalui terminal A (bus) dan Terminal C (angkutan kota) pada tahun 2022. Jumlah orang yang melalui terminal mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 128.536 penumpang, karena pada tahun tersebut sedang dilaksanakan revitalisasi dan diharapkan tahun 2023 akan mengalami kenaikan karena terminal sudah difungsikan secara optimal.

Kondisi terminal tipe C saat ini dalam kondisi rusak sedang sehingga perlu dilaksankan pemeliharaan total. Hal ini karena sejak pembangunan tidak pernah ada pemeliharaan dan kemampuan daerah untuk membangun sangat terbatas.

d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Tingkat kecelakaan per 100.000 penduduk pada tahun 2020 sebanyak 113,2% lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 127,1% dan pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan menjadi 153,5%. Hal ini dikarenakan angka kecelakaan lalu lintas Kota Salatiga meningkat meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 222 kejadian dengan korban MD=19 orang, LB=1 orang, LR=252 orang; lalu pada tahun 2021 jumlah kejadian kecelakaan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 246 kejadian dengan korban MD=8 orang, LB=4 orang, LR=508 orang; dan pada tahun 2022 jumlah kejadian kecelakaan meningkat sebanyak 51 kejadian menjadi 297 kejadian dengan korban MD=7 orang, LB=1 orang, LR=206.

e. Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kota Salatiga Tahun 2022 sebanyak 3.490 kendaraan, sedangkan jumlah kendaraan yang

melaksanakan uji KIR sebanyak 2.279 Kendaraan dan jumlah kendaraan yang tidak lulus uji KIR sebanyak 38 kendaraan.

f. Ketaatan terhadap RTRW

Tabel 2. 54. Rasio Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Realisasi RTRW	0	0	0	0	0	5.427
2. Rencana Peruntukan RTRW	0	0	0	0	0	5.498
3. Rasio (1/2)	0	0	0	0	0	98,7 %
Keterangan :	Kajian terhadap ketaatan RTRW baru dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai bahan kajian evaluasi RTRW dan RDTRW dalam penyusunan Revisi RTRW dan revisi RDTRW.					

Sumber : Kajian Ketaatan RTRW, DPUPR, 2023

g. Luas wilayah produktif

Tabel 2. 55. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Luas wilayah produktif	1.639,57	1.639,57	1.639,57	1.639,57	1.639,57	1.639,57
2. Luas seluruh wilayah budidaya	45.477	45.477	45.477	27.169	27.169	27.169
3. Rasio (1/2)	0,0360	0,0360	0,0360	0,0603	0,0603	0,0603

Sumber : RDTRW 2017-2022, DPUPR, Tahun 2023

h. Luas wilayah industri

Tabel 2. 56. Persentase Luas Wilayah Industri Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Luas wilayah industri	239,72	239,72	239,72	239,72	239,72	239,72
2. Luas seluruh wilayah	5.678	5.678	5.498	5.498	5.498	5.498
3. Rasio (1/2)	0,0422	0,0422	0,0436	0,0436	0,0436	0,0436

Sumber : RDTRW 2017-2022, DPUPR, Tahun 2023

i. Luas wilayah kebanjiran

Tabel 2. 57. Persentase Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha)

Uraian	2017 (ha)	2018 (ha)	2019 (ha)	2020 (ha)	2021 (ha)	2022 (ha)
1. Luas wilayah kebanjiran	5.304,56	5.304,56	5.304,56	5.304,56	5.304,56	5.304,56
2. Luas seluruh wilayah	5.678	5.678	5.498	5.498	5.498	5.498

3. Rasio (1/2)	0,93	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96

Sumber : Peta Rawan Bencana, BPBD, Tahun 2023

j. Luas wilayah kekeringan

Tabel 2. 58. Persentase Luas Wilayah Kekeringan Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha)

Uraian	2017 (ha)	2018 (ha)	2019 (ha)	2020 (ha)	2021 (ha)	2022 (ha)
1. Luas wilayah kekeringan	5.260,35	5.260,35	5.260,35	5.260,35	5.260,35	5.260,35
2. Luas seluruh wilayah	5.678	5.678	5.498	5.498	5.498	5.498
3. Rasio (1/2)	0,93	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96

Sumber : Peta Rawan Bencana, BPBD, Tahun 2023

k. Luas wilayah perkotaan

Tabel 2. 59. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga (dalam Ha)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Luas wilayah perkotaan	5.678	5.678	5.498	5.498	5.498	5.498
2. Luas seluruh wilayah	5.678	5.678	5.498	5.498	5.498	5.498
3. Rasio (1/2)	1	1	1	1	1	1

Sumber : RDTRW 2017-2022, DPUPR, Tahun 2023

l. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Tabel 2. 60. Jumlah dan Jenis Bank menurut Kepemilikannya Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bank Milik Pemerintah	7	7	7	7	7	7
2. Bank Milik Swasta	6	6	6	6	6	6
3. Bank Milik Asing	1	1	3	3	3	3
4. Bank Milik Koperasi	1	1	1	1	1	1
5. Bank Milik Campuran	0	0	0	0	0	0

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tahun 2023

m. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Tabel 2. 61. Jumlah dan Jenis Asuransi menurut Kepemilikannya Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Asuransi Jiwa	6	6	6	6	6	6
2. Asuransi Kesehatan	6	6	6	6	6	6

3. Asuransi Pendidikan	2	2	2	2	2	2
4. Asuransi Investasi	2	2	2	2	2	2
5. Asuransi Kendaraan	2	2	2	2	2	2
6. Asuransi Kecelakaan	3	3	3	3	3	3
7. Asuransi Korporasi	5	5	5	5	5	5
8. Asurasi Hari Tua	1	1	1	1	1	1

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tahun 2023

n. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Tabel 2. 62. Jumlah, Jenis, Kelas Restoran Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Restoran Cepat Saji	0	0	4	4	4	10
2. Coffee Shop	0	0	5	5	18	18
3. Café	0	0	19	19	26	26
4. Resto	0	0	37	36	56	56
5. Restoran khusus	0	0	2	2	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Tabel 2. 63. Jumlah dan Jenis Restoran Tahun 2022 Kota Salatiga

Jenis Usaha Makanan dan Minuman	Jumlah	Jenis Makanan yang Disajikan	Jumlah
1. Restoran	70	American Food	1
2. Cafetarian/ Café	26	European Food	3
3. Kantin	13	Indonesia Food	64
4. Coffee Shop	18	Italian Food	1
5. Warung/ Kedai Makanan	23	Japanese Food	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

o. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Tabel 2. 64. Jumlah Penginapan/ Hotel Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah penginapan/ hotel	34	34	0	30	31	31
2. Hotel berbintang	0	0	7	0	0	0
3. Hotel tidak berbintang	0	0	11	0	0	0
4. Home Stay	0	0	4	4	0	0
5. Wisma Tamu / Guest House	0	0	5	5	0	0
6. Homestay, Guest House dan Pondok Wisata	0	0	0	0	22	22

Sumber : Dataku, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2022

p. Persentase rumah tangga berakses air minum layak

Tabel 2. 65. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah rumah tangga akses air minum layak	26.446	27.458	29.900	34.545	36.315	35.974
2. Jumlah rumah tangga	64.712	65.307	66.737	65.899	66.490	64.712
3. Persentase	40.39 %	42 %	44.8 %	52.4 %	54.6 %	55.6 %

Sumber : Dataku, PDAM Salatiga, Tahun 2023

q. Rasio ketersediaan daya listrik

Tabel 2. 66. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah daya terpasang (KW)	58.283	103.273	109.716	116.347	121.276	126.800
2. Jumlah daya yang digunakan (Kwh)	107.822.461	126.934.190	258.608.243	250.053.954	262.718.447	274.564.356
3. Rasio	0,0005	0,0008	0,0004	0,0005	0,0005	0,0004

Sumber : PLN, Tahun 2023

r. Persentase penggunaan tenaga listrik

Tabel 2. 67. Persentase Penggunaan Tenaga Listrik Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah rumah tangga pengguna tenaga listrik	67.167	69.744	72.563	75.265	77.804	80.284

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2. Jumlah rumah tangga	64.712	65.307	66.737	65.899	66.490	64.712
3. Persentase (%)	103,79	106,79	108,73	114,22	117,02	124,06

Sumber : PLN, Tahun 2023

s. Persentase penduduk yang menggunakan HP/ Telepon

Tabel 2. 68. Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Tahun 2017 s.d. 2022 Kota Salatiga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Penduduk Pengguna HP/ telepon	19.073	20.325	148.890	170.198	153.950	179.289
2. Jumlah Penduduk	192.078	193.386	195.010	195.563	196.440	196.827
3. Persentase	9,93	10,51	76,35	87,03	78,37	91,09

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022, BPS Jateng

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi, Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah.

a. Angka kriminalitas

Tabel 2. 69. Angka Kriminalitas Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah kasus narkoba	31	11	37	45	27	48
2. Jumlah kasus pembunuhan	0	0	0	0	0	1
3. Jumlah kasus kejahatan seksual	0	1	0	2	1	0
4. Jumlah kasus penganiayaan	28	7	14	8	4	13
5. Jumlah kasus pencurian	138	34	64	49	24	34
6. Jumlah kasus penipuan	42	0	18	24	18	17
7. Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	4	0	0	0

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8. Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	239	53	137	128	74	113
9. Jumlah penduduk	192.078	193.386	195.010	195.563	196.440	196.827
10. Angka kriminalitas 8/9	0,0012	0,0003	0,0007	0,0006	0,0004	0,0006

Sumber : Dataku, Polres Salatiga, Tahun 2022

b. Jumlah demonstrasi

Tabel 2. 70. Jumlah Demonstrasi Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bidang politik	0	1	2	0	0	0
2. Bidang ekonomi	0	7	1	0	0	0
3. Kasus pemogokan kerja	0	5	0	2	3	3
4. Jumlah unjuk rasa	0	13	3	2	3	3

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

c. Lama proses perijinan

Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga dan telah terbentuk Mall Pelayanan Publik yang diresmikan pada bulan april 2021. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 untuk durasi waktu pengurusan izin usaha adalah paling lama 30 hari.

Pada tahun 2022 hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan di DPMPTSP dengan predikat Pelayanan Prima. Hasil evaluasi penyelenggaraan publik tahun 2021 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada unit penyelenggara pelayanan publik diperoleh hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP Kota Salatiga kategori A, meningkat dari tahun 2021 yaitu A- dengan predikat Sangat Baik.

Pada tahun 2022 Kota Salatiga mendapat penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Berdasarkan

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kota Salatiga, dari 58 produk layanan administrasi diperoleh nilai 90,09 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tertinggi.

d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Tabel 2. 71. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022

Uraian	2017 (jutaan)	2018 (jutaan)	2019 (jutaan)	2020 (jutaan)	2021 (jutaan)	2022 (jutaan)
1. Pajak Hotel	5.438,67	6.271,64	6.871,73	3.166,17	3.923,37	5.898,81
2. Pajak Restoran	4.495,81	5.183,67	6.288,87	3.854,83	5.048,92	7.874,24
3. Pajak Hiburan	501,65	641,73	725,80	243,02	216,21	614,07
4. Pajak Reklame	1.204,65	1.360,05	1.548,89	1.387,05	1.538,43	1.960,46
5. Pajak Penerangan Jalan	14.570,71	15.054,79	15.567,53	15.018,33	15.896,37	18.359,60
6. Pajak Parkir	210,29	216,40	247,54	137,54	119,64	163,57
7. Pajak Air Tanah	421,01	420,59	475,53	1.299,77	1.968,36	1.920,76
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.635,89	8.647,89	9.525,29	9.367,18	10.217,70	10.492,36
9. Pajak BPHTB	15.219,58	17.723,39	25.116,63	19.900,58	26.112,95	28.224,66
10. Retribusi Jasa Umum	5.991,78	4.916,02	5.036,13	4.197,08	4.525,51	4.983,22
11. Retribusi Jasa Usaha	2.478,78	3.727,26	2.390,53	3.465,01	8.687,47	4.186,87
12. Retribusi Perijinan Tertentu	1.965,83	2.014,79	3.606,08	1.634,85	1.765,53	2.137,59

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tahun 2022

e. Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha

1). Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

2). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011;

3). Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

4). Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5). Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Pelayanan Dasar;
6). Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/587/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Sistem Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7). Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/489/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8). Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/293/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan kualitas tenaga kerja.

a. Rasio Ketergantungan

Persentase penduduk Kota Salatiga di dominasi usia produktif. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2. 72. Rasio Ketergantungan Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022

No	Tingkat Pendidikan	2017 (jiwa)	2018 (jiwa)	2019 (jiwa)	2020 (jiwa)	2021 (jiwa)	2022 (jiwa)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	42.496	29.777	43.024	43.345	42.860	42.858
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	14.471	16.137	25.839	16.942	15.540	15.925
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1 + 2)	56.967	45.914	68.863	60.287	58.400	58.783
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	135.111	147.472	126.147	135.276	138.163	138.044
5.	Rasio ketergantungan (3/4)	0,422	0,311	0,546	0,445	0,422	0,425

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022

b. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Salatiga dapat dilihat dari tingkat pendidikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 73. Rasio Kualitas Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun 2017 s.d. 2022

No	Tingkat Pendidikan	2017 (jiwa)	2018 (jiwa)	2019 (jiwa)	2020 (jiwa)	2021 (jiwa)	2022 (jiwa)
1.	Jumlah lulusan Strata I (S1)	15.474	15.474	16.190	16.279	17.302	17.520
2.	Jumlah lulusan Strata II (S2)	1.498	1.731	1.558	1.602	1.662	1.472
3.	Jumlah lulusan Strata III (S3)	148	107	159	157	166	166
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	17.120	17.312	17.907	18.038	19.130	19.158
5.	Jumlah Penduduk	192.078	193.386	195.010	195.563	196.440	196.827
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,089	0,089	0,092	0,092	0,098	0,098

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022

2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 dan Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2022 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Salatiga Tahun 2022 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPJMD s/d 2022 sebesar 91% ≤ 100%);
2. Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPJMD s/d 2022 sebesar 76% sampai dengan 90% (76% ≤ 90%);
3. Sedang, untuk presentase capaian target akhir RPJMD s/d 2022 sebesar capaian 66 % ≤ 75%
4. Rendah untuk presentase capaian target akhir RPJMD sd 2022 sebesar capaian 51% ≤ 65%
5. Sangat Rendah untuk presentase capaian target akhir RPJMD as 2022 sebesar ≤ 50%.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

(2) Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup)

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 74. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.95	9.95	10.95	10.95	110.05	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	14.99	14.99	15.43	15.43	102.94	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
3	Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	58	58	190.17	190,17	327.88	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Peringkat dalam Porda	ranking	5	5	6	6	80.00	Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	77.40	77.40	77.72	77.72	100.41	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.32	1.32	0,80	0.80	139.39	Sangat Tinggi	Dinas Dalduk KB
7	Indeks/Angka Kriminalitas	nilai	0.06	0.06	0.031	0.031	148,33	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
8	Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	75	75	50	50	66.67	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Wilayah dengan Infrastruktur kondisi Baik	%	100	100	99,33	99,33	99,33	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	63,66	63,66	61.34	61.34	96,36	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
11	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	3.99	3.99	1.9	1.9	152.38	Tinggi	Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.45	5.45	5.53	5,53	101.460	Tinggi	Sekretariat Daerah
13	PDRB per Kapita (ribu rupiah)	ribu rupiah	73,893	70,913	71,260	71260	96.44	Sangat Tinggii	Sekretariat Daerah
14	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	3	3	-0,7	-0,7	-23.33	Rendah	DPMPTSP
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.73	5.73	5.58	5.58	102.62	Tinggi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
16	Prosentase Penduduk Miskin	%	4.70	4.70	4.73	4.73	99,36	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
17	Skor Pola Pangan Harapan	nilai	92.20	92.20	95.1	95.1	103.15	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
18	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	nilai	680.00	680.00	607.35	607.35	89.32	Tinggii	Dinas P3APPKB
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	97.20	97.20	95.44	95.44	98.18	Tinggi	
20	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	81.57	81.57	95.37	95.37	114	Sangat Tinggi	
21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	84.20	84.20	84.35	84.35	100.17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
22	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	65.00	65.00	74.98	74.98	113.35	Sangat Tinggi	
B.	**Aspek Pelayanan Umum**								
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	PENDIDIKAN								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	72	72	89.59	89.59	124.43	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100	100	91.16	91.16	91.16	Sangat Tinggi	
3	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	97	97	73.02	73.02	75.28	TInggi	
	KESEHATAN								
4	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	117	117	133.69	133.69	85.74	TInggi	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10.75	10.75	10.25	10.25	104.65	Sangat Tinggi	
6	Pravelensi Balita Gizi Buruk	%	0.02	0.02	0.05	0.05	-50.00	Sangat Rendah	
7	Success Rate TB	%	85	85	89.81	89.81	105.66	Sangat Tinggi	
8	Prevalensi Hipertensi Penduduk di atas usia 18 tahun	%	1.25	1.25	0.81	0.81	135.20	Sangat Tinggi	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
9	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	97.75	97.75	99.20	99.20	101.48	Sangat Tinggi	DPUPR
10	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	53	53	89.14	89.14	168.13	Sangat Tinggi	
11	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	100	100	101,52	101,52	101.52	Sangat Tinggi	
12	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100	100	95.73	95,73	95.73	Sangat Tinggi	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
13	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	80.00	80.00	85.35	85.35	106.69	Sangat Tinggi	Dinas PKP
14	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	93.62	93.62	91.95	91.95	98.22	Tinggi	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
15	Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA	%	100	100	95	95	95.00	Sangat Tinggi	Satpol PP
16	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	/10.000 penduduk	2	2	1.17	1.17	141.50	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SOSIAL								
17	Cakupan Penanganan PMKS	%	21	21	88.44	88.44	421.14	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	TENAGA KERJA								
18	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	62.4	62.4	96.76	96.76	155.06	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
19	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	32.14	32.14	21.43	21.43	66.68	Sedang	Dinas P3APPKB

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
20	Persentase Perempuan dalam Parlemen	%	32	32	24	24	75.00	Tinggi	
21	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41.89	41.89	41.08	41.08	98.07	Sangat Tinggi	
	PANGAN								
22	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Skor	14.5	0.00	0	0	0.00	Sangat Rendah	Dinas Pangan dan Pertanian
	Prevelance of undernourishment (PoU)	Skor	6.68	6.68	5.97	5.97	89.37	Tinggi	
	PERTANAHAN								
23	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	%	90	100	100	100	111.11	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	LINGKUNGAN HIDUP								
24	Indeks Pencemaran Air	Nilai	47.87	47.87	45.00	45.00	94.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
25	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	84.57	84.57	84.11	84.11	99.46	Sangat Tinggi	
26	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	59.38	59.38	47.28	47.28	79.62	Tinggi	
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.66	63.66	61,34	61,34	96,36	Sangat Tinggi	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
28	Persentase cakupan akta kelahiran	%	95	95	99.07	99.07	104,28	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Persentase Penduduk ber KTP elektronik	%	100	100	96.26	96.26	96.26	Sangat Tinggi	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
30	Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	2	2	1.56	1.56	78	Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
31	TFR (Total Fertility Rate)	%	2.40	2.40	1.84	1.84	123,33	Sangat Tinggi	Dinas Dalduk KB
	PERHUBUNGAN								
32	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	%	80	80	60.11	60.11	75.14	Tinggi	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
33	Tingkat ketersediaan Media Informasi Publik	%	100	100	97.73	97.73	97.73	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Tingkat Pengembangan Layanan e Government dan Smart City	%	100	100	87	87	87	Tinggi	
	KOPERASI DAN UKM								
35	Persentase Usaha Mikro Kecil yang dibina	%	69.86	69.86	84.55	84.55	121.03	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
36	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	8.53	8.53	10.7	10.7	126.03	Sangat TInggi	
	PENANAMAN MODAL								
37	Kenaikan Nilai Investasi PMA	Milyar Rupiah	314.749	314.759	289.111	289.111	91.85	Sangat Tinggi	DPMPTSP
38	Kenaikan Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	166.578	166.578	101.195	101.195	60.75	Rendah	
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
39	Persentase Pemuda Berwirausaha	%	6	6	2.43	2.43	40,50	Sangat Rendah	Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
40	Persentase Atlet Berprestasi	%	28	28	35.38	35.38	126,36	Sangat Tinggi	
	STATISTIK								
41	Persentase Ketersediaan Data Statistik	%	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PERSANDIAN								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
42	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	%	100	100	70.85	70.85	70.85	Sedang	
	KEBUDAYAAN								
43	Persentase Kelompok Seni dan Komunitas Budaya yang dibina	%	64	64.00	100	100	156.25	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
44	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	10.2	10.20	22.86	22.86	224.12	Sangat Tinggi	
	PERPUSTAKAAN								
45	Persentase Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan	%	90	90	570.08	570.08	633.42	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN								
46	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Manajemen Arsip secara lebih selektif (e arsip)	%	37.5	37.50	100.00	100.00	266.67	Sangat Tinggi	
	URUSAN PILIHAN								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
47	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Ha	1,000	1000	715.381	715.381	71.74	TInggi	Dinas Pangan dan Pertanian
	PARIWISATA								
48	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	160,000	160.000	310.000	310.000	194.02	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayan dan Pariwisata
49	Persentase Peminat Transmigrasi	%	5	5	0	0	0	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PERTANIAN								
50	Produktivitas Tanaman Pangan Utama								Dinas Pangan dan Pertanian
	Padi	Ton/Ha	6.73	6.73	6.73	6.73	100	Sangat Tinggi	
	Jagung	Ton/Ha	5.36	5.36	7.398	7.398	138.02	Sangat Tinggi	
51	Produksi Daging Sapi Potong	Kg	1,018,530	1,018,530	1,701.880	1.701.880	167.09	Sangat Tinggi	

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
	PERDAGANGAN								
52	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.72	4.72	4.54	4,54	96.19	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
	PERINDUSTRIAN								
53	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0.3	0.03	0	0	0	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
54	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	42	42	50,21	50.21	119.55	Sangat Tinggii	Bappeda
55	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100.00	100,00	100.00	Sangat Tinggi	
56	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD	%	100	100	100.00	100,00	100.00	Sangat Tinggi	
	KEUANGAN								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
57	Opini BPK	opini	WTP	WTP	Masih dalam proses penilaian	Masih dalam proses penilaian	Masih dalam proses penilaian	Masih dalam proses penilaian	BPKPD
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
58	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	90.6	90.6	54.74	54.74	60.42	Sedang	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
59	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	80	80	80	TInggi	Bappeda
	PENGAWASAN								
60	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3	3	3	3	100.00	Sangat Tinggi	Inspektorat
61	Tingkat Maturitas SPIP	level	3	3	3	3	100.00	Sangat Tinggi	
	FUNGSI LAINNYA								

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
62	Skor LAKIP/LKjIP	nilai	67.50	67.50	84.95	84.95	113.27	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
63	Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	90	90	100	100	111.11	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
64	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidorejo	%	80	80	91,97	91,97	114,96	Sangat Tinggi	Kecamatan Sidorejo
65	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Sidorejo	%	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	
66	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Sidorejo	%	75	75	0	0	0.00	Sangat Rendah	
67	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidorejo	%	45	45	55.61	55.61	123.58	Sangat Tinggi	
68	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sidorejo	%	91	91	91.25	91.25	100.27	Sangat Tinggi	

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
69	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Tingkir	%	88	88	91.76	91.76	104.27	Sangat Tinggi	Kecamatan Tingkir
70	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Tingkir	%	86	86	100	100	116.28	Sangat Tinggi	
71	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Tingkir	%	85	85.00	40.39	40.39	48.02	Sangat Rendah	
72	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Tingkir	%	60	60	64.12	64.12	106.87	Sangat Tinggii	
73	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tingkir	%	92	92.00	86.96	86.96	94.52	Sangat Tinggi	
74	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Argomulyo	%	82	82.00	59.00	59.00	71.95	Sedang	Kecamatan Argomulyo
75	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
	Kelurahan Kecamatan Argomulyo								
76	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Argomulyo	%	76	76	77.59	77.59	102.09	Sangat Tinggi	
77	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo	%	60	60	93.32	93.32	122.79	Sangat Tinggi	
78	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Argomulyo	%	79	79	81.38	81.38	103.01	Sangat Tinggi	
79	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidomukti	%	80	80	90.15	90.15	112.68	Sangat Tinggi	Kecamatan Sidomukti
80	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Sidomukti	%	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
81	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan Kecamatan Sidomukti	%	75	75	0.0	0.0	0.00	Sangat Rendah	
82	Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	%	45	45	75.78	75.78	168.40	Sangat TInggi	
83	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sidomukti	%	80	80	89.15	89.15	111.44	Sangat Tinggi	
C.	**Aspek Daya Saing**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	75	84.95	84.95	113.27	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	123	123	2.84	2.84	2.31	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Nilai SAKIP	angka	67.50	67.50	65.35	65.35	90.14	Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	63.66	63.66	61.34	61.34	96,36	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPJMD 2017 - 2022	Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Status	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi				
5	Indeks Kualitas Air	Angka	47.87	45.00	45.00	45.00	94.00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
6	Indeks Kualitas Udara	Angka	84.57	84.57	84.11	84.11	99.46	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
7	Indeks Tutupan Lahan	Angka	59.38	59.38	47.28	47.28	79.62	TInggi	Dinas Lingkungan Hidup
8	Opini BPK	opini	WTP	WTP	Masih dalam proses penilaian	Masih dalam proses penilaian	Masih dalam proses peniilaian		BPKPD

Sumber : Data yang diolah Bappeda, Tahun 2023

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari 22 indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 83 Indikator pada Aspek Pelayanan Umum serta 7 Indikator pada Aspek Daya Saing yang merupakan Indikator Kinerja Daerah. Capaian dari target Indikator Kinerja Daerah terhadap target RPJMD Tahun 2017 – 2022 terdiri dari 85 Indikator berstatus sangat tinggi, 16 indikator berstatus tinggi , 5 indkator berstatus sedang , 2 indikator berstatus rendah dan 5 indikator yang masih sangat rendah serta 1 indikator masih dalam proses penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dilihat pada tabel rekap data capaian Indikator Kinerja Daerah di bawah ini:

Tabel 2. 75. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN		CAPAIAN					Jumlah
			Sangat Tinggi	Tinggi	sedang	Rendah	Sangat Rendah	
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**		14	6	1	1	0	22
B.	**Aspek Pelayanan Umum**							
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
	1	Pendidikan	2	1	0	0	0	3
	2	Kesehatan	3	1	1	0	0	5
	3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4	0	0	0	0	4
	4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1	1	0	0	0	2
	5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	2	0	0	0	0	2
	6	Sosial	1	0	0	0	0	1
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	1	Tenaga Kerja	1	0	0	0	0	1
	2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	1	1	0	0	3
	4	Pangan	1	1	0	0	0	2

NO	URAIAN		CAPAIAN					Jumlah
			Sangat Tinggi	Tinggi	sedang	Rendah	Sangat Rendah	
	5	Pertanahan	1	0	0	0	0	1
	6	Lingkungan Hidup	4	0	0	0	0	4
	7	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2	0	0	0	0	2
	8	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	0	0	0	0	1
	9	Pengendalian Penduduk Dan KB	1	0	0	0	0	1
	10	Perhubungan	0	1	0	0	0	1
	11	Komunikasi Dan Informatika	1	1	0	0	0	2
	12	Koperasi Dan UKM	2	0	0	0	0	2
	13	Penanaman Modal	1	0	0	1	0	2
	14	Kepemudaan Dan Olah Raga	1	0	0	0	1	2
	15	Statistik	1	0	0	0	0	1
	16	Persandian	0	0	1	0	0	1
	17	Kebudayaan	2	0	0	0	0	2
	18	Perpustakaan	1	0	0	0	0	1
	19	Kearsipan	1	0	0	0	0	1
	Urusan Pilihan							
	1	Kelautan Dan Perikanan	0	1	0	0	0	1
	2	Pariwisata	2	0	0	0	0	2
	3	Pertanian	3	0	0	0	0	3
	4	Perdagangan	1	0	0	0	0	1
	5	Perindustrian	0	0	0	0	1	1
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
	1	Perencanaan	3	0	0	0	0	3
	2	Keuangan	Masih dalam proses penilaian					
	3	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	0	0	1	0	0	1
	4	Penelitian Dan Pengembangan	1	0	0	0	0	1

NO	URAIAN		CAPAIAN					Jumlah
			Sangat Tinggi	Tinggi	sedang	Rendah	Sangat Rendah	
	5	Pengawasan	2	0	0	0	0	2
	6	Fungsi Lainnya	18	1	0	0	3	22
C.	**Aspek Daya Saing**		4	2	0	0	1	7
	Total		**85**	**16**	**5**	**2**	**5**	**113**

Sumber : Data yang diolah Bappeda, Tahun 2023

Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 berdasarkan indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2.1.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022 dijelaskan melalui 6 (enam) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022 adalah sebesar 9,95 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 10,95 tahun, sehingga capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2022 adalah 110.05 % dengan kategori Sangat Tinngi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2017 sebesar 9,82 tahun, Tahun 2018 sebesar 10,15 tahun, Tahun 2019 sebesar 10,4 tahun, Tahun 2020 sebesar 10,42 tahun, Tahun 2021 sebesar 10,66 dan akhir RPJMD Tahun 2022 sebesar 10,95 tahun yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 9,95, sedangkan

realisasi Tahun 2022 sebesar 10,95 tahun. Dengan demikian target RPJMD untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 110,05%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas Tahun 2022 adalah 8,69 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga Tahun 2022 adalah 10,95 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendidikan menjadi salah satu aspek guna mengukur capaian kinerja pada indikator ini. Indikator kinerja rata-rata lama sekolah dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang dijalani, serta jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Keberhasilan pencapaian suatu indikator angka partisipasi dipengaruhi oleh kemudahan akses dan kualitas kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan serta Beasiswa Siswa Kurang Mampu.

Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah adalah :

1. Memberikan peluang yang luas pada pendidikan Non Formal seperti Kejar Paket;
2. Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi;
3. Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu;
4. Pemberian penghargaan bagi siswa yang memiliki prestasi melalui kegiatan lomba bidang pendidikan.
5. Meningkatkan pelayanan anak berkebutuhan khusus

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah meningkatnya PAUD *Holistic integrative* dan pengelolaan PAUD yang berkualitas sesuai standar nasional, meningkatnya akses Pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau serta meningkatnya Pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.

2.2.1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefiniskan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.

Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022 sebesar 14,99 tahun dan terealisasi 15.43 tahun dan capaian kinerja Tahun 2022 adalah 102,94% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2017 sebesar 14,98 tahun, Tahun

2018 sebesar 14,99 tahun, Tahun 2019 sebesar 15 tahun, Tahun 2020 sebesar 15,41 tahun , Tahun 2021 sebesar 15,42 tahun dan realisasi Tahun 2022 sebesar 15,43 tahun, yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 14,99 tahun, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 telah mencapai 15,43 tahun. Dengan demikian target RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 102,94%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, Harapan lama Sekolah (HLS) Penduduk Indonesia sebesar 13,10 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan setingkat Diploma I. Sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga adalah 15,43 tahun. Dengan demikian Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah Penduduk Indonesia secara nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..

Harapan lama sekolah berpengaruh terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Terdapat empat kriteria untuk investasi pengembangan sumber daya manusia yaitu:

1. Kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan kejuruan serta teknologi;
2. Perluasan pendidikan dasar yang dipandang memiliki tingkat keuntungan/manfaat *(rate of return)* yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya;
3. Pengembangan di sektor pedesaan sehingga

memperlihatkan adanya peranan pendidikan masal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan

4. Keadilan dan pemerataan yang menunjukkan akan pentingnya sebuah distribusi kesempatan memperoleh pendidikan dan bentuk pengembangan sumber daya manusia lain baik secara geografis , sosial serta ekonomis.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah antara lain:

1. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah meningkatnya PAUD *Holistic integrative* dan penyelenggaraan PAUD sesuai standar nasional, meningkatnya akses Pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau serta meningkatnya Pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari 1 kegiatan dimana sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pendidikan dasar jenjang SMP yang bermutu merata dan terjangkau
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan, dimana sasaran pelaksanaan kegiatan dari program ini adalah meningkatnya akses pendidikan non formal yang bermutu, merata dan terjangkau

2.2.1.3. Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2022 sebesar 58% dan terealisasi sebesar 190.17%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang

dilestarikan Tahun 2022 adalah 204.36% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan pada Tahun 2017 sebesar 38,95%, Tahun 2018 sebesar 57,8%, Tahun 2019 sebesar 73,23%, Tahun 2020 sebesar 88,97% Tahun 2021 sebesar 129,55% sedangkan Tahun 2022 sebesar 190.17% yang artinya realisasi dan capaian kinerja untuk indikator cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD adalah sebesar 58%, sedangkan pada Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 190.17% sehingga target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 327.88%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah

1. Pengembangan gelar seni budaya yang mengedepankan kearifan lokal.
2. Terlaksananya kajian pelestarian warisan budaya.
3. Peran serta dan kepedulian masyarakat, pelaku budaya, akademisi terhadap seni dan budaya daerah.
4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pementasan yang bersifat nasional/internasional
5. Pemanfaatan media sosial seperti instragram, youtube dan facebook untuk menginformasikan pengembangan gelar seni budaya.

6. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian cagar budaya dan situs secara berkala melalui kerjasama dengan stakeholder dan instansiBanyaknya potensi benda cagar budaya, peninggalan sejarah,
7. Banyaknya penggiat cagar budaya dan sejarahwan di Kota Salatiga.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Program Pengembangan Kebudayaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya serta pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kota Salatiga kebudayaan .
2. Program Pembinaan Sejarah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan sejarah lokal.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan cagar budaya

2.2.1.4. Peringkat Dalam PORDA.

Indikator kinerja peringkat dalam PORDA merupakan indikator megatif yang artinya semakin rendah realisasinya akan semakin baik capain kinerjanya.

Adapun analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) peringkat dalam PORDA Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2022 peringkat dalam PORDA adalah peringkat 5 dan terealisasi peringkat 6 sehingga capaian kinerja 80% dengan kategori Baik. Data realisasi ini adalah berdasarkan capaian pada PORDA terakhir yang diikuti Kota Salatiga pada tahun 2018 di Surakarta dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Hal ini disebabkan PORDA diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020 dan tahun 2022 belum mengalami peningkatan karena

PORDA diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sehingga capaian tahun 2022 masih menggunakan capaian tahun 2018.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD adalah Kota Salatiga pada posisi 5 besar PORDA Jawa Tengah, dan pada tahun 2022 posisi Kota Salatiga masih pada peringkat 6, jadi target dalam RPJMD masih belum tercapai pada tahun ini dengan tingkat kemajuan sebesar 80%.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja peringkat dalam PORDA.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan PORDA yang akan datang, Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Belajar Olahraga (KBO) dan Pusat Pengembangan Latihan Olahraga Daerah (PPOPD).
2. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan.
3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga.
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
5. Pengadaan peralatan cabang olahraga.
6. Pembibitan atlet sejak usia dini sehingga menghasilkan bibit atlet profesional.
7. Membangun sinergi yang baik antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan induk cabang olahraga dan KONI.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mendukung indikator ini program/kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan serta pemberdayaan, pengembangan organisasi kepemudaan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

2.2.1.5. Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Tahun 2022 angka usia harapan hidup sebesar 77,40 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi 77,72 tahun dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022 sebesar 100,41% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup pada Tahun 2017 adalah 76,87 tahun, Tahun 2018 adalah 76,98 tahun, Tahun 2019 adalah 77,11 tahun, Tahun 2020 adalah 77,40 tahun, Tahun 2021 adalah 77,55 tahun dan realisasi kinerja Tahun 2022 adalah 77,72 tahun. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD untuk indikator kinerja Usia Harapan Hidup adalah 77,40 tahun, dan pada Tahun 2022 terealisasi 77,72 tahun. Dengan demikian target akhir RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 100,41%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 77,72 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Usia Harapan Hidup juga mencapai 77,72 tahun, dengan demikian Usia Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga sama dengan Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Keberhasilan manajemen resiko tinggi di masyarakat melalui kelompok sayang ibu dan pendampingan ibu hamil resiko tinggi.
2. Peningkatan upaya promosi kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pola hidup sehat dengan penerapan GERMAS.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Angka Usia Harapan Hidup, di dukung oleh program - program sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan pada Dinas Kesehatan dan 1 kegiatan pada RSUD dengan sasaran kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintregrasi, penerbitan izin

Rumah Sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan mutu serta peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air MInum (DAM).
4. Program Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat Kota dan pelaksanaan kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat Kota.

2.2.1.6. Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Tahun 2022 indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,32% dan terealisasi 0,80%, sehingga capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 139,39% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2017 sebesar 1,38%, Tahun 2018 sebesar 1,45%, Tahun 2019 sebesar 1.31%, Tahun 2020 sebesar 1,18% , Tahun 2021 sebesar 0,83% dan realisasi capain kinerja Tahun 2022 sebesar 0,80%, yang artinya realisasi kinerja terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 1,32%, dan pada Tahun 2022 terealisasi 0,80%, dengan demikian target RPJMD untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 139,39%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2022 adalah sebesar 1.17% per tahun. Dengan demikian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga sama dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian laju pertumbuhan penduduk Tahun 2022 mengalami peningkatan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi selama masa pandemi seperti APD baik bagi pemberi pelayanan KB maupun akseptor KB.
2. Melaksanakan pelayanan KB dengan memperhatikan protokol kesehatan terutama untuk KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
3. Peningkatan kualitas tenaga pemberi pelayanan KB di masa pandemi melalui pelatihan CTU.
4. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan dan penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan genre kit, BKB kit, BKL kit, dan KIE kit.

5. Pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Modus Operasi Wanita (MOW).
6. Melakukan monitoring program KKBKP oleh PLKB di tingkat kelurahan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas IMP (Institusi Masyarakat Pesedaan).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan advokasi, KIE, pengendalian dan KB, pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organissai kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga

2.2.1.7. Indeks/Angka Kriminalitas

Indikator Indeks/Angka Kriminalitas merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Indeks/ Angka Kriminalitas Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Indeks/Angka Kriminalitas Tahun 2022 sebesar 0,06 dan terealisasi sebesar 0,030 sehingga capaian kinerja indikator Indeks/Angka Kriminalitas adalah 150,00% dengan kategori sangat baik

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada Tahun 2017 sebesar 0,17, tahun 2018 sebesar 0,067, Tahun 2019 sebesar 0,087, Tahun 2020 sebesar 0,056, Tahun 2021 sebesar 0,033 dan Tahun 2022 sebesar 0,030% Dengan demikian realisasi kinerja dan capaian kinerja semakin meningkat.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 0,06 sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2022 adalah 0,030, dengan demikian target akhir RPJMD telah tercapai karena dengan tingkat kemajuan sebesar 150,00%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks/Angka Kriminalitas.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas adalah:

1. Adanya koordinasi yang intens antara Pemerintah Kota Salatiga dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas Kota Salatiga;
2. Adanya pemantauan daerah rawan konflik;
3. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat; melalui sosialisasi orientasi kewaspadaan nasional dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan terorisme;
4. Fasilitasi dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

5. Sosialisasi wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat dari pelajar, mahasiswa, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
6. Operasi gabungan Satpol, TNI dan POLRI untuk penegakan Perda dan Perkada.

f. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Terdapat 5 (program) untuk mendukung capaian indikator Indeks/Angka Kriminalitas pada Badan Kesbangpol yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran ini pada Satpol PP adalah :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali.
2. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

2.2.1.8. Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik

Indikator Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain

1. Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
2. Jl. Jenderal Sudirman (0%)
3. Jl. W. Mongonsidi, (100%)
4. Jl. Soekarno Hatta, (100%)
5. Penataan BunderanTamansari, (0%)
6. Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7. Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar (50%)
8. Rest Area Tingkir (0%)
9. Bantaran isep-Isep, (0%)
10. Bendung Andong (0%)
11. Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
12. Jl. Hasanudin, (100%)
13. Jl. A. Yani, (50%)
14. Jl. Pattimura, (100%)
15. Jl.Tingkir – Barukan, (0%)
16. Jl. Kartini, (100%)
17. Jl. Osamaliki, (100%)
18. Jl. Veteran, (0%)
19. Jl. Pemuda, (0%)
20. Jl. Muh Yamin. (0%)

Dari 20 target diatas yang terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 11 ruas jalan, sehingga realisasi Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2022 adalah 50%.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik tahun 2022 sebesar 75% dan terealisasi sebesar 50% sehingga capaian kinerja indikator Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik adalah 66,67% dengan kategori Cukup.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Tahun 2017 sebesar 15,78%; realisasi tahun 2018 sebesar 25%, realisasi tahun 2019 sebesar 35%, realisasi tahun 2020 sebesar 40%, realisasi tahun 2021 sebesar 45% dan realisasi Tahun 2022 sebesar 50 %. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik selalu mengalami peningkatan sebesar 5 %.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 75% dan pada tahun 2022 baru tercapai 50% dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai pada tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 66,67%.

d..Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian realisasi kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2022 ini disebabkan penataan wajah kota ini menjadi program prioritas bagi Wali Kota terpilih selain itu ketersediaan anggaran juga mendukung tercapainya target persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target indikator Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan baik di dukung oleh Program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan RTRW, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan strategi sistem penataan bangunan, penataan bangunan dan pemeliharaan bangunan.
3. Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan.
4. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengembangan jaringan jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

2.2.1.9. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik

Realisasi Indikator Kinerja Utama Wilayah dengan Infrastruktur kondisi baik dihitung dari dari rata-rata realisasi IKD Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase jalan dalam kondisi mantap.

Berikut rumus perhitungan IKU Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik :

$$\textit{Realisasi Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik} = \frac{\textit{persentase jaringan drainase dalam kondisi baik + Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik + Persentase jalan dalam kondisi mantap}}{3}$$

Berdasarkan rumus diatas maka realisasi kinerja IKU Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

$$\textit{Realisasi Kinerja Wilayah dengan Infrastruktur Baik} = \frac{101{,}52 + 95{,}73 + 101{,}48}{3} = 99{,}57$$

Adapun analisa terhadap capaian kinerja indikator kinerja Utama Wilayah dengan kondisi Infrastruktur baik tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Wilayah dengan Infrastruktur baik tahun 2022 adalah 100%. Dan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Realisasi tahun 2022 sebesar 99,33%. Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka capaian kinerja untuk Wilayah dengan Infrastruktur baik adalah 99.33% dengan kategori Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator persentase wilayah dengan infrastruktur baik tahun 2017 adalah 65,21%, tahun 2018 sebesar 82,61%, tahun 2019 sebesar 93,45%, tahun 2020 sebesar 94,46%, tahun 2021 sebesar 96,21% dan tahun 2022 sebesar 99,33%. Dengan demikian persentase realisasi wilayah dengan infrastruktur baik selalu meningkat namun pada tahun 2021 sempat menurun dan pada tahun 2022 dapat meningkat kembali.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator persentase wilayah dengan infrastruktur baik adalah 100%. Sedangkan realisasi tahun 2022 baru mencapai 99,33%. Dengan demikian masih target RPJMD belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 98,15%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan realisasi kinerja wilayah dengan infrastruktur kondisi baik terutama terkait dengan masyarakat pengguna sanitasi. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Banyaknya program pemerintah yang menyasar pada bantuan maupun sanitasi layak;
2. Wilayah kota Salatiga yang berupa dataran tinggi menyebabkan tidak ada genangan pada drainase

f. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Terdapat 5 Program untuk mendukung capaian indikator kinerja presentase Wilayah dengan Infrastruktur baik antara lain:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penyelenggaraan Jalan

2.2.1.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdsarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

IKLH	**=**	**(0,376 x Realisasi Indeks Pencemaran Air) + (0,405 x Realisasi Indeks Pencemaran Udara) + (0,219 x Realiasasi Indeks Tutupan Lahan)**

Berdasarkan rumus di atas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Realisasi IKLH =	(0,376 x 45.00 + (0,405 x 84.11) + (0,219 x 47.28)	= 61,34 %

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 61.34% sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 72,16% atau dengan kategori cukup

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja Indeks IKLH Tahun 2017 sebesar 56,78, tahun 2018 sebesar 59,78, tahun 2019 sebesar 60,05, tahun 2020 sebesar 60,88, tahun 2021 sebesar 58,65. dan tahun 2022 sebesar 61,34%. Dengan demikian realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Salatiga terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 85, sedangkan realisasi tahun 2022 baru mencapai 61,34. Dengan demikian target akhir RPJMD masih belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan baru mencapai 72,16%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Nilai IKLH nasional mencapai 72,42 sedangkan nilai IKLH Kota Salatiga sebesar 61.34. Dengan demikian Nilai IKLH Kota Salatiga masih berada dibawah nilai IKLH Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tidak tercapaianya target indeks kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022, dikarenakan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri kecil maupun besar, sektor perdagangan dan jasa sehingga menimbulkan timbunan sampah, meningkatkan emisi, meningkatkan beban pencemaran air sungai atau badan air penerima serta mengurangi tutupan lahan. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Melakukan penambahan RTH untuk mengurangi efek dari pencemaran udara.
2. Mengurangi alih fungsi lahan dengan mematuhi Rencana Tata Ruang/Wilayah.
3. Peningkatan Pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup sehingga status mutu air, udara dan vegetasi tetap terjaga.
4. Penegakan hukum lingkungan benar-benar digalakkan dengan memberlakukan sangsi bagi kegiatan/usaha yang tidak mematuhi aturan mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mengembangkan dan meningkatkan jenis investasi yang ramah lingkungan (green investation), sehingga dapat mengurangi dan mencegah dampak negatif pembangunan terhadap kualitas Lingkungan Hidup.
6. Mengembalikan fungsi sungai sebagai badan air, dengan menegaskan larangan membangun di atas sempadan sungai, serta larangan membuang sampah di sungai.
7. Melakukan uji emisi gas buang bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terdiri dari 1 kegiatan sasaran kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan limbah B3.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
7. Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan sampah dan pembinaan, pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perhubungan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 6 kegiatan dengan sasaran kegiatan penetapan rencana induk dan jaringan LLAJ dan penyediaan perlengkapan jalan, Pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/barang antar kota dalam satu daerah, penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah.

2.2.1.11. Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang adalah 253,66 Ha. Sedangkan realisasi kinerja Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 mencapai 149,19 Ha. Indikator kinerja luasan kawasan kumuh merupakan indikator kinerja negatif yang artinya semakin rendah realisasinya akan semakin baik capain kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan dihitung dengan rumus:

$$\textit{Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan} = \frac{\textit{Luas Kawasan Kumuh – luas Kawasan yang tertangani}}{\textit{Luas Kota salatiga}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2022 sebagai berikut:

$$\textit{Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan} = \frac{\textit{253,66 – 149.19}}{\textit{5498 Ha}} \textit{ X 100\%} \quad \textit{=1,84\%}$$

Sampai dengan tahun 2022 capain untuk luasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 1,84% dari target yang ditetapkan sebesar 3,99%, di mana lokasi kawasan penanganan kumuh yaitu di RT 013/RW 005 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir seluas 0.82 Ha dan di RT 005/RW 007 Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir seluas 1,2 Ha. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Luasan kawasan kumuh perkotaan akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 3,99% sedangkan realisasi Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2022 sebesar 1,84% sehingga capaian kinerja yang artinya kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotahun 2022 sebesar 153,88% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2017 sebesar 4,38%, tahun 2018 sebesar 4,08%, tahun 2019 sebesar 2,21%, tahun 2020 sebesar 1,90%, tahun 2021 sebesar 1,94% dan tahun 2022 sebesar 1,84% yang artinya kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan terus mengalami kenaikan

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target Luasan kawasan kumuh perkotaan pada akhir RPJMD adalah sebesar 3,99% sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 luasan kawasan kumuh perkotaan sudah mencapai 1,84%. Dengan

demikian target RPJMD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 153,88%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Target nasional sesuai dengan Program Kotaku (Kota Tanpa (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR sebesar 0%, sementara sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat luasan kawasan kumuh sebesar 1,84% di Kota Salatiga.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan indikator ini dikarenakan:

1. Perbaikan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan
2. Meningkatnya fasilitasi pembangunan sarana prasarana pemukiman berbasis masyarakat.
3. Adanya kerjasama dan peran serta masyarakat yang baik antara Pemerintah Kota Salatiga , stakeholder dan masyarakat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase luasan kawasan kumuh antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman .
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

   Program Penatagunaan Tanah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

2.2.1.12. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 5,45% dan terealisasi sebesar 5,53%, sehingga capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebesar 101,46% dengan kategori Sangat Baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

   Realisasi untuk indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 5,23%, tahun 2018 sebesar 5,21%, tahun 2019 sebesar 5,90%, tahun 2020 sebesar -1,68%, tahun 2021 sebesar 3,33%, tahun 2022 sebesar 5,53% yang artinya realisasi indikator Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menurun dan meningkat pada tahun 2019 . Pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 dan meningkat lagi tahun 2021 dan tahun 2022

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

   Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 5,45%, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 adalah 5.53%. Dengan demikian target RPJMD sudah tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 101.46%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

   Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5.3%, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,31%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga Tahun 2022 sudah mencapai 5.53%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi daripada pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi secara nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab tercapainya target dari indikator ini adalah:

1. Dengan adanya pandemic Covid 19 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga.
2. Tingkat Pengangguran di Kota Salatiga yang cenderung meningkat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penataan persebaran penduduk.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Koperasi dan UKM antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengawasan dan pengendalian koperasi.
2. Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelatihan bagi SDM Koperasi.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan terwujudnya Raperda Koperasi dan Sarasehan.

5. Progran Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pasar murah, subsidi sembako, fasilitasi sertifikasi HALAL bagi produk UMKM, fasilitasi pembentukan kelompok UMKM berbadan Hukum dan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi/UMKM.
6. Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan terwujudnya portal informasi terpadu UMKM.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan daya Tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata serta pengelolaan destinasi pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

2.2.1.13. PDRB per Kapita (ribu rupiah)

Indikator kinerja indeks PDRB perkapita merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama PDRB Perkapita tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 73.893 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 78.987 ribu rupiah sehingga capaian kinerja adalah 106,89% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 60.247 ribu rupiah, tahun 2018 sebesar 64.410 ribu rupiah, Tahun 2019 sebesar 68.886 ribu rupiah, tahun 2020 sebesar 69.142 ribu rupiah, tahun 2021 sebesar 72.388 ribu rupiah dan

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

PDRB per kapita Kota Salatiga tahun 2022 adalah 78.987 ribu rupiah, sedangkan target kinerja PDRB per Kapita yang tertuang dalam RPJMD adalah 73.893 ribu rupiah. Dengan demikian target akhir RPJMD Kota Salatiga tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 106,89%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja PDRB Perkapita.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tambahan investasi masing-masing lapangan usaha berjalan sesuai dengan rencana, baik investasi pemerintah maupun swasta.
2. Sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku ekonomi.
3. Adanya peningkatan daya saing serta promosi-promosi unggulan daerah yang telah dilaksanakan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target PDRB perkapita, terdapat 4 (empat) program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, penerbitan izin usaha perdagangan, dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan metrologo legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

2.2.1.14. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya

Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\textit{investasi tahun n} - \textit{investasi tahun (n-1)}}{\textit{Investasi tahun (n-1)}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2022 sebagai berikut:

$$\textit{-70,29} = \frac{\textit{390,306-1.313,603}}{\textit{1.313.603}} \textit{ X 100\%}$$

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator kinerja Utama Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target indikator Pertumbuhan Nilai Investasi akhir RPJMD tahun 2022 adalah 3% dan terealisasi minus 70,29% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 0% dengan kategori Kurang.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

   Realisasi kinerja untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga tahun 2017 sebesar -42,58%, tahun 2018 sebesar 7,29%, 2019 sebesar 373,11%, tahun 2020 sebesar 0%, tahun 2021 sebesar 154,35% dan tahun 2022 sebesar 0%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021 dan turun kembali di tahun 2022.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

   Target akhir jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, pertumbuhan nilai investasi diharapkan mencapai 3%. dengan demikian target akhir RPJMD tercapai di tahun 2021 dengan tingkat kemajuan sebesar 5145%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

   Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penyebab tercapainya target pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga meskipun dalam kondisi pasca pandemi covid-19 antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha;
2. Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi
3. Meningkatnya kesadaran investor untuk melaporkan data-data investasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya pencapaian target Pertumbuhan Nilai Investasi, terdapat 4 (empat) program dan kegiatan yang mendukung pada DPMPTSP antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembuatan peta potensi investasi.
2. Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyeleggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal

2.2.1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin kecil tingkat pengangguran terbuka, semakin baik capaiannya kinerja pemerintah.

Pengangguran terbuka meliputi:

a. penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
b. penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;

c. penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
d. penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Target tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 adalah 7,5% terealisasi 5.58% dan capaian indikator kinerja sebesar 103,20% dengan katagori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2017 sebesar 3,96%, tahun 2018 sebesar 4,28%, tahun 2019 sebesar 4,43%, tahun 2020 sebesar 7,44%, tahun 2021 sebesar 7,26% dan tahun 2022 sebesar 5.58% Dengan demikian realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga tahun 2020 menurun, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD)

Target akhir jangka menengah RPJMD sebesar 5.73% pada tahun 2022 tercapai 5,58%. Namun demikian persentase TPT tiap tahun cenderung tidak stabil atau selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Target akhir RPJMD dapat tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 102,62%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 Jawa Tengah tercatat 5,57% dan TPT Indonesia tercatat 5,86%.,maka TPT Kota Salatiga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan lebih rendah dari TPT Indonesia.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengangguran menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan tingkat pendapatan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyaknya pengangguran di Kota Salatiga pada tahun 2022 merupakan efek dari pandemi covid-19. Guna mengatasi masalah pengangguran, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan berbagai langkah, antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja.
2. Meningkatkan jumlah pelatihan yang berbasis kompetensi
3. Memfasilitasi Job Fair Tenaga Kerja;
4. Pemberian bantuan sembako

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta.
2. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan.

2.2.1.16. Prosentase Penduduk Miskin

Indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 5.14% dan terealisasi 4,73% sehingga capaian kinerjanya adalah 99.36% dengan kategori Akan Tercapai

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**

   Realisasi Persentase Penduduk Miskin tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 sebesar 4,84%, tahun 2019 sebesar 4,76% tahun 2020 sebesar 4,94%, tahun 2021 sebesar 5,14% dan tahun 2022 sebesar 4.73% Dengan demikian Realisasi Kinerja untuk menurunkan angka penduduk miskin di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

   Target realisasi kinerja Pesentase Penduduk Miskin Kota Salatiga pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 4,7%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 adalah 4,73%, dengan demikian target akhir RPJMD tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 99,36%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

   Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Miskin Indonesia pada tahun 2022 tercatat 9,57%, sedangkan persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 4.73%. Dengan demikian persentase Persentase penduduk miskin Kota Salatiga lebih rendah daripada nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

   Faktor yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga adalah yang berkelanjutan sehingga berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga meliputi 3 kelompok program, yaitu

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
2. Kelompok program pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok program pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah.

f. Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
2. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan data fakir miskin.
4. Program Penanganan Bencana terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

2.2.1.17. Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Adapun analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pola Pangan Harapan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

   Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 sebesar 92,2 dan terealisasi sebesar 95,51sehingga capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah 103.15% dengan kategori Baik. Capaian ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Salatiga semakin baik.

b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.**

   Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 sebesar 91,8, tahun 2018 sebesar 91, tahun 2019 sebesar 93,5, tahun 2020 sebesar 93,9, tahun 2021 sebesar 90,0 dan tahun 2022 sebesar 92,2 Dengan demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami penurunan di tahun 2018, meningkat kembali di tahun 2020 dan kembali menurun di tahun 2021, di tahun 2022 meningkat kembali,

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**

   Target Skor Pola Pangan Harapan pada akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 92,2, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 92,2 dengan demikian target skor pola pangan pada RPJMD 2022 dengan tingkat kemajuan 98.90%.

d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

   Standar nilai Pola Pangan Harapan nasional tahun 2022 adalah 92,9, dengan demikian standar Pola Pangan Harapan Pemerintah Kota Salatiga sama dengan standar nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.**

   Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan Peningkatan KAP (knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan local, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

f. **Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

   Dalam upaya meningkatkan skor Pola Pangan Harapan,

terdapat 9 (sembilan) program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan pangan.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pangan segar.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik hewan tumbuhan dan mikro organisme, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak,
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
7. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran pelaksanaan penyuluhan pertanian.
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis masyarakat veteriner.

2.2.1.18. Skor capaian Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak

Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Capaian Kota Layak anak dijelaskan melalui langkah analisis sebagai berikut:

a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**
   Target skor Capaian KLA tahun 2022 adalah sebesar 680 dan terealisasi sebesar 607,35, sehingga capaian kinerja indikator skor Capaian Kota Layak Anak adalah 89,32 dengan kategori Baik.
b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
   Realisasi kinerja untuk indikator skor capaian KLA tahun 2017 sebesar 275, tahun 2018 sebesar 606,5, tahun 2019 sebesar 794,95, tahun 2020 sebesar 794,5, tahun 2021 sebesar 607,35 dan tahun 2022 sebesar 680 yang artinya realisasi kinerja untuk indikator skor KLA terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 menurun di tahun 2021 dan naik kembali tahun 2022.
c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).**
   Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator skor capaian KLA adalah sebesar 680, sedangkan realisasi tahun 2022 adalah

680, dengan demikian target RPJMD untuk indikator skor capaian KLA tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 100%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2022 sebesar 680, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan , dengsn skor 680 poin tersebut Kota Salatiga mendapatkan Predikat Menuju Kota Layak Anak Kategori Madya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian indikator kinerja untuk Kota Layak Anak tidak terlepas dari peran semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung pengisian dan verifikasi data Kota Layak Anak terkait dalam penyiapan data dan verifikasi Kota Layak Anak yang didalamnya tercakup unsur pemenuhan hak-hak anak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai skor Kota Layak Anak antara lain:

1. Advokasi pendidik sebaya pencegahan kekerasan pada anak di sekolah;
2. Orientasi sistem perlindungan anak (SPA) bagi aparat kelurahan kecamatan
3. Lokakarya Disiplin positif menuju Sekolah Ramah Anak (LRA)
4. Sosialisasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih sayang dalam keluarga

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian KLA, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

2.2.1.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan suatu indeks untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender dijelaskan melalui langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 adalah 97,01 dan terealisasi dengan skor 95,44 sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 98,19% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 sebesar 96,02, tahun 2018 sebesar 95,34, tahun 2019 sebesar 95,12, tahun 2020 sebesar 95,00 dan tahun 2021 sebesar 95,18 dan tahun 2022 sebesar 95.44. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan

Gender (IPG) terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target jangka menengah pada akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 97,20 dan pada tahun 2022 baru tercapai 95,44.Dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,19%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan data BPS, nilai (IPG) Jawa Tengah adalah 92,83 dan nilai IPG nasional adalah 92,07. Dengan demikian, nilai IPG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPG Jawa Tengah dan nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi Pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. nilai IPG dipengaruhi

karena adanya beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian IPG, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hokum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

2.2.1.20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) namun Indeks Pemberdayaan Gender mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Angka IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dijelaskan melalui langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 81,57dan terealisasi sebesar 95.44 sehingga capaian

kinerja pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 117% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017 sebesar 80,83, tahun 2018 sebesar 80,83, tahun 2019 sebesar 82,16, tahun 2020 sebesar 76,19, tahun 2021 sebesar 76,07 dan tahun 2022 sebesar 95.44 Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kenaikan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IDG adalah sebesar 81,57, sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 95.44 Dengan demikian target akhir RPJMD untuk indikator IDG tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 117%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, nilai IDG Jawa Tengah adalah 92.83 dan nilai IDG nasional adalah 75,57. Dengan demikian, nilai IDG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDG Jawa Tengah dan nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian atas perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ataupun di tempat kerja. Kesetaraan Gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Dalam dunia

politik, ketimpangan gender tampak dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPRD jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak meningkat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan skor capaian IDG, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada DP3APPKB antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik hokum sosial dan ekonomi, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

2.2.1.21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 adalah 84,20 dan realisasi nilai IPM tahun 2022 adalah

84,98dengan demikian capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,93dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Indeks IPM tahun 2017 sebesar 81,68; tahun 2018 sebesar 82,41, tahun 2019 sebesar 83,12, tahun 2020 sebesar 83,14, tahun 2021 sebesar 83,60 dan tahun 2022 sebesar 84,98. Dengan demikian realisasi dan capaian Indeks IPM Kota Salatiga terus mengalami kenaikan sebesar 100.93 dengan kategori sangat baik.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target Akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IPM adalah sebesar 84,20 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 84.98 sehingga target akhir RPJMD sudah tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 100.,93%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.

Berdasarkan data BPS, nilai IPM nasional sebesar 72,91 dan IPM Jawa Tengah sebesar 72,79 dengan demikian maka capaian IPM Kota Salatiga telah melebihi capaian IPM Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Per Kapita. Dari ke empat komponen pendukung tersebut realisasi tiap tahun di Kota Salatiga selalu meningkat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang pencapaian kinerja pada indikator IPM adalah pelaksanaan program yang dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta Peningkatan PDRB Per Kapita.

Berdasarkan perhitungan efisiensi 4 komponen di atas maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 100,93%.

2.2.1.22. Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Indeks PMPRB merupakan Penilaian Mandiri yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga dengan menggunakan LHE melalui aplikasi PMPRB, yang selanjutnya akan dievaluasi dan menghasilkan Indeks RB

Indikator kinerja Indeks PMPRB) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks PMPRB dijelaskan melalui langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks PMPRB pada tahun 2022 adalah 65 terealisasi dan 74,98. Nilai Indeks PMPRB ini adalah realisasi PMPRB tahun 2022 dan akan dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian realisasi target Indeks PMPRB tahun 2022 sebesar 115,35% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja nilai indeks PMPRB tahun 2017 sebesar 58,25, tahun 2018 sebesar 75,4, tahun 2019 sebesar 82,11, tahun 2020 sebesar 77,84, tahun 2021 sebesar 70,95 dan tahun 2022 sebesar 74,98 Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Indeks PMPRB terus mengalami kenaikan

sampai dengan tahun 2020 dan menurun di tahun 2021 dan menaik lagi di tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target jangka menengah pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator indeks PMPRB adalah 65 dan pada tahun 2022 sudah tercapai nilai indeks PMPRB 74.98 Dengan demikian target RPJMD untuk indikator Indeks PMPRB telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 115,35%.

Penilaian Indeks PMPRB tersebut digunakan untuk mendukung penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementrian PAN-RB. Pada tahun 2022 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga yaitu 66,85, meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun data series skor Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tahun 2018 : 58,22

Tahun 2019 : 63,39

Tahun 2020 : 64,99

Tahun 2021 : 66,00

Tahun 2022 : 66,85

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks PMPRB.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan meningkatkan nilai PMPRB yang melampaui target disebabkan oleh pelaksanaan PMPRB telah mengacu pada Road Map RB Pemerintah Kota Salatiga tahun 2020-2022 yang tertuang dalam rencana aksi yang dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan instrument penilaian LKE RB.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Inspektorat Daerah antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan pegawasan internal sasaran kinerjanya yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan regular, evaluasi reviu, audit kinerja, audit kepatuhan, probity audit, Kerjasama pengawasan APIP-APH serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal. Sedangkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sasaran kinerjanya yaitu penerbitan LHP tujuan tertentu, pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, dan pemeriksaan khusus, serta terlaksananya penanganan kerugian daerah oleh TPKD dan Sekretariat TPKD.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan perumusan kegiatan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sasaran kinerjanya yaitu dokumen kebijakan pengawasan, SOP, PKPT dan pembaharuan audit charter, sedangkan untuk kegiatan pendampingan dan asistensi sasaran kinerjanya adalah klinik konsultasi, workshop atau sosialisasi SPIP dan Maturitas SPIP, penilaian RB, sosialisasi WBK/WBBM dan pembangunan ZI, operasionalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar, Workshop Pengendalian Gratifikasi, sosialisasi LHKPN/LHKASN, verifikasi LHKASN, peringatan hari anti korupsi, monev korsupgah, survei IPAK dan SPI.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

1. Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
2. Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan

arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pengelolaan nama domain dan sub domain serta pengelolaan e government.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data statistik sektoral, pengembangan infrastruktur serta penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengamanan informasi dan penyediaan layanan keamanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BKPSDM antara lain:

1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan penataan pendaftaran penduduk
2. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan serta pembinaan dan pengawasan, pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BPKPD antara lain:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada BAPPEDA antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan

sasaran kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanan bidang perekonomian dan SDA serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Sekretariat DPRD antara lain Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 8 kegiatan dengan sasaran kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Sekretariat Daerah antara lain:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum dan fasilitasi kerja sama daerah.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 kegiatan dengan sasaran kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan,

pengelolaan pengadaan baran dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks PMPRB, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung pada Kecamatan antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan sasaran kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

2.2.2.1. Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1.1 Urusan Pendidikan

Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	64,32	64,32	89,61	89.61	139.31	Sangat Tinggi
2)	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	100	100	99.23	99.23	99.23	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
3)	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	97	97	90.56	90.56	93.36	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD pada Tahun 2022 yang ditargetkan 64.32% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 89,61%. Angka diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 5-6 tahun yang masih sekolah sebanyak 5010 orang dengan jumlah penduduk umur 5-6 tahun sebanyak 5.591 orang dikalikan 100%

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada Tahun 2022 yang ditargetkan 100% terealisasi targetnya sebesar 99,23%. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah sebanyak 18.013 orang dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun sebanyak 18.153 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada Tahun 2022 yang ditargetkan 97% terealisasi sebesar 90.56%. Angka diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah sebanyak 8.819 orang dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun sebanyak 9.738 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD mencapai lebih 100%, dikarenakan terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD (Golden Age).

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI sebesar 99,23% dikarenakan adanya peran serta masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke Salatiga.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS terealisasi sebesar 90.56% dikarenakan terbangunnya pemahaman masyarakat untuk melanjutkan sekolah anaknya ke SMP?MTS.

Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD 2017-2022, keseluruhan capaian indikator kinerja daerah untuk urusan Pendidikan pada tahun 2022, telah tercapai dengan kategori sangat tinggi. Pencapaian indikator yang melampui target yang telah ditetapkan tersebut, didukung dengan pelaksanaan program pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2. 77. Capaian Program Daerah Urusan Pendidikan

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	64,23	4010	4010	62.43	R
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD	%	93	80.17	80.17	86.20	T
Prosentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK / RA	%	86	64.96	64.96	75.53	T
Prosentase TK / RA yang terakreditasi	%	96,5	85.47	85.47	88.57	T
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	114.07	114.07	114.07	ST
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	83.34	83.34	83.34	T
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	%	100	130.59	130.59	130.59	ST
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	100	66.25	66.25	66.25	S
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0.02	0.02	99.985	ST
Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI	%	1,95	0.08	0.08	101.91	ST
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,12	0.07	0.07	100.05	ST
Prosentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs	%	1,95	0.05	0.05	100.25	ST
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	92,51	88.40	88.40	95.56	ST
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	92,79	98,62	98,62	106.28	ST
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
Prosentase penduduk melek huruf	%	99,13	99,62	99,62	100,49	ST
Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi	%	58	33,33	33,33	57,47	R

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	100	83,33	83,33	83.88	T
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK						
Prosentase guru layak mengajar PAUD	%	76,5	84,91	84,91	113.61	ST
Prosentase guru layak mengajar SD / MI	%	96	97,39	97,39	101,45	ST
Prosentase guru layak mengajar SMP / MTs	%	95,5	97.63	97.63	102.23	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Ketersediaan data informasi Pendidikan	%	100	100,00	100	100,00	ST
Persentase penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	%	100	NA	100	NA	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bulan	12	12,00	12	100,00	ST

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2023

2.2.2.1.2 Urusan Kesehatan

Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	117	117	133,69	133,69	85.74	Tinggi
2)	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10.75	10.75	10.25	10.25	104.65	Sangat Tinggi
3)	Prevelensi Balita Gizi Buruk	%	0.02	0.02	0.05	0.05	-50.00	Sangat Rendah
4)	Success Rate TB	%	85	85	89.81	89.81	105.66	Sangat Tinggi
5)	Prevalensi Hipertensi Penduduk di atas usia 18 tahun	%	1.25	1.25	0.81	0.81	135.20	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Angka kematian ibu (AKI) Kota Salatiga Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan 117 yaitu 133,69/100.000 KH. Apabila dilihat secara perhitungan angka absolut pada Tahun 2022 kematian ibu hamil , ibu bersalin , ibu nifas yang berdasarkan KTP sehingga dimanapun ibu bertempat tinggal akan dilaporkan atau dikembalikan sesuai dengan yang tertera dalam identitas walaupun tidak meninggal di Kota Salatiga dan kematian ibu yang disebabkan oleh penyakit jantung, asma dan TB, 2 (dua) diantaranya tidak tinggal di Salatiga. Hal ini terjadi dikarenakan mobilisasi masyarakat di Kota Salatiga sangat tinggi dengan dibuktikan hasil pelacakan kematian ibu terlihat bahwa ibu yang berKTP di Salatiga namun tidak tinggal di Kota Salatiga.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 10.25/1.000 KH. Angka tersebut berada di bawah target yang telah ditentukan yaitu 10,75/ 1000 KH. Tetapi masih termasuk tinggi kasus kematian bayinya .Secara absolute dari target 25 kasus kematian bayi, terdapat 23 kasus kematian bayi di Kota Salatiga pada Tahun 2022. Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 104,65% masuk dalam kategori berhasil. Perkembangan capaian AKB dari Tahun 2017 – 2022 cenderung fluktuatif dengan capaian sebesar 10,25 per 1000 kelahiran bayi

Prevalensi Gizi Buruk pada Tahun 2022 capaian balita gizi buruk sebesar 0,05%, Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2017-2022 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Upaya yang dilakukan diantaranya

memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunnya penyakit menular terlihat dari Success Rate Tuberkolusis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2022 sebesar 89,81% dengan target 2022 sebesar 85%. Dari 412 Kasus TB di Kota Salatiga, terdapat 379 kasus yang sudah sembuh dan mendapatkan pengobatan lengkap, walaupun nilainya menurun 2,19% dibanding tahun 2021. Perkembangan penanganan Tuberkolusis (TB) cenderung fluktuatif dari Tahun 2017-2022.

Prevalensi hipertensi penduduk usia >18 tahun pada Tahun 2022 mencapai 135.20% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 2022 sebesar 1,25%, perhitungan prevalensi hipertensi penduduk usia ≥18 tahun untuk tahun ini sebesar 0,81%.

Realisasi pada Tahun 2022 menunjukkan angka dibawah target RPJMD Tahun 2022 dan ini menunjukkan indikator program tercapai. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah untuk urusan Kesehatan tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Kesehatan, dengan pencapaian program sebagai berikut

Tabel 2. 79. Capaian Program Daerah Urusan Kesehatan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas	%	100	96.96	96.96	96.96	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	ST
	AKABA per 1.000	/1000 KH	11	11.59	11.59	11.59	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	96,32	96,32	120,40	ST
	Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar	%	100	200	200		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	100	100	ST
	Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	%	1.5	11.52	11.52	192	ST
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	75	79.56	79.56	106.08	ST
	Prosentase kasus stunting di Salatiga	%	10	6.21	6.21	62,1	R

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	45	68,33	68,33	85,20	T
	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	%	92	88,95	88,95	88.95	T
	Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun	%	1.25	0.81	0.81	112.50	ST
	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	100	91.47	91.47	143.69	ST
	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	100	92,3	92,3	108.44	ST
	Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th	%	0.8	0.6	0.6	75	T
	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	%	100	100	100	100	ST
	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	91.36	91.36	162.48	ST
	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	ST
	cakupan pelayanan kesehatan remaja	%	100	100	100	1001	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	91,68	91,68	121,66	ST
	Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	92	88,57	88,57	96,27	ST
	Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100	100	ST
	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	94	94.06	94.06	101,47	ST
	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	79,57	79,57	140,83	ST
	Persentase cakupan kepesertaan JKN	%	100	95,84	95,84	108,50	ST
	Sucses Rate TB Kota Salatiga	%	85	89,8	89,8	105,78	ST
	CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk	/100.000 penduduk	126	479	479	140,89	ST
	Annual Parasite Incident per 1000 penduduk	/100.000 penduduk	<1	0.04	0.04	203.02	ST
	Insident Rate DBD per 100.000 penduduk	%	<15	30	30	122,59	ST
	Angka Penemuan Pheumonia Balita per 1000 penduduk	%	53	55,9	55,9	62.09	R
	Tertanganinya KLB/Bencana x24 jam	%	100	0	0	0	R
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya	%	91	90,00	90,00	97,83	ST
	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	52	30,23	30,23	57,04	R
	Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk	kasus	2	5,00	5,00	250,00	ST
	*Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	91	28,57	28,57	31,05	SR
	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya	%	100	91,69	91,69	98,47	ST
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
	Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok	%	100	100	100	100,00	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal	%	92	100	100	285,71	ST
	Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri	%	82,61	100	100	120,48	ST
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	92	97,55	97,55	104,84	ST
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	87	95,51	95,51	98,70	ST
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100	100	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	77	92,54	92,54	106,08	ST
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	83	93,63	93,63	107,74	ST
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	%	100	100	100	100	ST
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
	Persentase apotik yang memiliki ijin	%	100	100	100	100	ST
	Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT)	%	96	65	65	95,59	ST
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100,00	ST
	Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	bln	12				
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bln	12				
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Bln	12				
	RSUD						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Persentase peralatan medis yang memenuhi standar	%	95,,00	89,17	89,17	94,86	ST
	Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar	%	90,00	75	75	83,33	T
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						
	Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar	%	90,00	97,95	97,95	108,83	ST
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR)	%	85,00	56,37	56,37	67,91	S
	Average Length of Stay (Av LOS)	hari	4,50	3,40	3,40	71,54	S
	Bed Turn Over (BTO)	kali	65,00	54,31	54,31	84,86	T
	Turn Over Interval (TOI)	hari	1,00	2,93	2,93	234,57	ST
	Net Death Rate (NDR)	0/00	24,25	30,91	30,91	126,17	ST
	Gross Death Rate (GDR)	0/00	40,00	46,30	46,30	115,46	ST
	Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	pelayanan	16,00	16,00	16,00	100,00	ST
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90,00	87,39	87,39	99,31	ST

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023

2.2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 80. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	97.75	97.75	99.20	99.20	101.48	Sangat Tinggi
2)	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	97.75	97,75	89.13	89.13	89.13	Tinggi
3)	Persentase Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	%	100	100	101.52	101.52	101.52	Sangat Tinggi
4)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100	100	95.73	95.73	95.73	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Sedangkan dari data updating kondisi jalan tahun 2022 panjang jalan kondisi mantap sepanjang 334,77 km, sehingga prosentase capaiannya adalah 99,20%. Capaian tahun 2022 ini sudah melebihi target kinerja pada indikator capaian RPJMD pada tahun 2022 yaitu senilai 97.75% dengan status Tercapai.

Capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunjukkan dengan jumlah KRK (Keterangan Rencana Kota) sebagai syarat pengajuan IMB. Pada yang terbit dibandingkan jumlah permohonan KRK yang masuk. Dari permohonan yang masuk diterbitkan 221 berkas KRK. Jadi realisasi capaiannya adalah sebesar 96,5%, dengan target pada tahun 2021 adalah 89%. Capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target kinerja pada indikator capaian RPJMD pada tahun 2022 Pada tahun 2022 capaiannya sudah diatas target, hal ini disebabkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam peraturan Tata Ruang Wilayah.

Target Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 adalah 100%. Pada tahun 2022 sudah terbangun sepanjang 5.304,84 m sehingga panjang saluran dalam kondisi baik bertambah menjadi 387.526,51

m dengan persentase sebesar 101,52%. dari total panjang saluran yang menjadi target pembangunan sepanjang 381.719,59 m .

Pada tahun 2021 jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 94,75% atau sepanjang 22.490,6 m dari total panjang irigasi 23.735 m. Pada tahun 2022 panjang jaringan tidak bertambah , tetapi pembangunan jalan inspeksi kondisi jalan baik menjadi 22.722,3 m. Dari data tersebut maspmka capaian persentase jaringan drainase dalam kondisi baik pada tahun 2022 adalah 95,73% dengan status tercapai. Berikut ini merupakan capaian akses layanan air minum dan sanitasi di Kota Salatiga :

Tabel 2. 81. Capaian Akses Layanan Air Minum

NO	AKSES LAYANAN AIR MINUM	TARGET	REALISASI
1.	Air Minum Layak	97,5%	91%
2.	Air Minum Jaringan Perpipaan	100%	82%
3.	Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	0%	18%
4.	Air Minum Aman	79,02%	82%

Tabel 2. 82. Capaian Sanitasi

NO	SANITASI	TARGET	REALISASI
1.	Sanitasi Layak	100%	94,37%
2.	Sanitasi Belum Layak	0%	5,63%
3.	Sanitasi Aman	5,33%	8,37%

Adapun capaian program untuk mendukung realisasi Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 83. Capaian Program Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						
	Persentase kenaikan panjang Drainase	%	51.50	71.92	71.92	139,65	ST
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air						
	Panjang sungai berturap	meter	2400	1364,20	1364.20	56,84	R
	Rasio jaringan irigasi	m/ ha	39	85,63	85,63	219,56	ST
	Program Penyelenggaraan Jalan						
	Persentase jalan kondisi baik	%	97,75	99,20	99,20	101,48	ST
	Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat kapasitas maupun konstruksinya	m2	1.000	618,25	618,25	618,25	ST
	Tersedianya data base jalan dan jembatan	dok	3	6	6	200,00	ST
	Tersedianya dokumen perencana1n jalan dan jembatan	dok	10	4	4	40	SR
	Jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan perjalanan dan LHR	Dok	1	-	-	0,00	SR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						
	Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	%	90	0	0	0,00	SR

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
	Persentase Pemenuhan air baku	%	95,00	NA	NA	NA	NA
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	%	99,61	99,59	99,59	99,59	ST
	Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak	%	87,66	88,19	88,19	98,24	ST
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						
	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	98	100,13	100,13	100,13	ST
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
	Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	dok	2	1,00	1,00	7,69	SR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
	Persentase rekomedasi pemanfaatan tata ruang	%	100	96,51	96,51	96,51	ST
	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PU dan tata ruang		1	1,00	1,00	100	ST
	Program Penataan Bangunan Gedung						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Persentase bangunan gedung ber-IMB	%	35,04	62,31	62,31	155,78	ST
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	100	0	0	0,00	SR
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2023

Perkembangan penataan bangunan gedung di Kota Salatiga, antara lain 4 Kecamatan sudah memiliki Gedung yang baik dan representatif, sedangkan dari 23 Kelurahan, 7 Kelurahan memiliki Gedung yang sangat baik (Kelurahan Salatiga, Kalicacing, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Tingkir Tengah, Ledok dan Gendongan), 11 Kantor kelurahan dalam kondisi baik dan 5 Kantor Kelurahan dalam kondisi yang kurang baik (Kelurahan Bugel, Kumpulrejo, Sidorejo Kidul, Kecandran dan Tingkir Lor). Sedangkan dari perangkat Daerah, ada 7 OPD yang memiliki Gedung kurang layak, yaitu DPUPR, Inspektorat, Bappeda, Disbudpar, Dispora, Diskominfo, Dinkop UMKM.

Perkembangan penataan jasa konstruksi di Kota Salatiga Berdasarkan PP 14 Tahun 2021 pasal 8 dan 9, kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Pembinaan Jasa Konstruksi adalah:

a. Pelatihan Tenaga Terampil.

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 ini telah menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil jenjang 6 dengan jabatan kerja Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama dengan peserta sebanyak 30 orang. Pada bulan September 2023 direncanakan pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil jenjang 4 sebanyak 40 peserta.

b. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Kabupaten / Kota.

   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga telah mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi dengan alamat portal: **jakon.salatiga.go.id**

c. Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi

   Bulan September 2023 direncanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan target 40 BUJK

2.2.2.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 84. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022(%)	Kategori Status
1)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	80	80.00	85.38	85.38	106.73	Sangat Tinggi
2)	Cakupan Ketesediaan Rumah Layak Huni	%	93.62	93.62	91.95	91.95	98.22	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU ditergetkan 80% terealisasi 85.38%, sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 106,73%. Realisasi Capaian Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 80%. Angka ini diperoleh dari luas PSU perumahan dalam kondisi baik sejumlah 52.868,26 m² dibagi luasan PSU perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota Salatiga sejumlah 61.923,36 m² dikalikan 100%. Capaian tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan :

a. Penyelenggaraan penyerahan prasarana dan utilitas perumahan
b. Pembangunan Prasarana Utilitas Perumahan
c. Pemeliharaan dan pengembangan PSU Perumahan untuk meningkatkan kualitas PSU serta memelihara PSU dalam keadaan baik.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni sampai dengan tahun 2022 yang ditargetkan 93,62% terealisasi 91,95%, dengan capaian indikator sebesar 98,22 %. Realisasi Capaian Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 93,62 dengan status Akan Tercapai. Data dasar jumlah rumah layak huni pada tahun awal RPJMD 2017-2022 adalah sebanyak 37.873 rumah. Sejak ditetapkannya RPJMD 2017 – 2022, yaitu pada tahun 2017,

realisasi peningkatan kualitas RTLH adalah sebanyak 1.230 unit, dengan rincian penambahan sebagai berikut :

a. Tahun 2017 sebanyak 411 unit;
b. Tahun 2018 sebanyak 58 unit;
c. Tahun 2019 sebanyak 421 unit;
d. Tahun 2020 sebanyak 340 unit;
e. Tahun 2021 sebanyak 226 unit
f. Tahun 2022 sebanyak 211 unit

Realisasi penambahan tersebut berasal dari pembiayaan APBD sejumlah 870 rumah, DAK sejumlah 455 unit rumah, BSPS sejumlah 333 unit rumah dan dari Baznas sejumlah 3 unit rumah.

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2022 jumlah rumah layak huni di Kota Salatiga menjadi sebanyak 41.302 rumah, yang berasal dari Peningkatan Kualitas rumah sebanyak 1.661 unit serta dari hasil pendataan pembangunan baru rumah swadaya serta CSR 6 unit dan dari hasil pendataan pembangunan baru rumah swadaya dan komersil sebanyak 424 unit. Adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni sebanyak 91,95%, diperoleh dari jumlah rumah layak huni tahun 2022 sebanyak 41.302 unit rumah dibagi jumlah seluruh rumah di Kota Salatiga sebanyak 44.915 rumah dikalikan 100%. Realisasi Capaian Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 98,21% dengan status Akan Tercapai.

Pencapaian Indikator Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung oleh pelaksanaan Program pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga, dengan capaian indikator program pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2. 85. Capaian Program Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Kategori Status
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Program Pengembangan Perumahan						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Kategori Status
	Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan permukiman dan pemanfaatan permukiman dengan rencana kawasan permukiman	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)						
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	80	85,35	85,35	106,69	ST
	Program Pengembangan Perumahan						
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase kawasan kumuh	%	47,63	58,81	58,81	121,47	ST
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)						
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	M2	605,18	2.441,29	2.441,29	403,40	ST
	Program Kawasan Permukiman						
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,62	91,95	91,95	97,63	ST
	Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau	%	83,38	8,59	8,59	10,30	SR
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

2.2.2.1.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 86. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2)	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	/10.000 penduduk	2	2	2,74	2,74	63	Rendah

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, Tahun 2023

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditargetkan 100% pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 100% dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke Satpol PP segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Jumlah penanganan pelanggaran Perda selama tahun 2022 adalah sebanyak 86 kejadian dibagi jumlah pengaduan sebanyak 92 kejadian dikalikan 100%. Beberapa pelanggaran perda sedang di tangani karena prosesnya lama jadi belum terselesaikan pada tahun 2021.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan 2,0 per 10.000 penduduk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, terealisasi 2,74. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 2,74 orang per 10.000 penduduk atau di tahun 2022, atau masih ada 11 kasus penyalahgunaan narkoba.

Capaian Prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk akhir RPJMD ditargetkan 2,0, sedangkan realisasi pada tahun 2021 tercapai 2,74, sehingga capaian kinerja mencapai 63% dengan status Upaya Keras

Realisasi Capaian Indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didukung oleh pelaksanaan program pada Satuan Pamong Praja , Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesbangpol, dengan capaian program sebagai berikut :

Tabel 2. 87. Capaian Program Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
1	**Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
2	**Satuan Polisi Pamong Praja**						
3	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**						
4	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	94,36	94,36	94,36	ST
5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang/ 10.000 penduduk	10	7,00	7,00	63,64	R
6	Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum	%	100	91,75	91,75	91,75	ST
7	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	Orang/ 10.000 penduduk	79	79,00	79,00	100,00	ST
8	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**						
9	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah kebakaran	%	70	64,16	64,16	91,66	ST
10	Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran	Orang/ 10.000 penduduk	2	1,00	1,00	50,00	SR
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	%	80	66,90	66,90	83,63	T
12	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**						
13	**Program Penanggulangan Bencana**						
14	Persentase sekolah tanggap bencana	%	15	NA	NA	NA	NA
15	Persentase desa siaga bencana	%	15	NA	NA	NA	NA
16	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Bulan	12	12,00	12	100,00	ST
17	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
18	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**						
19	Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga	%	0	0	0	100,00	ST
20	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**						
21	Tersusunnya kajian dampak perekonomian	Dokumen	0	0	0		
22	Prevalensi penyalahguna narkoba	Prevalensi	2,3	1,73	1,73	75,22	T
23	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						
24	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	%	12,20	83,33	83,33	626,54	ST
25	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik**						
26	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	0,00	85,00	85,00	85,00	T
27	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						
28	Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
29	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2022

2.2.2.1.6 Urusan Sosial

Tabel 2. 88. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Cakupan Penanganan PMKS	%	21	21	84.44	84.44	421.13	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditargetkan 21% terealisasi 84.44%. Angka ini diperoleh dari jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 10.582 orang dibagi jumlah seluruh PMKS di Kota Salatiga sebanyak 12.792 orang dikalikan 100%. Penanganan PMKS dilakukan melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial mewujudkannya dengan pelaksanaan Program Dinas Sosial, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 89. Capaian Program Daerah Urusan Sosial

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
1	**Urusan Sosial**						
2	**Dinas Sosial**						
3	**Program Pemberdayaan Sosial**						
4	Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembakau, bantuan pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin	%	79,00	100,00	100,00	105,26	ST
5	Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	%	11,00	100,00	100,00	769,23	ST
6	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						
7	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	%	74,00	93,45	93,45	106,19	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
8	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						
9	Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan rekomendasi	%	80,00	100,00	100,00	0	SR
10	Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi	%	90,00	100,00	100,00	0	SR
11	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	61,00	100,00	100,00	113,64	ST
12	Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	17,00	100,00	100,00	476,19	ST
13	Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	64,00	100,00	100,00	129,87	ST
14	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						
15	Persentase (%) anak terlantar yang di tangani	%	43,00	82,14	82,14	157,96	ST
16	Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina	%	26,00	30,00	30,00	96,77	ST
17	Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina	%	44,00	75,00	75,00	141,51	ST
18	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	52,00	NA	NA	NA	ST
19	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	69,00	96,77	96,77	116,59	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
20	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	21,00	53,21	53,21	212,84	ST
21	Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh bantuan/penanganan	%	57,00	52,15	52,15	75,58	T
22	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	9,00	10,89	10,89	99,00	ST
23	Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	%	21,00	100,00	100,00	400,00	ST
24	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						
25	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	76,00	100,00	100,00	109,89	ST
26	**PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**						
27	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	61,00	82,72	82,72	113,32	ST
28	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						
29	Pemeliharaan taman makam pahlawan	TMP	1	1,00	1,00	100,00	ST
30	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan	Kegiatan	5	3,00	3,00	60,00	R
31	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

2.2.2.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	62.4	36.00	95.71	95.71	153.83	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Capaian penempatan tenaga kerja yang ditargetkan 36,00% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 95,71%. Angka ini diperoleh dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan bekerja sebanyak 2164 orang dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (mencari Kartu AK-1) sebanyak 2261 orang dikalikan 100 %. Jumlah ini naik tajam dari Tahun 2020 dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan bekerja sebanyak 774 orang dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar (mencari Kartu AK-1) sebanyak 804 orang, Hal ini di pengaruhi karena ada PT. SCI yang menerima banyak tenaga kerja dan data penempatannya di laporkan ke dinas.

Sedangkan Capaian Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendukung pencapaian Indikator Daerah Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 91. Capaian Program Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar						
	Urusan Tenaga Kerja						
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	100	40,00	40,00	6,96	SR
		%	75	40,00	40,00	75	S
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
2	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	%	15	-	-	0,00	SR
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	36	95,71	95,71	264,39	ST
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,1	70,36	70,36	118,35	ST
5	Tingkat pengangguran terbuka	orang	5171	8.143,00	8.143,00	161,47	ST
6	Jumlah TKI yang terlindungi	orang	32	5,00	5,00	15,63	SR
7	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	%	40	79,00	79,00	197,50	ST
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
8	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas	PP	11	20,00	20,00	181,81	SR
		PKB	2	1,00	1,00	50	SR
9	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	kasus	10	7,00	7,00	70,00	S

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

2.2.2.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tabel 2. 92. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan	%	32.14	25	25	25	77.78	Tinggi
2)	Persentase Perempuan dalam Parlemen	%	32	20	24	24	75.00	Tinggi
3)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41.89	41.89	39.66	39.66	94.68	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Forum Anak merupakan wadah bagi anak anak untuk berkomunikasi, bertukar pendapat, serta berkonsultasi masalah seputar anak. Forum Anak berperan penting sebagai media dalam menyampaikan informasi, ajang berkreasi, serta konsultasi seputar masalah yang dihadapi anak-anak. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu tumbuh kembang, sikap dan karakter anak, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual kepada anak, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan yang ditargetkan 25% terealisasi 25%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan jumlah forum anak yang sudah terbentuk di Kota Salatiga yaitu berjumlah 7 (terdiri dari 1 tingkat kota, 4 tingkat kecamatan dan 2 di tingkat kelurahan) dibagi dengan jumlah wilayah administrasi kelembagaan di Kota Salatiga dengan jumlah 28 (terdiri dari 1 di tingkat kota, 4 di tingkat kecamatan dan 23 di tingkat kelurahan). Sehingga didapatkan perhitungan 7 (tujuh) dibagi 28 (dua puluh delapan) dikali 100% dengan hasil yaitu sebesar 25%. Sehingga tingkat keberhasilannya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 32,14% sebesar 77,78% dengan status Upaya Keras.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari semua pihak dan stakeholder terkait, khususnya dari Rumanksa selaku

Forum Anak Tingkat Kota di Salatiga yang aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak terlepas juga dari keanggotan Rumanksa yang diisi oleh anak-anak milenial yang melek akan teknologi, sehingga lebih bisa meningkatkan kinerja untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada. Di sisi lain juga terdapat faktor penghambat untuk mencapai indikator yaitu bahwa di tahun 2021 terdapat pandemic COVID-19, sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Tetapi kegiatan masih bisa dilakukan lewat online, seperti halnya rapat koordinasi lembaga Forum Anak, webinar, maupun recruitment keanggotaan Rumanksa yang pendaftarannya dilakukan dengan online.

Persentase perempuan dalam Parlemen yang ditargetkan 32%, terealisasi sebesar 24%. Angka ini diperoleh dari jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 6 orang dibagi jumlah seluruh anggota legislatif sebanyak 25 orang dikalikan 100%. Penambah jumlah anggota dewan dikarenakan ada Pengganti Antar Waktu DPRPD Kota Salatiga pada Akhir Tahun 2021. Selain itu capaian 24% telah mendekati pemenuhan kuota 30% perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 41,89% dapat tercapai 39,66% sehingga tingkat keberhasilan dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 94,68% dengan status Akan Tercapai. Angka realisasi kinerja didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk perempuan yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk pekerja Kota Salatiga. Sehingga didapatkan perhitungan 37.599/94.794 x 100% = 39,66%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan program untuk mendukung capaian indikator urutan pemberdayan perempuan dan perlindungan anak, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 93. Capaian Program Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,05	0,01	0,01	20,00	SR
3	Persentase kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
4	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,02	0,037	0,037	185,00	ST
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK						
5	Score capaian KLA	score	675,00	607,35	607,35	89,97	T
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
6	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	jumlah	1,00	1,00	1,00	100,00	ST
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
7	Persentase perempuan yang	%	32,00	24,00	24,00	75,00	S

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	menjadi anggota legislatif						
8	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	%	41,89	39,66	39,66	94,68	ST
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
9	Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Keelurahan	%	25,00	25,00	25,00	77,78	T
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
10	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	15,15	100,00	100,00	550,00	ST
11	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	90,63	100,00	100,00	110,34	ST
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
12	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk	jumlah	1,00	-	-	0,00	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

2.2.2.1.9 Urusan Pangan

Tabel 2. 94. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Skor	14.5	0	0	0	0	
2)	Prevelance of Undernourushment	Skor	6.68	6.68	5.97	5.97	89.37	Tinggi

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU adalah indikator angka rawan pangan di Indonesia dalam upaya mendukung target pencapaian SDGs ke-2. Target pada Tahun 2022 sebesar 6,68 sedangka realisasinya 5,97 dan masuk dalam kategori tinggi. PoU adalah indikator negatif - karena semakin tinggi angka yang diperoleh menunjukkan dampak yang tidak bagus. PoU akan naik atau turun seiring kondisi pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan didukung oleh Pelaksanaan dan pencapaian Program pada Dinas Pangan Kota Salatiga, sebagai berikut:

Tabel 2. 95. Capaian Program Daerah Urusan Pangan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Urusan Pangan						
	Dinas Pangan						
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
1	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	94	94,00	94,00	98,95	ST
2	Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2.487	2.600,00	2.600,00	104,00	ST
3	Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	109,00	79,00	79,00	71,82	S
4	Penguatan cadangan pangan	%	70	70,00	70,00	70,00	S
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
5	Pangan segar aman	%	98	98,00	98,00	98,00	ST
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
6	Ketersediaan pangan utama (beras)	ton/ tahun	20.783	19.286,00	19.286,00	90,98	ST
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
7	penanganan rumah tangga rawan pangan	KK	210	225,00	225,00	86,54	T
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12			0,00	SR

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Pada tahun 2022, capaian indikator urusan pangan adalah sebagai berikut : Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dari target 95%, realisasi 94% atau tercapai sebesar 98,95%, ketersediaan energi per kapita (Kkal/kapita) dari target 2.500 kkal/kapita tercapai 2.600 kkal /kapita atau tercapai 104%. Ketersediaan protein per kapita dari target 110 gram/kapita tercapai 79 gram.kapita atau sekitar 71,81%. Penguatan cadangan pangan dari target 100%, tercapai 70%., Persentase pangan segar aman dari target 100% tercapai 98%.. Ketersediaan pangan utama (beras) dari target 21.198 ton tercapai 19.826 ton atau capaian 93,53%. Penanganan rumah tangga rawan pangan dari target 260 KK tercapai 225 KK.

Dari indikator urusan pangan diatas, masih ada indikator yang jauh dari target yang ditetapkan yaitu : ketersediaan protein per kapita 71,81%, penguatan cadangan pangan sebesar 70%.

Capaian protein per kapita adalah rata-rata konsumsi protein per orang perhari per kelompok makanan. rendahnya capaian protein per kapita pada Tahun 2022, disebabkan karena kemampuan dan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi protein hewani yang rendah akibat kelemahan daya beli masyarakat saat pandemi Covid-19. Akibat lainnnya bisa disebabkan karena masyarakat lebih memprioritaskan membeli kebutuhan dalam kesehatan (multivitamin, obat-obatan dan masker).

Belum optimalnya kinerja program bidang pangan dipengaruhi oleh gejolak pasokan dan harga pangan selama tahun 2022 dengan data sebagaimana berikut :

Tabel 2.96. Harga Bahan Pokok Per Bulan Kota Salatiga Tahun 2022 (Rupiah)

BAHAN POKOK	HARGA BAHAN POKOK PER BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
BERAS PREMIUM	10.470	10.476	10.640	10.696	10.554	10.280	10.542	10.529	10.515	10.469	10.448	10.490
BERAS MEDIUM	9.767	9.762	9.852	9.929	9.629	9.452	9.715	9.725	9.684	9.622	9.621	9.663
BERAS TERMURAH	9.549	9.589	9.557	9.500	9.467	9.405	9.482	9.504	9.469	9.461	9.460	9.473
JAGUNG	6.969	6.090	5.965	5.902	7.004	6.764	6.409	6.345	6.504	6.654	6.567	6.517
KEDELAI	10.636	11.052	12.355	12.440	12.633	12.883	12.578	12.273	12.558	12.587	12.575	12.498
GULA PASIR LOKAL	13.418	13.935	13.950	13.756	13.824	15.708	14.220	14.163	14.363	14.514	14.687	14.432
DAGING SAPI MURNI/RPH	110.119	110.000	117.381	132.083	131.726	122.917	126.027	122.821	127.387	126.213	124.834	125.314
DAGING AYAM RAS	33.655	29.293	31.457	35.012	33.310	34.476	33.564	32.710	33.877	33.593	33.664	33.461
TELUR AYAM RAS	22.308	19.743	23.319	24.268	26.751	27.402	25.435	24.297	25.680	26.032	25.853	25.465
MINYAK GORENG CURAH	19.529	17.957	20.490	21.375	16.042	16.375	18.571	18.448	18.060	17.231	17.528	17.817
TEPUNG TERIGU	8.745	8.351	8.611	8.845	8.979	9.833	9.067	8.924	9.145	9.220	9.281	9.143

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Tabel 2.97. Harga Sayur Mayur Per Bulan Kota Salatiga Tahun 2022 (Rupiah)

BAHAN POKOK	HARGA SAYUR MAYUR PER BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
BAWANG MERAH	26.263	33.684	34.905	35.316	41.643	50.000	58.421	38.095	32.864	33.286	33.045	33.455
BAWANG PUTIH IMPOR	30.211	30.263	32.286	36.789	35.643	32.579	29.895	26.571	27.045	26.000	25.227	24.545
BUNCIS	6.842	5.316	6.714	9.895	12.500	9.947	7.789	5.333	7.455	10.476	10.591	9.182
CABE MERAH BESAR	36.579	33.368	45.000	38.789	38.286	58.947	73.158	54.286	53.409	36.000	33.045	33.864
CABE MERAH KERITING	29.789	31.053	44.286	30.263	30.000	68.947	77.896	60.000	57.500	41.905	30.455	28.455
CABE RAWIT HIJAU	44.263	31.316	31.476	23.368	24.286	53.526	53.947	32.381	33.409	28.095	25.000	33.864
CABE RAWIT MERAH	55.000	35.789	49.762	39.211	37.143	81.842	76.842	50.238	47.727	40.905	30.545	37.500
KEMBANG KOL	16.158	14.526	15.857	19.474	23.857	16.632	15.421	11.048	11.091	13.714	21.500	23.909
KENTANG	13.842	13.579	14.000	14.000	14.500	14.000	14.421	14.238	15.000	14.143	14.000	14.136
KOL BULAT	5.000	4.421	5.000	5.474	8.000	11.526	10.789	8.476	5.227	4.000	4.909	7.523
TIMUN	5.263	5.842	6.333	6.895	6.536	5.737	6.579	5.762	8.409	5.143	5.000	5.455
TOMAT	13.421	13.263	9.095	6.526	9.000	13.895	14.421	8.238	5.636	4.310	11.364	17.364
WORTEL	9.211	9.789	7.143	7.105	8.643	8.737	12.737	13.238	12.773	10.000	9.409	9.773

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

2.2.2.1.10 Urusan Pertanahan

Tabel 2. 96. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dalam Daerah Kota	%	90	90	100	100	111.11	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota yang ditargetkan 90% terealisasi 100%. Hal tersebut adalah karena terselesaikan nya 1 kasus tanah negara yang sudah di laporkan. Capaian ini sudah maksimal dikarenakan lengkapnya dokumen pendukung permasalahan pertanahan. Adapun yang sudah di laksanakan antara lain koordinasi dan pencarian data atau kronologis permasalahan pertanahan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Bidang Aset), Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) dan ATR/BPN Kota Salatiga.

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan didukung oleh pelaksanaan dan pencapaian Program pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga, sebagai berikut:

Tabel 2. 97. Capaian Program Daerah Urusan Pertanahan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Pertanahan						
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah						
1	Cakupan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Daerah	%	100				
	Program Penatagunaan Tanah						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
2	Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah	dok	0	-			
	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah						
	Program Penatagunaan Tanah						
3	Media interpersonal	kali	4	40,00	40,00		
4	Media luar ruang	kali	12				
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						
5	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota	%	90	75,00	75,00	75,00	T

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

2.2.2.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2. 98. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Indeks Pencemaran Air	Nilai	47.87	47.67	45.00	45.00	94.00	Sangat Tinggi
2)	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	84.57	84.57	84.11	84.11	99.46	Sangat Tinggi
3)	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	59.38	59.38	47.28	47.28	79.62	Tinggi
4)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.66	63.51	61.34	61.34	96.36	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Indikator kinerja daerah urusan lingkungan hidup merupakan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah untuk menilai. Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator

kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara. Realisasi tahun 2022 tercapai 84.11%. Prosentase IKLH tahun 2022 tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata nilai Indeks Kualitas Air (bobot 30%) nilai sebesar 45.00 Indeks Kualitas Udara (bobot 30%) nilai sebesar 84.11, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (bobot 40%) nilai sebesar 47,28.

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2022 adalah 96,36% dengan status Akan Tercapai. Tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 diperkirakan karena seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangan industri kecil maupun besar, sektor perdagangan dan jasa sehingga meningkatkan timbulan sampah, meningkatkan emisi, meningkatnya beban pencemaran air sungai atau badan air penerima serta mengurangi tutupan lahan.

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup didukung oleh Pelaksanaan dan pencapaian Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, sebagai berikut:

Tabel 2. 99. Capaian Program Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Lingkungan Hidup						
	Dinas Lingkungan Hidup						
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
1	Dokumen RPPLH	dok	0	1,00	1,00	100,00	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
2	Dokumen KLHS	dok	0	1,00	1,00	100,00	ST
3	Persentase Penegakan hukum lingkungan	%	100	81,00	81,00	81,00	T
	Program Pengelolaan Persampahan						
4	Persentase penanganan sampah	%	70	98,68	98,68	135,18	ST
5	Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	21	17,76	17,76	74,00	S
6	Persentase pengangkutan sampah	%	70	98,68	98,68	135,18	ST
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
7	Pemantauan status mutu air	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						
8	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
9	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%	100	92,00	92,00	92,00	ST
10	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1,00	1,00	100,00	ST
	Program Peningktan PendidIkan, Pelatihan dan Penyuluhan						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
11	Jumlah Penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	buah	2	1,00	1,00	50,00	SR
12	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						
13	Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	40	100,00	100,00	200,00	ST
14	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)						
15	Persentase ruang terbuka hijau	%	16,9	27,70	27,70	158,31	ST
16	Cakupan layanan penerangan jalan umum	%	69,00	64,05	64,05	85,40	T
17	Persentase penurunan pelanggaran penggunaan PJU tanpa meteran	%	46,00	63,91	63,91	130,43	ST
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Berikut ini merupakan data dukung terkait Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) :

Tabel 2. 100. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

No	Uraian	TAHUN					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Total Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan (dokumen)	190	192	200	159	49	izin lingkungan, SPPL, izin IPAL & Izin TPS LB3
2	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi thd IL dan Izin PPLH (perusahaan)	4	11	30	65	53	
3	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan thd IL dan Izin PPLH (persen)	75	81,81	76,76	41,54	5,66	ketaatan yang dimaksud adalah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten /Kota

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

2.2.2.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2. 101. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Cakupan Akta Kelahiran	%	95	95	97.63	97.63	102.77	Sangat Tinggi
2)	Persentase Penduduk ber KTP elektronik	%	100	100	94.32	94.32	94.32	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022

Capaian/realisasi kinerja tahun 2022 adalah sebesar 97,63%, dibandingkan dengan target pada tahun yang sama sebesar 95%. Capaian ini berdasar jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran 51.935 orang dibandingkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun 53.198 orang. Dengan

demikian capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 dibandingkan target adalah 102,77% dengan status Tercapai. Upaya yang telah dilakukan Dinas Dukcapil Kota Salatiga yaitu:

a) Pelayanan Paket Kelahiran *3 in 1*, yaitu untuk pengajuan akta kelahiran anak usia sampai dengan 60 hari, akan sekaligus diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Indentitas Anak (KIA).
b) Sosialisasi lewat media cetak (harian Jawa Pos dua kali dan Suara Merdeka satu kali setahun) dan media elektronik melalui Radio Suara Salatiga setiap hari dalam satu tahun, serta pembuatan leaflet yang diedarkan melalui Kelurahan.
c) Pelayanan Paket Kelahiran *2 in 1*, yaitu untuk pengajuan akta kelahiran anak usia 60 hari sampai dengan kurang dari lima tahun, maka akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA.
d) Sosialisasi melalui pengadaan kalender yang dibagikan kepada kelurahan, kecamatan, ketua RT, ketua RW, Perangkat Daerah dan masyarakat yang datang ke Dinas, didalamnya terdapat prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus dokumen kependudukan

Target cakupan penduduk berKTP el adalah 100%. Cakupan penduduk yang berKTP elektronik pada tahun 2022 adalah 94,32%. Capaian ini berdasar jumlah penduduk terekam KTP 140.309 orang dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP 148.755 orang. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah 94,32%.

Persentase ini belum memenuhi target dikarenakan masih adanya penduduk wajib KTP yang belum terekam, umumnya penduduk berkebutuhan khusus, lansia dan siswa SLTA sebagai wajib KTP pemula. Upaya yang telah dilakukan Dinas Dukcapil Kota Salatiga yaitu perekaman keliling untuk menjangkau penduduk berkebutuhan khusus di wilayah kelurahan dan perekaman bagi wajib KTP pemula di sekolah, tetapi terkendala adanya pandemi COVID-19.

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh Pelaksanaan dan pencapaian Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sebagai berikut:

Tabel 2. 102. Capaian Program Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Program Pendaftaran Penduduk						
1	Persentase cakupan akta kelahiran	%	94	94,00	94,00	98,95	ST
	Program Pencatatan Sipil						
2	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
3	Persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022

2.2.2.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2. 103. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : 4 Kecamatan di Kota Salatiga, Tahun 2023

Target akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator kinerja Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 100% dan realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian target RPJMD untuk indikator kinerja ini telah tercapai . Pencapaian Indikator Kinerja Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dicapai dengan Capaian realisasi pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 2. 104. Capaian Program Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat						
1	Persentase Kelurahan yang berpartisipasi dalam Kegiatan TMMD	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
2	Persentase PKK aktif	%		100,00	100,00		

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat						
3	persentase Posyandu Aktif	%	100			0,00	SR
4	Persentase penyusunan kebijakan pembinaan usaha keehatan sekolah/madrasah berdasarkan rekomendasi	%	80			0,00	SR

Sumber : 4 Kecamatan di Kota Salatiga, Tahun 2023

2.2.2.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 105. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	TFR (Total Fertility Rate)	%	2.4	2.42	1.90	1.90	120.83	Sangat Tinggi

Sumber : DP3APPKB, Tahun 2023

TFR adalah Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang ibu sampai akhir masa reproduksinya. Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 2,42% dapat tercapai 1,90%, tingkat keberhasilan sebesar 121%. Angka tersebut dihitung dengan rumus 5 x ASFR per 1000 kelahiran. Age Specific Fertility Rates (ASFR) adalah angka kelahiran menurut umur. ASFR Kota Salatiga menurut jumlah kelompok wanita usia subur (usia 15-49 tahun) pada tahun 2021 sebesar 0,38. Maka perhitungan TFR= 5 x 0,38 = 1,90%. Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022 adalah 120.83% dengan status tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh pencapaian Indikator Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 106. Capaian Program Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
1	Rasio akseptor KB baru	%	117	48,11	48,11	40,09	SR
2	Cakupan peserta KB aktif	%	80	71,27	71,27	89,59	T
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA						
3	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	%	1:1	2.3:1	2.3:1	100	ST
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn	%	2	1,05	1,05	60,34	R
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA						
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78	71,27	71,27	91,43	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA						
6	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	9	15,34	15,34	174,32	ST
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
7	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
8	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	2,65	0,67	0,67	26,80	SR
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,11	1,18	1,18	56,19	R
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
10	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)		1:2	1:1.96	1:1.96	100	ST
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
11	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
12	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	15	0,67	0,67	6,70	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
13	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	80	82,83	82,83	82,83	T
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	85	75,33	75,33	83,70	T
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

2.2.2.1.15 Urusan Perhubungan

Tabel 2. 107. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Kendaraan Angkatan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis dan Layak Jalan	%	80	80	81.54	81.54	101.93	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2022

Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dihitung dengan jumlah kendaraan umum yang memiliki

KIR dibagi dengan jumlah kendaraan umum, yang ditargetkan 80% pada tahun 2021 terealisasi 81,54%. Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 adalah 101.93 dengan status Tercapai. Penyebab Keberhasilan Indikator tersebut karena adanya komunikasi dan pembinaan kepada sopir dan pemilik angkutan umum.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan pada tahun 2022 didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

Tabel 2. 108. Capaian Program Daerah Urusan Perhubungan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Dinas Perhubungan						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	90,89	95,44	95,44	95,44	ST
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
2	Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	98,7	99,00	99,00	99,97	ST
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
3	Persentase kesediaan angkutan kota	%	88	72,00	72,00	81,82	T
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
4	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	Kasus	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
5	Persentase kendaraan layak jalan melalui uji KIR	%	89,79	81,54	81,54	83,55	T
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

2.2.2.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2. 109. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Tingkat Ketersediaan Media Informasi Publik	%	100	90	93.86	93.86	93.86	Sangat Tinggi
2)	Tingkat Pengembangan Layanan e Government dan Smart City	%	100	91	85	85	85	Tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Tingkat Ketersediaan Informasi Publik yang ditargetkan 90% terealisasi 93.86%. Angka ini diperoleh dari jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersedia dibagi dengan jumlah Seluruh Dokumen DIP. Pada tahun 2022 Jumlah Dokumen DIP yang tersedia sebanyak 41,3 dibagi dengan Seluruh Dokumen DIP sebanyak 44 dokumen dikalikan 100%. Dokumen DIP dari Perangkat Daerah dilakukan digitalisasi, disimpan dan dipublikasi

kepada masyarakat melalui website resmi PPID yaitu ppid.salatiga.go.id sehingga tidak diperlukan tempat penyimpanan arsip dalam bentuk fisik.

Tingkat Pengembangan Layanan E-Government dan Smart City yang ditargetkan 91% terealisasi 85% atau capaian pada kinerja RPJMD s.d tahun 2021 sebesar 93,86% dengan status Akan tercapai. Angka ini diperoleh dari jumlah layanan yang ada sampai dengan tahun 2022 sebanyak 8,5 layanan dibagi jumlah layanan yang ditargetkan selama 5 tahun (periode RPJMD) sebanyak 10 layanan dikalikan 100%.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 110. Capaian Program Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Komunikasi dan Informatika						
	Dinas Komunikasi dan Infomatika						
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
1	Prosentase sekolah dasar dalam penggunaan internet sahat dan aman	%	90	-	-	100	ST
2	Persentase website OPD aktif	%	90	100,00	100,00	100,00	ST
3	Tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang	%	0	-	-	0,00	SR
4	Tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan (comment center)	%	0	100,00	100,00	100,00	ST
5	Prosentase relawan TIK dalam pemanfaatan TIK	%	60	-	-	100	ST
6	Cakupan pengembangan	%	60	-	-	100	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan						
7	Persentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan protokol	%	90				
8	Persentase jumah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik	%	.				
9	§ Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	kali	12	-	-	0,00	SR
10	§ Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau	kali	12	2,00	2,00	3,70	SR
11	§ Media luar ruang seperti media baliho dan vidiotron.	kali	12	4,00	4,00	7,41	SR
12	Sistem penyediaan Layanan Informasi	%	50	100,00	100,00	100,00	ST
13	Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani	%	90	97,00	97,00	97,00	ST
14	% sengketa informasi yg diselesaikan	%	90	-	-	0,00	SR
15	% badan publik menyediakan informasi publik	%	75	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Aplikasi Informatika						
16	Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city	%	82	75,00	75,00	75,00	S
17	Tingkat ketersediaan layanan infrastrastruktur dasar data center,	%	45	45,00	45,00	69,23	S

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	disaster rekoveri center dan TIK Pomkot						
18	Tingkat ketersediaan ekosistem TIK Smart City	%	35	35,00	35,00	70,00	S
19	Jumlah pendataan menara telekomunikasi	Kelurahan	23	23,00	23,00	100,00	ST
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12			0,00	SR

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2.2.2.1.17 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2. 111. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Usaha Mikro Kecil yang dibina	%	69.86	69,86	84,55	84,55	121,03	Sangat Tinggi
2)	Persentase KSP/USP Koperasi Sehat	%	8.53	8.06	6.14	6.14	71.98	Sedang

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2023

Persentase Usaha Mikro (UM) Binaan ditargetkan 69,86% (19.416 dari 22.965 UM) terealisasi 79% .Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi seritifikat halal dan badan hukum kelompok UMKM, Fasilitasi aplikasi pintas umkm, broadcast dan konsultasi baik melalui tatap muka maupun melalui media online.

Capaian Kinerja di Tahun 2022

a. Fasilitasi sertifikat halal bagi 41 produk UMKM
b. Fasilitasi badan hukum kelompok UMKM sebanyak 9 kelompok.

c. Tersusunnya profil UMKM sebanyak 1 dokumen.
d. Terlaksananya keikutsertaan pameran sebanyak 2 kali.
e. Terlaksananya bantuan sembako sebanyak 800 paket bagi 800 UMKM.

Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk yang ditargetkan 5,93% terealisasi 6,62% . Angka ini diperoleh dari jumlah UMKM yang ikut pameran promosi sebanyak 1.683 UMKM dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM sebanyak 25.404. Keikutsertaaan pameran di dalam kota Salatiga yang diselenggarakan oleh berbagai instansi seperti Pameran di Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga (TWSS), bazar yang diselenggarakan oleh Apeksi, Festival Singkong, Pameran dalam event Saya Salatiga, Pameran dalam rangka hari jadi Kota Salatiga, Festival Pangan, dan bazar di kelurahan Noborejo dan Kutowinangun Kidul. Selain itu, diikuti juga pameran di luar kota seperti Pameran di Bandung, di event PRPP, Hari Koperasi, Pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian koperasi dan UKM maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga menargetkan koperasi aktif 85,34% dari 177 koperasi aktif atau ada 151 koperasi di Salatiga yang targetkan aktif. Capaian realisasinya 93 koperasi (52,54%) . Itu berarti (32,8%) di bawah target. Tidak dapat dicapainya target koperasi aktif disebabkan beberapa faktor.

Sampai tahun 2022 banyak koperasi yang mengalamai permasalahan likuiditas. Hal ini diantaranya dikarenakan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan ada yang menutup usahanya. Semakin banyak indikator yang harus dipenuhi untuk memperoleh status koperasi aktif, juga menjadi sebab jumlah koperasi aktif menurun.

Indikator untuk menyatakan suatu koperasi aktif adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
3. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan.
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyataselama 2 (dua) tahun berturut-turut;
5. Tidak melaporkan RAT 3 tahun berturut-turut;

6. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
7. Bermasalah hukum (asset dan pinjaman dengan pihak ketiga);
8. SK pendirian Badan Hukum belum ada;
9. Permasalahan internal koperasi;
10. Koperasi tidak ditemukan di lapangan
11. Data double.
12. Kesalahan input.

Capaian kinerja di tahun 2022 dalam mendukung peningkatan jumlah koperasi aktif adalah:

1. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan Rapata Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 50 orang
2. Terlaksananya pelatihan manajemen resiko sebanyak 50 orang
3. Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi sebanyak 30 orang
4. Terlaksananya pelatihan perkoperasian sebanyak 30 orang
5. Terlaksananya pelatihan SOM dan SOP koperasi sebanyak 30 orang
6. Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian sebanyak 50 orang
7. Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha koperasi sebanyak 25 orang.
8. Terlaksananya gelar produk anggota koperasi dan UMKM sebanyak 2 kali
9. Terlaksananya operasi pasar kedelai sebanyak 100.000 kg.
10. Terlaksananya pemberian paket sembako untuk anggota koperasi.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kopersai dan UMKM Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 112. Capaian Program Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Koperasi dan UKM						
	Dinas Koperasi dan UKM						
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)						
1	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	5.93	6,62	6,62	111,64	ST
	Program Pengembangan UMKM						
2	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	%	69,86	69,86	69,86	121.03	ST
	Persentase koperasi aktif	%	85,31	52.54	52.54	61,59	T
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi						
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi						
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						
3	Persentase koperasi aktif	%	85,31	53.54	53.54	61.59	S
4	Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam	%	23,7	43,01	43.01	181,48	ST
5	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	6.14	10.75	10.75	126.03	ST
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Usaha Mikro (UMKM)						
6	Nilai Omzet Usaha Mikro	juta	154.424	401.759	401.759	407.759	ST
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				-	-	SR
7	Jumlah perda LPS Koperasi	naskah	1	NA	NA	NA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2023

2.2.2.1.18 Urusan Penanaman Modal

Tabel 2. 113. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Kenaikan Nilai Investasi PMA	Milyar Rupiah	314.749	301.249	887.89	887.89	282.09	Sangat Tinggi
2)	Kenaikan Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	166.578	132.36	-90.74	-90.74	-54.47	Sangat Rendah

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

Kenaikan nilai investasi PMA pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp 301,249 milyar rupiah terealisasi Rp 1.221,01 milyar rupiah. Realisasi Capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 adalah 282,09% dengan status tercapai. Penyebab keberhasilan kenaikan nilai investasi PMA di antaranya adalah

- Kondusifnya iklim investasi di Kota Salatiga
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha

- Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi
- Meningkatnya kesadaran Investor untuk melaporkan data-data investasinya ke Lembaga LKPM Provinsi

Kenaikan nilai investasi PMDN pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 132,36 milyar rupiah terealisasi sebesar (Rp 90,741) milyar rupiah. Capaian Indikator Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021 bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja yaitu sebesar -54,47 %. Hal ini di karenakan investor domestik belum kembali aktif setelah terkena dampak dari pandemi COVID 19, produktivitas di Kota Salatiga masih di dominasi oleh investor investor asing.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kota Salatiga, sebagai berikut

Tabel 2. 114. Capaian Program Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Penanaman Modal						
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
	Program Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	milyar rupiah	301.249	1.221.011	1.221.011	387,93	ST
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	milyar rupiah	163.378	92.592	92.592	55,59	R

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
3	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	investor	169	149	149	84,18	T
	Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
	Program Pelayanan Penanaman Modal						
4	Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	%	66,67	95,00	95,00	142,493	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
5	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	75	NA	NA		
	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	100	ST
	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	100	ST

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

2.2.2.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2. 115. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Pemuda Berwirausaha	%	6	6	2.45	2.45	40.83	Sangat Rendah
2)	Persentase Atlet Berprestasi	%	28	28	35,38	35.38	81.64	Tinggi

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2023

Persentase pemuda berwirausaha tahun 2022 ditargetkan sebesar 6% tercapai sebesar 2,45 %. Angka ini diperoleh dengan membandingkan data pemuda yang memiliki pekerjaan wiraswasta dengan jumlah total pemuda di Kota Salatiga. Jumlah pemuda yang berwiraswasta tahun 2022 sebanyak 1.053 orang dan total pemuda sebanyak 43.426 orang. Realisasi Capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2022 adalah 40.83% dengan status Upaya Keras.

Presentase pemuda yang berwirausaha tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena:

a. Kegiatan pelatihan kewirausahaan belum optimal dilaksanakan karena hanya sebatas pelatihan teori dan praktek dalam waktu yang singkat.
b. Tidak ada pendampingan yang berkelanjutan bagi peserta pelatihan kewirausahaan pemuda.
c. Tidak adanya monitoring dan evaluasi bagi pemuda yang telah selesai mengikuti pelatihan kewirausahaan sehingga tidak diketahui efektifitas dan dampak pelatihan kewirausahaan.
d. Tidak ada dukungan modal dan sarana untuk pemuda berwirausaha.

Persentase atlet berprestasi tahun 2022 ditargetkan sebesar 28 % tercapai sebesar 35.38 %. Angka ini diperoleh dengan membandingkan data atlet memperoleh juara pada kejuaraan cabang olahraga PORPROV 2018 dengan jumlah total atlet di Kota Salatiga. Jumlah atlet yang berprestasi tahun 2021 sebanyak 115 atlet dan total atlet sebanyak 305 atlet. Capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi Capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2022 adalah 81,64% dengan status Akan tercapai. Presentase atlet berprestasi tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena:

a. Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak adanya event kejuaraan olahraga.
b. Program latihan dan pembinaan tidak berjalan optimal karena pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 116. Capaian Program Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Kepemudaan dan Olahraga						
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga						
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
1	Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan,	orang	100	82,00	82,00	82,00	T

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	kepeloporan dan kewirausahaan						
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
2	Cakupan Peran Serta Pemuda dalam kegiatan kepemudaan	orang	1.500	355,00	355,00	22,90	SR
3	Persentase Satuan Pendidikan dan Organisasi Pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100	48,00	48,00	48,00	SR
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
4	Jumlah Pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda binaan 200 orang)	orang	40	60,00	60,00	150,00	ST
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
5	Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan	Orang	350	350,00	350,00	87,50	T
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
6	Jumlah cabor olahraga berprestasi	cabor	39	39,00	39,00	100,00	ST
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
7	Persentase lapangan olahraga yang representatif	%	28	25,00	25,00	83,33	T
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						
8	Jumlah Gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan	orang	100	100,00	100,00	100,00	ST
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2023

2.2.2.1.20 Urusan Statistik

Tabel 2. 117. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Ketersediaan Data Statistik	%	100	100	92.38	92.38	92.38	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Jumlah data yang harus ada merupakan data sesuai dengan Permedagri 54 tahun 2010 terdiri dari 30 jenis data dan 210 jumlah data. Persentase Ketersediaan Data Statistik yang ditargetkan 100% terealisasi 92,38% atau capaian pada tahun 2022 sebesar 92,38 %. Angka ini diperoleh dari jumlah Data yang ada sampai dengan tahun 2021 sebanyak 194 data dibagi jumah data yang harus ada yang ditargetkan selama 5 tahun (periode RPJMD) sebanyak 210 data dikalikan 100%. Realisasi capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2021 adalah 92,38% dengan status akan tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Statistik didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 118. Capaian Program Daerah Urusan Statistik

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Statistik						
	Dinas Komunikasi dan Infomatika						
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	92,38	92,38	92,38	ST

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2.2.2.1.21 Urusan Persandian

Tabel 2. 119. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	%	100	100	75.40	75.40	75.40	Tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Tingkat Pengamanan Informasi Daerah yang ditargetkan 100% terealisasi 75,40% atau capaian pada tahun 2021 sebesar 75,40 %. Angka ini diperoleh dari jumlah Data yang ada yang diamankan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 236 data dibagi jumah data yang harus ada untuk diamankan yang ditargetkan selama 5 tahun (periode RPJMD) sebanyak 313 data dikalikan 100%. Realiasasi capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2021 adalah 75,40% dengan status Upaya Keras.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 120. Capaian Program Daerah Urusan Persandian

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
1	Tingkat pengamanan informasi daerah		100	75,40	75,40	75,40	Upaya Keras

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

2.2.2.1.22 Urusan Kebudayaan

Tabel 2. 121. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Kelompok Seni dan Komunitas Budaya yang dibina	%	64	60	58.82	58.82	91.91	Sangat Tinggi
2)	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	10.2	10.2	14.18	14.18	139.02	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina merupakan rasio kelompok yang dibina dengan jumlah kelompok seni budaya yang ada di Kota Salatiga. Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pembinaan kelompok budaya yang ditargetkan 143 kelompok (60%) dari 233 kelompok yang ada di Kota Salatiga dan terealisasi 140 kelompok (58,82%). Realisasi capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2022 adalah 91,91% dengan status Akan Tercapai.

Persentase cagar budaya yang dilestarikan merupakan rasio jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kota Salatiga. Pada Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan 15 buah dari jumlah seluruhnya 141 buah (10,2%) dan terealisasi 20 buah (14,18%) benda situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara. Realisasi capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2022 adalah 139.02% dengan kategori Tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 122. Capaian Program Daerah Urusan Kebudayaan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
1	Persentase/Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3	20	20	500,00	ST
	Program Pengembangan Kebudayaan						
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	19	42	42	221,05	ST
	Program Pembinaan Sejarah						
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	10,2	14,18	14,18	139,02	ST
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

2.2.2.1.23 Urusan Perpustakaan

Tabel 2. 123. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	%	90	90	476	476	528.89	Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan yang ditargetkan 90% terealisasi 476%. Angka tersebut dihitung dengan rumus jumlah koleksi buku di seluruh perpustakaan di Salatiga sebanyak 933.595 dibagi Jumlah penduduk sebanyak 196.082 dikalikan 100%.Pada tahun 2021 terdapat penambahan koleksi sebanyak 158.190, sehingga dengan koleksi buku tahun 2019 sebanyak 56.906 buku dan penambahan 775.405 buku pada tahun 2020, jumlah total koleksi buku per 31 Desember 2021 adalah 933.595 buku.

Capaian persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan tidak adanya

pengadaan buku dan dipengaruhi faktor pembagi yaitu jumlah penduduk. Namun terdapat penambahan koleksi buku dengan adanya hibah dari masyarakat dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 124. Capaian Program Daerah Urusan Perpustakaan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Perpustakaan						
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
1	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	100	71,43	71.43	95,24	ST
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	%	90	476,76	476,76	532,29	ST
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

2.2.2.1.24 Urusan Kearsipan

Tabel 2. 125. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Manajemen Arsip Secara Lebih Selektif (e arsip)	%	50	80	80	80	125	Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Tahun 2021 target yang ditetapkan 31,25 % dapat tercapai 84,93%, realisasi capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2021 sebesar 226,48%. Angka tersebut dihitung dengan rumus jumlah pengguna SKD yang mengumpulkan sebanyak 62 dibagi Jumlah perangkat daerah, kelurahan dan SMP sebanyak 73 dikalikan 100%.

Capaian Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan management arsip secara lebih efektif (e-arsip) 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena adanya pergantian perubahan petugas kearsipan dan masih kurangnya perhatikan kepala perangkat daerah dalam pengelolaan kearsipan. Namun telah dilakukan upaya-upaya diantaranya :

a) Pendampingan pengelolaan arsip dinamis kepada perangkat daerah
b) Seminar kearsipan bagi sekretaris-sekretaris dinas se Kota Salatiga
c) Workshop kearsipan bagi petugas kearsipan di perangkat daerah se-Kota Salatiga
d) Audit kearsipan kepada seluruh perangkat daerah se-Kota Salatiga

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kearsipan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 126. Capaian Program Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)
	Kearsipan						
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
1	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	Orang	85	75	75	17,65	SR
2	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	%	100	100	100	57	SR
3	Jumlah Arsiparis Terampil	Orang	5	6,00	6,00	120	ST
	Program Perlindungan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						
4	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	Boks	120	120	120	96,67	ST

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
5	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	100	84,93	84,93	169,86	ST
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
6	Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	*books*	35	115,00	115,00	328,57	ST

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

2.2.2.1.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 127. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Ha	1000	810	715.589	715.589	71.56	Upaya Keras

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Produksi perikanan budidaya yang ditergetkan 810 ton terealisasi tidak mencapai target yaitu mencapai 715,589 ton, dengan realisasi capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2021 adalah 71,56% dengan status Upaya Keras. Kegagalan pada indikator ini disebabkan oleh harga pakan yang terus menerus naik akibat pandemi COVID 19 dan juga penghapusan anggaran kegiatan yang mendukung produksi perikanan budidaya.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 128. Capaian Program Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Perikanan dan Kelautan						
	Dinas Pertanian						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
1	Produksi perikanan budidaya	ton	900	715,589	715,589	71,56	S
2	Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan	Rb Rp/bln	2.000	1.000,00	1.000,00	40,00	SR
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
3	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
4	- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yg Terbina	Klp	73,00	100,00	100,00	133,33	ST
5	- Jumlah Kelompok Pembudidya Ikan	klp	73,00	100,00	100,00	133,33	ST
6	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	47,95	35,00	35,00	65,63	S
7	- Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budiddaya Ikan yang Baik (CBIB)	klp	35,00	35,00	35,00	87,50	T
8	- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	klp	73,00	100,00	100,00	133,33	ST
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
9	Produksi Benih BBI	ekor	5.750.000	408.007,00	408.007,00	6,28	SR
10	Produksi Benih Usaha	ekor	15.000.000	40.022.900,00	40.022.900,00	250,14	ST

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Pembenihan Rakyat (UPR)						

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

2.2.2.1.26 Urusan Pariwisata

Tabel 2. 129. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Jumlah Kunjungan Wisata	Org	160,000	80,000	183,210	183,210	114.51	Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2022

Jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan 80.000 orang terealisasi 183.210 orang. Sedangkan realisasi capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2021 adalah 114,51% dengan status kategori tercapai. Peningkatan jumlah wisatawan disebabkan karena adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan/tingkat hunian hotel/MICE dan obyek wisata, adanya pembangunan, /perbaikan sarana dan prasarana wisata , kegiatan promosi melalui pameran promosi dan beragai media, pencanangan kota gastromi, penetapan kota kreatif, dan event/pentas gelar seni, yang dilaksanakan di dalam/luar Salatiga ataupun melalui online, pelatihan SDM pariwisata,serta partisipasi aktif dari pemerintah, pokdarwis, stakeholder, masyarakat dan pelaku pariwisata lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 130. Capaian Program Daerah Urusan Pariwisata

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Pariwisata						
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
1	Jumlah kunjungan wisata	orang	138.396	183.210	183.210	130,96	ST
	Program Pemasaran Pariwisata						
2	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	buah	6	24	24	400,00	ST
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						
3	Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	kelompok	5	5	5	100,00	ST

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

2.2.2.1.27 Urusan Pertanian

Tabel 2. 131. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
	Pertanian							
1)	Produktivitas Tanaman Pangan Utama							
	Padi	Ton/ Ha	6.73	6.66	6.52	6.52	96.88	Akan Tercapai
	Jagung	Ton/ Ha	5.36	5.31	5.82	5.82	108.58	Tercapai
2)	Produksi Daging Sapi Potong	Kg	1,018,530	1,018,530	1,395,800	1,395,800	137.04	Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Produktivitas tanaman pangan utama terdiri dari padi dan jagung. Produktivitas padi yang ditargetkan 6,66 ton/ha terealisasi 6,52 ton/ha atau realisasi capaian terhadap RPJMD s.d tahun 2021 adalah 96,88% dengan status Akan tercapai. Produktivitas jagung yang ditargetkan 5,31 ton/ha terealisasi 5,82 ton/ha realisasi capaian terhadap RPJMD s.d tahun 2021 adalah 108,58% dengan status Tercapai.

Produktivitas padi dan jagung dipengaruhi oleh curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan munculnya bakteri, adanya organisme penggangu tanamana: tikus dan jamur serta beberapa kondisi saluran irigasi yang rusak saat musim kemarau. Walaupun demikian pencapaian target tidak sesuai yang diharapkan karena masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian dan adanya hama padi yang belum teratasi. Wilayah Salatiga adalah wilayah perkotaan, oleh karenanya produktivitas padi dan jagung tersebut sudah termasuk kategori baik.

Produksi daging sapi potong yang ditargetkan 1.018.530 kg terealisasi 1.395.800 kg realisasi capaian terhadap RPJMD s.d tahun 2021 adalah 137,04% dengan status tercapai. Produksi daging ini dipengaruhi oleh ketersediaan sapi dan keberadaan rumah potong hewan (RPH) yang layak/baik sehingga kuantitas dan kualitasnya terjaga. Kebijakan saat pandemi COVID 19 pelaksanaan penyembelihan hewan qurban harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Sapi di Kota Salatiga selain dipasok dari wilayah dalam kota juga dipenuhi dari wilayah penyangga sekitar yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 132. Capaian Program Daerah Urusan Pertanian

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	Pertanian						
	Dinas Pertanian						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						

No	Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
1	Produktivitas Tanaman Pangan Utama						
	- Padi	Ton /ha	6,66	6,52	6,52	96,89	ST
	- Jagung	Ton /ha	5,31	5,82	5,82	108,58	ST
2	Produktivitas pertanian tanaman hortikultura	Ton /ha					
3	Produksi tanaman perkebunan utama	Kg/ha					
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
4	Cakupan Bina Kelompok Tani						
	- Pemula	%	26	44,23	44,23	189,18	ST
	- Lanjut	%	47	44,23	44,23	90,82	ST
	- Madya	%	25,32	11,54	11,54	45,58	SR
	- Utama	%	1,95	-	-	0,00	SR
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
5	Produksi Daging Sapi Potong	kg	1.018.530,00	1.395.800,00	10.185.530,00	13,70	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
6	Angka Kematian/Mortalitas Ternak	ekor/ tahun	0	0	0	0	SR
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

2.2.2.1.28 Urusan Perdagangan

Tabel 2. 133. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.72	4.69	-3.76	-3.76	-79.66	Upaya Keras

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2023

Realisasi sektor perdagangan terhadap PDRB (N-1) tahun 2020 sebesar -3.76%, sumber data dari BPS Kota Salatiga tahun 2021 terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 yang terdiri dari komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Kota Salatiga. Sedangkan untuk Realisasi tahun 2021 Kontribusi Sektor Perdagangan menurut Lapangan Usaha adalah 13,02% berdasarkan rilis Salatiga dalam Angka 2022.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 134. Capaian Program Daerah Urusan Perdagangan

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Perdagangan						
Dinas Perdagangan						
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang	%	85,00	88,00	88,00	97,78	ST

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	Komoditi	30,00	30,00	30,00	90,91	ST
Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan kementrian perdagangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
Perkembangan harga kebutuhan pokok	Daftar harga	1	1,00	1,00	100,00	ST
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	96,00	96,00	96,00	96,00	ST
Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	%	100,00	97,49	97,49	97,49	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
Perkembangan nilai ekspor	*Rp*	302.255.375	183.759.104,88	183.759.104,88	60,19	R
Perkembangan nilai impor	*Rp*	105.902.990	62.063.238,64	62.063.238,64	59,80	R
Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	*%*	4,65	(3,76)	(3,76)		
Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	*produk*	4	4,00	4,00	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
Program persentase lokasi PKL yang tertata	*%*	61	60,00	60,00	82,19	T
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	*%*	80	80,00	80,00	94,12	ST

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	80,00	80,00	80,00	91,95	ST
Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan	dokumen	1	1,00	1,00	100,00	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2023

2.2.2.1.29 Urusan Perindustrian

Tabel 2. 135. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Presentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0.3	0	0	0	0	Perlu Upaya Keras

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 0,30% dan terelasasi 0% yang diperoleh dari jumlah IKM 2022 sebanyak 1611 dikurangi jumlah IKM tahun 2021 sebanyak 1611 dibagi jumlah IKM di tahun 2021 sebanyak 611 dikali 100%.

Capaian kinerja sebesar 0% angka ini diperoleh dari realisasi 2022 dibagi target 2022 dikali 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar -022% maka capaian tahun 2022 bergerak ke arah positif walaupun masih sebesar 0%.

Tabel 2. 136. Capaian Program Daerah Urusan Perindustrian

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
Pertumbuhan IKM	%	0,30	(0,22)	0,22	-73,33	SR
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	30,00	29,73	29,73	99,10	ST
Persentase industri kecil dan menengah	%	2,00	85,91	85,91	4295,50	ST
Cakupan kelompok IKM yang dibina	%	1,20	5,33	5,33	444,17	ST
Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	%	1,00			0,00	SR
Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Unit	9,00	7,00	7,00	77,78	T
Jumlah klaster industri yang berkembang	Klaster	5,00			0,00	SR
Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Produk	20	-	-	0,00	SR
Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	3,00	3,66	3,66	122,00	ST
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100	ST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

2.2.2.1.3. Urusan Transmigrasi

Tabel 2. 137. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Peminat Transmigrasi	%	5	5	0	0	0	Perlu Upaya Keras

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Pada tahun 2022 target persentase peminat transmigrasi sebesar 5 % dengan realisasi kinerja sebesar 0 dimana capaian kinerja sebesar 0% yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi tahun 2022 sebesar 0 dengan target 2022 sebesar 5% . Pada tahun 2021 target persentase peminat transmigrasi sebesar 5% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 25 % dengan target 2022 sebesar 5 %.

Walaupun Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian hanya 50%, tetapi Program pendukung pencapaian indikator urusan transmigrasi tetap yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sebagai Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian, sebagai berikut :

Tabel 2. 138. Capaian Program Daerah Urusan Transmigrasi

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	KK	5	1,00	1,00	20,00	SR
Prosentase Peminat Transmigrasi	%	5	25,00	25,00	500,00	ST

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

2.2.2.1.30 Fungsi Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 139. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
	Perencanaan							
1)	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen Perencanaa	%	42	42	72.76	72.76	173.24	Tercapai
2)	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3)	Persentase Kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	Penelitian dan Pengembangan							
4)	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	70	73.33	73.33	73.33	Akan Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2023

Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan yang ditargetkan 42% terealisasi 72,76%. Hasil ini diperoleh dari jumlah usulan yang masuk dalam RKPD sebanyak 1.464 usulan dibagi jumlah seluruh usulan yang masuk sebanyak 2.012 usulan dikalikan 100%. Keberhasilan pencapaian target didukung dengan pemberlakuan sistem perencanaan yang mengakomodasi rekap usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan terekamnya data usulan masyarakat dalam sistem maka pemantauan usulan menjadi lebih valid dan terukur. Selain itu dengan semakin sadarnya masyarakat dalam mengusulkan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun yang berkenaan menjadikan tingginya usulan yang terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada Tahun 2021 yang ditargetkan 70% terealisasi 73,33%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program Perangkat Daerah yang masuk dalam SiDA (Sistem Inovasi Daerah) sebanyak

22 program dibagi jumlah seluruh program dalam SiDA sebanyak 30 program dikalikan 100%. Keberhasilan pencapaian target dicapai karena OPD yang mengampu pemanfaatan kelitbangan yang tercantum pada Perwali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Menuju Smart City Tahun 2017-2022, masih menganggarkan kegiatan pendukung tahun 2021 serta telah menssoialisasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD pada Tahun 2022 yang ditargetkan 100% terealisasi 100% Hasil ini diperoleh dari jumlah program yang masuk dalam RKPD sebanyak 156 program dibagi jumlah seluruh program dalam RPJMD sebanyak 156 program dikalikan 100%. Di Tahun 2021 terjadi perubahan nomenlaktur Program dari Permendagri No. 13 Tahun 2016 menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka diperlukan pemetaan nomenlaktur tersebut berdasarkan indikator program pada RPJMD 2017-2022. Dengan demikian semua rencana program pada RPJMD 2017-2022 telah diakomodir pada program RKPD 2022.

Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD pada Tahun 2021 yang ditargetkan 100% terealisasi 100%Hasil ini diperoleh dari jumlah program yang masuk dalam APBD sebanyak 156 program dibagi jumlah seluruh program dalam RKPD sebanyak 156 program dikalikan 100%. Komitmen Bappeda dalam mengawal kesesuaian program RKPD ke dalam APBD dengan menerapkan aplikasi SIPD secara ketat dan simultan menghasilkan kesesuaian 100%. Aplikasi SIPD diatur sedemikian rupa sehingga pada proses penyusunan APBD tidak diperkenankan menambah program baru.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 140. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah	%	70	64,50	64,50	89,58	T
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					19	SR
Terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dunia usaha	dokumen	2	NA	NA	NA	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	75	100,00	100,00	125,00	ST
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	%	75	100,00	100,00	125,00	ST
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					100	ST
Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan	%	0	-	-	0,00	SR
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir	%	42	72,76	72,76	173,24	ST
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD		100			0,00	SR
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD		100	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Ekonomi	%	85	100,00	100,00	111,11	ST
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Ekonomi	%	85	100,00	100,00	111,11	ST
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang	%	100	100,00	100,00	100,00	ST

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat						
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang	dokumen	0	-	-	0,00	SR
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen SPKD	%	80	NA	NA	NA	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersusunnya dokumen SPKD	dokumen	0	NA	NA	NA	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota	dokumen	0	NA	NA	0	SR
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					7	SR
Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal retensi arsip	kegiatan	0	NA	NA	#VALUE!	#VALUE!
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan ketahanan pangan	dokumen	0	-	-	0,00	SR
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan	%	25	30,00	30,00	120,00	ST
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1	SR
Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat	kegiatan	0	-	-	0,00	SR
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	73,33	73,33	73,33	S
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam	%	85	100,00	100,00	111,11	ST
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	%	85	100,00	100,00	111,11	ST
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	20,00	SR
Nilai Lakip Bapelitbangda		74	NA	NA	NA	

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2023

2.2.2.1.31 Fungsi Penunjang Keuangan

Tabel 2. 141. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keuangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
	Keuangan							
1)	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Masih dalam penilaian	Masih dalam penilain	1OO	Tercapai

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tahun 2022

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan capaian kinerja untuk tahun 2021 sesuai dengan target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan merupakan keempat kalinya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya di raih di tahun 2017, 2018, 2019 , dan 2021 serta mendapatkan penghargaan berupa piagam yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan tahun 2022 masih dalam penilaian

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keuangan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 142. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Keuangan

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Badan Keuangan Daerah						
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Peningkatan PAD	%	10,0	3,13	3,13	31,30	SR
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini	WTP	Masih dalam penilaian	Masih dalam penilaian	100	ST
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	100,00	ST

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tahun 2023

2.2.2.1.4. Fungsi Penunjang Kepegawaian

Tabel 2. 143. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
1)	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	90.6	71.00	52.04	52.04	57.44	Upaya Keras

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan 71.00% hanya terealisasi sebesar 52.04%. Indeks Profesional ASN dilakukan penilaian dengan metode

atau unsur yang dinilai berupa Penilaian Kompetensi, Penilaian Kompensasi, Penilaian Kinerja dan Penilaian Disiplin. Dengan rincian Dimensi Kualifikasi sebesar 12,61%, Dimensi Kompetensi sebesar 11,61%, Dimensi Kinerja sebesar 23,18% dan Dimensi Disiplin sebesar 5%. Penilaian Indeks Profesional ASN dilakukan terhadap 33 Perangkat Daerah se-Kota Salatiga. Realisasi capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2021 adalah 57,44% dengan status Upaya Keras.

Pengukuran IP ASN memiliki 4 dimensi yaitu Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin. Bobot masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut Kualifikasi 25% yang berasal dari pendidikan terakhir, Kinerja sebesar 30% yang berasal dari penilaian SKP dan perilaku kerja pegawai, Kompetensi sebesar 40% yang berasal dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, seminar/workshop/magang/kursus, Disiplin sebesar 5% yg berasal dari riwayat pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang menghambat pencapaian target IP ASN adalah dari dimensi Kualifikasi masih banyak PNS dikota Salatiga yang memiliki kualifikasi pendidikan dibawah S3, karena capaian nilai total 25 dari dimensi kualifikasi bisa tercapai kalau semua pegawai memiliki kualifikasi pendidikan S3. Dari penilaian IP ASN tahun 2021 nilai dari dimensi kualifikasi sebesar 12,61. Data pendidikan PNS Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : SD 71 orang, SLTP 75 orang, SLTA 373 orang, D1 3 orang, D2 16 orang, D3 529 orang, D4 56 orang, S1 1821 orang, S2 372 orang, S3 2 orang, sehingga dari dimensi kualifikasi sangat sulit untuk memperoleh nilai maksimal, sehingga perlu dorongan/upaya untuk meningkatkan minat pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Dari dimensi kompetensi nilai yang diperoleh hanya 11,25 sedangkan dimensi ini mempunyai bobot terbesar yakni 40%. Kendala pencapaian dimensi kompetensi adalah belum semua pejabat struktural mengikuti diklat kepemimpinan, data di tahun 2021 sebanyak 39 orang pejabat eselon III dan 116 orang pejabat eselon IV belum mengikuti diklat kepemimpinan. Belum adanya kesadaran dari pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dari diklat teknis, seminar, workhsop, magang, kursus dan sebagainya, sehingga yang mengikuti diklat teknis hanya sedikit.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kepegawaian didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 144. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kepegawaian

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah						
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	6,71	6,89	6,89	121,30	ST
Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	%	13,71	13,89	13,89	97,41	ST
Program Kepegawaian Daerah						
Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	%	2,20	4,94	4,94	218,58	ST
Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	%	30,00	5,48	5,48	18,30	SR
Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	ST
Program Kepegawaian Daerah						
Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			100,00	100,00		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah						
Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	%	100	-	-	0,00	SR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

2.2.2.1.32 Fungsi Penunjang Pengawasan

Tabel 2. 145. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Meningkatnya Level Kapabilitas Inspektorat	Level	3	3	3	3	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
2)	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	100	Tercapai

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2023

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Target Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Salatiga tahun 2022 adalah level 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Salatiga. Untuk Level 3, sebagaimana laporan Nomor PE.09.03/LHP-775/PW11/6/2022 tanggal 5 Desember 2022, Level Kapabilitas APIP Kota Salatiga mendapat nilai 3. Capaian target yang sebesar 100% ini kategori sangat berhasil karena melampui target yang ditetapkan. Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Salatiga sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan *(enabler),* Aktivitas Pengawasan *(delivery)*, dan Kualitas Pengawasan *(result)*.

Tercapainya level kapabilitas Inspektorat level 3 (tiga) pada tahun 2022 merupakan hasil dari komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern yang berfungsi sebagai early warning system dan pencegahan dini akan kemungkinan terjadi fraud dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sedangkan untuk Tingkat Maturitas SPIP, target nilai Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2019 adalah 3 (tiga). Hasil Quality Assurance (QA) atas penilaian mandiri maturitas SPIP tertuang pada Laporan Pelaksanaan Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Salatiga yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor LQA-944/PW11/3.1/2018 tanggal 18 Desember 2018 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kota Salatiga mendapat nilai 3,147 (L3 terdefinisi).

Tercapainya tingkat maturitas SPIP pada tahun 2021 tak lepas dari peran APIP dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern dan semangat meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 146. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Program Penyelenggaraan Pengawasan						
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	85,0	93,00	93,00	106,90	ST
Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu	%	90,0	90,00	90,00	94,74	ST
Meningkatnya level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Skor	68,0	70,95	70,95	101,36	ST
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						
Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3,0	3,15	3,15	104,90	ST
Tingkat Maturitas SPIP	level	3,0	3,00	3,00	100,00	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Persentase terwujudnya Kebijakan Pengawasan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2023

2.2.2.1.33 Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Tabel 2. 147. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Persentase Jumlah Produk yang didampingi oleh Tenaga Ahli DPRD	%	90	89	88	88	97.78	Akan Tercapai

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2023

Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD dapat tercapai 100% karena telah tersusun 4 (dua) Naskah Akademik/Raperda atas inisiatif DPRD tahun 2020 dari yang direncanakan sebanyak 4 (empat) Naskah Akademik/Raperda.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 148. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi	%	89,00	89,00	89,00	98,89	ST
Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD	%	68,00	68,00	68,00	97,14	ST
Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	89,00	89,00	89,00	98,89	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2023

2.2.2.1.34 Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah

Tabel 2. 149. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Skor LAKIP /LKjIP	Nilai	67.5	67.5	64.15	64.15	95.04	Akan Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2023

Target tahun 2022 untuk indikator kinerja Rata-rata Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebesar 72,5 dan terealisasi sebesar 83,23 dengan

capaian kinerja 114,80% dengan kategori sangat baik. Skor ini merupakan rata-rata skor kepuasan masyarakat dari 95 Unit Pelayanan Publik yang terdiri dari 32 Perangkat daerah, kelurahan, dan UPT. Skor tersebut menunjukkan kinerja unit pelayanan termasuk kategori baik dengan nilai mutu pelayanan B.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 150. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Terselenggaranya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi	%	85	80,00	80,00	88,89	T
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD	%	92	92,00	92,00	97,87	ST
Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	%	89	89,00	89,00	98,89	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur	%	95	92,22	92,22	97,07	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Prosentase peserta yang mengikuti bimtek barang/jasa	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Tersedianya database capaian kinerja Setda	dokumen	1	1,00	1,00	100,00	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA					90	T

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah daerah	Skor	88	88,00	88,00	97,78	ST
Cakupan Koordinasi Pemerintah daerah		77			0,00	SR
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Jumlah rekomendasi sinkronisasi penguatan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal)	Rekomendasi					
Presentase UKS yang memiliki strata Paripurna	%					
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Peningkatan skor LPPD dan Ketepatan waktu penyampaian LKPJ	skor	-		-	-	
	waktu					
Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan	%	95	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Terciptanya pengendalian pencemaran lingkungan hidup						
Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan lingkungan	%	80	138,89	138,89	154,32	ST
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-				
Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan	%	95			0,00	SR
Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah Tepat Waktu	dok	1			0,00	SR
Prosentase OPD di dalam menginput RUP	%	100	95,15	95,15	95,15	ST
Indeks Reformasi Birokrasi	%	65	66,85	66,85	100	ST
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya	PKS	-				

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Prosentase Raperda atas usul Walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah	%	100	150,00	150,00	150,00	ST
Prosentase rancangan Perwali yang ditetapkan	%	100	332,50	332,50	332,50	ST
Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh pemerintah daerah	%	100	-	-	0,00	SR
Prosentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan Walikota	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Prosentase Sosialisasi Peraturan perundang undangan	%	100	-	-	0,00	SR
Prosentase produk hukum daerah yang diundangkan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD	%	80	25,20	25,20	28,00	SR
Terwujudnya Penataan dan dan evaluasi dibidang kelembagaan	%	100 8 OPD 33 OPD			100 8 OPD 33 OPD	ST
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintahan	%	70	70,00	70,00	77,78	T
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan pangan						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi					
Presentase fasilitasi penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan zakat	SK UPZ					
Jumlah rekomendasi kebijakan hibah daerah	Rekomendasi					
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Presentase rakor pengendalian inflasi dalam satu tahun	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program SIKP	%	60	60,00	60,00	85,71	T
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		-				
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di bidang promosi & investasi	bidang	-		-	-	SR
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemuda	Rekomendasi					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang olahraga	Rekomendasi					
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	orang					
banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin yang terbina di Kota Salatiga	kegiatan	1 keg dan 94 modin	1 keg dan 124 modin	1 keg dan 94 modin	1 keg dan 94 modin	ST
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat kota	agama / keyakinan					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Terlaksananya pensertifikatan tanah milik pemkot dan masyarakat		-		-	-	ST
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Persentase terdistribusinya juknis administrasi pembangunan	%	100	-	-	0,00	SR
Presentase terdistribusinya juklak APBD	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Presentase terdistribusinya buku standarisasi harga	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Presentase deviden BUMD dalam PAD	%	96			0,00	SR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda	%	98	84,03	84,03	85,74	T
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan	%	100			0,00	SR
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Kecamatan Kelurahan, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan	%					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	%					
Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang dipergunakan	%	1	1,00	1,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol	%					
Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik	%					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Persentase fasilitasi pengadaab barang jasa melalui ULP	%	100			0,00	SR
Prosentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan yang dihasilkan	%	80	80,00	80,00	100,00	ST
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Presentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	88,40	88,40	88,40	T
Presentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	96,25	96,25	96,25	ST
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan lingkup subbag pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan	%					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Peningkatan skor LPPD dan ketepatan waktu penyampaikan LKPJ	skor	3	3,44	3 ,44	112,79	ST
	waktu	30 Maret			30 Maret	ST
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Lingkup subbag pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan	%	83		100	0,00	SR
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah	bidang	5			0,00	SR
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih	%	65	88,00	88,00	135,38	ST
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Meningkatnya koordinasi bidang pariwisata	%	80			0,00	SR

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2023

2.2.2.1.35 Fungsi Penunjang Kecamatan

1) Kecamatan Sidomukti

Tabel 2. 151. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2222 (%)	Kategori Status
1)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidomukti	%	80	80	84.92	84.92	106.15	Tercapai
2)	Tingkat Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Sidomukti	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3)	Cakupan RW Berprestasi di Bidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Kecamatan Sidomukti	%	75	0	0	0	0	Upaya Keras
4)	Persentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Sidomukti	%	45	45	79.71	79.71	177.13	Tercapai
5)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sidomukti	%	80	78	89.11	89.11	111.39	Tercapai

Sumber : Kecamatan Sidomukti, Tahun 2023

Pada tahun 2022 target tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke Wajib Pajak adalah 80%. Adapun realisasinya sebesar 84,92%. Jumlah WP seluruh Kecamatan Sidomukti tahun 2022 sebesar 17.119 orang. Jumlah SPPT yang sudah tersampaikan tahun 2022 sebesar 15.431 lembar.

Dalam upaya meningkatkan peran kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat dilakukan pembinaan, fasilitasi kegiatan, pemberian stimulan terhadap 359 lembaga yang terdiri dari RT, RW, LPMK, PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, UKS, PSM dan Kelompok PKK RW dan RT se Kecamatan Sidomukti. Dari target 100%, capaian realisasi berhasil memenuhi target yang ditentukan yakni mencapai 100%.

Pada tahun 2022, target cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan 0 %. Target prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Tahun 2022 adalah 45%. Prioritas usulan rencana pembangunan yang terakomodir sejumlah 138 usulan terealisasi 169 kegiatan atau sebesar 79,71 %.

Adanya dukungan dari OPD terkait dalam mengakomodir usulan kegiatan. Pelaksanaan Implementasi Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melalui dana kelurahan.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sebagai berikut:

Tabel 2. 152. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Kategori Status
Kecamatan Sidomukti						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	80	90,14	90,14	112,68	ST
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	75	75,78-	75,78-	168,40	ST
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	45	79,71	79,71	177,13	ST
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	80	89,95	89,95	111,44	ST

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Kategori Status
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
Terlaksananya PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan Sidomukti						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Kecamatan Sidomukti, Tahun 2023

2) Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 153. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidorejo	%	80	80	90,14	90,14	112,68	Tercapai
2)	Tingkat Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Sidorejo	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3)	Cakupan RW Berprestasi di Bidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Kecamatan Sidorejo	%	85	85	0	0	0	Upaya Keras
4)	Persentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Sidorejo	%	45	45	78,78	78,78	175,07	Tercapai
5)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	80	80	89,15	89,15	114,44	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
	Kecamatan Sidorejo							

Sumber : Kecamatan Sidorejo, Tahun 2023

Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Sidorejo Realisasi tahun ini sebesar 90.14% dari target yang ditentukan sebesar 80% merupakan pencapaian yang tergolong memuaskan. Dari 21.066 WP, 19.699 telah membayarkan pajaknya tepat waktu. Angka 90,14% didapat dari (19.699:21.066) x 100%. Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adalah kesadaran WP yang tinggi untuk membayar PBB dan adanya kegiatan pelayanan keliling PBB yang mendekatkan para Wajib Pajak dengan lokasi pembayaran serta stimulan berupa hadiah langsung yang diberikan pada saat pelayanan keliling tersebut. Selain itu, harapan masyarakat untuk dapat beruntung memperoleh hadiah undian juga cukup tinggi.

Pada Tahun 2022 capaian realisasi sebesar 100% dari target. Realisasi 100% dari target yang ditentukan sebesar 70%. Rumus prosentase Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan adalah Jumlah lembaga yang terfasilitasi (740):Jumlah lembaga yang ada(740) x 100%. Faktor yang menyebabkan berhasil tercapainya target pada setiap tahun adalah partisipasi semua lembaga yang aktif mengusulkan kegiatan dan perhatian besar dari Pemerintah Kota Salatiga dalam mengakomodir usulan tersebut mengingat fungsi lembaga kemasyarakatan yang banyak membantu mensukseskan program pemerintah.

Target dan Realisasi Indikator Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan pada Tahun 2022 dihilangkan dikarenakan pergeseran anggaran (refocusing) untuk kegiatan pemulihan ekonomi atas dampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan lomba kebersihan di tingkat kelurahan dan kecamatan diterapkan aturan bahwa RW yang telah berprestasi tidak diperkenankan mengikuti lomba sehingga memberikan kesempatan kepada RW yang lain untuk turut berpartisipasi dan mendapatkan kemungkinan berprestasi.

Dari 489 usulan rencana pembangunan pada awal 2020, terealisasi 202 usulan di Tahun 2021. Prosentase usulan di Tahun 2021 adalah (202

: 489) x 100% = 41,32%. Dibandingkan dengan target yang ditentukan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 56%, capaian yang diperoleh masih belum memenuhi target. Faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian target dikarenakan belum maksimalnya pendampingan di tingkat kelurahan dalam perencanaan awal usulan yang akan diprioritaskan. Semua usulan ditampung tanpa ada filter sehingga menyebabkan angka pembagi yang besar dan mempengaruhi prosentase hasil akhir. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian dari tahun lalu adalah adanya program dana kelurahan yang mengakomodir usulan dari musyawarah pembangunan sehingga tidak hanya mengandalkan realisasi usulan dari OPD lain.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 89,15% dari target yang ditentukan. Nilai 85,83% pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 termasuk dalam kategori baik meskipun dibawah target tahun ini. Nilai 85,83 diperoleh dari 3,433 (Rata2 SKM Unit Pelayanan) x 25 x 100%. Dengan dicabutnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) pada pertengahan Tahun 2021 dan masih belum berakhirnya masa pandemi menjadi sebagian faktor penentu kendala dalam mencapai target realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 154. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Kecamatan Sidorejo						
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	80	91,97	91,97	114,96	ST
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	0	0	0	0	R
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	58	53,83	53,83	92,81	ST
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%					
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka)	%	91	91,25	91,25	100,27	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Persentase kegagalan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	%	100			0,00	SR
Tingkat Kepastian proses layanan publik.	%	100			0,00	SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan	%	0	0	0	0	SR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bulan	12	12,00	12,00	100,00	ST

Sumber : Kecamatan Sidorejo, Tahun 2023

3) Kecamatan Tingkir

Tabel 2. 155. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Tingkir

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
1)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Tingkir	%	88	88	91,76	91,76	104,27	Tercapai
2)	Tingkat Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di	%	86	86	100	100	116,28	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 (%)	Kategori Status
	Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Tingkir							
3)	Cakupan RW Berprestasi di Bidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Kecamatan Tingkir	%	85	85	40,82	40,82	48,02	Perlu Upaya Keras
4)	Persentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Tingkir	%	60	60	64,12	64,12	106,87	Tercapai
5)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tingkir	%	92	92	86,93	86,93	94,49	Akan Tercapai

Sumber : Kecamatan Tingkir, Tahun 2023

Pada Tahun 2022 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP ditargetkan sebesar 88% dan dapat terealisasi sebesar 91,76% sehingga capaian realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 sebesar 104,27%. Hal ini dapat dikategorikan sangat baik. Faktor / hal hal yang menyebabkan Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP menjadi baik adalah dengan adanya pemberian honor petugas penyampaian SPPT PPB ke WP sehingga petugas penyampaian lebih termotivasi untuk menyampaikan SPPT PBB ke WP. Namun untuk kendala adalah dengan adanya SPPT yang beralamatkan tidak sesuai dengan pemiliknya atau kosong, sehingga tidak semua SPPT PBB dapat tersalurkan.

Pada Tahun 2022 Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan ditargetkan sebesar 86% dan dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 sebesar 116,28%Hal ini dapat dikategorikan baik. Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan keberhasilan capaian Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan. Semua kelembagaan

yang terfasilitasi merupakan garda terdepan pelayanan kepada publik dan fasilitasi sudah dianggarkan dalam APBD Kota Salatiga. Meskipun sudah melebihi target akan tetapi masih ada stake holder yang belum terfasilitasi, diharapkan kedepan kelembagaan yang belum dapat terfasilitasi dapat aktif dan bisa difasilitasi, sehingga kualitas SDM kelembagaan di kecamatan dan kelurahan yang sudah terfasilitasi secara keseluruhan dapat meningkat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Pada Tahun 2022 Persentase realisasi usulan hasil musrenbang ditargetkan sebesar 60% dan dapat terealisasi sebesar 64,12% sehingga capaian realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 sebesar `106,87%. Hal ini dapat dikategorikan Perlu Upaya Keras. Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan kurang berhasilnya capaian Persentase realisasi usulan hasil musrenbang dikarenakan tidak semua usulan yang diusulkan di musrenbang dapat dilaksanakan semua nya. Hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran, .

Realisasi Cakupan RW berprestasi Pada Tahun 2022 Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan ditargetkan sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 40,82% sehingga capaian realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 sebesar 48,02%. Hal ini dapat dikategorikan Perlu Upaya Keras.

Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan Tingkir pada Tahun 2022 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 90% dan dapat terealisasi sebesar 86,93% sehingga capaian realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2022 sebesar 94,49%. Hal ini dapat dikategorikan Akan Tercapai. Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan berhasilnya capaian kinerja indikator survei kepuasan masyarakat. Faktor tersebut antara lain, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di kecamatan dan kelurahan mendapatkan nilai yang baik dari masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh Kelurahan dan Kecamatan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik.

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Tingkir didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 156. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Tingkir

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Kecamatan Tingkir						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	88	91,76	91,76	104,27	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan	%	86	100	100	116,28	ST
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	85	40,82	40,82	48,02	SR
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	76	93,32	93,32	122,79	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka)	%	90	85,94	85,94	93,41	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bulan	100	100,00	100,00	100	ST
Cakupan luasan Pemakaman yang dipelihara						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	100,00	100,00	100	ST
Cakupan luasan RTH yang dipelihara						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan						

Sumber : Kecamatan Tingkir, Tahun 2023

4) Kecamatan Argomulyo

Tabel 2. 157. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022(%)	Kategori Status
1)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT ke WP Kecamatan Argomulyo	%	82	82	87,71	87,71	106,96	tercapai
2)	Tingkat Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Argomulyo	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3)	Cakupan RW Berprestasi di Bidang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Kecamatan Argomulyo	%	76	75	77.59	77.59	102.09	Tercapai
4)	Persentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Argomulyo	%	76	74	77.97	77.97	102.59	Tercapai
5)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Argomulyo	%	80	79	80.60	80.60	100.75	Tercapai

Sumber : Kecamatan Argomulyo, Tahun 2023

Pada tahun 2022 target tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke Wajib Pajak adalah 81%. Adapun realisasinya sebesar 60%. Jumlah WP seluruh Kecamatan Argomulyo tahun 2021 sebesar 21.410 orang. Jumlah SPPT yang sudah tersampaikan tahun 2021 sebesar 12.822 lembar. Penyebab turunnya prosentase penyampaian SPPT PBB ke WP di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, antara lain dikarenakan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB kurang, alamat

wajib pajak sebagian tidak diketahui karena perubahan kepemilikan tanah, alamat pemilik tanah di luar kota, alamatnya tidak jelas, wajib pajak dari luar kota banyak yang belum bayar pajak, Solusi yang telah dilakukan sementara melakukan koordinasi dengan kelurahan.

Pada tahun 2022, tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan dari target 100%, capaian realisasi berhasil memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 100%. Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah lembaga yang terfasilitasi yakni 334 lembaga dibandingkan dengan total keseluruhan lembaga di Kecamatan Argomulyo yakni 334 lembaga.

Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan pada tahun 2022 ditargetkan 74% dan capaian realisasi sebesar 77,59%. Indikator diperoleh dari perbandingan jumlah RW yang berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan yakni sejumlah 42 RW dibandingkan dengan jumlah keseluruhan RW di Kecamatan Argomulyo yakni sebanyak 58 RW. Target belum dapat terealisasi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya K3 (kebersihan, keindahan dan kenyamanan).

Pada tahun 2022 Target prosentase realisasi usulan hasil Musrenbang Tahun 2022 adalah 74%. Prioritas usulan rencana pembangunan yang terakomodir sejumlah 177 usulan terealisasi 138 kegiatan atau sebesar 77,97 %. Adanya dukungan dari OPD terkait dalam mengakomodir usulan kegiatan. Pelaksanaan Implementasi Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melalui dana kelurahan.

Nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021, Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 100/520/101.1 tanggal 24 Juni 2021 tentang penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bidang perizinan di Kota Salatiga, maka secara otomatis di Kecamatan Argomulyo mulai Bulan Juli Tahun 2021 sudah tidak melakukan pelayanan di bidang perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk kategori pelayanan non perijinan 80,6 dengan mutu pelayanan B (Baik) Target Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Argomulyo Tahun 2021 adalah sebesar 79%. Realisasi kinerja Tahun 2021 di Kecamatan sebesar 80,60% dapat dikatakan sudah memenuhi target .

Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo didukung oleh pencapaian Indikator Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sebagai berikut :

Tabel 2. 158. Capaian Program Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Kecamatan Argomulyo						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	82	87,71	87,71	106,96	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan	%	100	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan	%	76	77,59	77,59	102,09	ST
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	74	78,00	78,00	102,63	ST
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka)	%	79	80,60	80,60	100,75	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan	%					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Persentase pemenuhan tanah bengkok yang memiliki batas						
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kecamatan dalam mendukung inovasi						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bulan	100			0,00	SR

Program Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD (2022)	Persentase Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2022	Kategori Status
Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		100			0,00	SR
Persentase pemenuhan tanah bengkok yang memiliki batas	%	60		100	0,00	SR
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi						
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kecamatan dalam mendukung inovasi	%	0				

Sumber : Kecamatan Argomulyo, Tahun 2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

1) Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
2) Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk;
3) Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial;
4) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah;
5) Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur;
6) Peningkatan luasan RTH tidak berbanding lurus dengan penyerapan beban pencemar udara serta kurangnya penegakan hukum lingkungan;
7) Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD, PNF DAN Pendidikan dasar;
2) Belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
3) Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan PAUD dan PNF serta pendidikan dasar;
4) Belum optimalnya pelayanan sekretariat dalam menunjang kualitas pelayanan pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan:

1) Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita
2) Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
3) Masih tingginya kasus gizi buruk
4) Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif
5) Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor
6) Kurang optimalnya koordinasi lintas daerah dalam pengendalian penyakit

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan:

1) Kurang berfungsinya sistem kota dalam pengembangan wilayah, Keterkaitan antar wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis;
2) Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, Pembangunan masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan memperoleh keuntungan ekonomi sering menimbulkan eksploitasi SDA sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan;

3) Meningkatkan ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung SDA baik permukaan maupun air tanah;
4) Menurunnya kemampuan penyediaan air, berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air;
5) Pemanfaatan infrastruktur jalan, trotoar, saluran yang tidak sesuai peruntukannya;
6) Masih ada masyarakat yang enggan lingkungannya dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal akibat kurangnya pemahaman bahwa instalasi IPAL tidak menimbulkan polusi/bau terhadap lingkungannya;
7) Kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah;

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan:

1) Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau;
2) Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan;
3) Beberapa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas PSU yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
4) Ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan;
5) Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana;
6) Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan:

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana;
2) Semakin menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada meningkatnya risiko bencana;
3) Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja

1) Belum Optimalnya Penegakan Perda dan Perwali dikarenakan Sekretariat PPNS belum terbentuk walaupun Perwali sudah ada, Kurangnya Koordinasi Implikasi Sinkronisasi Simplikasi (KISS) anggota yang telah mengikuti diklat PPNS, dan Belum optimalnya dukungan stakeholder dan penyangga persepsi OPD;
2) Belum Optimalnya Peran Anggota Satlinmas karena tidak regenerasi anggota satlinmas khususnya perempuan;
3) Pembinaan SDM Satpol dikarenakan 80% anggota Satpol PP merupakan Non PNS;
4) Pengelolaan Damkar disebabkan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan SOP dan terbatasnya personil damkar.

(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Masih munculnya konflik dan terorisme;
2) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaaan;
3) Belum optimalnya penanaman nilai toleransi antar umat beragama;
4) Belum optimalnya kegiatan/penyuluhan tentang bahaya dan dampak narkoba.

f. Urusan Sosial

Permasalahan:

1) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani masalah PPKS;

2) Terbatasnya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Sosial sebagai penunjang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
3) Pengembangan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan pelayanan belum optimal;
4) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, atau yang dulu disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan belum terlaksana secara optimal karena akar persoalan PMKS Jalanan belum teratasi;
5) Masih terbatasnya pelayanan dalam Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
6) Belum adanya standar khusus dalam Pelayanan LKS/LKSA berupa Akreditasi bagi LKS/LKSA.

2.3.2.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan:

1) Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia;
2) Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang;
3) Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan;
4) Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
5) Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit;
6) Kurangnya fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7) Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan

perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Permasalahan:

1) Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender;
2) Masih kurangnya pelindungan hak perempuan;
3) Masih kurangnya perlindungan anak
4) belum optimalnya sistem yang mengakomodir data gender dan anak.

c. Urusan Pangan

Permasalahan

1) Adanya gejolak pasokan dan harga pangan yang disebabkan jatuhnya harga di produsen maupun meningkatnya harga dikonsumen;
2) Kenaikan harga BBM yang berefek pada kenaikan biaya transportasi dan/atau kemasan (packing) barang pertanian; BBM untuk sarana prasarana pertanian;

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan :

1) Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah.
2) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan.
3) Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
4) Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah.
5) Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1) Pembangunan kawasan permukiman yang kurang memperhatikan dampak lingkungan terutama tdk adanya pengolihan limbah domestik sebelum dibuang ke Badan air;
2) Tingginya alih fungsi lahan;

3) Masih rendahnya koordinasi lintas OPD dalam penanganan limbah Domestik;
4) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah;
5) Peningkatan luasan RTH tidak berbanding lurus dengan penyerapan beban pencemar udara (Diperlukan tegakan/ vegetasi penyerap emisi karbon);
6) Kurang optimalnya penegakan hukum lingkungan.

f. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan :

1) Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update;
2) Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan;
3) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan;
4) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan Stakeholder;

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan:

1) Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas pegawai. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
2) Masih adanya kurang inisuaitif dan kreatifitas pegawai/staf dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga masih adanya ketergantungan pegawai/staf terhadap atasannya. Hal ini terbukti dengan masih adanya pegawai yang menunggu tugas dan petunjuk dari atasannya tanpa ada ide untuk menjabarkan tugas pokoknya.

h. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan:

1) Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak bersedia menjadi peserta KB aktif, di mana pada tahun 2020 jumlah

peserta KB aktif sebanyak 19.098 orang dari PUS sebanyak 26.563 orang;

2) Angka unmetneed yang masih tinggi dari target yaitu pada tahun 2021 angka unmetneed 14,20% dari target 15% menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak bersedia untuk ber-KB.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan :

1) Alat uji laik jalan yang merupakan salah satu persyaratan peningkatan keselamatan lalulintas sudah tidak memenuhi standar yang berlaku;
2) Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan terutama untuk infrastruktur dan keselamtan jalan;
3) Aplikasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum optimal;
4) *Load factor* angkutan kota yang rendah di bawah 30% dan prosentase penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi dikarenakan angkutan umum belum mengakses seluruh wilayah kota (4 kecamatan dan 23 kelurahan) (trunk route & feeder);;
5) Belum tersedianya terminal untuk pelayanan angkutan kota dan angkutan pedesaan dan terminal angkutan barang atau tempat *loading /unloading* barang yang representaatif ;

j. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Permasalahan :

1) Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik yaitu 94 persen pada akhir tahun 2022;
2) Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government. Hal ini ditunjukkan oleh indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga yaitu 2,34 pada akhir tahun 2021 padahal nilai maksimal adalah 5;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi publik;
4) Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik, SAQ, Monev KI masih dalam kategori tidak informatif;

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Permasalahan:

1) Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha, pada tahun 2022 tercatat baru sebesar 43,01 persen;

2) Masih rendahnya status koperasi sehat, ditahun 2022 baru sebanyak 10,75 persen koperasi dengan status sehat;
3) Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas;
4) Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalkan sebagian UKM menutup usahanya akibat pandemic corona.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan:

1) Belum optimalnya iklim investasi dan usaha;
2) Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor;
3) Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha;
4) Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal;
5) Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan OSS-RBA yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga.

m. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Permasalahan :

1) Belum optimalnya pengembangan olahraga pendidikan dan disabilitas;
2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Olah Raga;
3) Belum optimalnya budaya berolahraga;
4) Rendahnya daya saing kepemudaan;
5) Belum optimalnya penguatan ideologi kepemudaan dan pramuka;
6) Kurangnya sarana prasarana kepemudaan dan pramuka;
7) Belum optimalnya pembinaan kepramukaan;

n. Urusan Statistik

Permasalahan:

1) Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal;

2) Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena data statistik terpadu belum tersedia;
3) Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap;

o. Urusan Persandian

Permasalahan:

1) Terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan informasi daerah;
2) Masih rendahnya tingkat kesadaran perangkat daerah (pegawai) terkait dengan keamanan informasi;
3) Belum terpenuhinya kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan:

1) Belum optimalnya kelembagaan/kelompok dan pelaku seni budaya dalam beraktivitas sehingga berdampak pada terbatasnya pembinaan kelompok seni, jumlah event/pagelaran seni dan budaya terutama kesenian tradisional dan budaya lokal serta kekayaan gastronomi;
2) Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian ,perlindungan, penyelamatan, pengamanan cagar budaya dan peninggalan sejarah; pemenuhan standarisasi gedung museum serta SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi selaku Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

q. Urusan urusan Perpustakaan

Permasalahan:

1) Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat Kota Salatiga;
2) Masih terbatasnya jumlah naskah kuno yang dilaporkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk diakuisisi/alih media;
3) Masih terbatasnya jumlah perpustakaan yang telah sesuai dengan SNP (Standar Nasional Perpustakaan);
4) Masih dibutuhkan peningkatan terhadap minat baca masyarakat.

r. Urusan Kearsipan

Permasalahan:

1) Masih rendahnya kualitas pengelolaan arsip di Organisasi Perangkat Daerah;
2) Belum optimalnya perangkat daerah melaksanakan sistem kearsipan sesuai aturan untuk menuju tertib arsip;
3) Belum optimalnya autentikasi dan alih media kearsipan;
4) Belum adanya pengelolaan arsip hilang di tingkat Kota Salatiga.

2.3.2.3. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan:

1) Kenaikan harga pakan ikan setiap 3 bulan sekali;
2) Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan tang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65,63%.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan:

1) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana destinasi/obyek pariwisata dan diversifikasi produk wisata destinasi dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
2) Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan ekonomi kreatif pariwisata/gastronomy dan kesadaran masyarakat/stakeholder pelaku pariwisata dan ekraf dalam berperanserta mengembangkan dan mengelola produk ekraf.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan:

1) Belum adanya sarana prasarana lumbung pangan yang sesuai dengan standar;
2) Manajemen kelembagaan kelompok tani kurang optimal;
3) Belum dilakukan intensifikasi pengelolaan lahan pertanian yang luasnya terbatas
4) Binatang ternak yang terdampak penyakit Mulut dan Kuku, mengalami penurunan dalam kualitas produksi susu dan rendahnya kualitas daging;
5) Kapasitas rumah potong hewan yang terbatas.

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan:

1) Masih kurang maksimalnya pelayanan Bidang Metrologi yang telah di amanatkan UU no 23 tahun 2014 kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten, dikarenakan belum operasionalnya UPT Metrologi yang di dukung SDM Fungsional Metrologi, peralatan pendukung pelayanan Metrologi dan Peraturan Daerah yang mendukung (Perda dan Perwali);
2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen;
3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera/tera ulang;
4) Persaingan pasar global yang makin ketat sehingga perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri;
5) Dampak utamanya adalah perdagangan kendaraan bermotor turun drastis karena pandemic COVID-19.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan:

1) Pertumbuhan IKM dan persentase IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 adalah 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen;
2) Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, hal ini dikarenakan adanya *pandemic Covid_19;*
3) Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen;
4) Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah;
5) Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga;
6) Belum optimalnya kelembagaan dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda);
7) Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya. Terdapat 1650 perusahaan industri, namun hanya

39 perusahaan yang memiliki akun SIINas dan yang rutin melaporkan hanya 25 perusahaan.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan:

1) Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%;
2) Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal;
3) Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat *given,* yang selanjutnya menjadi salah satu kendala penurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan transmigrasi di Kota Salatiga.

2.3.2.4. Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Permasalahan:

1) Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah.

b. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah

Permasalahan:

1) Keterbatasan keuangan daerah menyebabkan pembangunan daerah tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, sehingga berdampak pada perencanaan tahun berikutnya;
2) Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penelitian dan pengendalian melalui peningkatan kapasitas perencana dan peneliti;

3) Belum maksimalnya keberhasilan pencapaian target disebabkan karena belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan;
4) Belum optimalnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan perencanaan program pembangunan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau instansi lain dalam mengimplementasikan program pembangunan.

c. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permasalahan:

1) Belum optimalnya mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensinya;
2) Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua jabatan;
3) Belum terkoordinaksikan dengan baik perencanaan dan hasil pengembangan kompetensi pasca diklat untuk acuan penataan pegawai;
4) Pelaksanaan diklat belum sesuai kebutuhan organisasi dan individu;
5) Pemberhentian Tenaga Non ASN (Tenaga honorer dan Tenaga Harian Lepas) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan:

1. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan
2. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya koordinasi pengadaan barang/jasa
4. Belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi pengadaan Barang/Jasa
5. Belum optimalnya pengisian RUP oleh OPD
6. Masih rendahnya koordinasi kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah
8. Belum optimalnya koordinasi kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan protokoler dan kehumasan
9. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informatika

10. Belum adanya sistem pengamanan akun media sosial yang di tanggap menangani pembobolan akun.
11. Belum optimalnya koordinasi kebijakan monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan
12. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan konservasi SDA
13. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan perhubungan.

d. Sekretariat DPRD

Permasalahan :

1) Belum optimalnya pelaksanaan perancangan produk perundang-undangan;
2) Pelaksanaan penetapan peraturan daerah belum optimal;
3) Penetapan APBD belum optimal;
4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal.

e. Inspektorat

Permasalahan :

1) Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Resiko;
2) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan;
3) Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berulang;
4) Kurang optimlanya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKPD dan Inspektorat Provinsi);
5) Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani;
6) Belum efektifnya penerapan SPIP pada Perangkat Daerah;
7) Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan zona integritas;
8) Kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan korupsi dan pengumpulan data dan pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh responden;

9) Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan pengelolaan data administrasi pengawasan di Inspektorat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan aah kenijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga. Kerangka ekonomi derah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domistik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2024.

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4.9 - 5.2%, sedangkan angka inflasi 3.25 - 3.75%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676 - Rp15.877/USD. Hal itu merupakan hasil proyeksi dan kajian dari Tim Kajian Outlook Ekonomi di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarkat. Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *outlook* perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%. Kondisi perokonomian Nasional diproyeksikan apa yang akan terjadi berdasarkan data-data yang ada sekarang ini. Secara garis besar, melihat perekonomian Indonesia 2023 masih positif. Namun ada beberapa catatan, secara umum yang perlu menjadi perhatian seperti adanya potensi inflasi yang tinggi, resesi di negara maju dan harga minyak. Dari sinyal yang muncul di pasar, secara keseluruhan 2022 ini akan lebih baik dari 2021, kemudian 2023 kemungkinan terjadi perlambatan sehingga akan lebih rendah dari 2022.

Terkait inflasi, inflasi diperkirakan terkendali dan kemarin sesudah 5,9%, kemudian 5,72%, dan terakhir 5,42%, dan diperkirakan sampai

akhir tahun bisa 5,34% hingga 5,5%. Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive,* dan *forward looking.* Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diprakirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi *e-commerce* diprakirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan *digital banking* lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank

Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability)*. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Adapun penjelasan masing-masing kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (*well-callibrated*), perencanaan yang matang (*well-planned*), dan dikomunikasikan secara transparan (*well-communicated*) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2023. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data *dependent*).

b. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

c. Kebijakan Sistem Pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana "*white paper*" yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.

d. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

e. Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan eksporsebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi

pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada awal masa pandemi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur travel bubble bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

Tabel 3. 1. Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2 – 5,35
2.	Tingkat Kemiskinan	%	7-8
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3-6,9
4.	Rasio Gini	Indeks	0,375-0,378
5.	Indeks Pembangunan Manusia	%	73,29-73,35
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	27,02
7.	Nilai TukarPetani/NTP	Nilai	103-105
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN	Nilai	105-107

Informasi kebijakan ekonomi nasional pada musrenbang nasional RKP tahun 2024 diindikasikan sebagai berikut; kebijakan ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dari dinamika krisis global yang melanda dunia. Situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak, yang penuh dengan ketidakpastian, karena pandemi Covid belum sepenuhnya berakhir. Karena masih ada negara yang melakukan lockdown, maka menimbulkan gangguan pada rantai pasok komoditas vital. Ditambah dengan situasi perang Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan, dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan. Dampak perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan akan mempengaruhi investasi seiring dengan ketatnya likuiditas global.

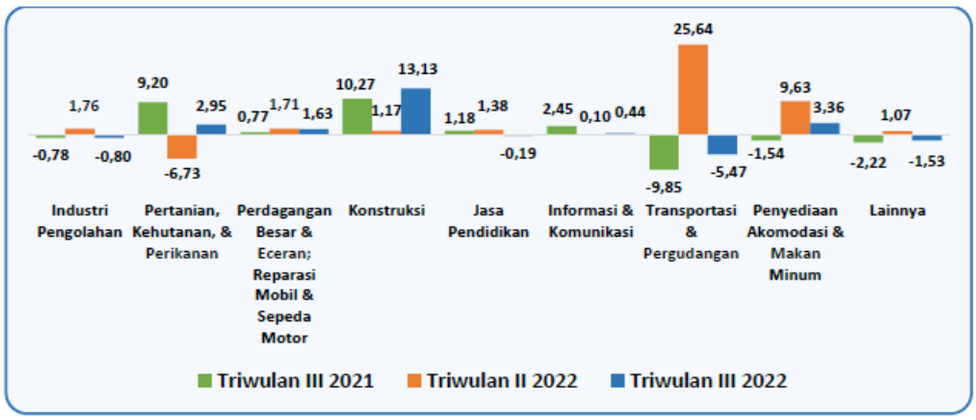
Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global. Inflasi melanda negara-negara maju. Amerika yang biasanya di bawah 1 persen saat ini inflasi sudah mencapai 8,5 persen, dan inflasi paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka

61,1 persen. Inflasi negara berkembang diperkirakan juga akan meningkat, namun dalam batas yang moderat. Kondisi ini berdampak pada skenario perdagangan

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2022 terhadap triwulan II-2022 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,32 persen. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan capaian pada triwulan II-2022 (q-to-q) yang tumbuh sebesar 1,47 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Konstruksi sebesar 13,13 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,36 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,95 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan mengalami kontraksi sebesar -0,80 persen, sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih tumbuh sebesar 1,63 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa Perusahaan sebesar 0,96 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,94 persen serta Real Estate sebesar 0,87 persen. Sementara itu, selain Industri Pengolahan, masih terdapat enam lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi diantaranya Jasa Lainnya yang terkontraksi sebesar -6,16 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,47 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terkontraksi -4,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terkontraksi -1,97 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi terkontraksi sebesar -0,23 persen dan Jasa Pendidikan sebesar -0,19 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III- 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,40 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,77 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,58 persen; dan Konstruksi sebesar 11,56 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 72,31 persen



Gambar 3. 1. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) persen

Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 persen dibandingkan triwulan III-2021 (y-ony), pertumbuhan ini melambat dari capaian triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 5,66 persen. Lapngan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain transportasi dan pergudangan sebesar 98,53%, Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman sebasar 24,33 % dan Jasa Lainnya sebesar 12,16%. Lapangan usaha Indsutri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 4,04 % dan 4,31 %. Sementara itu lapangan usha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan kedua mengalami kontraksi sebasar -1,17 %. Lapangan usaha lainnya yang tumbuh posistif di antara nya Jasa Perusahaan sebesar 9,87%, Adminsitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,06% dan Real Estate sebesar 6,61%.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga

Berdasarkan evaluasi kondisi perekonomian dan keuangan tahun lalu, pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-

sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Salatiga.

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 3,33%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,31%, sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 2,83%. Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga yaitu sebesar 32,75%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,38%. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,78% dan 13,02 dengan pertumbuhan sebesar 0,80 dan -5,36%.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2024 diprioritaskan pada penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, keterlibatan perempuan, anak dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan

kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pasca pandemi *Covid 19*. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Pada tahun 2021, jumlah PDRB ADHK sebesar Rp 9.820,29 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp.316,58 (dalam miliar) atau 3,33% jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.503,71 (dalam miliar).

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada tahun 2021 pada sektor industri pengolahan sebesar 32,75% atau Rp.4.586,93 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,04% atau Rp.4,34 (dalam miliar).

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2021 mengalami peningkatan positif jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 3,33%. Diharapkan pada tahun 2023 kondisi ekonomi Kota Salatiga dapat semakin membaik dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ditunjang dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanganan dampak Covid 19.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2021, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2022, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2023 dan Tahun 2024 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global dari dampak pandemi Covid 19. Tantangan yang akan dihadapi:

1) Angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kota di Jawa Tengah.
2) Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga yang relatif masih tinggi.
3) Jumlah stunting di Kota Salatiga yang masih relatif tinggi.
4) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu.

5) Upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi pasca pandemi Covid 19.
6) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi di masyarakat pasca pandemi Covid 19
7) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2020, Target 2021 dan target 2022 dapat ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3. 2. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2024

No	Indikator	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,33%	n.a	5,29-5,96
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14%	4,73	4,32-4,18
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	7,26%	5,58	5,70-5,20
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,60	84,35	85,10

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, OPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Asumsi Dana perimbangan yaitu DAK dan Bankeu Provinsi sesuai dengan usulan dari OPD.
3) Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui upaya:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
2) Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah.
3) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.
4) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan.
6) Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1) Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).

2) Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
3) Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
5) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
6) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2021 (audited) sebesar Rp 945.777.726.439,- dan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 886.352.219.264,-. dan proyeksi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 918.416.921.000,- serta proyeksi pendapatan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 882.809.159.000,-.

Pendapatan daerah Kota Salatiga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi komponen pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Dengan adanya pandemi Covid 19, dimana tahun 2021 sektor-sektor perekonomian mengalami penurunan dengan multiplier efek terjadinya PHK yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran terbuka,

peningkatan angka kemiskinan, melemahnya sektor informal dan menurunnya pendapatan masyarakat. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 untuk penanganan Covid 19. Pendapatan transfer antar daerah dari komponen bantuan keuangan provinsi diproyeksikan menurut usulan belanja bantuan keuangan, yang nantinya apabila alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan maka proyeksi pendapatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan ketetapan alokasinya. Demikian halnya untuk komponen Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah akan menyesuaikan dengan ketetapan alokasinya. Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 3. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2021 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2022

Uraian	2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
PENDAPATAN	**916.251.265.000**	**945.777.726.439**	**103,22%**	**903.370.549.855**	**886.352.219.264**	**98,12%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.406.216.000	280.726.390.512	118,25%	216.446.575.855	240.798.164.141	111,25%
PENDAPATAN TRANSFER	660.562.609.000	646.902.627.178	97,93%	686.923.974.000	645.554.055.123	93,98%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.282.440.000	18.148.708.749	99,27%	0	0	0,00%

Tabel 3. 4. Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2023, Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	PROYEKSI		Selisih Anggaran Tahun 2024 dan 2023 (+/-)	%
			2024	Perkiraan Maju 2025		
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**918.416.921.000**	**901.954.369.664**	**971.088.000.000**	**-16.462.551.336**	**-1,83%**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**226.789.700.000**	**247.111.071.664**	**250.761.000.000**	**20.321.371.664**	**8,22%**
04.01.01	Pajak Daerah	65.509.415.000	70.085.000.000	73.721.000.000	4.575.585.000	6,53%
04.01.02	Retribusi Daerah	11.597.916.000	13.972.520.164	12.390.000.000	2.374.604.164	16,99%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.303.718.000	20.303.718.000	22.334.000.000	-	0,00%
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.378.651.000	142.749.833.500	142.316.000.000	13.371.182.500	9,37%
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**691.627.221.000**	**654.843.298.000**	**720.327.000.000**	**-36.783.923.000**	**-5,62%**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.331.356.000	590.732.433.000	649.805.000.000	-29.598.923.000	-5,01%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71.295.865.000	64.110.865.000	70.522.000.000	-7.185.000.000	-11,21%
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	-	**-**	-	
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	

3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi;

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berikut ini Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 5. Realisasi Belanja Anggaran Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	**PENDAPATAN**	**905.568.012.938,00**	**919.729.813.254,78**	**101,56**	**946.191.087.524,00**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	69.470.000.000,00	75.518.553.026,00	108,71	65.041.971.971,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	10.892.475.000,00	11.341.448.745,00	104,12	14.978.515.080,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.732.135.000,00	20.463.337.373,00	98,70	18.824.426.644,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	117.549.428.938,00	133.652.742.533,78	113,70	181.840.024.102,00
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**218.644.038.938,00**	**240.976.081.677,78**	**110,21**	**280.684.937.797,00**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**				
9	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**556.674.455.000,00**	**549.840.528.577,00**	**98,77**	**534.246.583.063,00**
10	Dana Bagi Hasil Pajak	25.094.848.000,00	32.568.607.426,00	129,78	32.684.736.838,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.598.546.000,00	3.340.952.497,00	128,57	2.277.317.037,00
12	Dana Alokasi Umum	418.013.566.000,00	414.805.071.746,00	99,23	418.013.566.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	110.967.495.000,00	99.125.896.908,00	89,33	81.270.963.188,00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)**	**556.674.455.000,00**	**549.840.528.577,00**	**98,77**	**534.246.583.063,00**
15	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**				
16	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian	52.018.907.000,00	52.018.907.000,00	100,00	47.151.521.000,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)**	**52.018.907.000,00**	**52.018.907.000,00**	**100,00**	**47.151.521.000,00**

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
19	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.045.612.000,00	64.841.765.000,00	98,18	64.918.523.115,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.185.000.000,00	12.032.531.000,00	98,75	586.000.000,00
22	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)**	**78.230.612.000,00**	**76.874.296.000,00**	**98,27**	**65.504.523.115,00**
23	**Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)**	**686.923.974.000,00**	**678.733.731.577,00**	**98,81**	**646.902.627.178,00**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
25	Pendapatan Hibah	0,00	20.000.000,00	0,00	438.500.000,00
26	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.165.022.549,00
28	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**18.603.522.549,00**
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)**	**905.568.012.938,00**	**919.729.813.254,78**	**101,56**	**946.191.087.524,00**
30	**BELANJA**				
31	**BELANJA OPERASI**				
32	Belanja Pegawai	426.916.485.610,00	398.347.572.483,97	93,31	411.931.318.505,00
33	Belanja Barang	479.418.328.245,00	431.031.608.280,03	89,91	399.357.950.409,00
34	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Subsidi	340.000.000,00	204.717.500,00	60,21	0,00
36	Belanja Hibah	23.303.920.164,00	23.175.462.879,00	99,45	12.955.460.964,00
37	Belanja Bantuan Sosial	948.500.000,00	936.800.000,00	98,77	1.768.350.000,00
38	**Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)**	**930.927.234.019,00**	**853.696.161.143,00**	**91,70**	**826.013.079.878,00**

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
39	**BELANJA MODAL**				
40	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	409.818.620,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin	21.117.207.830,00	19.089.458.206,00	90,40	43.567.605.306,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	24.858.581.752,00	23.051.423.031,00	92,73	60.425.196.643,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.655.286.427,00	31.216.974.647,00	95,60	24.731.543.900,00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.105.105.214,00	1.722.875.662,00	81,84	182.158.040,00
45	Belanja Aset Lainnya	130.267.400,00	111.478.585,00	85,58	960.756.400,00
46	**Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)**	**80.866.448.623,00**	**75.192.210.131,00**	**92,98**	**130.277.078.909,00**
47	**BELANJA TAK TERDUGA**				
48	Belanja Tak Terduga	34.505.445.600,00	612.900.000,00	1,78	211.145.945,00
49	**Jumlah Belanja Tak Terduga (48)**	**34.505.445.600,00**	**612.900.000,00**	**1,78**	**211.145.945,00**
50	**JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)**	**1.046.299.128.242,00**	**929.501.271.274,00**	**88,84**	**956.501.304.732,00**
51	**TRANSFER**				
52	**BELANJA TRANSFER**				
53	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Bantuan Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
55	**JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
56	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)**	**1.046.499.128.242,00**	**929.701.271.274,00**	**88,84**	**956.501.304.732,00**

3.3.1. Kebijakan Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS, adapun kebijakannya adalah :

1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2024;
3) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
4) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang

berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

e. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Penentuan alokasi pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 telah melalui Rapat Pembahasan TAPD dengan OPD penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 serta Bawaslu dan KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Penganggaran Pemilihan 2024 Kota Salatiga Nomor : 910/0890 tanggal 17 Maret 2023 dengan telah memperhatikan Surat Pemerintah Jawa Tengah Nomor : 900/0002967, tanggal 17 Februari 2023 tentang Penyampaian Sharing Pendanaan Bersama.

f. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.3.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya,

dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

a. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

3.3.4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat Mandatory, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), dan unsur Pengawasan (1%) serta pendanaan kelurahan (baik proporsi belanja daerah maupun alokasi yang bersumber dari DAU *earmark*).

Pemenuhan amanat alokasi anggaran kelurahan sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan melalui RKPD, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan baik secara pemenuhan sarana dan prasana fisik, kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Adapun perkembangan alokasi Dana Kelurahan tahun 2021-2023 serta proyeksi Dana Kelurahan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Alokasi Dana Kelurahan Kota Salatiga Tahun 2021- 2023 dan Proyeksi Dana Kelurahan Tahun 2024

Perangkat Daerah		Alokasi Dana Kelurahan			Proyeksi Dana Kelurahan
Kode	**Nama**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
7.01.0.00.0.00.28.0000	**Kecamatan Argomulyo**				
7.01.0.00.0.00.28.0001	Kelurahan Ledok	1.646.100.000	1.595.255.155	912.152.000	1.213.800.000
7.01.0.00.0.00.28.0002	Kelurahan Kumpulrejo	2.230.200.000	1.970.609.308	1.126.776.000	1.499.400.000
7.01.0.00.0.00.28.0003	Kelurahan Tegalrejo	1.752.300.000	1.699.114.240	965.808.000	1.285.200.000
7.01.0.00.0.00.28.0004	Kelurahan Noborejo	1.539.900.000	1.541.434.880	858.496.000	1.142.400.000
7.01.0.00.0.00.28.0005	Kelurahan Cebongan	1.062.255.000	1.219.915.840	697.528.000	928.200.000
7.01.0.00.0.00.28.0006	Kelurahan Randuacir	1.646.100.000	1.595.274.560	912.152.000	1.213.800.000
7.01.0.00.0.00.29.0000	**Kecamatan Sidomukti**	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Mangunsari	2.177.100.000	1.927.540.912	1.099.948.000	1.463.700.000
7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Kecandran	1.539.900.000	1.486.001.500	858.496.000	1.213.800.000
7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Dukuh	2.230.199.000	1.959.475.410	1.126.776.000	1.499.400.000
7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Kalicacing	1.062.000.000	1.214.820.850	697.528.000	928.200.000
7.01.0.00.0.00.30.0000	**Kecamatan Sidorejo**	-	-	-	-
7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Sidorejo Lor	2.177.000.000	1.859.167.900	1.099.948.000	1.463.700.000
7.01.0.00.0.00.30.0002	Kelurahan Salatiga	2.177.100.000	1.923.505.425	1.099.948.000	1.463.700.000

Perangkat Daerah		Alokasi Dana Kelurahan			Proyeksi Dana Kelurahan
Kode	**Nama**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
7.01.0.00.0.00.30.0003	Kelurahan Bugel	1.105.100.000	1.221.133.144	724.356.000	963.900.000
7.01.0.00.0.00.30.0004	Kelurahan Pulutan	1.115.100.000	1.266.835.680	724.356.000	963.900.000
7.01.0.00.0.00.30.0005	Kelurahan Kauman Kidul	955.800.000	1.126.076.160	724.356.000	963.900.000
7.01.0.00.0.00.30.0006	Kelurahan Blotongan	2.230.200.000	2.111.392.800	1.206.738.000	1.606.500.000
7.01.0.00.0.00.31.00	**Kecamatan Tingkir**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Tingkir Tengah	1.062.000.000	1.219.915.840	697.528.000	928.200.000
7.01.0.00.0.00.31.0002	Kelurahan Tingkir Lor	945.000.000	1.126.076.160	643.872.000	928.200.000
7.01.0.00.0.00.31.0003	Kelurahan Kutowinangun Lor	2.017.800.000	1.782.953.920	1.019.464.000	1.356.600.000
7.01.0.00.0.00.31.0004	Kelurahan Kutowinangun Kidul	1.539.900.000	1.501.434.880	858.496.000	1.142.400.000
7.01.0.00.0.00.31.0005	Kelurahan Sidorejo Kidul	1.486.800.000	1.454.515.040	831.668.000	1.106.700.000
7.01.0.00.0.00.31.0006	Kelurahan Gendongan	902.700.000	1.219.915.840	697.528.000	928.200.000
7.01.0.00.0.00.31.0007	Kelurahan Kalibening	690.300.000	1.027.563.100	590.216.000	785.400.000
TOTAL		**35.290.854.000**	**35.049.928.544**	**20.174.134.000**	**26.989.200.000**

Sedangkan komposisi dan persentase alokasi angaran untuk pemenuhan *mandatory spending* pada RKPD tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3. 7. Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2024

No	Unsur Mandatory	% Minimal	% Pagu 2024	Keterangan
1	PENDIDIKAN	20 %	21,83 %	
2	KESEHATAN	10 %	26,34 %	
3	INFRASTRUKTUR	40 %	26,02 %	
4	PENGAWASAN	1 %	1,08 %	

3.4. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melaui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2024. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemapuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 8. Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	142.431.115.304,00	142.431.115.304,00	100,00	155.741.332.512,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan (72 s/d 77)	**142.431.115.304,00**	**142.431.115.304,00**	**100,00**	**155.741.332.512,00**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 84)	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**3.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETO (78 - 85)	**140.931.115.304,00**	**140.931.115.304,00**	**100,00**	**152.741.332.512,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**130.959.657.284,78**	**0,00**	**142.431.115.304,00**

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka urusan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga diwadahi dalam kerangka anggaran pendapatan, belanja daerah untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 9. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode Belanja	Uraian	Proyeksi	
		2024	Perkiraan Maju 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**247.111.071.664**	**250.761.000.000**
04.01.01	Pajak Daerah	70.085.000.000	73.721.000.000
04.01.02	Retribusi Daerah	13.972.520.164	12.390.000.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.303.718.000	22.334.000.000
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	142.749.833.500	142.316.000.000
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**654.843.298.000**	**720.327.000.000**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	590.732.433.000	649.805.000.000
04.02.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	64.110.865.000	70.522.000.000
	Jumlah Pendapatan	**901.954.369.664**	**971.088.000.000**
5	**BELANJA**		
05.01	**BELANJA OPERASI**	**917.687.825.028**	**1.183.346.401.643**
05.01.01	Belanja Pegawai	453.115.759.904	634.362.063.865
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	443.526.823.124	530.387.637.692
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0
05.01.05	Belanja Hibah	19.534.477.000	17.039.925.086
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.510.765.000	1.556.775.000
05.02	**BELANJA MODAL**	**69.046.931.572**	**41.163.923.837**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.379.410.000	1.435.783.220
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.576.328.936	11.613.433.651
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.455.152.480	10.650.831.291
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.654.796.000	16.455.120.000
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	981.244.156	1.008.755.675
05.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
05.03.05	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000
	Jumlah Belanja	**988.734.756.600**	**1.226.510.325.480**
	Total Surplus/(Defisit)	**-86.780.386.936**	**-255.422.325.480**
6	**PEMBIAYAAN**		

Kode Belanja	Uraian	Proyeksi	
		2024	Perkiraan Maju 2025
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**86.780.386.936**	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.780.386.936	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.780.386.936	0
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Pembiayaan Netto	**86.780.386.936**	**0**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0
	TOTAL APBD	**988.734.756.600**	**1.226.510.325.480**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RPD merupakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Salatiga maka penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 harus selaras dan sinergi dengan RPD Kota Salatiga Periode Tahun 2023-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga sebagaimana RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005 – 2025 dengan Tujuan RPD Tahun 2023 – 2026.

Tabel 4. 1. Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025 dengan Tujuan RPD 2023 – 2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
		Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Untuk menjamin keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	10,68
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,44
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	84,83
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,24
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96,74
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,97
	Indeks Literasi Masyarakat	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Nilai	52.56
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	6,45
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			%	30
		Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	29,41
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	31
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			medali	30
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			%	20,59
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Usia Harapan Hidup			Tahun	77,78
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	172
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	12,03
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0,08
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	93
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	36,97
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	66
			Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna
	Laju Pertumbuhan penduduk			%	1,32
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,3
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita **PDRB ADHK*			%	4,84
				Juta	55,80
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	71,11
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,37
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	31,05
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	97,08
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,81
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	108,08
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	65
			Tingkat hunian akomodasi	%	22
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	9
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,12
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Padi	%	6,15
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10
			Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,03
			Produktivitas Sapi Perah	%	0,75
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100
			Ketersediaan beras	%	70
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah	Pertumbuhan nilai investasi			%	10,22
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	3,50

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga			Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10,2
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10,25
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	6,52
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	69,84
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	80
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	61,5
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	94,5
		Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	75
	Skor Pola Pangan Harapan			Skor	94,4
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,49
			Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2,487
			Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	109
	Prosentase Peminat Transmigrasi			%	3,7
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	3,7
	Score capaian KLA			Nilai	620

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender		Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	32,14
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24
	IDG			Nilai	80,05
	IPG			Nilai	95,5
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	40
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,75
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	81,25
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,67
			Indeks PMPRB	Nilai	72
			Nilai SAKIP	Angka	66,00
			Indeks Inovasi	Nilai	46,32
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	33,33
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	80
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	%	57
			Nilai Sistem Merit	%	285

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			QA SPIP	Nilai	3,06
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,96
			QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,86
			Kapabilitas APIP	Level	3
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	76
			Indeks SPBE	Nilai	2,5
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	94
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	97
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	82
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	98,8
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	95,9
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	79,5
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,25
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	61
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,80
			Persentase PKK Aktif	%	55
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,53
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	59
			Persentase PKK Aktif	%	55
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,10
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	72
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60,05
			Persentase PKK Aktif	%	72,50
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	61
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	64
			Persentase PKK Aktif	%	55
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota			%	100
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100
	Penanggulangan Potensi Konflik			%	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,71
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	100
	Indeks Risiko Bencaca			Nilai	90,45
		Meningkatnya persentase Kelurahan tanggap Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	19
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,86
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%)			%	55
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	97
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	97
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	56,40
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,40
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	80,00
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,00
	Rasio Konektivitas Kota	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan		%	0,71
			Rasio Ijin Trayek	%	24,37
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
	Kinerja lalu lintas kota				0,40
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82,00
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	10,37
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	46
	Pemukiman yang Tertata			%	6,34
		Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,15
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	60
			Penyelesaian kasus tanah Negara	%	50

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Suistainable Development Goal'S* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-2 (kedua) RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD tahun 2024 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RKP 2024 sebagai berikut:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

   Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
   Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

   Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

   Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sedangkan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisai Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,7%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,7%;
3. Indeks Gini Ratio sebesar 0,374 – 0,377;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99- 74,02;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27%;
6. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108;

7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110;
8. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 %;

4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **"*Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas*"** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,44-8,52%;
3. Rasio Gini sebesar 0,372;
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,70-5,50%;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 %
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44-4,94%;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Indeks Rasio Bencana turun 4%; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 8,00.

4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 ditujukan untuk **"*Mewujudkan Insan Yang Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat dan Berilmu dan Berbudi Luhur*".** Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2024 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal.
2. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP.
3. Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter.
4. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi.
6. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal.
7. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi,

8. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak.
9. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid-19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat.
10. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmet need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan kesehatan reproduksi pada remaja.
11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak.
12. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS.
13. Akselerasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan.
14. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
15. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat.
16. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang.
17. Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga.

Sasaran pembangunan pada tahun 2024 berdasarkan kesepakatan Rakortek Perencanaan Pembangunan Wilayah Pengembangan Kedungsapur adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,32 – 4,18%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,70 – 5,20%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,29 – 5,96%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,10
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,50
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,40
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,22%

Prioritas pembangunan Kota salatiga yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026 juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Persandingan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.3, sedangkan upaya penanganan isu strategis serta prioritas pembangunan tahun 2024 tersaji pada tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel 4. 3. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia Berkualitas**	**Mewujudkan Insan Yang Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat, Berilmu serta Berbudi Luhur**		
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
			2. Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disbudpar
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		2. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			1. Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum
		3. Meningkatkan kesejahteraan sosial,	1. Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak	2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
			3. Program Perlindungan Khusus Anak	DP3APPKB
			4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3APPKB
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		4. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
			2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum
			3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	5. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan	1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		konsumsi energi dan protein masyarakat	3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3APPKB
			4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	6. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP.	1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		7. Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter	1. Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		8. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar	1. Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		9. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		10. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,	Dinas Kesehatan
			2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,	Dinas Kesehatan
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		11. Penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid-19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,	Dinas Kesehatan
			5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			6. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		12. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmeed need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan reproduksi pada remaja	1. Program Pengendalian Penduduk	DP3APPKB
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3APPKB
		13. Akselerasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3APPKB
			2. Program Perlindungan Khusus Anak	DP3APPKB

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
6. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi	1. Program pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPAR
			2. Program Pengembangan Kebudayaan	DISBUDPAR
		15. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal	1. Program Pengembangan Kesenian tradisional	DISBUDPAR
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	16. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3APPKB
			2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DINSOS
			3. Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS

		17. Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 6. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	SATPOL BPBD KESBANGPOL

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Tabel 4. 4. Sinkronisasi Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
1.	Masih belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal	38.335.123.645	1. Program Pengelolaan Pendidikan	38.335.123.645	Dinas Pendidikan
		2. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP	19.389.037.255	1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.389.037.255	Dinas Pendidikan
		3. Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter	91.396.600	1. Program Pengembangan Kurikulum	91.396.600	Dinas Pendidikan
		4. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar	-			Dinas Pendidikan
		5. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk	32.583.162.500	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	32.308.162.500	Dinas Kesehatan

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.000.000	Dinas Kesehatan
		6. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak	2.906.573.500	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,	1.168.662.500	Dinas Kesehatan
				2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,	275.000.000	Dinas Kesehatan
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.462.911.000	Dinas Kesehatan
		7. Penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid-19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat	3.581.255.000	1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.000.000	Dinas Kesehatan
				2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.168.662.500	Dinas Kesehatan

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
				3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,	97.450.000	Dinas Kesehatan
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.690.482.500	Dinas Kesehatan
				5. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	349.660.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan Ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk	11 Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak	1.698.399.400	Program Pemberdayaan Sosial	771.574.500	Dinas Sosial

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
				1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	276.494.000	DP3APPKB
				2 Program Perlindungan Khusus Anak	205.000.000	DP3APPKB
				3 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	267.534.900	DP3APPKB
				4 Program Perlindungan Perempuan	177.796.000	DP3APPKB
		12. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang	276.494.000	1 Program peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja		DP3APPKB
				2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	276.494.000	DP3APPKB
		16 Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan	28.490.149.484	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.490.149.484	KECAMATAN

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS				
3.	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan belum optimalnya penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial	8. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat	1.642.457.900	1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	275.000.000	Dinas Kesehatan
				2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	685.737.900	Dinas Pangan dan Pertanian
				3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	681.720.000	DP3APPKB
		9. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmeed need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan reproduksi pada remaja	2.452.573.500	1. Program Pengendalian Penduduk	608.120.000	DP3APPKB
				2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.844.453.500	DP3APPKB

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		10. Akselerasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan	1.122.534.900	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	267.534.900	DP3APPKB
				2. Program Perlindungan Khusus Anak	205.000.000	DP3APPKB
				3. Program Penataan Bangunan Gedung	650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
		11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak	1.698.399.400	1. Program Pemberdayaan Sosial	771.574.500	Dinas Sosial
				2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	276.494.000	DP3APPKB
				3. Program Perlindungan Khusus Anak	205.000.000	DP3APPKB
				4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	267.534.900	DP3APPKB
				5. Program Perlindungan Perempuan	177.796.000	DP3APPKB
		12. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup	276.494.000	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	276.494.000	DP3APPKB

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		dan peran perempuan di berbagai bidang				
4.	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur	13. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang	13.323.371.131	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.353.252.194	Dinas Pekerjaan Umum
				3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.857.009.000	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Peningkatan luasan RTH tidak berbanding lurus dengan penyerapan beban pencemar udara serta kurangnya penegakan hukum lingkungan			1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.463.109.937	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
6.	Belum optimalnya pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah	14. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi	1.112.713.500	1. Program pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	253.431.500	DISBUDPAR
				2. Program Pengembangan Kebudayaan	859.282.000	DISBUDPAR
		15. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal	80.000.000	1. Program Pengembangan Kesenian tradisional	80.000.000	DISBUDPAR
7.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah	16. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS	31.436.721.784	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	636.220.000	DP3APPKB
				2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	681.720.000	DINSOS

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PAGU PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	PROGRAM PENDUKUNG	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
				3. Program Pemberdayaan Sosial	771.574.500	DINSOS
				4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	657.057.800	KECAMATAN
				5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.490.149.484	KECAMATAN
				6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	200.000.000	BAPPEDA
		17. Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga	1.068.893.800	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	172.213.100	BAKESBANGPOL
				2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	896.680.700	BAKESBANGPOL

4.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 untuk mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, *Suistainable Development Goal'S* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan Pemilihan Serentak (Pemilu dan Pilkada) dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.4.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan

Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

1. penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2024, untuk mendukung Strategi Nasional tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan Inovasi SUPER TANGGUH (Satu Perangkat Daerah Bertanggung Jawab Penuh) terhadap satu wilayah kelurahan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7. Program Pemberdayaan Sosial;
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program-program tersebut selanjutnya dilaksanakan perangkat daerah pengampu urusan terkait dan diperkuat oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Salatiga yang telah dibentuk dan ditetapkan melalui SK Wali Kota Salatiga Nomor : 050.05/96/2023, tanggal 7 Maret 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Salatiga. TPPS bertugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara *konvergen* hingga tingkat desa/kelurahan untuk mencapai target prevalensi stunting se-Jawa Tengah menjadi 14%.

4.2.4.2. Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang, terdapat 3 kawasan di Kota Salatiga yang masuk dalam rencana pengembangan yaitu:

1. Penataan Jl. Jendral Sudirman

   Program ini diestimasikan menggunakan investasi 85 milyar bersumber dana APBN. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga dengan menyusun DED penataan kawasan tersebut, yang telah diselesaikan pada tahun 2018 dan telah mendapatkan ijin lingkungan.
2. Pembangunan Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

   dengan stimasi investasi 25 milyar bersumber dari APBN. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga dengan mempersiapkan lahan yang siap dibangun untuk rusun di wilayah Noborejo dengan fasilitas air dan listrik yang telah tersedia, serta telah mendapatkan ijin lingkungan. Wilayah sekitar area pembangunan dekat dengan kawasan industri Kota Salatiga.

3. Peningkatan terminal Tipe A Tingkir yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan telah selesai pembangunannya pada akhir tahun 2022.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Sebagai bentuk dukungan Kota Salatiga terhadap Program Nasional yang dimanatkan pada Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tersebut pada RKPD 2024 telah dialokasikan pagu indikatif untuk pelaksanaan program yang masuk dalam Perangkat Daerah pelaksana urusan Jalan, Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan, yaitu :

a) **Program Pengembangan Perumahan** dengan Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU, Persentase rumah tinggal bersanitasi dan Persentase kawasan kumuh, untuk mendukung Pembangunan Rusunawa;
b) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota dan Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik, untuk mendukung pembangunan Terminal Tipe A Tingkir;
c) **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan indikator Persentase jalan kondisi baik dan Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat kapasitas maupun konstruksinya, untuk mendukung Revitalisasi Jalan Jenderal Sudirman.

4.2.4.3. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dukungan Pemerintah Kota Salatiga pada arah kebijakan Nasional untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung untuk persiapan pemilu tahun 2024 berupa :

1. Pendidikan Politik bagi partai politik dan masyarakat;
2. Pembinaan forum kerukunan umat beragama;
3. Gerakan kemitraan Bersama organisasi kemasyrakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;
4. Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM)

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

5. Pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
6. Forum komunikasi sosial politik;
7. Pembentukan dan operasionilasi tim pemnatauan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaran dan tahapan pemilu serentak 2024;
8. Peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Selain itu, salah satu bentuk dukungan lain dari Pemerintah Kota Salatiga adalah pada fasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi pendanaan Pilkada serentak sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD melalui mekanisme Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Program pendukung Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

4.2.4.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2024 Kota Salatiga tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2024 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2024 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, innformasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.4.5. Dukungan terhadap SDG's

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2024, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evalusi capaian SDG's tahun 2021. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (*goal)* berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dari sisi muatan substansi materi yang disampaikan kepada Penjabat Wali Kota. Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga, baik dari unsur Komisi A, Komisi B dan Komisi C maupun Bapemperda dalam forum FGD, dilanjutkan dengan

menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2023, hasil reses/ serap aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan lain-lain.

Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPD menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kota Salatiga, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Salatiga dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya.

Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kota Salatiga, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga terhadap RKPD Tahun 2024, dokumen draft awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draft Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga. Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud

akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat Kota Salatiga melalui DPRD Kota Salatiga untuk bahan penyusunan RKPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2024 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2024, KUA-PPAS dan APBD tahun 2024.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah daerah, pokok pokok pikiran (POKIR) DPRD Salatiga untuk RKPD tahun 2024 adalah ”Percepatan Pemulihan Ekomoni Kerakyatan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” dengan rincian sebagai berikut:

A. Bidang Ekonomi

1) Penguatan ekonomi melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
2) Pemerintah memfasilitasi dan menstimulasi pelaku usaha melalui modal (KURDA) dan pemasaran
3) Peningkatan *hard* dan *soft skill* pelaku UMKM dengan memberikan fasilitasi *platform digital marketing*
4) Penataan UMKM dengan dibuat kluster-kluster
5) Memperbanyak *mice,* festival dan -*event-event*

B. Pemantapan Infrastruktur

1) Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi:
    a. Penambahan Indeks Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    b. Peningkatan Program Tanam Pohon secara masiv dan terstruktur
    c. Kepastian hukum dalam Pembangunan Kota, Perkada RDTR tidak bertentangan dengan Perda RTRW
    d. Kebijakan pengembangan wilayah yang mempertimbangkan skenario Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2) Integrasi dalam proses pembangunan (supya tidak terjadi tambal sulam)

3) Perencanaan strategis dan terpadu terkait sistem drainase berikut langkah pemeliharaannya secara menyeluruh dan periodik
4) Melaksanakan penataan wajah kota yang memiliki ciri khas tertentu *(diferensiasi)*
5) Adanya *masterplan* pembangunan kota yang memperhatikan pemerataan pembangunan khususnya daerah eks wilayah pemekaran.

C. Penanganan Kemiskinan dan Stunting

1) Pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara integrasi dengan berbasis data yang akurat
2) Penanganan program kemiskinan melalui kegiatan Super Tangguh dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dengan didukung semua Perangkat Daerah
3) Penanganan stunting harus didasarkan pada akar masalah dan terintegrasi

D. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1) Bidang Pendidikan meliputi:
    a. Pengembangan kurikulum merdeka belajar.
    b. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan karena ada indikasi Pendidikan formal dimasuki paham intoleran
    c. Peningkatan strategi untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan di Salatiga
    d. Evaluasi program regrouping SD, efektivitasnya sampai dimana
    e. Terkait program zonasi agar praktek di lapangan didukung dengan pemerataan sarana prasarana dan soft skill Sumber Daya Manusia
    f. Peningkatan program moving school dan outing school dengan memanfaatkan bis sekolah
    g. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Salatiga adalah ruang kelas, sekolah tidak hanya di kelas tetapi juga di lingkungan
2) Bidang Kesehatan yaitu Pemerintah Kota Salatiga harus memikirkan strategi untuk mengantisipasi persaingan faskes dengan daerah di sekitar

E. Pelayanan Publik

1) Perlunya kepastian waktu, prosedur dan biaya.
2) Menjaga transparansi dalam pelayanan publik.

3) Harus dilakukan perubahan budaya kerja ketika pelayanan publik mengalami transformasi teknologi
4) Perlunya evaluasi regulasi yang menghambat pelayanan publik
5) Mempermudah perijinan yang berhubungan dengan investasi dan pemberian insentif serta kemudahan investasi

F. Tata Kelola Pemerintahan

1) Budaya kerja (efisien dan efektif untuk melayani).
2) Evaluasi dan Review SOTK
3) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4) Perlindungan bagi Ketua RT/RW, LPMK dan Lembaga di Kelurahan melalui BPJS Ketenagakerjaan
5) Penyelesaian permasalahan asset pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dilakukan secara cepat dan berpihak kepada masyarakat
6) Pemberian Insentif khusus bagi anggota Linmas
7) Menjaga stabilitas dan netralisasi ASN

G. Pariwisata dan Olah Raga

1) Bidang Pariwisata
    a. Perlunya tindak lanjut Perda tentang Pemajuan Budaya yang sudah disahkan pada Tahun 2021
    b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata (realisasi tahun 2022 sebanyak 274.171 orang terdiri dari 272.853 orang wisatawan domestic dan 1.318 orang wisatawan asing).
    c. Perlunya promosi dan penyelenggaraan jaringan festival dan event-event dengan skala besar.
    d. Perlunya penumbuhan destinasi wisata baru.
    e. Perlunya disusun strategi gastronomi setelah ditetapkan sebagai gastronomi dunia.
    f. Pembangunan pusat-pusat kuliner untuk mendukung gastronomi.
    g. Pembangunan *On/Off Ram* Tol di Kelurahan Bugel sebagai salah satu pendukung pariwisata dan perekonomian.
    h. Penguatan jati diri budaya Salatiga dengan memfasilitasi dan mempatenkan ciri khas budaya Salatiga
2) Bidang Olah Raga

a. Perlunya dukungan Pemerintah Olah raga sebagai diferensiasi/pembeda kota.
b. Pembangunan pusat-pusat olah raga.
c. Penguatan prestasi atlet-atlet Kota Salatiga
d. Mengemas olahraga sebagai potensi wisata di Kota Salatiga

H. Penguatan BUMD

1) Penguatan BUMD untuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Dalam proses perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan maka salah satu yang memiliki fungsi dan peran cukup krusial adalah dokumen RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 juga merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Suistainable Development Goal'S* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

5.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan,

pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan

Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

d. Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs dan Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan

kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA) , Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase

puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

   Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas

sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), Average Length of Stay (Av LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR).

5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan

sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kepatuhan IMB.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, *updating* kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai

indikator kinerja Rasion tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan.

Proram ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

5.1.5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah

Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

5.1.6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

b. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.2.1. Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemgesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

5.2.2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase kelembagaan PUG aktif, presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Persentase Perempuan di Lembaga legislatif.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota dengan target kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

5.2.3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan

minimum energi (MDER) dan kinerja ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman.

5.2.4. Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota untuk indikator kinerja presentase penyelesaian sengketa tanah.

b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara untuk indikator kinerja presentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan; presentase data rupa bumi yang tersedia dan presentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU dan TPU.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

5.2.5. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana perlindungan

dan pengelolalaan lingkungan hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja berupa dokuemen IKPLHD dan dokumen KLHS.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.

d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Prosentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan presentase tersusunnya dokumen IGRK.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah pernghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

5.2.6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun dan Presentase akta perkawinan non muslim.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan. Indikator kinerja program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database.

5.2.7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dan Persentase Baduta Stunting.

5.2.8. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan teminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupteran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

5.2.9. Komunikasi Dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang

menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian progam Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

5.2.11. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan capaian program Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola.

5.2.12. Kepemudaan Dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

5.2.13. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase

OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.2.14. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

5.2.15. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan museum Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Presentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.2.16. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar

membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuni

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program presentase koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan.

5.2.17. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan; autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan capaian program Persentase jumlah aesip yang diselamatkan.

c. Program Perizinan Penggunanaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan capaian program Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip.

5.3. Urusan Pilihan

5.3.1. Kelautan Dan Perikanan

a. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5.3.2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindunggan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.3.3. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan

ternak yang seumbernya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase kejadian bencana pertanian.

e. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

5.3.4. Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan

terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

   Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.

d. Program Pengembangan Ekspor

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator program berupa Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5.3.5. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang

terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri.

5.3.6. Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.4.1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan; Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan; Cakupan fasilitasi Kerjasama daerah; skor LPPD; Ketepatan waktu penyamapaian LKPJ (30 maret); Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan

Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan; cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT; Cakupan koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD; Cakupan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; Cakupan Koordinasi POK dan Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas; presentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi dan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

5.4.2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

5.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.5.1. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.5.2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash managenent (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

5.5.3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Rasion PNS yang mengikuti assessment, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

5.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

5.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

5.5.6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaiam SPPT PBB pada WP.

5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.6.1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan

kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

5.7. Unsur Pemerintahan Umum

5.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

   Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program presentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

   Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

Tabel 5. 1. Prioritas, Kerangka Pendanaan dan Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
1.	Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal	1. Program Pengelolaan Pendidikan	38.335.123.645	Dinas Pendidikan	Pemenuhan Kuantitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan dengan melakukan pendataan dan penghitungan kebutuhan untuk pencapaian pelayanan minimal.
2.	Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP	1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.389.037.255	Dinas Pendidikan	
3.	Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter	1. Program Pengembangan Kurikulum	91.396.600	Dinas Pendidikan	
4.	Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar				
5.	Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32.308.162.500	Dinas Kesehatan	Pengalokasikan program dan kegiatan yang mendukung penurunan kasus kematian ibu, bayi, dan balita, dengan melakukan pendataan dan penghitungan kebutuhan untuk pencapaian target pelayanan kesehatan
		2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.000.000	Dinas Kesehatan	
6.	Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,	1.168.662.500	Dinas Kesehatan	Upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
					cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjsama lintas sektoral untuk penanganan stunting
		2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,	275.000.000	Dinas Kesehatan	Pelaksanaan kegiatan terpadu meliputi skrining kesehatan bagi calon pengantin, pemberian tablet tambah darah, bagi remaja putri dan ibu hamil, ANC terpadu bagi ibu hamil, kelas ibu hamil , pendampingan ibu hamil resiko tinggi, penanganan ibu hamil KEK pasca perawatan
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.462.911.000	Dinas Kesehatan	Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi serta pelaksanaan Rembuk Stunting mulai dari Kelurahan sampai tingkat Kota sebagai upaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting secara konvergen sampai tingkat Kelurahan
7.	Penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid-19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat	1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.000.000	Dinas Kesehatan	Bantuan pendanaan berupa hibah untuk Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Salatiga setiap tahun, untuk mendukung kegiatan pencegahan HIV/AIDS
		2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.168.662.500	Dinas Kesehatan	Koordinasi lintas sektor baik untuk TB, HIV maupun Malaria, kegiatan investigasi kontak/deteksi dini TB dan deteksi dini HIV/AIDS dengan VCT Mobile, serta pertemuan rutin untuk pencegahan Malaria, serta penyusunan RAD TB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
		3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	97.450.000	Dinas Kesehatan	Penerbitan regulasi terkait penanggulangan TB, serta optimasi peran tenaga kesehatan yang melibatkan lintas organisasi kesehatan
		4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.690.482.500	Dinas Kesehatan	Melaksnakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung transformasi di bidang kesehatan, yang terdiri dari 6 jenis transformasi yakni transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.
		5. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	349.660.000	Dinas Lingkungan Hidup	Fokus pada pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota untuk emantauan Status Mutu Air, Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air
8.	Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat	1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	275.000.000	Dinas Kesehatan	Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung transformasi kesehatan pada Layanan Primer dan Sistem ketahanan kesehatan termasuk penanganan ibu hamil KEK pasca perawatan
		2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	685.737.900	Dinas Pangan dan Pertanian	Penyediaan cadangan pangan, penyediaan lumbung pangan, bahan pangan alternatif, bazar pangan murah rangka pemenuhan pangan bagi masyarakat untuk mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
		3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	681.720.000	DP3APPKB	Pelakasanaan kegiatan untuk pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
9.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmeed need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan reproduksi pada remaja	1. Program Pengendalian Penduduk	608.120.000	DP3APPKB	Penyusunan GDPK (Grand Desain Perencanaan Kependudukan) 5 pilar serta pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.844.453.500	DP3APPKB	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB
10.	Akselerasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	267.534.900	DP3APPKB	Pelaksanan berbagai kegiatan kelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak.
		2. Program Perlindungan Khusus Anak	205.000.000	DP3APPKB	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi.
		3. Program Penataan Bangunan Gedung	650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur terutama mengarah pada

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
					penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan transportasi massal yang terintegrasi
11.	Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak	1. Program Pemberdayaan Sosial	771.574.500	Dinas Sosial	Pemantapan pelaksanaan program-program kemiskinan untuk meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan menangani Masalah Kesejahteraan Sosial
		2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	276.494.000	DP3APPKB	Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak, perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak
		3. Program Perlindungan Khusus Anak	205.000.000	DP3APPKB	
		4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	267.534.900	DP3APPKB	
		5. Program Perlindungan Perempuan	177.796.000	DP3APPKB	
12.	Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	276.494.000	DP3APPKB	
13.	Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemantapan dan pemerataan infrastruktur terutama mengarah pada

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
		2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.353.252.194	Dinas Pekerjaan Umum	penyelesaian penataan wajah kota serta untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak bagi Masyarakat serta pemenuhan lingkungan yang sehat
		3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.857.009.000	Dinas Pekerjaan Umum	
		1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.463.109.937	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan target kinerja peningkatan cakupan layanan penerangan jalan umum. serta pemenuhan luasan RTH di Kota Salatiga
14.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi	1. Program pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	253.431.500	DISBUDPAR	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
		2. Program Pengembangan Kebudayaan	859.282.000	DISBUDPAR	Pelaksanaan pengelolaan kebudayaan oleh masyarakat, pelestarian kesenian tradisional untuk peningkatan obyek pemajuan kebudayaan
15.	Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal	1. Program Pengembangan Kesenian tradisional	80.000.000	DISBUDPAR	Pelaksanaan Pembinaan kesenian Masyarakat untuk peningkatan SDM, Lembaga dan pranata kesenian pada masyarakat
16.	Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri,	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	636.220.000	DP3APPKB	Peningkatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
		2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	681.720.000	DINSOS	pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
	serta sinergitas lembaga pengelola PMKS				peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
		3. Program Pemberdayaan Sosial	771.574.500	DINSOS	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan PSKS
		4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	657.057.800	KECAMATAN	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, untuk peningkatan IKM
		5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.490.149.484	KECAMATAN	koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, baik dalam sarana dan prasarana fisik, sosial maupun ekonomi, termasuk Langkah-langkah penanggulangan inflasi
		6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	200.000.000	BAPPEDA	Pengembangan Inovasi dan teknologi untuk memfasilitasi inovasi masyarakat, dengan menyusun rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
		7. Program Perekonomian dan Pembangunan	469.578.000	SETDA	Penguatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator pencapaian seluruh target pembangunan daerah, melalui kegiatan sinergi program/kegiatan/sub kegiatan/agenda antar unit kerja yang ada

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA
					di Setda dengan Pengendalian Operasional Kegiatan
17.	Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	172.213.100	BAKESBANGPOL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk penurunan penyalahgunaan narkoba dan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024
		2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	896.680.700	BAKESBANGPOL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial untuk Penurunan Kejadian atau konflik sosial dalam rangka menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024

Tabel 5. 2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Kode dan Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	196.773.820.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	127.566.625.000
3	1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	120.000.000.000
4	1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.619.290.000
5	1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.409.220.000
6	1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	13.922.470.000
7	1.05.0.00.0.00.33.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.599.050.000
8	1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial	11.034.030.000
9	2.08.2.14.0.00.07.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.868.820.000
10	2.09.3.27.3.25.08.0000 Dinas Pangan dan Pertanian	16.307.444.000
11	2.11.0.00.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup	38.891.000.000
12	2.12.0.00.0.00.10.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.156.790.000
13	2.15.0.00.0.00.12.0000 Dinas Perhubungan	11.793.100.000
14	2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	11.499.600.000
15	2.17.0.00.0.00.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6.489.800.000
16	2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.827.500.000
17	2.19.0.00.0.00.16.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	19.490.744.000
18	2.22.3.26.0.00.17.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.070.700.000
19	2.23.2.24.0.00.18.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.956.010.000
20	3.30.0.00.0.00.20.0000 Dinas Perdagangan	17.698.320.000
21	3.31.2.07.3.32.21.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.011.670.000

No	Kode dan Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
22	4.01.0.00.0.00.22.0000 Sekretariat Daerah	34.497.930.000
23	4.02.0.00.0.00.23.0000 Sekretariat DPRD	50.764.700.000
24	5.01.5.05.0.00.24.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.498.100.000
25	5.02.0.00.0.00.25.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	29.577.460.000
26	5.03.5.04.0.00.26.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.341.600.000
27	6.01.0.00.0.00.27.0000 Inspektorat	10.707.920.000
28	7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Argomulyo	18.963.358.400
29	7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sidomukti	14.240.168.400
30	7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sidorejo	19.652.518.400
31	7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Tingkir	19.987.778.400
32	8.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.517.220.000
Jumlah		**988.734.756.600**

Tabel 5. 3. Pagu Indikatif Dana Kelurahan Tahun 2024

No	Kode dan Perangkat Daerah		Pagu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pagu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JUMLAH
A	**7.01.0.00.0.00.28.0000**	**Kecamatan Argomulyo**			
1	7.01.0.00.0.00.28.0001	Kelurahan Ledok	722.892.000	490.908.000	1.213.800.000
2	7.01.0.00.0.00.28.0002	Kelurahan Kumpulrejo	1.031.706.100	467.693.900	1.499.400.000
3	7.01.0.00.0.00.28.0003	Kelurahan Tegalrejo	733.652.000	551.548.000	1.285.200.000
4	7.01.0.00.0.00.28.0004	Kelurahan Noborejo	777.418.000	364.982.000	1.142.400.000
5	7.01.0.00.0.00.28.0005	Kelurahan Cebongan	674.450.000	253.750.000	928.200.000
6	7.01.0.00.0.00.28.0006	Kelurahan Randuacir	791.590.000	422.210.000	1.213.800.000
B	**7.01.0.00.0.00.29.0000**	**Kecamatan Sidomukti**			
1	7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Mangunsari	852.408.000	611.292.000	1.463.700.000
2	7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Kecandran	867.378.000	346.422.000	1.213.800.000
3	7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Dukuh	927.400.000	572.000.000	1.499.400.000
4	7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Kalicacing	512.462.000	415.738.000	928.200.000
C	**7.01.0.00.0.00.30.0000**	**Kecamatan Sidorejo**			
1	7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Sidorejo Lor	809.940.000	653.760.000	1.463.700.000
2	7.01.0.00.0.00.30.0002	Kelurahan Salatiga	870.940.000	592.760.000	1.463.700.000
3	7.01.0.00.0.00.30.0003	Kelurahan Bugel	687.998.000	275.902.000	963.900.000
4	7.01.0.00.0.00.30.0004	Kelurahan Pulutan	605.000.000	358.900.000	963.900.000
5	7.01.0.00.0.00.30.0005	Kelurahan Kauman Kidul	671.659.000	292.241.000	963.900.000
6	7.01.0.00.0.00.30.0006	Kelurahan Blotongan	995.849.000	610.651.000	1.606.500.000

No	Kode dan Perangkat Daerah		Pagu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pagu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	JUMLAH
D	**7.01.0.00.0.00.31.00**	**Kecamatan Tingkir**			
1	7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Tingkir Tengah	605.937.000	322.263.000	928.200.000
2	7.01.0.00.0.00.31.0002	Kelurahan Tingkir Lor	642.500.000	285.700.000	928.200.000
3	7.01.0.00.0.00.31.0003	Kelurahan Kutowinangun Lor	731.298.000	625.302.000	1.356.600.000
4	7.01.0.00.0.00.31.0004	Kelurahan Kutowinangun Kidul	661.536.100	480.863.900	1.142.400.000
5	7.01.0.00.0.00.31.0005	Kelurahan Sidorejo Kidul	769.850.000	336.850.000	1.106.700.000
6	7.01.0.00.0.00.31.0006	Kelurahan Gendongan	632.250.000	295.950.000	928.200.000
7	7.01.0.00.0.00.31.0007	Kelurahan Kalibening	600.000.000	185.400.000	785.400.000
		TOTAL	**17.176.113.200**	**9.813.086.800**	**26.989.200.000**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	4,62	4,86-5,44	4,86-5,44
2.	Pendapatan per Kapita **PDRB ADHK*	Juta	50,74	52,43	55,80	59,16
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,26	7,01	6,46-5,51	6,46-5,51
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,66	10,66	10,68	10,70
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,42	14,99	15,43	15,46
6.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	51,56	51,56	52,56	53,26
7.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	15,5	15,5	30	52
8.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	23	23	30	16
9.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	20,59	20,59	20,59	21
10.	Angka Harapan Hidup	Angka	77,55	77,72	77,78	77,98
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,18	1,32	1,32	1,30
12.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026
13.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	Belum ada data	Belum ada data	100	100
14.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,82	3,82	3,86	3,90
15.	Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	50	51	55	60
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	58,65	58,65	56,40	56,80
17.	Rasio Konektivitas	%	0,71	0,71	0,71	0,71
18.	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,30	0,30	0,40	0,50
19.	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	9,8	10,00	10,37	11,00
20.	Pemukiman yang Tertata	%	6,19	6,22	6,34	6,49
21.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	-68,21	11,47	10,22	10,55
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,36	59,45	69,84	70,10
23.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	93,30	93,30	95,00	96,00
24.	Pola Pangan Harapan	Skor	90,70	90,00	94,40	97,00
25.	Peminat Transmigrasi	%	1,00	1,00	3,70	4,60
26.	Score Capaian KLA	Nilai	607,25	680,00	620,00	630,00
27.	IPG	Nilai	95,37	97,20	95,50	96,50
28.	IDG	Nilai	79,08	81,57	80,05	81,50
29.	Indeks RB	Nilai	64,99	66,00	67,00	70,00

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,70	84,75	85,00	SETDA
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28,00	32,30	46,00	65,00	DINAS PKP
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,49	1,64	DISPANGTAN
4.	Indeks Pembangunan Manusi (IPM)	Nilai	83,58	84,03	84,98	85,87	BAPPEDA
5.	Angka Kemiskinan	Angka	4,95	4,73	4,67-4,59	4,67-4,59	DINSOS
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,08	0,06	DINKES
B	**Aspek Daya Saing Daerah**						
1.	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,50	2,70	DISKOMINFO
2.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	97,00	98,00	DPUPR

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
C	**Aspek Pelayanan Umum**						
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						DISDIK
1)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,81	84,81	84,83	84,85	
2)	APS SD/MI	%	99,22	99,22	99,24	99,26	
3)	APS SMP/MTs	%	96,72	96,72	96,74	96,76	
4)	APS Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,97	61,99	
	Kesehatan						DINKES
5)	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	429,55	117	172	129	
6)	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	13,55	10,75	12,03	10,31	
7)	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,08	0,06	
8)	Success Rate TB	%	92,00	85,00	93,00	95,00	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
9)	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	39,33	38,54	37,97	35,40	
10)	Presentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	50,00	50,00	66,00	82,00	
11)	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						DPU PR
12)	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96,00	96,00	97,00	98,00	
13)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	50,00	50,00	74,00	91,00	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						DINAS PKP
14)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,15	2,02	
15)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28,00	32,30	46,00	65,00	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
16)	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	
17)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	66,90	66,90	100	100	
18)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,73	1,73	1,72	1,69	
19)	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	NA	NA	100	100	
20)	Kelurahan Tangguh Bencana	%	NA	15	19	26	
21)	Indeks Risiko Bencana	%	91,20	91,00	90,45	90,00	
	Sosial						DINAS SOSIAL
22)	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	64,72	75,00	85,00	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
	Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar						
	Tenaga kerja						DISPERINAKER
23)	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40,00	80,00	100,00	
24)	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,20	50,00	50,00	
25)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	97,08	99,72	
26)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	46,15	46,15	61,50	76,90	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						DP3APPKB
27)	Prosentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	25,00	32,14	32,14	39,29	
28)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	39,66	40,00	40,00	41,00	
	Pangan						DISPANGTAN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
29)	Ketersediaan pangan utama (beras)	%	70,00	70,00	70,00	70,00	
30)	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	
31)	Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita	106,00	107,00	109,00	111,00	
32)	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,49	1,64	
	Pertanahan						DINAS PKP
33)	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	10,00	90,00	50,00	75,00	
34)	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10,00	20,00	60,00	100,00	
	Lingkungan Hidup						DLH
35)	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,50	47,87	41,20	41,80	
36)	Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,82	84,57	79,80	80,40	
37)	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,21	59,38	47,00	47,00	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						DISDUKCAPIL

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
38)	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97,63	98,67	98,80	99,00	
39)	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94,32	95,53	95,90	96,50	
40)	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	75,12	79,01	79,50	80,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						DP3APPKB
41)	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	2,40	2,30	2,10	
42)	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%/th	20	20	24	24	
	Perhubungan						DISHUB
43)	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	21,87	
44)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	22,79	
45)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	83	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
	Komunikasi dan Informatika						DISKOMINFO
46)	Tingkat Keterbukaan informarmasi Publik	%	94	95	97	100	
47)	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,5	2,7	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						DINKOP UKM
48)	Persentase Koperasi Aktif	%	70	70	71,11	72,22	
49)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	
	Penanaman Modal						DPMPTSP
50)	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	tad	-18,13	3,50	5,00	
51)	Kenaikan nilai investasi PMDN	%	tad	tad	10,2	10,35	
52)	Kenaikan nilai investasi PMA	%	tad	tad	10,25	10,75	
	Kepemudaan dan olah raga						DISPORA
53)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2,45	2,50	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
54)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38,73	38,73	39,50	
55)	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	
	Statistik						DISKOMINFO
56)	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	92	93	94	95	
	Persandian						DISKOMINFO
57)	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	75	78	82	89	
	Kebudayaan						DISBUDPAR
58)	Presentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,71	14,71	29,41	58,82	
59)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	16,43	31	45	
	Perpustakaan						DINPERSIPDA

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
60)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45	5,45	6,45	7,45	
	Kearsipan						DINPERSIPDA
61)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75	75	76	77	
	Urusan Pemerintahan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						DISPANGTAN
62)	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	6	
63)	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	5	5	
	Pariwisata						DISBUDPAR
64)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	106,07	106,07	108,08	110,13	
65)	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,06	-37,06	65	79	
66)	Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	17,42	22	28	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
67)	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8	9,0	10	
68)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,06	0,06	0,12	0,16	
	Pertanian						DISPANGTAN
69)	Produktivitas Pertanian Padi	%	6,1	6,1	6,15	6,15	
70)	Peningkatan Produktivitas tanaman holtikultura	%	7	7	10	10	
71)	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	NA	0,01	0,03	0,04	
72)	Produktivitas Sapi Perah	%	0,05	0,05	0,75	0,82	
73)	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	
	Perdagangan						DISDAG
74)	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3,76	4,72	4,77	4,89	
	Perindustrian						DISPERINAKER

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
75)	Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah)	%	0,30	0,30	0,37	0,49	
76)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30,00	31,05	31,15	
	Transmigrasi						DISPERINAKER
77)	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1,00	NA	3,70	4,60	
	Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						BAPPEDA
78)	Indeks Inovasi	Nilai	46,28	46,28	46,32	46,36	
79)	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	NA	NA	20	46,67	
80)	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100	80	90	
	Keuangan						BPKPD
81)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
82)	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	4,12	10,00	5,00	10,00	
	Kepegawaian						BKPSDM
83)	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,04	52,40	57	61	
84)	Nilai Sistem Merit	Nilai	242	255	285	326	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan						
	Pengawasan						IRDA
85)	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	
86)	QA SPIP	Nilai	3	3	3,06	3,10	
87)	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,96	3	
88)	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,70	2,74	2,86	3	
	Pendukung Urusan Pemerintahan						
	Sekretariat DPRD						SETWAN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
89)	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	88	100	100	100	
	Sekretariat Daerah						SETDA
90)	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66,06	70,00	81,25	81,75	
91)	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,37	34,40	34,67	35,00	
92)	Indeks PMPRB	Nilai	70,95	71	72	74	
93)	Nilai SAKIP	Angka	64,50	64,50	66,00	70,00	
94)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,7	84,75	85	
	Penunjang Urusan Pemerintahan : KECAMATAN						
	Kecamatan Sidomukti						KEC. SIDOMUKTI
95)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,25	89,50	
96)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	61	63	
97)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,80	79,90	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
98)	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	55	65	
	Kecamatan Sidorejo						KEC. SIDOREJO
99)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	87	89	
100)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	61	63	
101)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,80	79,90	
102)	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	55	65	
	Kecamatan Tingkir						KEC. TINGKIR
103)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,94	92	92,10	92,2	
104)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	95,62	88	72	74	
105)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40,39	60	60,05	60,15	
106)	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	72,50	73,5	
	Kecamatan Argomulyo						KEC. ARGOMULYO

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2026	
107)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	84	88	
108)	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	61	62	
109)	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	61	64	68	
110)	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	55	65	

Adapun program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Salatiga Tahun 2024 berdasarkan masing-masing urusan dalam langkah penyelenggaraan pemerintah daerah dijabarkan dalam target kinerja program. Perincian program dan indikator program dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 6. 3. Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**DINAS PENDIDIKAN**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**%**				
a.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		100	100	100	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
a.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	113,46	100	100	
b.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	130,81	100	100	
c.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,004	0,002	
d.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,44	0,42	0,4	
e.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,28	87,3	87,32	
f.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,7	97,72	97,74	
g.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	1,97	1,99	
h.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	Data Belum Tersedia	1,79	1,81	
i.	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	2,05	2,07	
j.	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	1,86	1,88	
k.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	25	35	
l.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	25	35	
m.	APK PAUD	%	38,33	38,35	38,37	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
n.	Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	Data Belum Tersedia	0,18	0,3	
o.	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,33	87,35	87,37	
p.	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	Data Belum Tersedia	41,67	58,33	
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					
a.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	Data belum tersedia	20.10	20,30	
b.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	Data belum tersedia	17	19	
c.	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	Data belum tersedia	58,33	75,00	
4.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					
a.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	Data belum tersedia	31	33	
b.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	Data belum tersedia	41	43	
c.	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	Data belum tersedia	51	53	
d.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84,95	84,97	84,99	
e.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,3	97,32	97,34	
f.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96,43	96,45	96,47	
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**					
a.	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,09	86,11	86,13	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
b.	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,33	58,35	58,37	
c.	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	Data Belum Tersedia	30	34	
d.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	98,00	100,00	
e.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	98,00	100,00	
6.	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**					
a.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	Data belum tersedia	11	13	
b.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	Data belum tersedia	11	13	
c.	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	Data Belum Tersedia	25	40	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**DINAS KESEHATAN**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	100	
b.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	84,88	85,5	86,5	
c.	Cost Recovery	%	100	100	100	
d.	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	
2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
a.	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	12	10	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
b.	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	135	145	
c.	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	55	57	
d.	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1	< 1	
e.	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	30,4	39,1	
f.	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	74	78	
g.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	
h.	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	86	88	
i.	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	77	80	
j.	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98	98	
k.	Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98	98	
l.	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	100	
m.	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	98	99	
n.	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100	100	
o.	Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100	
p.	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100	
q.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	100	
r.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	
s.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	100	
t.	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100	100	
u.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100	
v.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
w.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	100	
x.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100	
y.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	100	
z.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100	
aa.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100	
ab.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	100	
ac.	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100	100	
ad.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100	100	
ae.	cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	100	
af.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	100	
ag.	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	66	70	
ah.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	81	83	
ai.	Cakupan UCI kelurahan	%	100	100	100	
aj.	Deteksi Dini Hepatitis	%	70	78	82	
ak.	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95	95	
al.	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<9	<7	
am.	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	70	80	
an.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	78	83	85	
ao.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80	80	
ap.	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	18	30	
aq.	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	3	5	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
ar.	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4,3	4	
as.	Persentase Ibu hamil KEK	%	9,083367897	8	6	
at.	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	11	9	
au.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100	100	
av.	Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,8	9,6	
aw.	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100	
ax.	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100	100	
ay.	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	85	87	
az.	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	83	85	
ba.	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100	100	
bb.	Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	50	66,67	83,33	
bc.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,396	0,399	0,402	
bd.	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					
a.	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	53	60	70	
4.	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					
a.	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	53,33	57	59	
b.	Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	78,78	84	88	
c.	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	76,66	80	84	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
d.	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	58,82	64	68	
e.	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	91,11	88	90	
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					
a.	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	91	95.6	100	
b.	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,58	96,6	96,62	
c.	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	94,97	96,2	97,4	
d.	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100	
e.	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	94,94	96,06	97,19	
f.	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,37	93,5	93,63	
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**DPUPR**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	*76,63*	*79*	*81*	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					
a.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	*%*	*84,2*	*88*	*92*	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					
a.	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	*%*	86,69	*87,09*	*87,45*	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					
a.	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	*%*	*95,08*	*95,48*	*95,8*	
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					
a.	*Prosentase jaringan drainase kondisi baik*	*%*	*75,51*	*77,51*	*79,51*	
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					
a.	*Rasio kepatuhan IMB*	*%*	*75*	*80*	*80*	
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					
a.	*Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan*	*%*	*100*	*100*	*100*	
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					
a.	*Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap*	*%*	*93,75*	*94,06*	*94,37*	
b.	*Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik*	*%*	*93,38*	*97,05*	*100*	
9.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					
a.	*Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi*	*%*	*75*	*75*	*75*	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					
a	*Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*	*%*	*96,51*	*97*	*97*	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
D.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**DPKP**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	90	90	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**DINAS PKP**
a.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	NA	33,33	100	
b.	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	NA	50	100	
c.	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	NA	50	100	
2.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**DINAS PKP**
a.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1,24	7,92	13,52	
b.	terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	8,7	17,39	26,09	
c.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	8,2	7,52	6,84	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**DINAS PKP**
a.	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	28	46	65	
b.	terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	16,18	17,8	18,88	
c.	cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	5,52	5,67	5,82	
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	87,89	88	88	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**BPBD**
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	tad	86	88	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**Satpol PP**
a.	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	94,36	96	99	
b.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	
4.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**BPBD**
a.	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	
b.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	
c.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	
d.	Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	tad	36	40	
5.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					
a.	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	64	66	70	
b.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	64,16	67	70	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
c.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,02	89,5	90,5	
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**DINSOS**
a.	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	12.5	62,5	100	
b.	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	19,23	42,3	57,69	
c.	Persentase PSKS yang dibina	%	60	75	85	
3.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					
a.	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	
b.	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	
c.	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	
d.	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	
4.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					
a.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**%**	96,93	97,2	97,6	
b.	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	**%**	93,3	95	96	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
5.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					
a.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	
b.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100	100	
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					
a.	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,48	88,48	89,48	
2.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					
a.	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	45	100	
b.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0.03	0,03	0,04	
3.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					
a.	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	tad	71,43	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
4.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					
a.	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	32	37	
b.	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	27	32	
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,28	88	90	
2.	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					
a.	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%		100	100	
b.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,56	3,6	3,8	
c.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%		100	100	
d.	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	20	24	24	
3.	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					
a.	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100	
b.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	0,012	15,1426437	14,1331	
				100	100	
4.	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	25	75	
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					
a.	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	0	100	100	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					
a.	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	0	59,48	64,06	
7.	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					
a.	Persentase anak korban kekerasan	%	0,037	0,02	0,02	
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**DISPANGTAN**
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Nilai**	**85,318**	**86,354**	**87,39**	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**					
a.	Penyediaan Infrastruktur Pangan	**%**	**0**	**20**	**30**	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					
a.	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	60	80	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
b.	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	6,89	5,58	4,52	
4.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					
a.	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	6	8,89	10,74	
5.	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					
a.	Persentase Pangan segar aman	%	98	98	98	
D.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
1.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					**DINAS PKP**
a.	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	50	100	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**					**DINAS PKP**
a.	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100	75	100	
b.	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	100	50	100	
c.	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	32,3	60	40	
3.	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					**DINAS PKP**
a.	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	6	12	
b.	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	50	100	
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**DINAS LH**
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	83	85	
2.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**DINAS LH**
a.	IKPLHD	Dokumen	1	1	1	
b.	KLHS	Dokumen	0	0	0	
3.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**DINAS LH**
a.	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100	100	
b.	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100	100	100	
c.	Presentase Konservasi Lahan	%	0	10	20	
d.	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	0	20	35	
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**DINAS LH**
a.	Persentase ruang terbuka hijau	%	16,18	17,3	17,5	
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**DINAS LH**
a.	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	NA	25	35	
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**DINAS LH**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	
b.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	39	35	30	
c.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
d.	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	100	100	
7.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**DINAS LH**
a.	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100	100	100	
b.	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100	100	
c.	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	0	30	50	
8.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**DINAS LH**
a.	Persentase Pengurangan Sampah	%	26	28	30	
b.	Persentase Penanganan Sampah	%	72	71	70	
c.	Persentase Pengangkutan Sampah	%	72	71	70	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	88,3	88,9	
2.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	95,53	95,9	96,5	Disdukcapil
b.	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	79,01	79,5	80	
3.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					
a.	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	98,67	98,8	99	Disdukcapil
b.	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100	100	100	
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					
a.	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100	Disdukcapil
G.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					
a.	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	0	66	90	
b.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0,92	1,85	1,75	
c.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	
d.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,39	2,3	2	
e.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	27	22	22,1	
2.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					
a.	Rasio akseptor KB baru	%	87,16	70	73	
b.	Cakupan peserta KB aktif	%	71,9	82	84	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
c.	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	**rasio**	2,3:1	1:2	1:2	
d.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	**%**	71,2	78,1	78,3	
e.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	**%**	14,2	14	12	
f.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**%**	65,85	25,93	27,57	
g.	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	**%**	100	87	90	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					
a.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	**rasio**	1:2	1:2	1:2	
b.	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	**%**	89	90	90	
c.	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	**%**	0,29	1,9	1,7	
d.	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	**%**	66	83	87	
e.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	**%**	82	80	82	
f.	Persentase Baduta Stunting	**%**	**0**	26	22	
H.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dinas Perhubungan
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,15	84.23	84,33	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					
a.	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	71	83	95	
b.	Persentase layanan angkutan darat	%	27,53	27,53	29	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,61	82	88,31	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					
a.	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	**%**	90	94	98	
3.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**					
a.	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**%**	100	100	100	
b.	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**%**	95	97	100	
J.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					Dinas Koperasi, UKM
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,37	83,40	83,45	
2.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					
a.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	50	52%	54%	
3.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	21,93	30.7	39,47	
4.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					
a.	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	36,34	37,59	40,1	
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					
a.	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	10	50	100	
6.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					
a.	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	15	21	24	
7.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					
a.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	30,21	30,85	31,28	
K.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DPMPTSP
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	88	90	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					
a.	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	440,9	533,49	645,52	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
3.	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10	10	10	
4.	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					
a.	Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	90	92	94	
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	10	11	13	
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					
a.	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10	10	10	
L.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DISPORA
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,87	80	82	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					
a.	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	2,45	5	5	
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	22,86	25	30	
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					
a.	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	65	75	
M.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**DISKOMINFO**
a.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75	80	90	
b.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	75	80	90	
N.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**DISKOMINFO**
a.	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	62,6	70	75	
O.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					DISBUDPAR
a.	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	82,12	84	86	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					
a.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	**16,2**	**25**	**35**	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					
a.	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	12,5	50	100	
4.	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					
a.	Prosentase kajian sejarah	%	12,5	50	100	
5.	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					
a.	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	7	14	28	
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					
a.	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	5,3	5	4,5	
P.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**DINPERSIP**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,71	82.71	83.71	
2.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					
a.	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	79,83	83,83	87,83	
3.	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					
a.	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	0	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
Q.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**DINPERSIP**
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					
a.	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	**%**	**80**	**84**	**88**	
2.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					
a.	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	10	30	50	
3.	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					
a.	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	0	100	100	
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**DISPANGTAN**
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					
a.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	**%**	**100**	**100**	**100**	
b.	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	**%**	**35**	**35**	**35**	
2.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					
a.	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	100	
b.	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**DISBUDPAR**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
1.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					
a.	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	100	100	
2.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					
a.	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	100	100	
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					
a.	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100	100	
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					
a.	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60	70	100	
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**DISPANGTAN**
1.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					
a.	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	**%**	70	75	75	
2.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					
a.	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	**%**	70	75	75	
3.	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					
a.	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	**%**	0	0	0	
4.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Persentase kejadian bencana pertanian	**%**	0	0	0	
5.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					
a.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani					
	- Pemula	%	44	48,4	58,56	
	- Lanjut	%	44	48,4	58,56	
	- Madya	%	11,5	12,65	15,31	
	- Utama	%	1,95	2,15	2,6	
D.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**DISDAG**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,03	84,1	84,2	
2.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					
a.	Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	10	15	25	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					
a.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	80	90	100	
b.	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	96	80	90	
c.	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	21	44	71	
d.	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	21	29	44	
e.	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	6	26	46	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
4.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					
a.	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	0	100	100	
b.	Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	komoditi	26	26	26	
5.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					
a.	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	50	70	90	
6.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					
a.	Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	70	80	100	
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					DISPERINAKER
1.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					
a.	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,3	0,38	0,75	
2.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**					
a.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	50	100	
b.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	0,8	1	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					
a.	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	NA	5,1	6	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**DISPERINAKER**
1.	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					
a.	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	100	100	100	
IV.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
A.	**SEKRETARIAT DAERAH**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	98	100	100	Bag. Prokompin
b.	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	NA	100	100	Bag. Umum
c.	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	Bag. Pembangunan
2.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					
a.	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	Bag. Pemerintahan
b.	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	100	100	
c.	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	83	95	95	
d.	Skor LPPD	Nilai	NA	3,1	3,1	
e.	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100	100	
f.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	NA	100	100	Bag. Hukum

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
g.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	94%	100	100	Bag. Kesra
3.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					
a.	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	Bag. Perekonomian
b.	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	100	100	
c.	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	100	100	
d.	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100	100	
e.	Cakupan Koordinasi POK	%	100	100	100	Bag. Pembangunan
f.	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	83,73	83,82	84,15	Bagian PBJ
B	**SEKRETARIAT DPRD**					
1.	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**					
a.	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	70	80	90	Sekretariat DPRD
2.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					
a.	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
b.	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
c.	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
C.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	PERENCANAAN					**BAPPEDA**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**BAPPEDA**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,31	82	83	
2.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**BAPPEDA**
a.	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	46,67	82	90	
3.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**BAPPEDA**
a.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	100	83	90	
b.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	100	83	90	
D.	**KEUANGAN**					**BPKPD**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					BPKPD
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,15	81	82	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					BPKPD
a.	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%		20,2	20,2	
b.	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%		84,82	84,82	
c.	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%		97,78	97,78	
d.	Cash managenent (Persentase anggaran)	%		15,07	15,07	
e.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%		100	100	
f.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					BPKPD
a.	Asset Management	Laporan	4	4	4	
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					BPKPD
a.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	100	
E.	**KEPEGAWAIAN**					**BKPSDM**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**BKPSDM**
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,39	82,20	85,20	
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**BKPSDM**
a.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	4.94	1.47	1.47	
b.	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	5.48	10	10	
c.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	227.25	240,00	250,00	
d.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	14.38	24.56	23.96	
e.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90.83	95,00	100,00	
F.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**BKPSDM**
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**BKPSDM**
a.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	13,89	3,09	2,94	
b.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,89	7,01	6,21	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
G.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**BAPPEDA**
1.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**BAPPEDA**
a.	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakatdaerah.	%	0	28,57	44,44	
V.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					
A.	**INSPEKTORAT DAERAH**					**INSPEKTORAT DAERAH**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					INSPEKTORAT DAERAH
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	80	84	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					INSPEKTORAT DAERAH
a.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	NA	80	82	
b.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	NA	88	90	
c.	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	NA	45	75	
3.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					INSPEKTORAT DAERAH
a.	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	82	84	86	
VI.	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN					
A.	**KECAMATAN SIDOREJO**					

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	94,85	100	100	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,72	0,92	1,12	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	45	55	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	93,51	93,53	93,55	
B.	**KECAMATAN ARGOMULYO**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	97,31	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1,4	1,4	1,4	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	45	55	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	73,27	73,35	74	
C.	**KECAMATAN TINGKIR**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,83	0,85	0,95	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	50	55	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	95.63	72	74	
D.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,71	97	97,8	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	4,88	0,91	1,1	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	60	65	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	84,96	85,05	85,15	
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,9	84,75	85	
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	data belum tersedia	65	75	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**KESBANG**
a.	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	data belum tersedia	100	100	
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**KESBANG**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2024	2026	
a.	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	37.5	42,5	47,5	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**KESBANG**
a.	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	data belum tersedia	6	10	
b.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	data belum tersedia	52	56	
6.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**KESBANG**
a.	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	10	25	50	

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 ini disusun dengan asumsi respon dan pemulihan pandemi Covid-19 telah membaik, selain itu RKPD Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi pasca *Coronavirus Disease 2019* (Covid 2019). Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2024. RKPD Tahun 2024 juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2024, RPJMN 2020-2024, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI